



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO

**JL. KH. Hasyim Ashari Nomor 12 Telp. (0321) 391268 Kode Pos. 61324
Telp. (0321) 391268 Fax. (0321) 391268
Website : <http://www.mojokertokab.go.id>**



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan KH. Ashari No.12 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp.(0321) 391268 Fax. (0321) 391268
Website : [http : //www.mojokertokab.go.id](http://www.mojokertokab.go.id)

Mojokerto, 7 Februari 2022

Kepada

Nomor : 120.04/182/416-113/2022

Yth. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan

Sifat : Segera

Kabupaten Mojokerto

Lampiran : 1 (satu) bendel

Di –

Perihal : Pemenuhan data LPPD

MOJOKERTO

Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 130/34/416-011/2022, tanggal 7 Januari 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dikirimkan data dimaksud dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sebagaimana terlampir (beserta softcopy).

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
MOJOKERTO



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



SURAT PERNYATAAN

Nomor : 120.04/181/416-113/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si**
NIP : 19700927 199101 1 002
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa Data Agregasi Capaian Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Komunikasi dan Informatika, IKK Urusan Statistik, IKK Urusan Persandian dan IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) telah sesuai dan didukung oleh data-data sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan guna melengkapi penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2021.

Mojokerto, 7 Februari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB XX
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota

1 IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$		100,00%	Data Pendukung Terlampir
Keterangan	: ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait			

- Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1) Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	85,96%	Data Pendukung Terlampir
	2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ <p>Akses internet berkualitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps) 	100,00%	Data Pendukung Terlampir

	3)	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).	Ya	Data Pendukung Terlampir
--	----	--	--	----	--------------------------

2 IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$		$\frac{5}{178} \times 100\%$	2,81%	Data Pendukung Terlampir
Keterangan	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya ▪ Yang dimaksud dengan layanan publik terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat nama-nama jenis layanan publik. 				

- Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1)	<p>Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015}}{\text{Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	<p>84</p> <p>96,55%</p>	Data Pendukung Terlampir
	2)	<p>Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</p> $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	<p>47</p> <p>82,46%</p>	
	3)	<p>Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	<p>57</p> <p>100,00%</p>	


	4)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	<i>Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</i>	168					
					x 100%		x 100%	68,85%	Data Pendukung Terlampir
			<i>Jumlah layanan</i>	244					
	5)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	<i>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</i>	1					
					x 100%		x 100%	0,41%	Data Pendukung Terlampir
			<i>Jumlah layanan</i>	244					
6)	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</i>	0						
				x 100%		x 100%	0,00%	Data Pendukung Terlampir	
			<i>Jumlah sistem elektronik</i>	244					
7)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	<i>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</i>	9						
				x 100%		x 100%	3,69%	Data Pendukung Terlampir	
			<i>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi</i>	244					
8)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	<i>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</i>	57						
				x 100%		x 100%	100,00%	Data Pendukung Terlampir	
			<i>Jumlah Perangkat Daerah</i>	57					

	9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	<i>Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat</i> <hr/> <i>Jumlah Perangkat Daerah</i>	43 x 100%	<hr/> 57 x 100%	75,44%	Data Pendukung Terlampir
	10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	<i>Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya</i> <hr/> <i>Jumlah Perangkat Daerah</i>	28 x 100%	<hr/> 57 x 100%	49,12%	Data Pendukung Terlampir
	11)	Persentase data yang dapat berbagi pakai	<i>Jumlah data yang dapat berbagi pakai</i> <hr/> <i>Jumlah data yang dimiliki Pemerintah Daerah</i>	478 x 100%	<hr/> 1249 x 100%	38,27%	Data Pendukung Terlampir
	12)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	<i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city</i> <hr/> <i>Jumlah Perangkat Daerah</i>	0 x 100%	<hr/> 57 x 100%	0,00%	Data Pendukung Terlampir
	13)	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	<i>Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo</i> <hr/> <i>Jumlah ASN pengelola TIK</i>	9 x 100%	<hr/> 9 x 100%	100,00%	Data Pendukung Terlampir

	14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	<p>(Ada atau tidak ada) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visi, misi, tujuan dan sasaran ▪ Penganggaran ▪ Strategi ▪ Peta Jalan ▪ Arah Kebijakan ▪ Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat <ul style="list-style-type: none"> - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab 	ada	<p>Dokumen Arsitektur SPBE Data Pendukung Terlampir</p> <p>ada</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbup Arsitektur SPBE ✓ Perbup Tata Kelola SPBE ✓ Perbup Satu Data Palapa ✓ SK Bupati Tim SPBE Data Pendukung Terlampir
--	-----	---	---	-----	---

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh :</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si Pembina Utama Muda/IVc</p>
---	---



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3) IKK Outcome : Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah
 - Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan		
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$: $\frac{845.525}{1.122.165} \times 100\%$
			75,35%
Keterangan	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah penduduk yang dimaksud adalah penduduk usia 17 tahun ke atas ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		

- Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	1) Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah provinsi}} \times 100\%$	$\frac{5}{18} \times 100\%$	27,78%	Data Pendukung terlampir
	2) Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi	$\frac{\Sigma \text{ Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\Sigma \text{ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi}} \times 100\%$	$\frac{5}{5} \times 100\%$	#DIV/0!	Data Pendukung terlampir
	3) Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\Sigma \text{ Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP}}{\Sigma \text{ Diseminasi dan layanan informasi publik}} \times 100\%$	$\frac{5}{5} \times 100\%$	100%	Data Pendukung terlampir

Mengetahui,
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda/IVc

BAB XXV
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERSANDIAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota		
Rumus	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\% \cdot \frac{1}{5} \times 100\%$		20,00%
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen GAP Analisis ISO 27001 ▪ Yang dimaksud dengan Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI ▪ Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi ▪ Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata kelola keamanan informasi ▪ Pengelolaan resiko keamanan informasi ▪ Kerangka kerja keamanan informasi ▪ Pengelolaan aset informasi ▪ Teknologi dan keamanan informasi ▪ Indeks KAMI dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara selfassessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN ▪ Hasil verifikasi dapat berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun ▪ Daerah yang belum pernah melaksanakan/mengukur Indeks KAMI dapat membuat surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		

- Penjelasan IKK Output


IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
Tingkat keamanan informasi pemerintah	1) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\% \cdot \frac{0}{1} \times 100\%$ <p>Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara</p> <p>Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis.</p>	0,00%	Pemda sudah memiliki perangkat tapi belum terimplementasikan

	2) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.	<p>Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian</p> $\frac{10}{244} \times 100\%$ <p>Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penvangkalan maupun gabungan dari layanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kehiikan kegiatan perencanaan tanggung jawab praktek Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai.</p>	4,10%	siskeudes,antik,sikh,mojopahitshoppin gcenter,sanapati,klikmojo,e-monev,sso,e-mover,mojokertokab)
	3) Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	<p>Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</p> $\frac{0}{0} \times 100\%$ <p>Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan</p>	0,00%	sda.

	4) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik diamankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100\% = \frac{15}{18} \times 100\%$ <p>Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengangkan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetankan dalam suatu keputusan Kepala PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan teraelar beberapa JKS. JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi</p>	83,33%	Data dukung terlampir
--	---	---	--------	-----------------------

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika




 Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA**
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda/IVc



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB XXIV
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN STATISTIK

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi :	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
Rumus :	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{50}{57} \times 100\%$	87,72%	Berdasarkan Buku Desk Data Tahun 2021 terdapat 50 OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Keterangan :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara ▪ Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral ▪ Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 			

- Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1) Tersedianya buku profil daerah	Ada/Tidak	Ada	Pada tahun 2021 Diskominfo telah membuat Video Infografis Profil Kabupaten Mojokerto
	2) Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	25	Pada tahun 2021 telah dilaksanakan survey statistik sektoral sebanyak 25 kegiatan. Rincian sebagaimana terlampir
	3) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	12	Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kompilasi statistik sektoral sebanyak 12 kegiatan. Rincian sebagaimana terlampir
	4) Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	16	Pada tahun 2021 survey statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS sebanyak 16 kegiatan. Rincian sebagaimana terlampir

	5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	8	Pada tahun 2021 kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS sebanyak 8 kegiatan. Rincian sebagaimana terlampir
	6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik}} \times 100\% = \frac{37}{37} \times 100\% = 100\%$	100%	Daftar rincian metadata kegiatan statistik sektoral sebagaimana terlampir
	7)	Persentase kelengkapan metadata indikator statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\% = \frac{33}{41} \times 100\% = 80,49\%$	80,49%	Daftar rincian metadata indikator statistik sektoral sebagaimana terlampir

2) IKK Outcome : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi :	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			
Rumus :	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\% = \frac{50}{57} \times 100\% = 87,72\%$	87,72%	Berdasarkan Buku Desk Data Tahun 2021 terdapat 50 OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	
Keterangan :	<ul style="list-style-type: none"> Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait. 			

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



DATA PENDUKUNG KABUPATEN MOJOKERTO TERHADAP LPPD TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA KUNCI Urusan Komunikasi dan Informatika

1) IKK Outcome

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

Konsep/Definisi :

Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

IKK Output :

1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo.
2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo.
3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah.

1



Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

1) **IKK Outcome** : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

- Penjelasan IKK Outcome :

Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Seluruh OPD yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sebanyak 57 OPD melalui koneksi fiber optik Indosat (*internet dedicated*) dan Telkom (*Up to*).


Data pendukung :

- Data OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Dr. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

DATA OPD YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	INDOSAT (INTERNET DEDICATED)	INDIHOME TELKOM (UP TO)	NAMA
1	DINAS PENDIDIKAN	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884993	KOMINFO KAB MR U/ DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KESEHATAN	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884989	KOMINFO KAB MR U/DINAS KESEHATAN
			3213670244	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS JETIS
			3213670246	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS KUPANG
			3213670247	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS KEMLAGI
			3213670290	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS GEDEG
			3213670294	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS LESPADANGAN
			3213670296	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS KEDUNGSARI
			3214890811	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS TROWULAN
			3215282673	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS TAWANGSARI
			3215885754	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS SOOKO
			3215885756	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS GAYAMAN
			3215885982	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS BANGSAL
			3216820133	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS NGORO
			3216820150	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS MANDURO
			3216850321	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS WATU KENONGO
			3216850322	KOMINFO KAB MR U/PUSKESMAS PESANGGRAHAN
			3216850327	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS MOJOSARI
			3216850328	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS MODOPURO
			3216850999	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS PUNGGING
			3216855037	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS PACET
			3216855045	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS PANDAAN
			3216830050	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS DLANGGU
			3216830076	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS KUTUREJO
			3216830093	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS GONDANG
			3216830979	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS JATIREJO
			3216830995	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS PURI
			3436742248	KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS TRAWAS
3	RSUD PROF DR.SOEKANDAR	<input checked="" type="checkbox"/>	3216850080	KOMINFO KAB MR U/ RSUD PROF. DR. SUKANDAR
4	RSUD RA.BASOENI	<input checked="" type="checkbox"/>	3213670320	KOMINFO KAB MR U/ RSUD RA BASOENI GEDEG
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884982	KOMINFO KAB MR U/ DPU & PENATAAN RUANG
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	<input checked="" type="checkbox"/>	3216850086	KOMINFO KAB MR U/ PERUM RAKYAT KP DAN PERHUBUNGAN
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884967	KOMINFO U/ KESBANGPOL
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	<input checked="" type="checkbox"/>	3216850084	KOMINFO KAB MR U/ SATPOL PP
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884101	KOMINFO KAB MR U/ BPBD
			3216850089	KOMINFO KAB MR U/ DAMKAR
10	DINAS SOSIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884987	KOMINFO KAB MR U/ DINSOS
11	DINAS TENAGA KERJA	<input checked="" type="checkbox"/>	3216850090	KOMINFO KAB MR U/ DISNAKER
12	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884992	KOMINFO KAB MR U/ DINAS PANGAN & PERIKANAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	<input checked="" type="checkbox"/>	3216850085	DLH
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884991	KOMINFO KAB MR U/ KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	INDOSAT (INTERNET DEDICATED)	INDIHOME TELKOM (UP TO)	NAMA
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884963	KOMINFO KAB MR U/ PEMBERDAYAAN MASY & DESA
			152312225814	KLINIK LAKON PENGGODA DPMD
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884986	KOMINFO KAB MR U/ PP&KB
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884985	DISKOMINFO / PEMKAB MOJOKERTO
			3215884974	BIDANG INFORMATIKA DINAS KOMINFO
			3215885035	DINAS KOMINFO KAB. MOJOKERTO
			152312211125	BIDANG INFORMATIKA DINAS KOMINFO
			3215286662	WIKA
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884124	KOMINFO KAB MR U/ DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884981	KOMINFO KAB MR U/ PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884123	KOMINFO KAB MR U/ DINAS PERPUS DAN KEARSIPAN
21	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884960	KOMINFO KAB MR U/ KANTOR DISPORA
22	DINAS PERTANIAN	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884959	KOMINFO KAB MR U/ DINAS PERTANIAN
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884979	KOMINFO KAB MR U/ DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
24	BAGIAN TATA USAHA	<input checked="" type="checkbox"/>	3179260491	DISKOMINFO / PEMKAB MOJOKERTO
25	BAGIAN UMUM	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884127	KOMINFO KAB MR U/ SATYA BINA KARYA
			3215281450	KOMINFO KAB MR U/ PERINGGITAN
			3215885432	KOMINFO KAB MR U/ KANTOR BUPATI MOJOKERTO
			3215885487	KOMINFO KAB MR U/ KANTOR WAKIL BUPATI MOJOKERTO
			3215282938	DISKOMINFO U/ RUMDIN BUPATI BAG BELAKANG
			152312220581	POS SATPOL
26	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884958	KOMINFO KAB MR U/ SEKDA KAB
27	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	<input checked="" type="checkbox"/>	3213670319	DISKOMINFO / PEMKAB MOJOKERTO
31	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	<input checked="" type="checkbox"/>	3213670319	DISKOMINFO / PEMKAB MOJOKERTO
32	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	<input checked="" type="checkbox"/>	3213670319	DISKOMINFO / PEMKAB MOJOKERTO
28	BAGIAN HUKUM	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884956	KOMINFO KAB MR U/ BAGIAN HUKUM
29	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884965	KOMINFO KAB MR U/ PEMBANGUNAN
30	BAGIAN ORGANISASI	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884972	KOMINFO U/ BAGAN ORGANISASI
33	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	<input checked="" type="checkbox"/>	152312220566	PDE KAB MR
34	SEKRETARIAT DPRD	<input checked="" type="checkbox"/>	-	SEKRETARIAT DPRD
35	KECAMATAN SOOKO	<input checked="" type="checkbox"/>	321320995	KOMINFO KAB MR U/ KEC. SOOKO
36	KECAMATAN TROWULAN	<input checked="" type="checkbox"/>	321490400	KOMINFO KAB MR U/ KEC TROWULAN
37	KECAMATAN PURI		3216830012	KOMINFO KAB MR U/ KEC PURI
38	KECAMATAN BANGSAL	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884962	KOMINFO KAB MR U/ KEC BANGSAL
39	KECAMATAN GEDEG	<input checked="" type="checkbox"/>	152313204969	U/ GEDEG
40	KECAMATAN KEMLAGI		3213716481	KOMINFO KAB MR U/ KEC KEMLAGI
41	KECAMATAN JETIS		3213670266	KOMINFO KAB MR U/ KEC. JETIS
42	KECAMATAN DAWARBLANDONG		3179260570	DISKOMINFO U/ KEC DAWAR BLANDONG
43	KECAMATAN MOJOSARI	<input checked="" type="checkbox"/>	3216850099	KOMINFO KAB MR U/ KEC. MOJOSARI
44	KECAMATAN PUNGGING	<input checked="" type="checkbox"/>	3216850087	KOMINFO KAB MR U/ PUNGGING
45	KECAMATAN NGORO		3216820193	KOMINFO KAB MR U/ KEC. NGORO



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	INDOSAT (INTERNET DEDICATED)	INDIHOME TELKOM (UP TO)	NAMA
46	KECAMATAN KUTOREJO		3216830040	KOMINFO KAB MR U/ KEC. KUTOREJO
47	KECAMATAN DLANGGU		3216830053	KOMINFO KAB MR U/ KEC. DLANGGU
48	KECAMATAN GONDANG		3216830205	KOMINFO KAB MR U/ KEC. GONDANG
49	KECAMATAN JATIREJO		3216830967	KOMINFO KAB MR U/ KEC. JATIREJO
50	KECAMATAN TRAWAS		3436742038	KOMINFO KAB MR U/ KEC. TRAWAS
51	KECAMATAN PACET		3216855995	KOMINFO KAB MR U/ KEC. PACET
52	KECAMATAN MOJOANYAR		3215884964	PDE KAB MR U/ KEC. MOJO ANYAR
53	INSPEKTORAT	<input checked="" type="checkbox"/>	3215884961	KOMINFO KAB MR U/ KANTOR INSPEKTORAT
54	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/>	-	BAPPEDA
55	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/>	152312222314	BPKA
56	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	<input checked="" type="checkbox"/>	-	BAPENDA
57	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	<input checked="" type="checkbox"/>	-	BKPP
			3213670427	KOMINFO KAB MR U/ BALAI DIKLAT

NO	INSTANSI/LAIN-LAIN	INDOSAT (INTERNET DEDICATED)	INDIHOME TELKOM (UP TO)	NAMA
1		<input checked="" type="checkbox"/>	152312225812	BAZNAS
2		<input checked="" type="checkbox"/>	3215282933	DISKOMINFO U/ UPT METROLOGI LEGAL

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/TVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
3. Verifikasi dokumen elektronik menggunakan aplikasi VeryDs (Unduh di Playstore).



- **Penjelasan IKK Output:**

IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

IKK Output :

- 1) Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo.

Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah dan menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sebanyak 49 Perangkat Daerah melalui koneksi *fiber optic* Indosat yang tergelar sepanjang 161 km.

Data pendukung :

- Data Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah (melalui *fiber optic*) yang disediakan oleh Diskominfo (terlampir)
- Screenshot monitoring titik yang terhubung dengan jaringan FO Diskominfo (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



**DATA OPD YANG TERKONEKSI DI JARINGAN INTRA PEMERINTAH YANG DIAMANKAN DAN DISEDIAKAN
OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	CLUSTER
1	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	CLUSTER-1
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	CLUSTER-1
3	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	CLUSTER-1
4	BAGIAN TATA USAHA	CLUSTER-1
5	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	CLUSTER-1
6	BAGIAN ORGANISASI	CLUSTER-1
7	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	CLUSTER-1
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	CLUSTER-1
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	CLUSTER-1
10	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	CLUSTER-1
11	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	CLUSTER-1
12	BAGIAN HUKUM	CLUSTER-1
13	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	CLUSTER-1
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	CLUSTER-1
15	BAGIAN UMUM	CLUSTER-1
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	CLUSTER-1
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	CLUSTER-2
18	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	CLUSTER-2
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	CLUSTER-2
20	INSPEKTORAT	CLUSTER-2
21	DINAS PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	CLUSTER-2
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	CLUSTER-2
23	DINAS PERTANIAN	CLUSTER-2
24	DINAS PENDIDIKAN	CLUSTER-2
25	DINAS SOSIAL	CLUSTER-2
26	DINAS KESEHATAN	CLUSTER-2
27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	CLUSTER-2
28	KECAMATAN TROWULAN	CLUSTER-2
29	KECAMATAN SOOKO	CLUSTER-2
30	KECAMATAN JATIREJO	CLUSTER-2
31	KECAMATAN PURI	CLUSTER-2
32	KECAMATAN DLANGGU	CLUSTER-2
33	DPRD	CLUSTER-3
34	RSUD PROF.DR. SOEKANDAR	CLUSTER-3
35	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	CLUSTER-3
36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	CLUSTER-3
37	DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	CLUSTER-3
38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	CLUSTER-3
39	DINAS TENAGA KERJA	CLUSTER-3
40	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	CLUSTER-3
41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	CLUSTER-3
42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	CLUSTER-3
43	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	CLUSTER-3
44	KANTOR KECAMATAN BANGSAL	CLUSTER-3
45	KANTOR KECAMATAN MOJOSARI	CLUSTER-3
46	KANTOR KECAMATAN PUNGGING	CLUSTER-3



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

47	KECAMATAN MOJOANYAR	CLUSTER-3
48	RSUD RA.BASOENI	CLUSTER-4
49	KANTOR KECAMATAN GEDEG	CLUSTER-4

Mengetahui
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Lampiran Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Screenshot Hasil Monitoring Titik Yang Terkoneksi Di Jaringan Intra Pemerintah/*Fiber Optic* Yang Diamankan Dan Disediakan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto

#	Name	Upload Max Limit	Download Max Limit	Total Download	Upload	Download
12	Adm Keres	500M	500M	7.2 GB 521.7 kbps	0.0 kbps	4.2 Mbps
59	Adm Pembangunan	500M	500M	4337.1 MB 343.9 kbps	10.2 kbps	10.2 Mbps
29	Adm Pemerintahan	500M	500M	408.7 MB 35.9 kbps	873.3 kbps	873.3 kbps
74	Adm Pembangunan	500M	500M	2658.2 MB 2.3 kbps	15.5 kbps	15.5 kbps
30	Asisten Pemerintahan	500M	500M	175.2 MB 12.4 kbps	548.7 kbps	548.7 kbps
67	Asisten Pemerintahan	500M	500M	20.2 MB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
63	Asisten Urusan	500M	500M	484.7 MB 15.2 kbps	2.9 kbps	2.9 kbps
19	BACKUP LPSE	30M	30M	812.0 MB 224 kbps	224 kbps	224 kbps
36	BAPPENDA 1	500M	500M	17.5 GB 493.1 kbps	8.2 Mbps	8.2 Mbps
37	BAPPENDA 2	500M	500M	9.5 GB 327.9 kbps	3.9 Mbps	3.9 Mbps
62	BAPPENDA 1	500M	500M	1988.1 MB 109.9 kbps	50.7 kbps	50.7 kbps
61	BAPPENDA 2	500M	500M	9.0 GB 482.3 kbps	8.7 Mbps	8.7 Mbps
31	BANASE	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
16	BAPSDM	500M	500M	22.5 GB 102.1 kbps	14.3 Mbps	14.3 Mbps
57	BAPSDM 2	500M	500M	4.8 GB 400.8 kbps	505.7 kbps	505.7 kbps
75	BP Lempadangan	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
21	BP Lempadangan	500M	500M	1080.1 MB 39.2 kbps	53.5 kbps	53.5 kbps
126	BPKA	500M	500M	23.3 GB 206.2 kbps	1300.0 kbps	1300.0 kbps
1	BPKA	500M	500M	2889.0 MB 364.6 kbps	16.8 Mbps	16.8 Mbps
52	BPKAD 2	500M	500M	2639.4 MB 16.1 kbps	25.2 kbps	25.2 kbps
51	BPKAD 2	500M	500M	1984.0 MB 441.3 kbps	1002.4 kbps	1002.4 kbps
107	BPR Mekarjaya	500M	500M	3521.0 MB 111.2 kbps	2.9 kbps	2.9 kbps
47	Bug Unsur	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
45	Bukembangkul	500M	500M	5.2 GB 321.9 kbps	1919.5 kbps	1919.5 kbps
12	Burabaya	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
15	Burabaya	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
77	CNPS	unlimited	unlimited	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
43	CNPS Indak	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
42	CNPS Uluwu	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
79	DLI 1	500M	500M	10.7 GB 1273.5 kbps	17.7 Mbps	17.7 Mbps
84	DLI 2	500M	500M	11.5 GB 740.6 kbps	8.1 Mbps	8.1 Mbps
115	DPD&P2	500M	500M	12.0 GB 410.8 kbps	4.4 Mbps	4.4 Mbps
95	DPKAD 1	500M	500M	1688.4 MB 225.3 kbps	1.1 Mbps	1.1 Mbps
60	DPKAD 2	500M	500M	3361.4 MB 476.4 kbps	11.5 Mbps	11.5 Mbps
109	DPKAP P5P	500M	500M	16.0 GB 580.4 kbps	19.8 Mbps	19.8 Mbps
140	DPKAD 1	500M	500M	4314.0 MB 2.8 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
141	DPKAD 2	500M	500M	56.1 MB 23.5 kbps	23.0 kbps	23.0 kbps
112	DPUPR	500M	500M	20.0 GB 500.1 kbps	8.1 Mbps	8.1 Mbps
98	Desa Pengalipagan	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
128	Desa Jabon	500M	500M	6.0 GB 8.0 kbps	30.2 kbps	30.2 kbps
136	Desa Jambon	500M	500M	6.0 GB 293.8 kbps	11.3 Mbps	11.3 Mbps
129	Desa Jaten	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
88	Desa Kebundulan	500M	500M	16.1 GB 50.4 kbps	123.2 kbps	123.2 kbps
138	Desa Kemartani	500M	500M	16.0 GB 10.9 kbps	188 kbps	188 kbps
139	Desa Kertanegara	500M	500M	16.0 GB 21.9 kbps	213.2 kbps	213.2 kbps
87	Desa Moutanegara	500M	500M	4395.5 MB 17.0 kbps	637.8 kbps	637.8 kbps

#	Name	Upload Max Limit	Download Max Limit	Total Download	Upload	Download
118	Desa Kertanegara	500M	500M	16.0 GB 28.1 kbps	2.9 kbps	2.9 kbps
62	Desa Mekarjaya	500M	500M	4386.3 MB 35.3 kbps	272.2 kbps	272.2 kbps
51	Desa Ngirawu	500M	500M	12.4 GB 3.4 kbps	8.0 kbps	8.0 kbps
100	Desa Sedulur	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
81	Desa Selamkulam	500M	500M	9.2 MB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
142	Desa Sembawang Nulung	500M	500M	104.8 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
133	Desa Suroboyo	500M	500M	3716.0 MB 120.0 kbps	944 kbps	944 kbps
104	Desa Tegalur	500M	500M	374.4 MB 1020 kbps	3.2 kbps	3.2 kbps
86	Desa Turugalwager	500M	500M	8.2 GB 245.2 kbps	43.0 kbps	43.0 kbps
110	Desa Pambakulan	500M	500M	19.0 GB 200.7 kbps	3.0 Mbps	3.0 Mbps
108	Desa	500M	500M	46.0 GB 895.3 kbps	38.8 Mbps	38.8 Mbps
103	Desa	500M	500M	5.6 GB 493.2 kbps	941.3 kbps	941.3 kbps
114	Dedaklengkap	500M	500M	11.9 GB 3.2 kbps	6.6 kbps	6.6 kbps
94	Dedaklengkap	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
83	Dedaklengkap	500M	500M	18.0 GB 130.9 kbps	4.9 Mbps	4.9 Mbps
121	Dekamirah Barat	500M	500M	41.3 GB 321.0 kbps	27.0 Mbps	27.0 Mbps
107	Dekamirah Barat	500M	500M	8.2 GB 225.3 kbps	6.7 Mbps	6.7 Mbps
5	Dekamirah	500M	500M	12.0 GB 414.7 kbps	17.1 Mbps	17.1 Mbps
120	Degayu	500M	500M	8.3 GB 107.3 kbps	1780.7 kbps	1780.7 kbps
123	Degayu	500M	500M	9.3 GB 1152.8 kbps	41.1 Mbps	41.1 Mbps
122	Degayu	500M	500M	20.0 GB 741.3 kbps	14.1 Mbps	14.1 Mbps
127	Degayu	500M	500M	6.5 GB 760.4 kbps	24.1 Mbps	24.1 Mbps
113	Degayu	500M	500M	9.1 GB 1251.0 kbps	22.4 Mbps	22.4 Mbps
95	DGR	500M	500M	13.4 GB 35.2 kbps	1121.3 kbps	1121.3 kbps
104	Dinding Diklat	500M	500M	2612.0 MB 30.9 kbps	1109.5 kbps	1109.5 kbps
9	Dukuh	500M	500M	782.0 MB 10.2 kbps	35.9 kbps	35.9 kbps
56	Dukuh 2	500M	500M	5.3 GB 143.7 kbps	3.0 Mbps	3.0 Mbps
65	Huma 1 1	500M	500M	1944.3 MB 34.5 kbps	748.2 kbps	748.2 kbps
63	Huma 1 2	500M	500M	8.0 GB 114.1 kbps	89.7 kbps	89.7 kbps
116	Impekson	500M	500M	18.7 GB 165.6 kbps	585.0 kbps	585.0 kbps
124	Kec. Bangsal	500M	500M	21.4 GB 34.6 kbps	3.5 Mbps	3.5 Mbps
41	Kec. Chonggo	500M	500M	8.0 GB 132.3 kbps	8.8 Mbps	8.8 Mbps
102	Kec. Gedeg	500M	500M	5.4 GB 251.5 kbps	7.8 Mbps	7.8 Mbps
35	Kec. Jemur	500M	500M	17.1 GB 63.2 kbps	195.1 kbps	195.1 kbps
80	Kec. Noyanegara	500M	500M	10.0 GB 92.1 kbps	70.0 kbps	70.0 kbps
7	Kec. Mojokerto	500M	500M	10.0 GB 431.2 kbps	3.1 Mbps	3.1 Mbps
89	Kec. Pungging	500M	500M	14.0 GB 54.3 kbps	440.2 kbps	440.2 kbps
40	Kec. Puri	500M	500M	8.0 GB 790.8 kbps	20.0 Mbps	20.0 Mbps
117	Kec. Soko	500M	500M	15.0 GB 294.5 kbps	8.3 Mbps	8.3 Mbps
119	Kec. Toulaman	500M	500M	39.0 GB 470.2 kbps	5.1 Mbps	5.1 Mbps
96	Kel. Kauman	500M	500M	10.0 GB 34.1 kbps	2.8 kbps	2.8 kbps
89	Kel. Mijoran	500M	500M	8.7 GB 144.7 kbps	1703 kbps	1703 kbps
83	Kel. Satean	500M	500M	2411.0 MB 0 kbps	1109 kbps	1109 kbps
90	Kel. Sawahan	500M	500M	573.0 MB 1052 kbps	1432 kbps	1432 kbps
98	Kel. Wonorejo	500M	500M	2299.0 MB 9.7 kbps	54.9 kbps	54.9 kbps
14	Kedungjati	500M	500M	743.0 MB 2.4 kbps	32.4 kbps	32.4 kbps
4	Kel. PTP	500M	500M	131.0 GB 6.8 kbps	1620.1 kbps	1620.1 kbps



Lampiran Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

No	Name	Upload Max Limit	Download Max Limit	Total Download	Upload	Download
21	NET_PPPoE	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
73	OGAMATI	500M	500M	1031.8 MB 1554 kbps	3.6 kbps	3.6 kbps
97	PDAM	500M	500M	16.2 GB 253.5 kbps	11.7 Mbps	11.7 Mbps
72	PKK	500M	500M	363.1 MB 28.4 kbps	106.4 kbps	106.4 kbps
50	Pasar Lingsidangan	500M	500M	19.7 GB 207.2 kbps	7.9 Mbps	7.9 Mbps
85	Pasar Mulyan	500M	500M	2093.9 MB 675.4 kbps	29.8 Mbps	29.8 Mbps
8	Pendopo	500M	500M	1037.4 MB 0 bps	0 bps	0 bps
70	Pendopo 2	500M	500M	9.1 GB 278 kbps	3.6 kbps	3.6 kbps
64	Penerkua	500M	500M	1206.0 MB 22.0 kbps	745.5 kbps	745.5 kbps
13	Pemalang	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
39	Pemanggotan 2	500M	500M	526.7 MB 53.5 kbps	3.1 Mbps	3.1 Mbps
26	Pis 1 Sulpal	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
20	Pis 2 Sulpal	500M	500M	5.2 GB 0 bps	2.1 kbps	2.1 kbps
87	Pisut Doh-oleh	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
125	Pukemmas Gayaman	500M	500M	5.6 GB 214.7 kbps	2.8 Mbps	2.8 Mbps
101	Pukemmas Lingsidangan	500M	500M	2425.7 MB 647.7 kbps	12.6 Mbps	12.6 Mbps
118	Pukemmas Soko	500M	500M	2163.3 MB 75.8 kbps	337.3 kbps	337.3 kbps
105	RSD/RIA Babarsari	500M	500M	6.5 GB 83.9 kbps	65.4 kbps	65.4 kbps
71	Ruang Ayuden	500M	500M	618.6 MB 542 kbps	3.9 kbps	3.9 kbps
66	Ruang Bayat	500M	500M	328.8 MB 0 bps	676.7 kbps	676.7 kbps
40	Ruang Kerta Bagati	500M	500M	477.5 MB 652 kbps	195 kbps	195 kbps
63	Ruang Rajat Arsten	500M	500M	4504.9 MB 33.4 kbps	1034.8 kbps	1034.8 kbps
60	Ruang Rajat SBK	500M	500M	1.9 GB 37.5 kbps	38.5 kbps	38.5 kbps
34	Ruang Sekela	500M	500M	2027.9 MB 2.3 kbps	1955 kbps	1955 kbps
65	Ruang Waluya	500M	500M	1649.4 MB 225 kbps	185 kbps	185 kbps
33	Rumah Tangga	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
76	Sadap PP	500M	500M	15.3 GB 1879.0 kbps	112.2 Mbps	112.2 Mbps
11	Selaman	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
36	Selaman 1.1	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
46	Selaman 2	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
27	Staf Aki 2	500M	500M	8.4 GB 0 bps	0 bps	0 bps
3	Staff Rti	500M	500M	1052.2 MB 0 bps	0 bps	0 bps
17	TEST_BW	unlimited	unlimited	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
22	TK Perahu	500M	500M	453.9 MB 0 bps	0 bps	0 bps
4	Tunneling	10M	10M	2176 B 0 bps	0 bps	0 bps
0	ansi 1	25K	25K	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
76	anda AP	unlimited	unlimited	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
15	ansi 1	12K	12K	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
73	Back Up Link Soko	500M	500M	29.8 GB 0 bps	0 bps	0 bps
106	phobosari	500M	500M	5022.2 MB 170.2 kbps	187.5 kbps	187.5 kbps
49	phobos	500M	500M	14.9 GB 970.3 kbps	15.6 Mbps	15.6 Mbps
180	plonon	500M	500M	33.1 GB 446.6 kbps	9.5 Mbps	9.5 Mbps
111	Prongatan Nagel	500M	500M	3.2 GB 220.9 kbps	1995.9 kbps	1995.9 kbps
92	Prongatan Ngelendo	500M	500M	14.1 GB 17.4 kbps	6.5 Mbps	6.5 Mbps
112	Prongatan Demans	50M	50M	337.1 MB 0 bps	0 kbps	0 kbps
24	Prongatan Demans	500M	500M	3.4 GB 477 kbps	371 kbps	371 kbps

No	Name	Upload Max Limit	Download Max Limit	Total Download	Upload	Download
14	Kedungol	500M	500M	144.2 MB 2.5 Mbps	123 kbps	123 kbps
6	LAN POE	500M	500M	135.0 GB 4.1 Mbps	46.5 kbps	46.5 kbps
131	Luhlimanda	500M	500M	2362.1 MB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
54	Lobby 1	500M	500M	4024.3 MB 80.1 kbps	2.0 Mbps	2.0 Mbps
44	Lobby 2	500M	500M	3362.1 MB 535.4 kbps	3.8 Mbps	3.8 Mbps
134	Manding	500M	500M	88.9 MB 5.4 kbps	5.3 kbps	5.3 kbps
20	NET_PPPoE	1000M	1000M	15.5 GB 251.7 kbps	1600.2 kbps	1600.2 kbps
73	OGAMATI	500M	500M	1013.8 MB 27.5 kbps	63.5 kbps	63.5 kbps
97	PDAM	500M	500M	16.2 GB 253.5 kbps	11.7 Mbps	11.7 Mbps
72	PKK	500M	500M	362.5 MB 28.1 kbps	108.5 kbps	108.5 kbps
50	Pasar Lingsidangan	500M	500M	19.7 GB 207.2 kbps	7.7 Mbps	7.7 Mbps
85	Pasar Mulyan	500M	500M	2093.9 MB 675.4 kbps	27.2 Mbps	27.2 Mbps
8	Pendopo	500M	500M	1037.4 MB 0 bps	0 bps	0 bps
70	Pendopo 2	500M	500M	9.1 GB 9.3 kbps	6.9 kbps	6.9 kbps
64	Penerkua	500M	500M	1206.0 MB 25.4 kbps	979.4 kbps	979.4 kbps
13	Pemalang	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
39	Pemanggotan 2	500M	500M	525.1 MB 5.4 kbps	31.4 kbps	31.4 kbps
26	Pis 1 Sulpal	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
20	Pis 2 Sulpal	500M	500M	5.2 GB 0 bps	0 bps	0 bps
87	Pisut Doh-oleh	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
125	Pukemmas Gayaman	500M	500M	5.6 GB 570.7 kbps	130.3 kbps	130.3 kbps
101	Pukemmas Lingsidangan	500M	500M	2425.7 MB 647.7 kbps	15.9 Mbps	15.9 Mbps
118	Pukemmas Soko	500M	500M	2163.0 MB 50.2 kbps	471.7 kbps	471.7 kbps
105	RSD/RIA Babarsari	500M	500M	6.5 GB 1020 kbps	2.4 kbps	2.4 kbps
71	Ruang Ayuden	500M	500M	613.6 MB 15.3 kbps	171.3 kbps	171.3 kbps
66	Ruang Bayat	500M	500M	332.8 MB 67 kbps	1740 kbps	1740 kbps
40	Ruang Kerta Bagati	500M	500M	477.5 MB 0 kbps	104 kbps	104 kbps
63	Ruang Rajat Arsten	500M	500M	4501.9 MB 130.2 kbps	307.3 kbps	307.3 kbps
60	Ruang Rajat SBK	500M	500M	1.9 GB 115.7 kbps	102 kbps	102 kbps
34	Ruang Sekela	500M	500M	2024.9 MB 1395 kbps	1072 kbps	1072 kbps
65	Ruang Waluya	500M	500M	1649.4 MB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
33	Rumah Tangga	500M	500M	0 B 0 bps	0 kbps	0 kbps
76	Sadap PP	500M	500M	15.3 GB 1828.1 kbps	339.3 kbps	339.3 kbps
11	Selaman	500M	500M	0 B 0 bps	0 kbps	0 kbps
36	Selaman 1.1	500M	500M	0 B 0 bps	0 kbps	0 kbps
46	Selaman 2	500M	500M	0 B 0 bps	0 kbps	0 kbps
27	Staf Aki 2	500M	500M	8.4 GB 0 bps	0 kbps	0 kbps
3	Staff Rti	500M	500M	1052.2 MB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
17	TEST_BW	unlimited	unlimited	0 B 0 bps	0 kbps	0 kbps
22	TK Perahu	500M	500M	453.9 MB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
4	Tunneling	10M	10M	2176 B 0 kbps	0 kbps	0 kbps
0	ansi 1	25K	25K	0 B 0 bps	0 kbps	0 kbps
76	anda AP	unlimited	unlimited	0 B 0 bps	0 kbps	0 kbps
15	ansi 1	12K	12K	0 B 0 bps	0 kbps	0 kbps
23	Back Up Link Soko	500M	500M	20.0 GB 42.1 kbps	63.5 kbps	63.5 kbps
106	phobosari	500M	500M	5115.0 MB 157.8 kbps	6.0 kbps	6.0 kbps



Lampiran Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Screenshot Hasil Monitoring Titik Yang Terkoneksi Di Jaringan Intra
Pemerintah/*Fiber Optic* Yang Diamankan Dan Disediakan Oleh Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Mojokerto

#	Name	Upload Max Limit	Download Max Limit	Total Download	Upload	Download
12	Adm Kewa	500M	500M	7.2 GB 521.7 kbps	0.0 kbps	4.2 Mbps
59	Adm Pembangunan	500M	500M	4337.1 MB 343.9 kbps	10.2 kbps	10.2 Mbps
29	Adm Pemerintahan	500M	500M	408.7 MB 35.9 kbps	873.3 kbps	873.3 kbps
74	Adm Pembangunan	500M	500M	2658.2 MB 2.3 kbps	15.5 kbps	15.5 kbps
30	Asisten Pemerintahan	500M	500M	175.2 MB 12.4 kbps	548.7 kbps	548.7 kbps
67	Asisten Pemerintahan	500M	500M	20.2 MB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
63	Asisten Urusan	500M	500M	484.7 MB 15.2 kbps	2.9 kbps	2.9 kbps
19	BACKUP LPSE	30M	30M	812.0 MB 224 kbps	224 kbps	224 kbps
36	BAPPENDA 1	500M	500M	17.5 GB 493.1 kbps	8.2 Mbps	8.2 Mbps
37	BAPPENDA 2	500M	500M	9.5 GB 327.9 kbps	3.9 Mbps	3.9 Mbps
62	BAPPENDA 1	500M	500M	1988.1 MB 109.9 kbps	50.7 kbps	50.7 kbps
61	BAPPENDA 2	500M	500M	9.0 GB 482.3 kbps	8.7 Mbps	8.7 Mbps
31	BANJASE	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
16	BAPSDM	500M	500M	22.5 GB 102.1 kbps	14.3 Mbps	14.3 Mbps
57	BAPSDM 2	500M	500M	4.8 GB 400.8 kbps	505.7 kbps	505.7 kbps
75	BP Lempadangan	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
21	BP Lempadangan	500M	500M	1080.1 MB 39.2 kbps	53.5 kbps	53.5 kbps
124	BPKA	500M	500M	23.3 GB 206.2 kbps	1300.0 kbps	1300.0 kbps
1	BPKA	500M	500M	2889.9 MB 364.6 kbps	16.8 Mbps	16.8 Mbps
52	BPKAD 2	500M	500M	2639.4 MB 16.1 kbps	25.2 kbps	25.2 kbps
51	BPKAD 2	500M	500M	1984.0 MB 441.3 kbps	1002.4 kbps	1002.4 kbps
107	BPR Mekarjaya	500M	500M	3521.9 MB 111.2 kbps	2.9 kbps	2.9 kbps
47	Bug Unsur	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
45	Bukembangkul	500M	500M	5.2 GB 321.9 kbps	1919.5 kbps	1919.5 kbps
12	Burayud	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
15	Burayud	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
77	CNPS	unlimited	unlimited	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
43	CNPS Indak	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
42	CNPS Uluwu	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
79	DLH 1	500M	500M	10.7 GB 1273.5 kbps	17.7 Mbps	17.7 Mbps
84	DLH 2	500M	500M	11.5 GB 740.6 kbps	8.1 Mbps	8.1 Mbps
115	DPD&P2	500M	500M	12.0 GB 410.8 kbps	4.4 Mbps	4.4 Mbps
95	DPKAD 1	500M	500M	1688.4 MB 225.3 kbps	1.1 Mbps	1.1 Mbps
60	DPKAD 2	500M	500M	3361.4 MB 476.4 kbps	11.5 Mbps	11.5 Mbps
109	DPKAP P5P	500M	500M	16.0 GB 580.4 kbps	19.8 Mbps	19.8 Mbps
140	DPKAD 1	500M	500M	4314.4 MB 2.8 kbps	21.0 kbps	21.0 kbps
141	DPKAD 2	500M	500M	56.1 MB 23.5 kbps	23.0 kbps	23.0 kbps
112	DPUPR	500M	500M	20.0 GB 500.1 kbps	8.1 Mbps	8.1 Mbps
98	Desa Pengalipagan	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
128	Desa Jabon	500M	500M	6.9 GB 8.0 kbps	30.2 kbps	30.2 kbps
136	Desa Jambon	500M	500M	6.9 GB 293.8 kbps	11.3 Mbps	11.3 Mbps
129	Desa Jaten	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
88	Desa Kebundulan	500M	500M	16.1 GB 50.4 kbps	123.2 kbps	123.2 kbps
138	Desa Kemartan	500M	500M	16.0 GB 10.9 kbps	188 kbps	188 kbps
139	Desa Kewanan Rame	500M	500M	16.0 GB 21.9 kbps	213.2 kbps	213.2 kbps
87	Desa Moutanegara	500M	500M	4395.5 MB 17.0 kbps	637.8 kbps	637.8 kbps
143	Desa (1 internet)	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps

#	Name	Upload Max Limit	Download Max Limit	Total Download	Upload	Download
118	Desa Kumpang Rame	500M	500M	16.0 GB 28.1 kbps	2.9 kbps	2.9 kbps
62	Desa Mekarjaya	500M	500M	4386.3 MB 85.3 kbps	272.2 kbps	272.2 kbps
51	Desa Ngiraw	500M	500M	12.4 GB 3.4 kbps	8.0 kbps	8.0 kbps
100	Desa Sedul	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
81	Desa Selamkul	500M	500M	9.2 MB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
142	Desa Sembawang Nulung	500M	500M	104.8 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
133	Desa Sukan	500M	500M	3716.9 MB 120.8 kbps	564 kbps	564 kbps
104	Desa Tegalur	500M	500M	374.4 MB 1020 kbps	3.2 kbps	3.2 kbps
86	Desa Turungpajajar	500M	500M	8.2 GB 245.2 kbps	43.0 kbps	43.0 kbps
110	Desa Pambukan	500M	500M	19.0 GB 200.7 kbps	3.0 Mbps	3.0 Mbps
108	Desa	500M	500M	46.0 GB 895.3 kbps	38.8 Mbps	38.8 Mbps
103	Desa	500M	500M	5.6 GB 493.2 kbps	941.3 kbps	941.3 kbps
114	Dedakulung	500M	500M	11.9 GB 3.2 kbps	6.6 kbps	6.6 kbps
94	Duhul	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
83	Duhul 2	500M	500M	18.0 GB 130.9 kbps	4.9 Mbps	4.9 Mbps
121	Dukamulya Barat	500M	500M	41.3 GB 321.4 kbps	27.0 Mbps	27.0 Mbps
107	Dukamulya	500M	500M	8.2 GB 226.3 kbps	6.7 Mbps	6.7 Mbps
5	Duraker	500M	500M	12.0 GB 414.7 kbps	17.1 Mbps	17.1 Mbps
120	Dyapan	500M	500M	8.3 GB 107.3 kbps	1780.7 kbps	1780.7 kbps
123	Dyapanegara	500M	500M	9.3 GB 1152.8 kbps	41.1 Mbps	41.1 Mbps
122	Dyapanegad	500M	500M	20.0 GB 741.3 kbps	14.1 Mbps	14.1 Mbps
127	Dyapenhe	500M	500M	6.5 GB 760.4 kbps	24.1 Mbps	24.1 Mbps
113	Dyapenhe	500M	500M	9.1 GB 1251.0 kbps	22.4 Mbps	22.4 Mbps
95	GOR	500M	500M	13.4 GB 35.2 kbps	1121.3 kbps	1121.3 kbps
104	Gending Diklat	500M	500M	2612.9 MB 38.9 kbps	1109.5 kbps	1109.5 kbps
9	Hakun	500M	500M	782.0 MB 10.2 kbps	35.9 kbps	35.9 kbps
56	Hakun 2	500M	500M	5.3 GB 143.7 kbps	3.0 Mbps	3.0 Mbps
65	Hakun 1 1	500M	500M	1544.3 MB 34.6 kbps	748.2 kbps	748.2 kbps
63	Hakun 1 2	500M	500M	8.0 GB 114.1 kbps	69.7 kbps	69.7 kbps
116	Impakone	500M	500M	18.7 GB 165.6 kbps	586.5 kbps	586.5 kbps
124	Kec. Bangsal	500M	500M	21.4 GB 34.6 kbps	3.5 Mbps	3.5 Mbps
41	Kec. Chonggi	500M	500M	8.0 GB 132.3 kbps	8.8 Mbps	8.8 Mbps
102	Kec. Gedeg	500M	500M	5.4 GB 261.5 kbps	7.8 Mbps	7.8 Mbps
35	Kec. Janyan	500M	500M	17.1 GB 63.2 kbps	198.1 kbps	198.1 kbps
80	Kec. Nopayanar	500M	500M	10.0 GB 92.1 kbps	70.0 kbps	70.0 kbps
7	Kec. Mojosal	500M	500M	10.0 GB 431.2 kbps	3.1 Mbps	3.1 Mbps
89	Kec. Pungging	500M	500M	14.0 GB 54.3 kbps	446.2 kbps	446.2 kbps
40	Kec. Puri	500M	500M	8.0 GB 790.8 kbps	20.0 Mbps	20.0 Mbps
117	Kec. Soko	500M	500M	15.0 GB 294.5 kbps	8.3 Mbps	8.3 Mbps
119	Kec. Toulunan	500M	500M	39.0 GB 470.2 kbps	5.1 Mbps	5.1 Mbps
96	Kel. Kauman	500M	500M	10.0 GB 34.1 kbps	2.8 kbps	2.8 kbps
89	Kel. Mijanan	500M	500M	8.7 GB 144.7 kbps	1703 kbps	1703 kbps
83	Kel. Saitan	500M	500M	2411.8 MB 0 kbps	1109 kbps	1109 kbps
90	Kel. Sawahan	500M	500M	573.9 MB 1652 kbps	1432 kbps	1432 kbps
98	Kel. Wonorekum	500M	500M	2299.0 MB 9.7 kbps	54.9 kbps	54.9 kbps
14	Kedungri	500M	500M	743.9 MB 2.4 kbps	32.4 kbps	32.4 kbps
4	Kel. PTP	500M	500M	131.0 GB 6.8 kbps	1620.1 kbps	1620.1 kbps
143	Desa (1 internet)	500M	500M	0.0 GB 0 kbps	0 kbps	0 kbps



Lampiran Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

No	Name	Upload Max Limit	Download Max Limit	Total Download	Upload	Download
21	NET_PPPoE	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
73	Organisasi	500M	500M	1013.8 MB 1554 kbps	3.6 kbps	3.6 kbps
97	PDAM	500M	500M	16.2 GB 253.5 kbps	11.7 Mbps	11.7 Mbps
72	PKK	500M	500M	363.1 MB 28.4 kbps	106.4 kbps	106.4 kbps
50	Pasar Lingsidangan	500M	500M	19.7 GB 207.2 kbps	7.9 Mbps	7.9 Mbps
85	Pasar Mulyono	500M	500M	2093.9 MB 675.4 kbps	29.8 Mbps	29.8 Mbps
8	Pendopo	500M	500M	1037.4 MB 0 bps	0 bps	0 bps
70	Pendopo 2	500M	500M	9.1 GB 278 kbps	3.6 kbps	3.6 kbps
64	Penerkua	500M	500M	1206.0 MB 22.0 kbps	745.5 kbps	745.5 kbps
13	Pemalang	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
39	Pemalang 2	500M	500M	526.7 MB 53.5 kbps	3.1 Mbps	3.1 Mbps
26	Pis 1 Sulpal	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
20	Pis 2 Sulpal	500M	500M	5.2 GB 0 bps	2.1 kbps	2.1 kbps
87	Pisut Doh-oleh	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
125	Pukemmas Gayamsari	500M	500M	5.6 GB 214.7 kbps	2.8 Mbps	2.8 Mbps
101	Pukemmas Lingsidangan	500M	500M	2425.7 MB 647.7 kbps	12.6 Mbps	12.6 Mbps
118	Pukemmas Soko	500M	500M	2163.3 MB 75.8 kbps	337.3 kbps	337.3 kbps
105	RSD/RIA Babarsari	500M	500M	1.5 GB 83.9 kbps	65.4 kbps	65.4 kbps
71	Ruang Ayahan	500M	500M	618.6 MB 542 kbps	3.9 kbps	3.9 kbps
69	Ruang Rapih	500M	500M	328.8 MB 0 bps	676.7 kbps	676.7 kbps
40	Ruang Rapih Bapali	500M	500M	477.5 MB 652 kbps	195 kbps	195 kbps
63	Ruang Rapih Arsten	500M	500M	4504.9 MB 33.4 kbps	1034.8 kbps	1034.8 kbps
60	Ruang Rapih SBK	500M	500M	1.9 GB 37.5 kbps	38.5 kbps	38.5 kbps
34	Ruang Sekeloa	500M	500M	2027.9 MB 2.3 kbps	1955 kbps	1955 kbps
65	Ruang Waluya	500M	500M	1649.4 MB 225 kbps	185 kbps	185 kbps
33	Rumah Tangga	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
76	Sadap PP	500M	500M	15.3 GB 1879.0 kbps	112.2 Mbps	112.2 Mbps
11	Selaras	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
36	Selaras 1.1	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
46	Selaras 1.2	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
27	Staf Ahi 2	500M	500M	8.4 GB 0 bps	0 bps	0 bps
3	Staff Ahi	500M	500M	1052.2 MB 0 bps	0 bps	0 bps
17	TEST_BW	unlimited	unlimited	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
22	TK Perahu	500M	500M	453.9 MB 0 bps	0 bps	0 bps
4	Tunneling	10M	10M	2176 B 0 bps	0 bps	0 bps
0	ansi 1	25K	25K	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
76	anda AP	unlimited	unlimited	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
15	ansi 1	128k	128k	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
73	Back Up Link Soko	500M	500M	29.8 GB 0 bps	0 bps	0 bps
106	phobosari	500M	500M	5222.2 MB 170.2 kbps	187.3 kbps	187.3 kbps
49	phobosari	500M	500M	14.9 GB 970.3 kbps	15.6 Mbps	15.6 Mbps
180	phobosari	500M	500M	33.1 GB 446.6 kbps	9.5 Mbps	9.5 Mbps
111	Phongshan Nagel	500M	500M	3.2 GB 220.0 kbps	1935.9 kbps	1935.9 kbps
92	phobosari Mulyono	500M	500M	141.9 GB 17.4 kbps	6.5 Mbps	6.5 Mbps
112	phobosari Demans	50M	50M	337.1 MB 0 bps	0 kbps	0 kbps
24	phobosari Demans	500M	500M	3.4 GB 477 kbps	371 kbps	371 kbps

No	Name	Upload Max Limit	Download Max Limit	Total Download	Upload	Download
14	Kedungol	500M	500M	144.2 MB 2.5 Mbps	123 kbps	123 kbps
6	LAN POE	500M	500M	135.0 GB 4.1 Mbps	46.5 kbps	46.5 kbps
131	Luhlimanda	500M	500M	2362.1 MB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
54	Lobby 1	500M	500M	4524.3 MB 80.1 kbps	2.0 Mbps	2.0 Mbps
44	Lobby 2	500M	500M	3362.1 MB 535.4 kbps	3.8 Mbps	3.8 Mbps
134	Manding	500M	500M	88.9 MB 5.4 kbps	5.3 kbps	5.3 kbps
20	NET_PPPoE	1000M	1000M	15.6 GB 251.7 kbps	1600.2 kbps	1600.2 kbps
73	Organisasi	500M	500M	1013.8 MB 27.5 kbps	63.5 kbps	63.5 kbps
97	PDAM	500M	500M	16.2 GB 75.5 kbps	13.8 kbps	13.8 kbps
72	PKK	500M	500M	362.5 MB 28.1 kbps	1085.4 kbps	1085.4 kbps
50	Pasar Lingsidangan	500M	500M	19.7 GB 108.3 kbps	2.7 Mbps	2.7 Mbps
85	Pasar Mulyono	500M	500M	2093.9 MB 265.4 kbps	27.2 Mbps	27.2 Mbps
8	Pendopo	500M	500M	1037.4 MB 0 bps	0 bps	0 bps
70	Pendopo 2	500M	500M	9.1 GB 9.3 kbps	6.9 kbps	6.9 kbps
64	Penerkua	500M	500M	1206.0 MB 25.4 kbps	979.4 kbps	979.4 kbps
13	Pemalang	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
39	Pemalang 2	500M	500M	525.1 MB 5.4 kbps	31.4 kbps	31.4 kbps
26	Pis 1 Sulpal	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
20	Pis 2 Sulpal	500M	500M	5.2 GB 0 bps	0 bps	0 bps
87	Pisut Doh-oleh	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
125	Pukemmas Gayamsari	500M	500M	5.6 GB 570.7 kbps	130.3 kbps	130.3 kbps
101	Pukemmas Lingsidangan	500M	500M	2425.7 MB 390.9 kbps	15.9 Mbps	15.9 Mbps
118	Pukemmas Soko	500M	500M	2163.0 MB 50.2 kbps	471.3 kbps	471.3 kbps
105	RSD/RIA Babarsari	500M	500M	1.5 GB 1820 kbps	2.4 kbps	2.4 kbps
71	Ruang Ayahan	500M	500M	613.6 MB 15.3 kbps	171.3 kbps	171.3 kbps
69	Ruang Rapih	500M	500M	332.8 MB 67 kbps	1740 kbps	1740 kbps
40	Ruang Rapih Bapali	500M	500M	477.5 MB 0 kbps	104 kbps	104 kbps
63	Ruang Rapih Arsten	500M	500M	4501.9 MB 130.2 kbps	307.3 kbps	307.3 kbps
60	Ruang Rapih SBK	500M	500M	1.9 GB 113.7 kbps	102.3 kbps	102.3 kbps
34	Ruang Sekeloa	500M	500M	2024.9 MB 1395 kbps	1072 kbps	1072 kbps
65	Ruang Waluya	500M	500M	1649.4 MB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
33	Rumah Tangga	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
76	Sadap PP	500M	500M	15.3 GB 1628.1 kbps	239.3 kbps	239.3 kbps
11	Selaras	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
36	Selaras 1.1	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
46	Selaras 1.2	500M	500M	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
27	Staf Ahi 2	500M	500M	8.4 GB 0 bps	0 bps	0 bps
3	Staff Ahi	500M	500M	1052.2 MB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
17	TEST_BW	unlimited	unlimited	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
22	TK Perahu	500M	500M	453.9 MB 0 kbps	0 kbps	0 kbps
4	Tunneling	10M	10M	2176 B 0 kbps	0 kbps	0 kbps
0	ansi 1	25K	25K	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
76	anda AP	unlimited	unlimited	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
15	ansi 1	128k	128k	0 B 0 bps	0 bps	0 bps
23	Back Up Link Soko	500M	500M	29.8 GB 42.1 kbps	63.5 kbps	63.5 kbps
106	phobosari	500M	500M	5315.0 MB 157.8 kbps	6.6 Mbps	6.6 Mbps

Pembangunan Jaringan Broadband Tahun 2021

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto

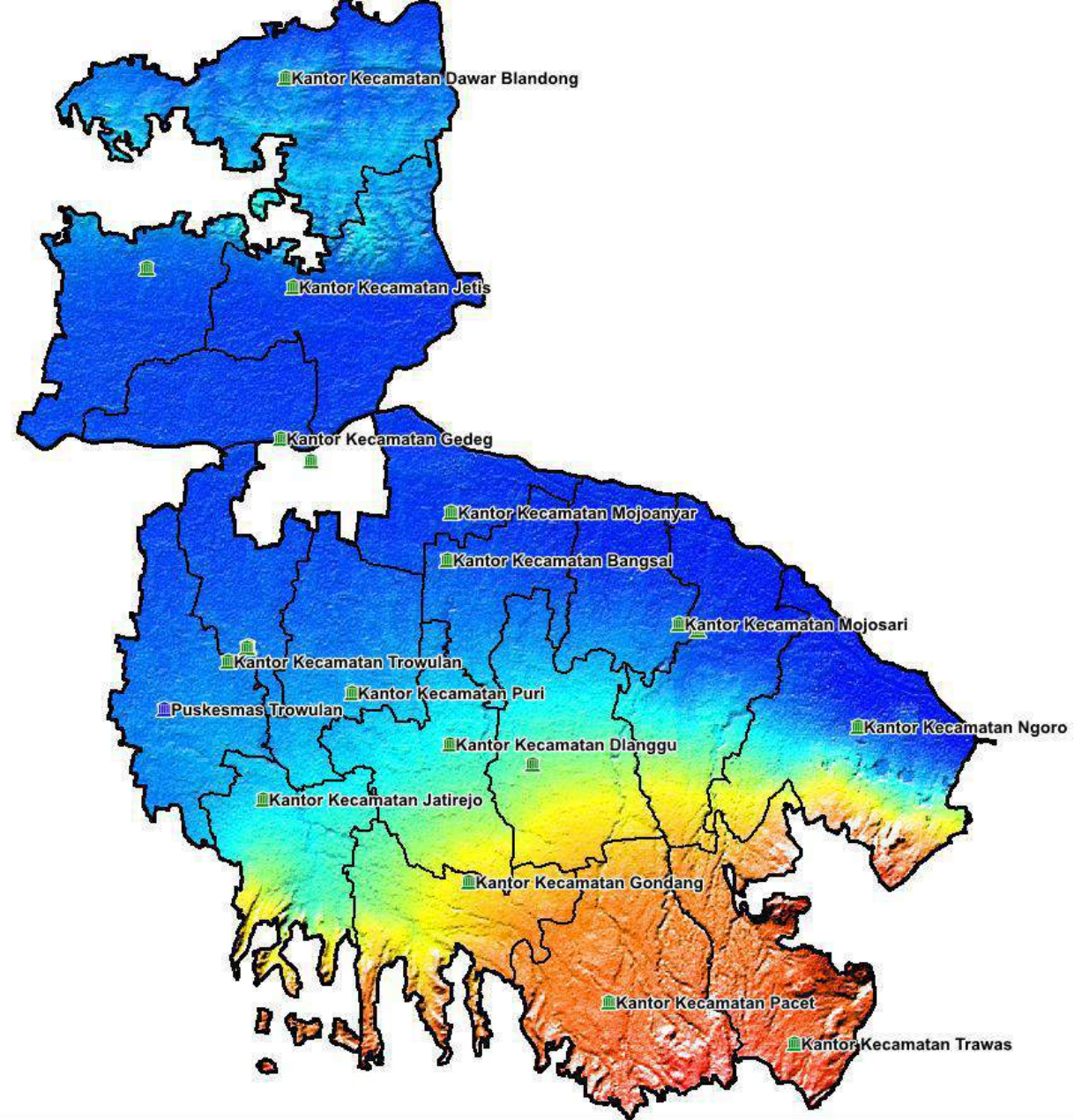


CV. Taiba Infrastruktur, Lamongan 6 Pebruari 2021



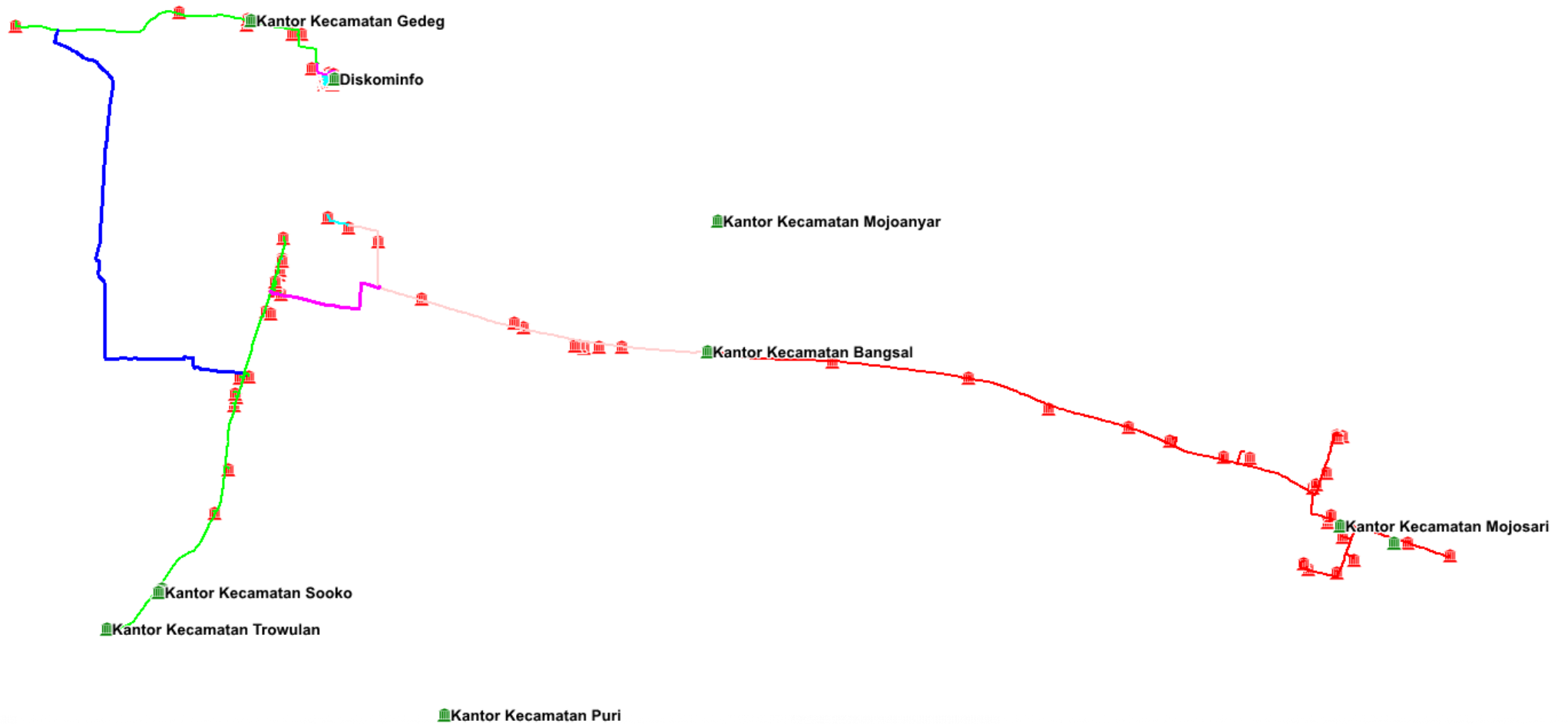
Mapping Kecamatan

- 18 Kecamatan
- Kecamatan Gedeg, Sooko, Trowulan, Bangsal, Pungging telah terhubung dengan Jaringan FO-GPON
- Kecamatan Mojosari telah terhubung dengan FO Point to Point dari Kominfo pada Kecepatan 10 Gbps
- Kecamatan Bangsal telah terbangun Menara Mini SST 24 meter, sebagai model prototipe untuk gateway Internet Desa



FO-GPON terbangun 2020

Gelaran Kabel FO sepanjang 57 km, menghubungkan 115 Modem ONT



115 titik ONT terhubung 2020

No.	Penempatan ONT (Optical Network Termination)	Cluster	Longitude	Latitude	No.	Penempatan ONT (Optical Network Termination)	Cluster	Longitude	Latitude
1	Baznas	cluster-1	112.43305	-7.462698	31	Pos Pantau di Pintu masuk Pendopo Bupati	cluster-	112.4339	-7.46369
2	Bagian Administrasi Pembangunan	cluster-1	112.433133	-7.462841	32	Sekretariat Bappeda	cluster-	112.4333	-7.46279
3	Sekwan Lantai 2	cluster-1	112.432978	-7.463316	33	TK	cluster-	112.4343	-7.46313
4	Badan Pendapatan Daerah Utara	cluster-1	112.432903	-7.463747	34	Ruang Ajudan	cluster-	112.4338	-7.46267
5	Lobby Bawah Kantor Bupati (wifi hotspot)	cluster-1	112.433288	-7.463241	35	Panti PKK (Rumah Dinas Belakang)	cluster-	112.4341	-7.46224
6	Bagian TU (Lt.1)	cluster-1	112.433297	-7.463068	36	Ruang Rapat Utama (SBK) (Lt.2)	cluster-	112.4332	-7.46328
7	Bagian Administrasi Perekonomian (Lt.1)	cluster-1	112.433256	-7.463433	37	Command Center	cluster-	112.4341	-7.46297
8	Bagian Organisasi (Lt.1)	cluster-1	112.433331	-7.463433	38	Bagian Humas Lantai 1	cluster-	0	0
9	Pendopo Bupati	cluster-1	112.433791	-7.46318	39	Sekwan Lantai 1	cluster-	0	0
10	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (STAFF)	cluster-1	112.434076	-7.462611	40	Rumah Dinas Bupati	cluster-	0	0
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	cluster-1	112.43409	-7.462913	41	Bappeda Lantai 2	cluster-	0	0
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2 lantai)	cluster-1	112.434081	-7.463278	42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Utara	cluster-	0	0
13	Bagian Humas Lantai 2	cluster-1	112.432771	-7.462847	43	Badan Pendapatan Daerah Selatan	cluster-	0	0
14	Bagian Kesra	cluster-1	112.432909	-7.462798	44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lantai 1	cluster-	0	0
15	Bagian Hukum	cluster-1	112.432897	-7.462873	45	Puskesmas Kesehatan Pemda	cluster-	0	0
16	Bagian Administrasi Pemerintahan Lt.2	cluster-1	112.432889	-7.462879	46	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (server)	cluster-	0	0
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selatan	cluster-1	112.432915	-7.463747	47	Dapur Rumah Dinas Bupati	cluster-	0	0
18	Bagian umum (Lt.2)	cluster-1	112.433288	-7.463455	48	Pos Satpol PP Dalam	cluster-	0	0
19	Lobby Atas kantor Bupati	cluster-1	112.433311	-7.463261	49	Dinas Pangan dan Perikanan	cluster-	112.4189	-7.51779
20	Kantor Bupati (Lt.2)	cluster-1	112.433436	-7.463267	50	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	cluster-	112.4254	-7.49233
21	Kantor Wakil Bupati (Lt.2)	cluster-1	112.43342	-7.463179	51	Inspektorat Daerah	cluster-	112.4261	-7.49253
22	Ruang Rapat Asisten	cluster-1	112.433328	-7.463086	52	Dinas Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	cluster-	112.4214	-7.50411
23	Kantor Sekda (Lt.2)	cluster-1	112.433194	-7.463216	53	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	cluster-	112.4277	-7.48305
24	Kasubag Rumah Tangga (Lt.2)	cluster-1	112.433282	-7.462976	54	Dinas Pertanian	cluster-	112.427	-7.48769
25	Ruang Staf Ahli (Lt.2)	cluster-1	112.433235	-7.463015	55	Dinas Pendidikan	cluster-	112.4267	-7.48908
26	Ruang Asisten Adm. Umum (Lt.2)	cluster-1	112.433229	-7.463061	56	Dinas Sosial	cluster-	112.4217	-7.50317
27	Ruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Lt.2)	cluster-1	112.433235	-7.463103	57	Dinas Kesehatan	cluster-	112.4216	-7.50275
28	Ruang Asisten Pemerintahan dan Kesra (Lt.2)	cluster-1	112.433235	-7.46315	58	Diskominfo	cluster-	112.4313	-7.46167
29	Diskominfo (Bidang Informatika)	cluster-1	112.434074	-7.462988	59	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	cluster-	112.4267	-7.48874
30	Unit Layanan Pengadaan	cluster-1	112.434071	-7.462879	60	Mall Pelayanan Publik	cluster-	112.4266	-7.48935



115 titik ONT terhubung 2020

No.	Penempatan ONT (Optical Network Termination)	Cluster	Longitude	Latitude
61	DPRD	cluster-2	112.426616	-7.489699
62	Pengadilan Negeri	cluster-2	112.427153	-7.487161
63	Kejaksaan Negeri	cluster-2	112.422209	-7.500678
64	Kantor Kecamatan Trowulan	cluster-2	112.405352	-7.532506
65	Kantor Kecamatan Sooko	cluster-2	112.411928	-7.527796
66	Puskesmas Sooko	cluster-2	112.412379	-7.52738
67	Kantor Desa Sooko	cluster-2	112.427296	-7.490158
68	Kantor Desa Jampirogo	cluster-2	112.42073	-7.512283
69	Kantor Desa Japan	cluster-2	112.423314	-7.500573
70	Pos Jaga Danrem	cluster-2	0	0
71	Ruang Kerja Danrem	cluster-2	0	0
72	RSUD Prof. Dr. Soekandar Kota Mojosari	cluster-3	112.559831	-7.519002
73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	cluster-3	112.433313	-7.480447
74	Dinas Lingkungan Hidup	cluster-3	112.561469	-7.50812
75	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Parawisata	cluster-3	112.439616	-7.483542
76	Satuan Polisi Pamong Praja	cluster-3	112.560777	-7.507929
77	Dinas Tenaga Kerja	cluster-3	112.560914	-7.50825
78	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	cluster-3	112.445214	-7.490768
79	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	cluster-3	112.465092	-7.496654
80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	cluster-3	112.464592	-7.496628
81	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	cluster-3	112.575241	-7.523151
82	UPT Metrologi Legal	cluster-3	112.465669	-7.496898
83	Puskesmas Gayaman	cluster-3	112.46756	-7.496813
84	GOR Mojosari	cluster-3	112.549938	-7.510779
85	BPR Majatama	cluster-3	112.435903	-7.481686
86	Polres Mojokerto	cluster-3	112.539836	-7.508592
87	Pusat Oleh-Oleh Jotangan	cluster-3	112.546696	-7.510752
88	Pasar Raya Mojosari	cluster-3	112.557954	-7.514558
89	PDAM	cluster-3	112.557311	-7.524833
90	LABKESDA	cluster-3	112.456832	-7.494183

No.	Penempatan ONT (Optical Network Termination)	Cluster	Longitude	Latitude
91	Kantor Kecamatan Bangsal	cluster-	112.4813	-7.49741
92	Kantor Kecamatan Mojosari	cluster-	112.5614	-7.5194
93	Kantor Kecamatan Pungging	cluster-	112.5682	-7.52148
94	Kantor Desa Jabon	cluster-	112.458	-7.49429
95	Kantor Desa Gayaman	cluster-	112.4705	-7.49674
96	Kantor Desa Sidomulyo	cluster-	112.4972	-7.49868
97	Kantor Desa Ngrowo	cluster-	112.5144	-7.50075
98	Kantor Desa Mojotamping	cluster-	112.5244	-7.50454
99	Kantor Desa Kebundalem	cluster-	112.5346	-7.50699
100	Kantor Desa Seduri	cluster-	112.5583	-7.51415
101	Kantor Kelurahan Wonokusumo	cluster-	112.5602	-7.51803
102	Kantor Desa Tunggal Pager	cluster-	112.57	-7.52161
103	Kantor Kelurahan Mojosari	cluster-	112.5616	-7.52084
104	Kantor Kelurahan Sarirejo	cluster-	112.561	-7.52526
105	Kantor Kelurahan Kauman	cluster-	112.5568	-7.52408
106	Kantor Kelurahan Sawahan	cluster-	112.5631	-7.52372
107	DLH_2	cluster-	112.5583	-7.51415
108	RSUD Raden Achmad Basoeni	cluster-	112.3938	-7.45629
109	Kantor Kecamatan Gedeg	cluster-	112.4236	-7.45549
110	Kantor Desa Tarusan	cluster-	112.4231	-7.45612
111	Kantor Desa Kemantren	cluster-	112.4145	-7.45454
112	RSUD Raden Achmad Basoeni	cluster-	112.3938	-7.45629
113	Pasar Rakyat Lepadangan	cluster-	112.43	-7.45722
114	Puskesmas Lepadangan	cluster-	112.4289	-7.45731
115	Diklat Kabupaten Mojokerto	cluster-	112.4232	-7.45533



23 Access Point terpasang di Pendopo Bupati

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point	
Kabupaten Mojokerto			
No	Nama OPD	Jumlah	Access Point Merk/Type
1	Baznas		
2	Bagian Administrasi Pembangunan (Berada di Kantor Bappeda)		
3	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	4	Ubiquiti/AP AC LR (1)/ AP AC Lite (1); Ruijie AP710 (2)
4	Pendopo Bupati	1	Ubiquiti/AP AC LR
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1	Ubiquiti/AP AC LR
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
8	Bagian Kesra (Bangunan terpisah dari Kantor		
9	Bagian Hukum (Bangunan terpisah dari Kantor		
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	2	Ubiquiti/AP AC LR (1); Ruijie AP710 (1)
11	Kantor Wakil Bupati		
12	Kantor Sekda	4	Ubiquiti/AP AC LR/ Ruijie AP710 (2); AP720 (1)
13	Diskominfo (Bidang Informatika)	2	Ruijie AP 840 & AP 680 (CD)
14	Unit Layanan Pengadaan	1	Ubiquiti/AP AC LR
15	TK		
16	Panti PKK (Rumah Dinas Belakang)		
17	Command Center		Menggunakan FO-PtP (CCR-1036)
18	Bagian Humas		
19	Sekretariat DPRD	3	Ubiquiti/AP AC LR / Ruijie AP710 (2)
20	Rumah Dinas Bupati		
21	Bappeda	5	Ubiquiti/AP AC LR (1)/ AP AC Lite (1)/Ruijie AP710(2)/Ruijie AP720(1)
22	Puskesmas Kesehatan Pemda		
23	Bagian Administrasi Pemerintahan (Bangunan terpisah dari Kantor Sekda)		
24	Kantor Bupati		
25	Pos Pantau		
Total		23	



9 Access Point terpasang di OPD yang berada di Kecamatan Gedeg, Trowulan & Puri

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	Pasar Rakyat Lespadangan	1	ZTE F609				
2	Puskesmas Lespadangan	1	ZTE F609				
3	Kecamatan Gedeg	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	3	Ruijie AP720
4	Kantor Desa Tarusan	1	ZTE F609				
5	Diklat Kabupaten Mojokerto	1	ZTE F609				
6	Kantor Desa Kemantren	1	ZTE F609				
7	RSUD Raden Achmad Basoeni	1	ZTE F609				
Total		7		1		3	

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	Kantor Kecamatan Trowulan	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	3	Ruijie AP720
Total		1		1		3	

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	3	Ruijie AP720
2	BPR Majatama	0	kabel FO sudah masuk				
Total		1		1		3	



19 Access Point terpasang di OPD yang berada di Kecamatan Mojoanyar, Bangsal & Pungging

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	LABKESDA	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	1	Ruijie AP720
2	Kantor Desa Jabon	1	ZTE F609				
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	3	Ruijie AP720
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	4	Ruijie AP720
5	UPT Metrologi Legal	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	3	Ruijie AP720
6	Puskesmas Gayaman	1	ZTE F609				
7	Kantor Desa Gayaman	0	Sedang dalam Renovasi				
Total		6		4		11	

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	Kantor Kecamatan Bangsal	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	3	Ruijie AP720
2	Kantor Desa Sidomulyo	1	ZTE F609				
3	Kantor Desa Ngrowo	1	ZTE F609				
4	Kantor Desa Mojotamping	1	ZTE F609				
Total		4		1		3	

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	Kantor Kecamatan Pungging	1	ZTE F609	1	RB750 GR3	3	Ruijie AP720
2	Kantor Desa Tunggal Pager	1	ZTE F609				
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	2	ZTE F609	2	RB750 GR3	2	Ruijie AP710 (1) Ruijie AP720 (1)
Total		4		3		5	1 AP710 & 4 AP720



38 Access Point terpasang di OPD yang berada di Kecamatan Sooko

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	2	Ruijie AP720
2	Rumah Dinas Danrem	1	ZTE F609				
3	Pengadilan Negeri	1	ZTE F609				
4	Dinas Pertanian	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	4	Ruijie AP720
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	4	Ruijie AP720
6	Dinas Pendidikan	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	4	Ruijie AP720, 1 AP belum terpasang
7	Mall Pelayanan Publik	0					
8	DPRD	0					
9	Kantor Desa Sooko	1	ZTE F609				
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	2	Ruijie AP720
11	Inspektorat Daerah	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	3	Ruijie AP720
12	Kantor Desa Japan	1	ZTE F609				
13	Kejaksaan Negeri	1	ZTE F609				
14	Dinas Kesehatan	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	4	Ruijie AP720
15	Dinas Sosial	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	4	Ruijie AP720
16	Dinas Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	5	Ruijie AP720
17	Kantor Desa Jampirogo	1	ZTE F609				
18	Dinas Pangan dan Perikanan	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	2	Ruijie AP720
19	Puskesmas Sooko	1	ZTE F609				
20	Kecamatan Sooko	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	4	Ruijie AP720
Total		18		11		38	



17 Access Point terpasang di OPD yang berada di Kecamatan Mojosari

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	Kantor Desa Kebundalem	1	ZTE F609				
2	Polres Mojokerto	1	ZTE F609	1	RB750 GR3		
3	Pusat Oleh-oleh Jotangan	1	ZTE F609	1	RB750 GR3	1	Ubiquiti/UAP Mesh Pro
4	GOR Mojosari	1	ZTE F609				
5	Dinas Lingkungan Hidup-1	1	ZTE F609	1	RB750 GR3	3	Ruijie AP710 (2) & AP720 (1)
6	Satpol PP	1	ZTE F609	1	RB750 GR3	3	Ruijie AP710
7	Disnaker	1	ZTE F609	1	RB750 GR3	2	Ruijie AP710
8	Dinas Lingkungan Hidup-2	1	ZTE F609	1	RB750 GR3	3	Ruijie AP710
9	Kantor Desa Seduri	1	ZTE F609				
10	Pasar Raya Mojosari	1	ZTE F609				
11	Kantor Kelurahan Wonokusumo	1	ZTE F609				
12	RSUD Prof. Dr. Soekandar	1	ZTE F609				
13	Kecamatan Mojosari	0	Terpasang OLT ZTE 16 Port PON			3	Ruijie AP710
14	Kantor Kelurahan Mojosari	1	ZTE F609				
15	Kantor Kelurahan Sawahan	1	ZTE F609				
16	Kantor Kelurahan Sarirejo	1	ZTE F609				
17	PDAM Tirta Dharma	1	ZTE F609	1	RB750 GR3	2	Ruijie AP720
18	Kantor Kelurahan Kauman	1	ZTE F609				
Total		17		7		17	3 Ruijie AP720 & 13 AP710



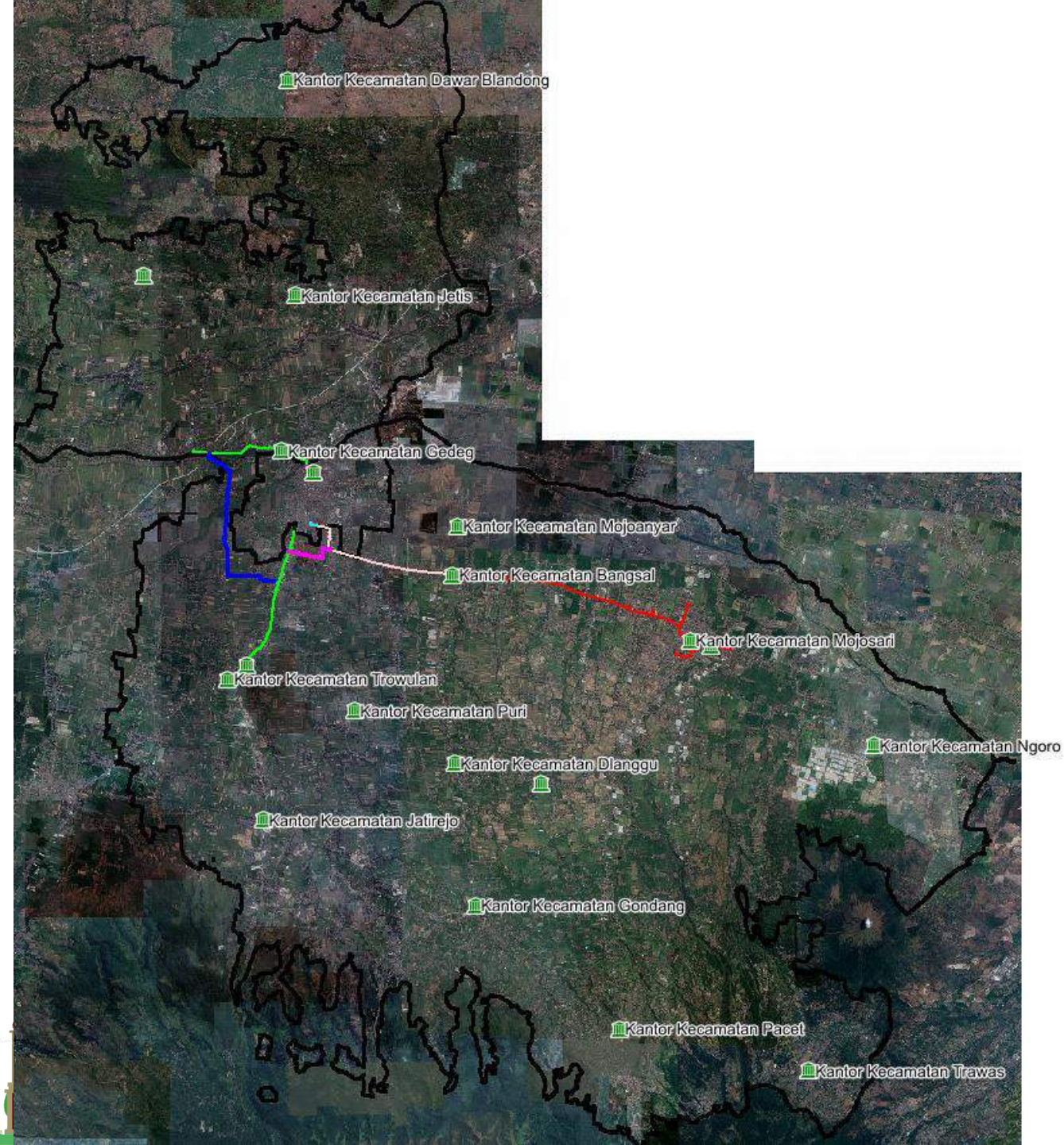
Perencanaan Jaringan Broadband ke Kecamatan

- Ideal nya koneksi broadband ke Kecamatan menggunakan jaringan FO, agar terbangun kecepatan data intranet minimal 1 Gbps ke Kecamatan. Dan dapat di upgrade ke 10G dengan penambahan Router CCR 1036 2S+ 8G di setiap Kantor Kecamatan.
- Kebutuhan 1 Gbps ke setiap Kantor Kecamatan, diperlukan karena posisi Kantor Kecamatan sebagai gateway untuk ke Kelurahan & Desa, SDN, SMPN, Puskesmas & Pasar Tradisional
- Membagi cluster penggelaran FO ke Kecamatan dalam 5 Cluster :
 - Cluster Gedeg : Jetis, Dawarblandong & Kemlagi
 - Cluster Trowulan : Puri, Dlanggu, Jatirejo & Mojoanyar
 - Cluster Mojosari : Ngoro
 - Cluster Pacet : Kutorejo, Pacet & Gondang
 - Cluster Trawas : Trawas via Kantor kec. Pacet atau Trawas via pertigaan Desa Pandanarum



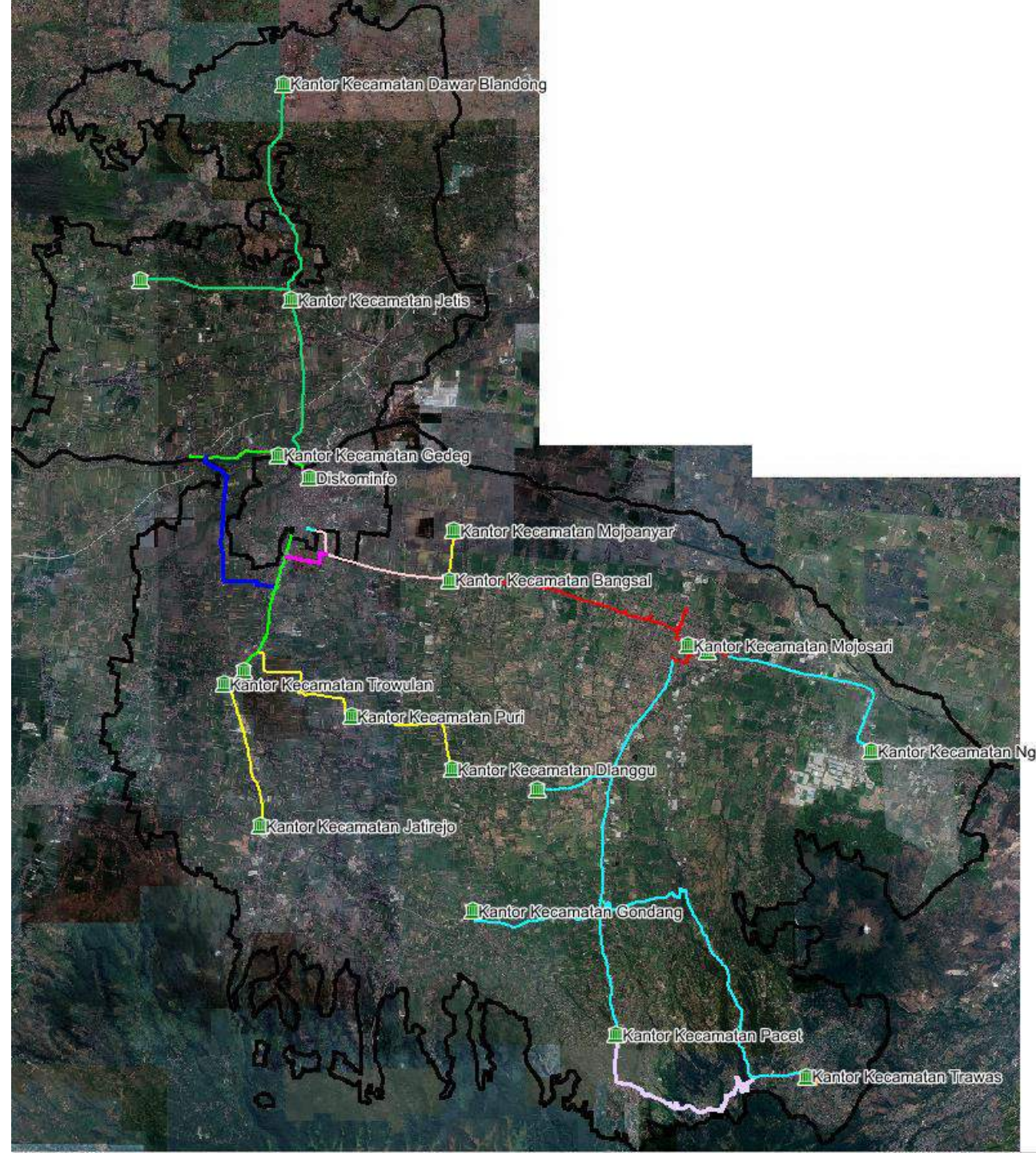
Mapping Kecamatan

Name	Lat	Long
Kantor Kecamatan Bangsal	-7.49741	112.481
Kantor Kecamatan Dawar Blandong	-7.33039	112.425
Kantor Kecamatan Dlanggu	-7.56102	112.482
Kantor Kecamatan Gedeg	-7.45549	112.424
Kantor Kecamatan Gondang	-7.6088	112.489
Kantor Kecamatan Jatirejo	-7.58003	112.417
Kantor Kecamatan Jetis	-7.40303	112.428
Kantor Kecamatan Kemlagi	-7.39639	112.377
Kantor Kecamatan Kutorejo	-7.56778	112.511
Kantor Kecamatan Mojoanyar	-7.48084	112.483
Kantor Kecamatan Mojosari	-7.5194	112.561
Kantor Kecamatan Ngoro	-7.55489	112.623
Kantor Kecamatan Pacet	-7.6505	112.537
Kantor Kecamatan Pungging	-7.52148	112.568
Kantor Kecamatan Puri	-7.54322	112.448
Kantor Kecamatan Trawas	-7.66456	112.601
Kantor Kecamatan Trowulan	-7.55303	112.378
Kantor Kecamatan Sooko	-7.5278	112.412



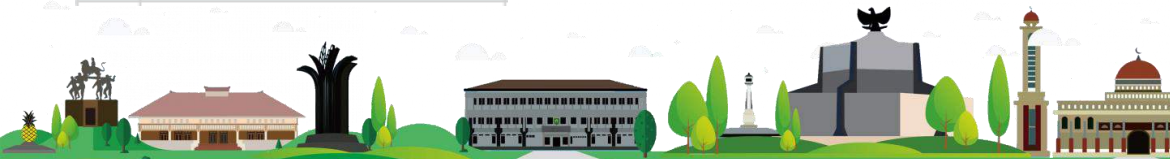
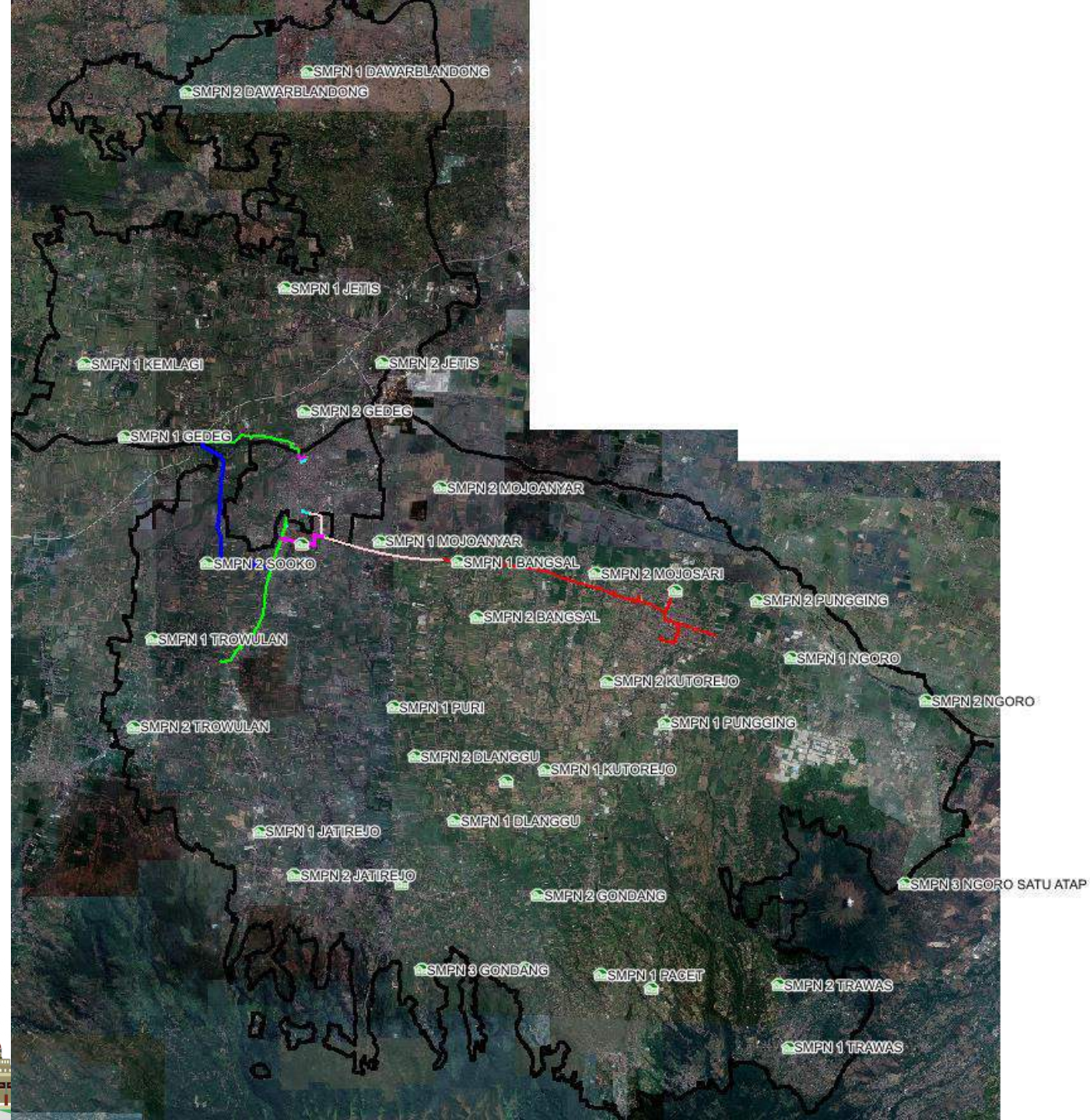
Plan FO ke Seluruh Kantor Kecamatan

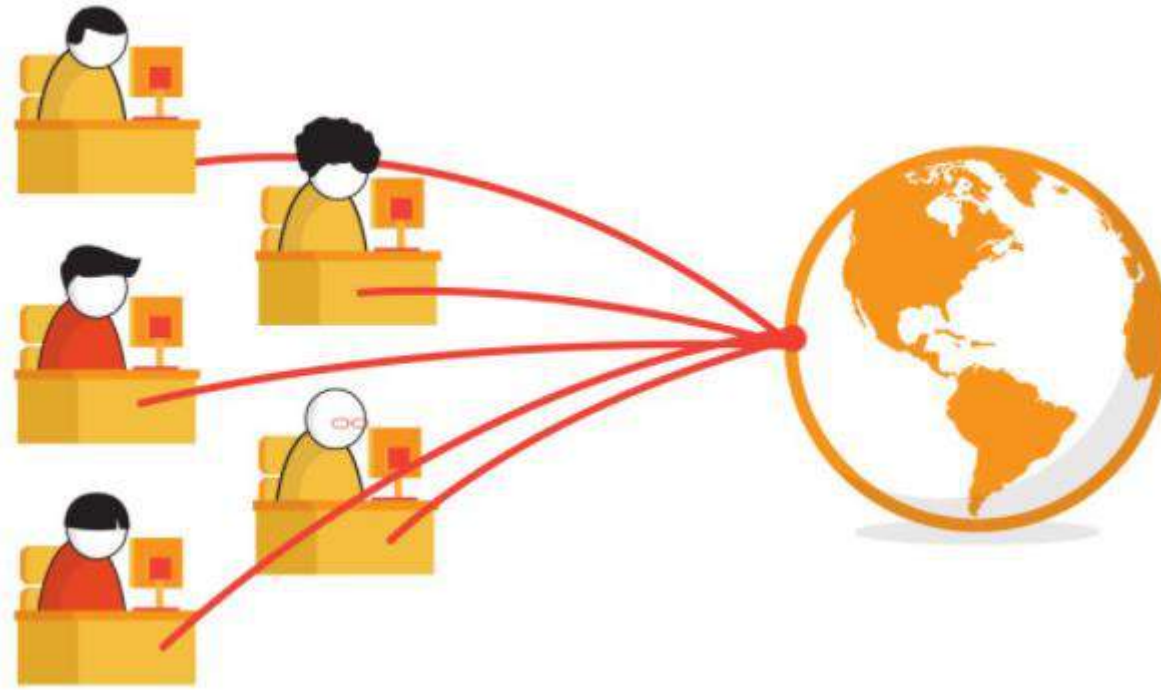
No	Cluster	Kecamatan	Panjang Kabel FO (meter)
1	Cluster Gedeg	Kec. Jetis, Kemlagi & DawarBlandong	25,000
2	Cluster Trowulan	Kec. Puri, Dlanggu, Jatirejo & Mojoanyar	22,000
3	Cluster Mojosari	Kec. Ngoro	10,000
4	Cluster Pacet	Kutorejo, Gondang & Pacet	28,000
5	Cluster Trawas	Kec. Trawas via Kantor Kec. Pacet	15,000
Total Kebutuhan Kabel FO (meter)			100,000



Mapping SMPN

No	Nama_SMP
1	SMPN 1 JATIREJO
2	SMPN 2 JATIREJO
3	SMPN 1 GONDANG
4	SMPN 2 GONDANG
5	SMPN 3 GONDANG
6	SMPN 1 PACET
7	SMPN 2 PACET
8	SMPN 3 PACET
9	SMPN 1 TRAWAS
10	SMPN 2 TRAWAS
11	SMPN 1 NGORO
12	SMPN 2 NGORO
13	SMPN 3 NGORO SATU ATAP
14	SMPN 1 PUNGGING
15	SMPN 2 PUNGGING
16	SMPN 1 KUTOREJO
17	SMPN 2 KUTOREJO
18	SMPN 3 KUTOREJO
19	SMPN 1 MOJOSARI
20	SMPN 2 MOJOSARI
21	SMPN 1 BANGSAL
22	SMPN 2 BANGSAL
23	SMPN 1 MOJOANYAR
24	SMPN 2 MOJOANYAR
25	SMPN 1 DLANGGU
26	SMPN 2 DLANGGU
27	SMPN 1 PURI
28	SMPN 1 TROWULAN
29	SMPN 2 TROWULAN
30	SMPN 1 SOOKO
31	SMPN 2 SOOKO
32	SMPN 1 GEDEG
33	SMPN 2 GEDEG
34	SMPN 1 KEMLAGI
35	SMPN 1 JETIS
36	SMPN 2 JETIS
37	SMPN 1 DAWARBLANDONG
38	SMPN 2 DAWARBLANDONG





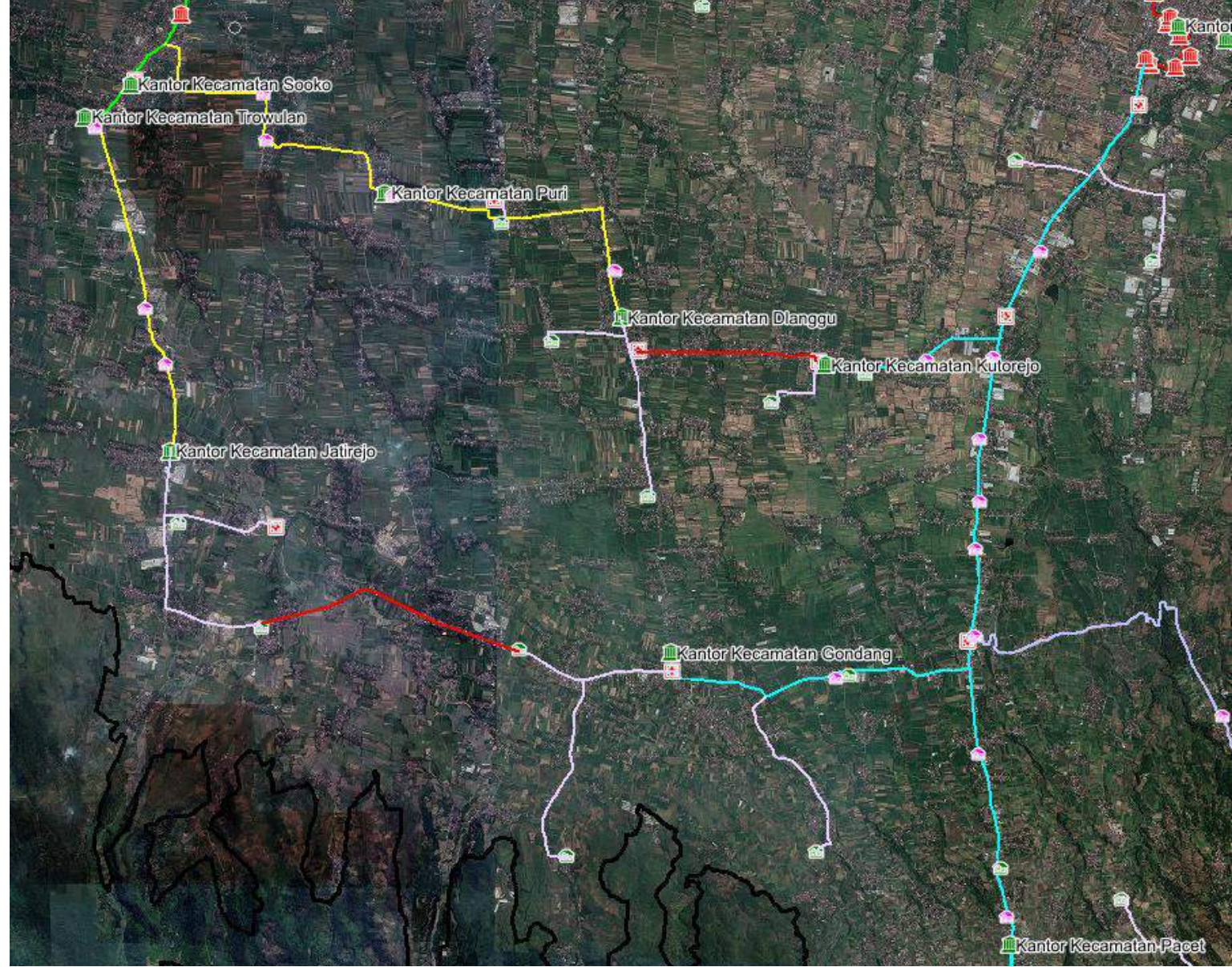
Backup Broadband Network

FO-Backup & Radio Broadband PtP



FO-Ring

- Menghubungkan Kecamatan Jatirejo ke Kecamatan Gondang sepanjang 6 km
- Menghubungkan Kecamatan Dlanggu ke Kecamatan Kutorejo



Pembangunan Jaringan Broadband Tahun 2021

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto

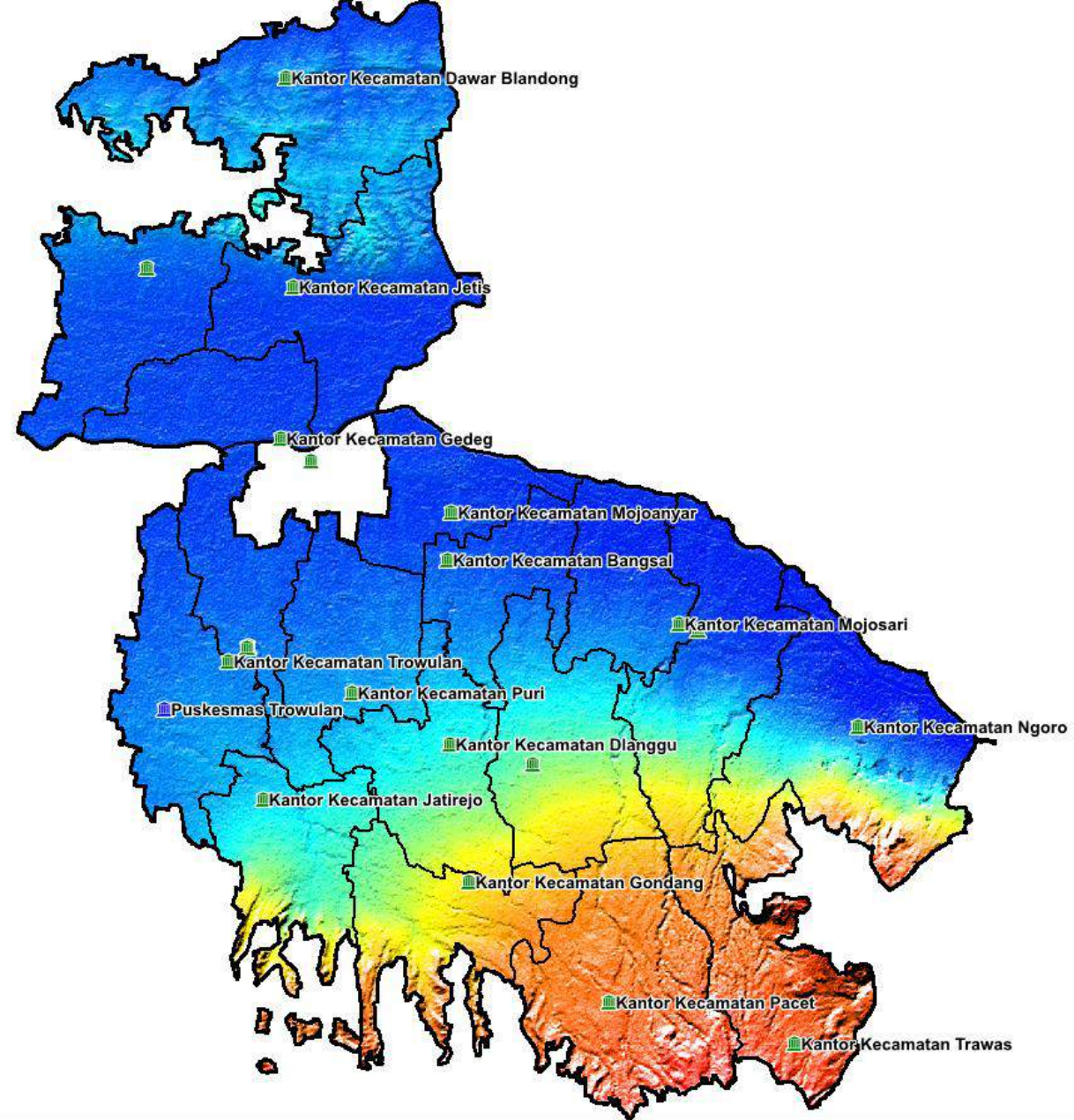


CV. Taiba Infrastruktur, Lamongan 6 Pebruari 2021



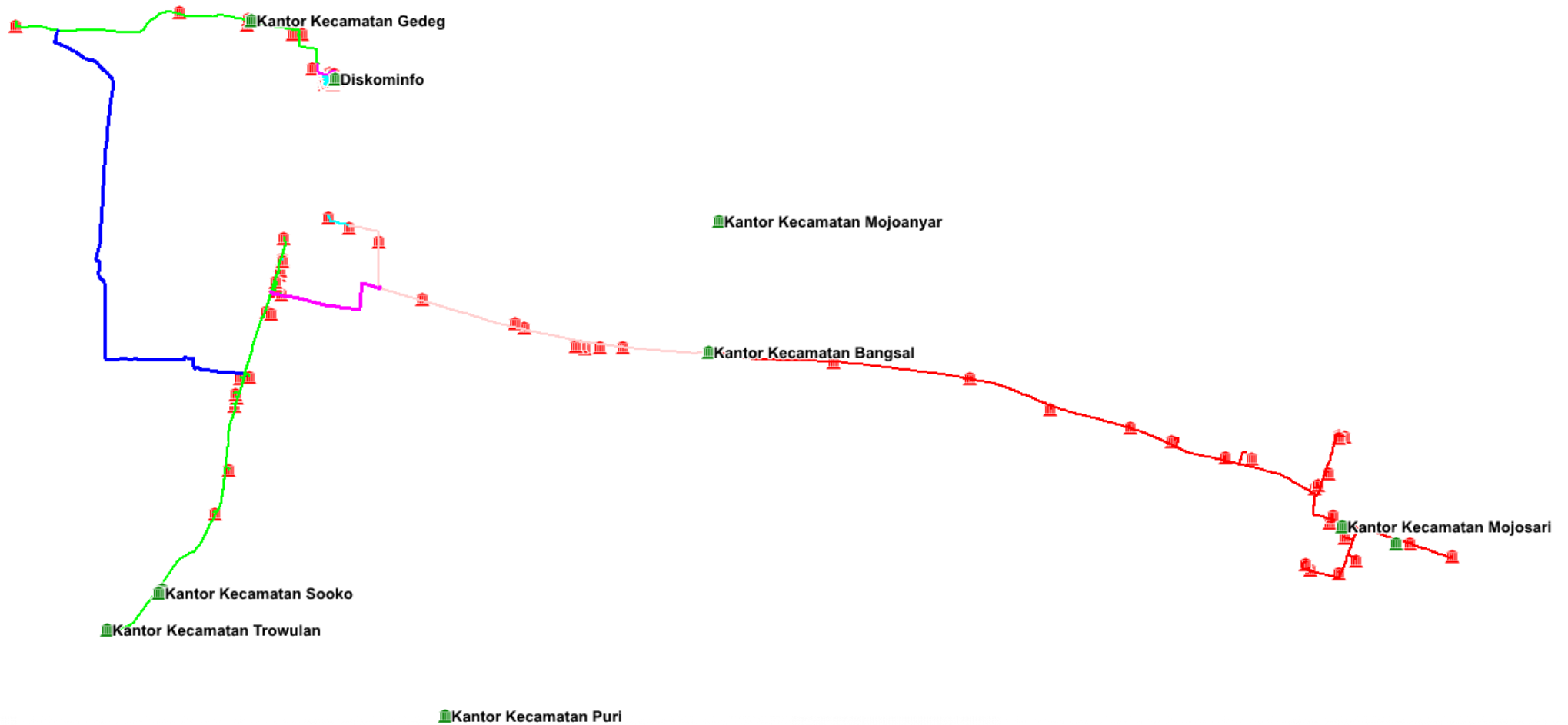
Mapping Kecamatan

- 18 Kecamatan
- Kecamatan Gedeg, Sooko, Trowulan, Bangsal, Pungging telah terhubung dengan Jaringan FO-GPON
- Kecamatan Mojosari telah terhubung dengan FO Point to Point dari Kominfo pada Kecepatan 10 Gbps
- Kecamatan Bangsal telah terbangun Menara Mini SST 24 meter, sebagai model prototipe untuk gateway Internet Desa



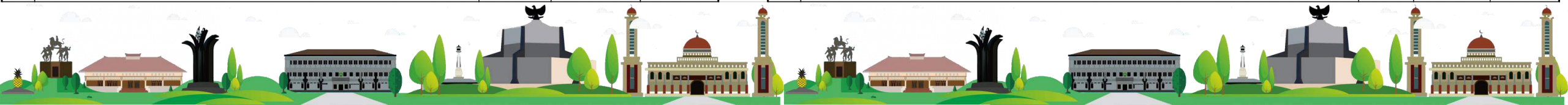
FO-GPON terbangun 2020

Gelaran Kabel FO sepanjang 57 km, menghubungkan 115 Modem ONT



115 titik ONT terhubung 2020

No.	Penempatan ONT (Optical Network Termination)	Cluster	Longitude	Latitude	No.	Penempatan ONT (Optical Network Termination)	Cluster	Longitude	Latitude
1	Baznas	cluster-1	112.43305	-7.462698	31	Pos Pantau di Pintu masuk Pendopo Bupati	cluster-	112.4339	-7.46369
2	Bagian Administrasi Pembangunan	cluster-1	112.433133	-7.462841	32	Sekretariat Bappeda	cluster-	112.4333	-7.46279
3	Sekwan Lantai 2	cluster-1	112.432978	-7.463316	33	TK	cluster-	112.4343	-7.46313
4	Badan Pendapatan Daerah Utara	cluster-1	112.432903	-7.463747	34	Ruang Ajudan	cluster-	112.4338	-7.46267
5	Lobby Bawah Kantor Bupati (wifi hotspot)	cluster-1	112.433288	-7.463241	35	Panti PKK (Rumah Dinas Belakang)	cluster-	112.4341	-7.46224
6	Bagian TU (Lt.1)	cluster-1	112.433297	-7.463068	36	Ruang Rapat Utama (SBK) (Lt.2)	cluster-	112.4332	-7.46328
7	Bagian Administrasi Perekonomian (Lt.1)	cluster-1	112.433256	-7.463433	37	Command Center	cluster-	112.4341	-7.46297
8	Bagian Organisasi (Lt.1)	cluster-1	112.433331	-7.463433	38	Bagian Humas Lantai 1	cluster-	0	0
9	Pendopo Bupati	cluster-1	112.433791	-7.46318	39	Sekwan Lantai 1	cluster-	0	0
10	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (STAFF)	cluster-1	112.434076	-7.462611	40	Rumah Dinas Bupati	cluster-	0	0
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	cluster-1	112.43409	-7.462913	41	Bappeda Lantai 2	cluster-	0	0
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2 lantai)	cluster-1	112.434081	-7.463278	42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Utara	cluster-	0	0
13	Bagian Humas Lantai 2	cluster-1	112.432771	-7.462847	43	Badan Pendapatan Daerah Selatan	cluster-	0	0
14	Bagian Kesra	cluster-1	112.432909	-7.462798	44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lantai 1	cluster-	0	0
15	Bagian Hukum	cluster-1	112.432897	-7.462873	45	Puskesmas Kesehatan Pemda	cluster-	0	0
16	Bagian Administrasi Pemerintahan Lt.2	cluster-1	112.432889	-7.462879	46	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (server)	cluster-	0	0
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selatan	cluster-1	112.432915	-7.463747	47	Dapur Rumah Dinas Bupati	cluster-	0	0
18	Bagian umum (Lt.2)	cluster-1	112.433288	-7.463455	48	Pos Satpol PP Dalam	cluster-	0	0
19	Lobby Atas kantor Bupati	cluster-1	112.433311	-7.463261	49	Dinas Pangan dan Perikanan	cluster-	112.4189	-7.51779
20	Kantor Bupati (Lt.2)	cluster-1	112.433436	-7.463267	50	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	cluster-	112.4254	-7.49233
21	Kantor Wakil Bupati (Lt.2)	cluster-1	112.43342	-7.463179	51	Inspektorat Daerah	cluster-	112.4261	-7.49253
22	Ruang Rapat Asisten	cluster-1	112.433328	-7.463086	52	Dinas Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	cluster-	112.4214	-7.50411
23	Kantor Sekda (Lt.2)	cluster-1	112.433194	-7.463216	53	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	cluster-	112.4277	-7.48305
24	Kasubag Rumah Tangga (Lt.2)	cluster-1	112.433282	-7.462976	54	Dinas Pertanian	cluster-	112.427	-7.48769
25	Ruang Staf Ahli (Lt.2)	cluster-1	112.433235	-7.463015	55	Dinas Pendidikan	cluster-	112.4267	-7.48908
26	Ruang Asisten Adm. Umum (Lt.2)	cluster-1	112.433229	-7.463061	56	Dinas Sosial	cluster-	112.4217	-7.50317
27	Ruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Lt.2)	cluster-1	112.433235	-7.463103	57	Dinas Kesehatan	cluster-	112.4216	-7.50275
28	Ruang Asisten Pemerintahan dan Kesra (Lt.2)	cluster-1	112.433235	-7.46315	58	Diskominfo	cluster-	112.4313	-7.46167
29	Diskominfo (Bidang Informatika)	cluster-1	112.434074	-7.462988	59	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	cluster-	112.4267	-7.48874
30	Unit Layanan Pengadaan	cluster-1	112.434071	-7.462879	60	Mall Pelayanan Publik	cluster-	112.4266	-7.48935



115 titik ONT terhubung 2020

No.	Penempatan ONT (Optical Network Termination)	Cluster	Longitude	Latitude
61	DPRD	cluster-2	112.426616	-7.489699
62	Pengadilan Negeri	cluster-2	112.427153	-7.487161
63	Kejaksaan Negeri	cluster-2	112.422209	-7.500678
64	Kantor Kecamatan Trowulan	cluster-2	112.405352	-7.532506
65	Kantor Kecamatan Sooko	cluster-2	112.411928	-7.527796
66	Puskesmas Sooko	cluster-2	112.412379	-7.52738
67	Kantor Desa Sooko	cluster-2	112.427296	-7.490158
68	Kantor Desa Jampirogo	cluster-2	112.42073	-7.512283
69	Kantor Desa Japan	cluster-2	112.423314	-7.500573
70	Pos Jaga Danrem	cluster-2	0	0
71	Ruang Kerja Danrem	cluster-2	0	0
72	RSUD Prof. Dr. Soekandar Kota Mojosari	cluster-3	112.559831	-7.519002
73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	cluster-3	112.433313	-7.480447
74	Dinas Lingkungan Hidup	cluster-3	112.561469	-7.50812
75	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Parawisata	cluster-3	112.439616	-7.483542
76	Satuan Polisi Pamong Praja	cluster-3	112.560777	-7.507929
77	Dinas Tenaga Kerja	cluster-3	112.560914	-7.50825
78	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	cluster-3	112.445214	-7.490768
79	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	cluster-3	112.465092	-7.496654
80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	cluster-3	112.464592	-7.496628
81	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	cluster-3	112.575241	-7.523151
82	UPT Metrologi Legal	cluster-3	112.465669	-7.496898
83	Puskesmas Gayaman	cluster-3	112.46756	-7.496813
84	GOR Mojosari	cluster-3	112.549938	-7.510779
85	BPR Majatama	cluster-3	112.435903	-7.481686
86	Polres Mojokerto	cluster-3	112.539836	-7.508592
87	Pusat Oleh-Oleh Jotangan	cluster-3	112.546696	-7.510752
88	Pasar Raya Mojosari	cluster-3	112.557954	-7.514558
89	PDAM	cluster-3	112.557311	-7.524833
90	LABKESDA	cluster-3	112.456832	-7.494183

No.	Penempatan ONT (Optical Network Termination)	Cluster	Longitude	Latitude
91	Kantor Kecamatan Bangsal	cluster-	112.4813	-7.49741
92	Kantor Kecamatan Mojosari	cluster-	112.5614	-7.5194
93	Kantor Kecamatan Pungging	cluster-	112.5682	-7.52148
94	Kantor Desa Jabon	cluster-	112.458	-7.49429
95	Kantor Desa Gayaman	cluster-	112.4705	-7.49674
96	Kantor Desa Sidomulyo	cluster-	112.4972	-7.49868
97	Kantor Desa Ngrowo	cluster-	112.5144	-7.50075
98	Kantor Desa Mojotamping	cluster-	112.5244	-7.50454
99	Kantor Desa Kebundalem	cluster-	112.5346	-7.50699
100	Kantor Desa Seduri	cluster-	112.5583	-7.51415
101	Kantor Kelurahan Wonokusumo	cluster-	112.5602	-7.51803
102	Kantor Desa Tunggal Pager	cluster-	112.57	-7.52161
103	Kantor Kelurahan Mojosari	cluster-	112.5616	-7.52084
104	Kantor Kelurahan Sarirejo	cluster-	112.561	-7.52526
105	Kantor Kelurahan Kauman	cluster-	112.5568	-7.52408
106	Kantor Kelurahan Sawahan	cluster-	112.5631	-7.52372
107	DLH_2	cluster-	112.5583	-7.51415
108	RSUD Raden Achmad Basoeni	cluster-	112.3938	-7.45629
109	Kantor Kecamatan Gedeg	cluster-	112.4236	-7.45549
110	Kantor Desa Tarusan	cluster-	112.4231	-7.45612
111	Kantor Desa Kemantren	cluster-	112.4145	-7.45454
112	RSUD Raden Achmad Basoeni	cluster-	112.3938	-7.45629
113	Pasar Rakyat Lepadangan	cluster-	112.43	-7.45722
114	Puskesmas Lepadangan	cluster-	112.4289	-7.45731
115	Diklat Kabupaten Mojokerto	cluster-	112.4232	-7.45533



23 Access Point terpasang di Pendopo Bupati

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point	
Kabupaten Mojokerto			
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type
1	Baznas		
2	Bagian Administrasi Pembangunan (Berada di Kantor Bappeda)		
3	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	4	Ubiquiti/AP AC LR (1)/ AP AC Lite (1); Ruijie AP710 (2)
4	Pendopo Bupati	1	Ubiquiti/AP AC LR
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1	Ubiquiti/AP AC LR
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
8	Bagian Kesra (Bangunan terpisah dari Kantor		
9	Bagian Hukum (Bangunan terpisah dari Kantor		
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	2	Ubiquiti/AP AC LR (1); Ruijie AP710 (1)
11	Kantor Wakil Bupati		
12	Kantor Sekda	4	Ubiquiti/AP AC LR/ Ruijie AP710 (2); AP720 (1)
13	Diskominfo (Bidang Informatika)	2	Ruijie AP 840 & AP 680 (CD)
14	Unit Layanan Pengadaan	1	Ubiquiti/AP AC LR
15	TK		
16	Panti PKK (Rumah Dinas Belakang)		
17	Command Center		Menggunakan FO-PtP (CCR-1036)
18	Bagian Humas		
19	Sekretariat DPRD	3	Ubiquiti/AP AC LR / Ruijie AP710 (2)
20	Rumah Dinas Bupati		
21	Bappeda	5	Ubiquiti/AP AC LR (1)/ AP AC Lite (1)/Ruijie AP710(2)/Ruijie AP720(1)
22	Puskesmas Kesehatan Pemda		
23	Bagian Administrasi Pemerintahan (Bangunan terpisah dari Kantor Sekda)		
24	Kantor Bupati		
25	Pos Pantau		
Total		23	



9 Access Point terpasang di OPD yang berada di Kecamatan Gedeg, Trowulan & Puri

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	Pasar Rakyat Lespadangan	1	ZTE F609				
2	Puskesmas Lespadangan	1	ZTE F609				
3	Kecamatan Gedeg	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	3	Ruijie AP720
4	Kantor Desa Tarusan	1	ZTE F609				
5	Diklat Kabupaten Mojokerto	1	ZTE F609				
6	Kantor Desa Kemantren	1	ZTE F609				
7	RSUD Raden Achmad Basoeni	1	ZTE F609				
Total		7		1		3	

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	Kantor Kecamatan Trowulan	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	3	Ruijie AP720
Total		1		1		3	

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	3	Ruijie AP720
2	BPR Majatama	0	kabel FO sudah masuk				
Total		1		1		3	



19 Access Point terpasang di OPD yang berada di Kecamatan Mojoanyar, Bangsal & Pungging

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	LABKESDA	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	1	Ruijie AP720
2	Kantor Desa Jabon	1	ZTE F609				
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	3	Ruijie AP720
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	4	Ruijie AP720
5	UPT Metrologi Legal	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	3	Ruijie AP720
6	Puskesmas Gayaman	1	ZTE F609				
7	Kantor Desa Gayaman	0	Sedang dalam Renovasi				
Total		6		4		11	

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	Kantor Kecamatan Bangsal	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	3	Ruijie AP720
2	Kantor Desa Sidomulyo	1	ZTE F609				
3	Kantor Desa Ngrowo	1	ZTE F609				
4	Kantor Desa Mojotamping	1	ZTE F609				
Total		4		1		3	

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	Kantor Kecamatan Pungging	1	ZTE F609	1	RB750 GR3	3	Ruijie AP720
2	Kantor Desa Tunggal Pager	1	ZTE F609				
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	2	ZTE F609	2	RB750 GR3	2	Ruijie AP710 (1) Ruijie AP720 (1)
Total		4		3		5	1 AP710 & 4 AP720



38 Access Point terpasang di OPD yang berada di Kecamatan Sooko

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	2	Ruijie AP720
2	Rumah Dinas Danrem	1	ZTE F609				
3	Pengadilan Negeri	1	ZTE F609				
4	Dinas Pertanian	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	4	Ruijie AP720
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	4	Ruijie AP720
6	Dinas Pendidikan	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	4	Ruijie AP720, 1 AP belum terpasang
7	Mall Pelayanan Publik	0					
8	DPRD	0					
9	Kantor Desa Sooko	1	ZTE F609				
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	2	Ruijie AP720
11	Inspektorat Daerah	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	3	Ruijie AP720
12	Kantor Desa Japan	1	ZTE F609				
13	Kejaksaan Negeri	1	ZTE F609				
14	Dinas Kesehatan	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	4	Ruijie AP720
15	Dinas Sosial	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	4	Ruijie AP720
16	Dinas Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	5	Ruijie AP720
17	Kantor Desa Jampirogo	1	ZTE F609				
18	Dinas Pangan dan Perikanan	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	2	Ruijie AP720
19	Puskesmas Sooko	1	ZTE F609				
20	Kecamatan Sooko	1	ZTE F609	1	Mikrotik/RB750GR3	4	Ruijie AP720
Total		18		11		38	



17 Access Point terpasang di OPD yang berada di Kecamatan Mojosari

Lokasi		Perangkat Modem ONT & Access Point					
Kabupaten Mojokerto		ONT		Routerboard		Access Point	
No	Nama OPD	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type	Jumlah	Merk/Type
1	Kantor Desa Kebundalem	1	ZTE F609				
2	Polres Mojokerto	1	ZTE F609	1	RB750 GR3		
3	Pusat Oleh-oleh Jotangan	1	ZTE F609	1	RB750 GR3	1	Ubiquiti/UAP Mesh Pro
4	GOR Mojosari	1	ZTE F609				
5	Dinas Lingkungan Hidup-1	1	ZTE F609	1	RB750 GR3	3	Ruijie AP710 (2) & AP720 (1)
6	Satpol PP	1	ZTE F609	1	RB750 GR3	3	Ruijie AP710
7	Disnaker	1	ZTE F609	1	RB750 GR3	2	Ruijie AP710
8	Dinas Lingkungan Hidup-2	1	ZTE F609	1	RB750 GR3	3	Ruijie AP710
9	Kantor Desa Seduri	1	ZTE F609				
10	Pasar Raya Mojosari	1	ZTE F609				
11	Kantor Kelurahan Wonokusumo	1	ZTE F609				
12	RSUD Prof. Dr. Soekandar	1	ZTE F609				
13	Kecamatan Mojosari	0	Terpasang OLT ZTE 16 Port PON			3	Ruijie AP710
14	Kantor Kelurahan Mojosari	1	ZTE F609				
15	Kantor Kelurahan Sawahan	1	ZTE F609				
16	Kantor Kelurahan Sarirejo	1	ZTE F609				
17	PDAM Tirta Dharma	1	ZTE F609	1	RB750 GR3	2	Ruijie AP720
18	Kantor Kelurahan Kauman	1	ZTE F609				
Total		17		7		17	3 Ruijie AP720 & 13 AP710



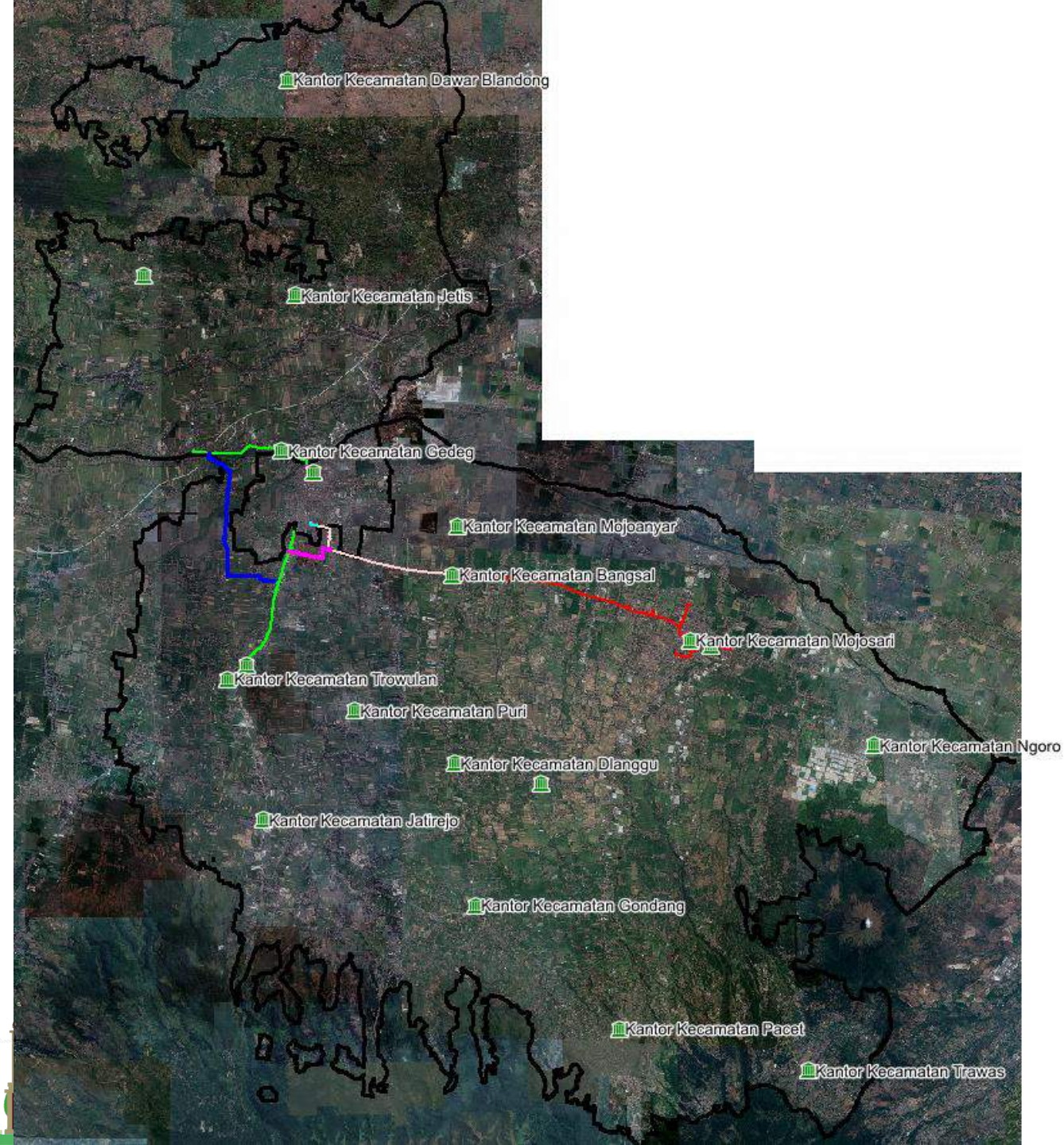
Perencanaan Jaringan Broadband ke Kecamatan

- Ideal nya koneksi broadband ke Kecamatan menggunakan jaringan FO, agar terbangun kecepatan data intranet minimal 1 Gbps ke Kecamatan. Dan dapat di upgrade ke 10G dengan penambahan Router CCR 1036 2S+ 8G di setiap Kantor Kecamatan.
- Kebutuhan 1 Gbps ke setiap Kantor Kecamatan, diperlukan karena posisi Kantor Kecamatan sebagai gateway untuk ke Kelurahan & Desa, SDN, SMPN, Puskesmas & Pasar Tradisional
- Membagi cluster penggelaran FO ke Kecamatan dalam 5 Cluster :
 - Cluster Gedeg : Jetis, Dawarblandong & Kemlagi
 - Cluster Trowulan : Puri, Dlanggu, Jatirejo & Mojoanyar
 - Cluster Mojosari : Ngoro
 - Cluster Pacet : Kutorejo, Pacet & Gondang
 - Cluster Trawas : Trawas via Kantor kec. Pacet atau Trawas via pertigaan Desa Pandanarum



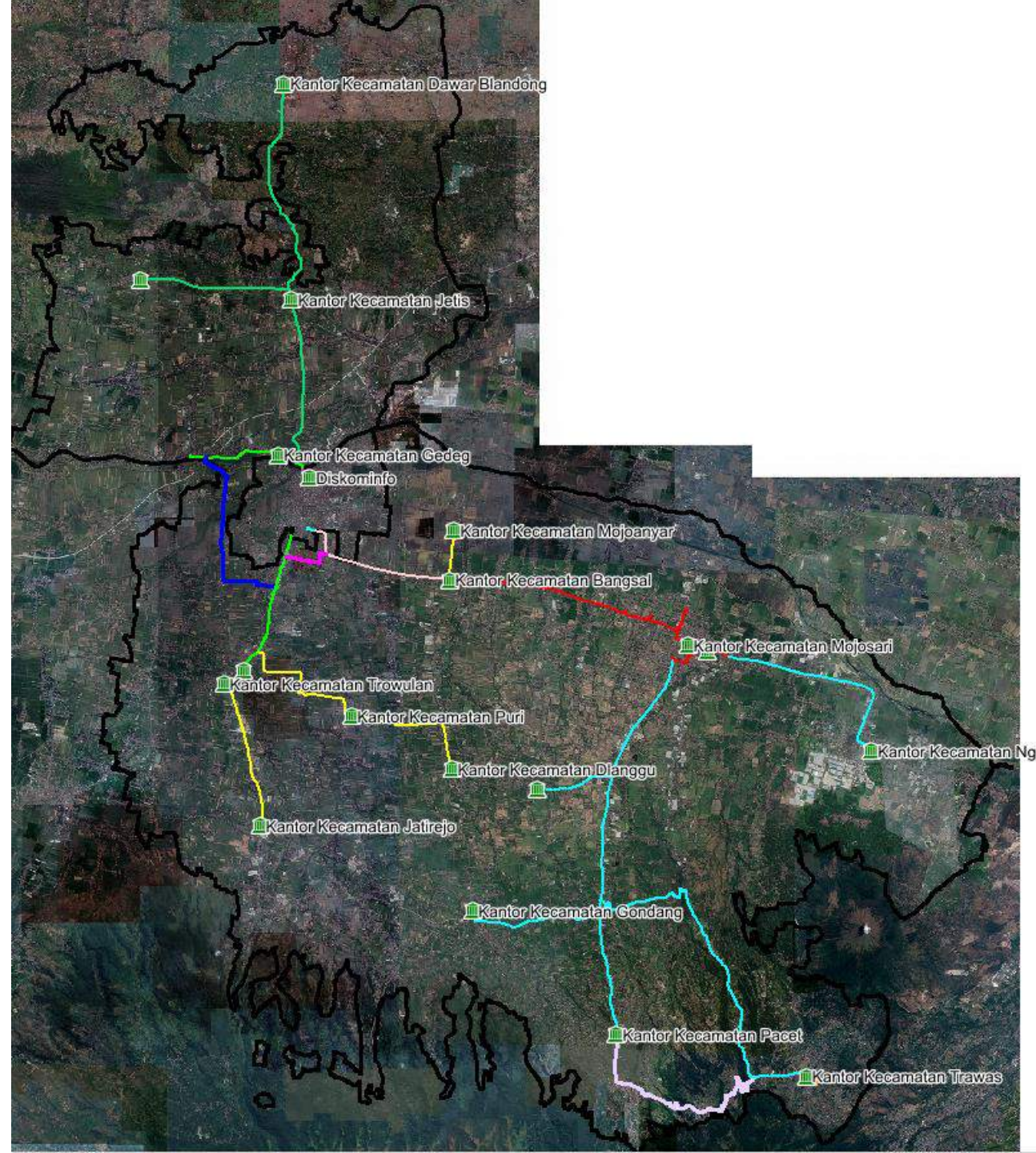
Mapping Kecamatan

Name	Lat	Long
Kantor Kecamatan Bangsal	-7.49741	112.481
Kantor Kecamatan Dawar Blandong	-7.33039	112.425
Kantor Kecamatan Dlanggu	-7.56102	112.482
Kantor Kecamatan Gedeg	-7.45549	112.424
Kantor Kecamatan Gondang	-7.6088	112.489
Kantor Kecamatan Jatirejo	-7.58003	112.417
Kantor Kecamatan Jetis	-7.40303	112.428
Kantor Kecamatan Kemlagi	-7.39639	112.377
Kantor Kecamatan Kutorejo	-7.56778	112.511
Kantor Kecamatan Mojoanyar	-7.48084	112.483
Kantor Kecamatan Mojosari	-7.5194	112.561
Kantor Kecamatan Ngoro	-7.55489	112.623
Kantor Kecamatan Pacet	-7.6505	112.537
Kantor Kecamatan Pungging	-7.52148	112.568
Kantor Kecamatan Puri	-7.54322	112.448
Kantor Kecamatan Trawas	-7.66456	112.601
Kantor Kecamatan Trowulan	-7.55303	112.378
Kantor Kecamatan Sooko	-7.5278	112.412



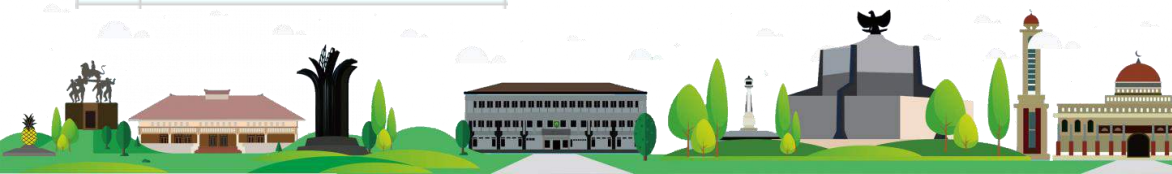
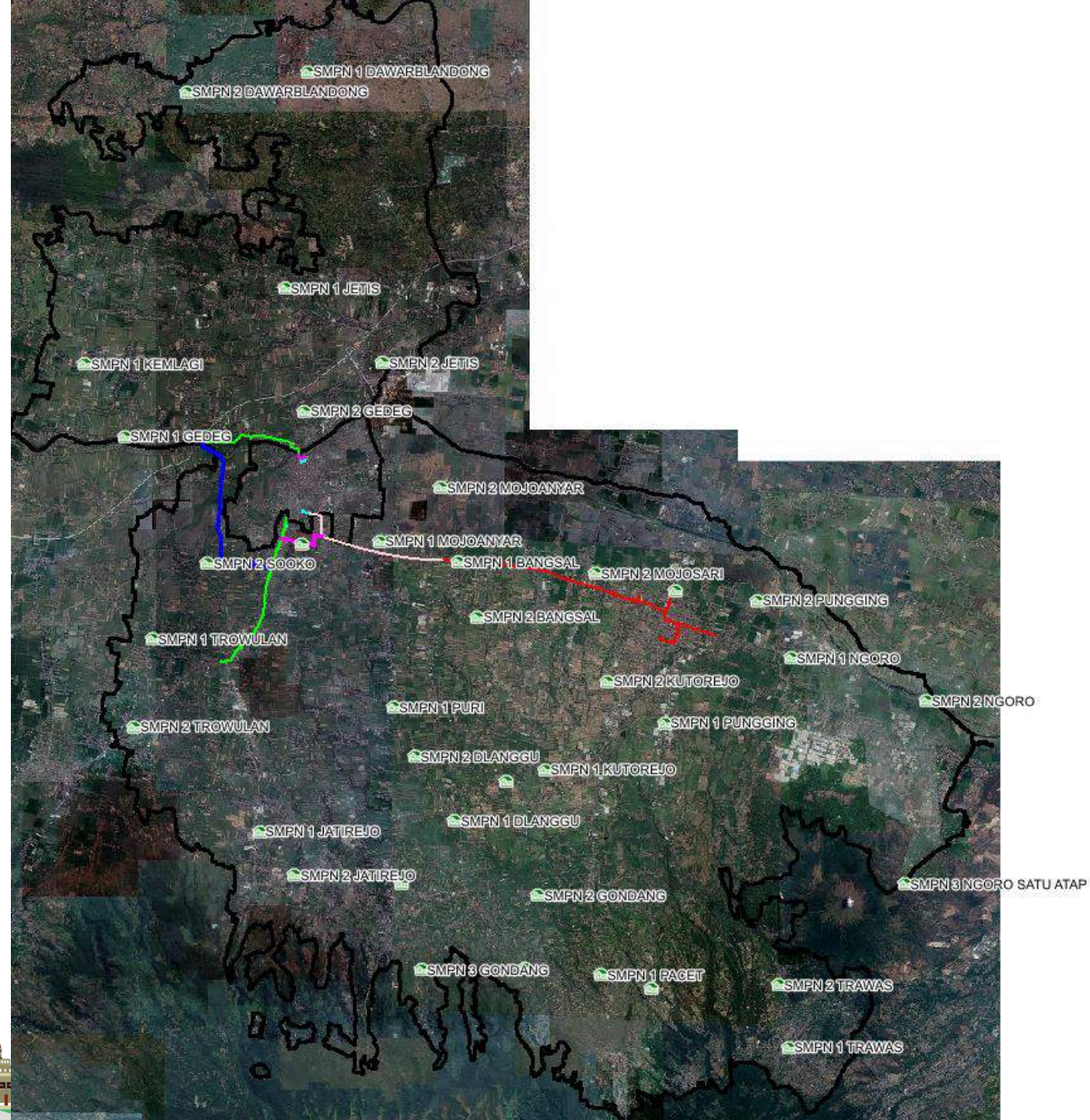
Plan FO ke Seluruh Kantor Kecamatan

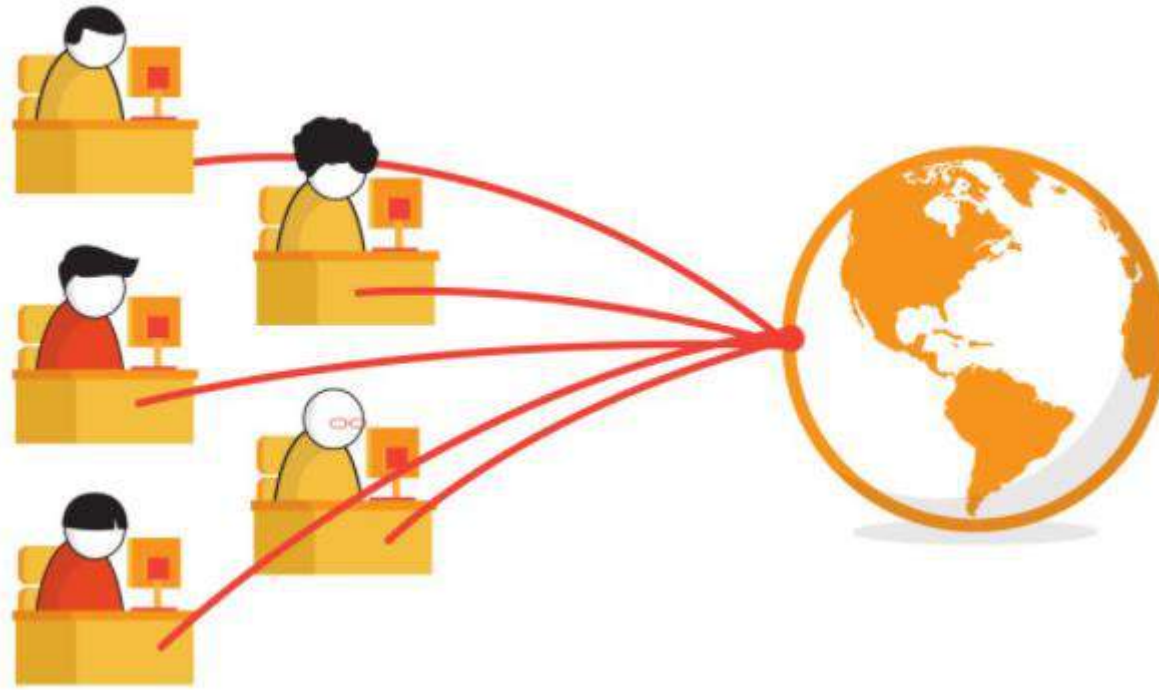
No	Cluster	Kecamatan	Panjang Kabel FO (meter)
1	Cluster Gedeg	Kec. Jetis, Kemlagi & DawarBlandong	25,000
2	Cluster Trowulan	Kec. Puri, Dlanggu, Jatirejo & Mojoanyar	22,000
3	Cluster Mojosari	Kec. Ngoro	10,000
4	Cluster Pacet	Kutorejo, Gondang & Pacet	28,000
5	Cluster Trawas	Kec. Trawas via Kantor Kec. Pacet	15,000
Total Kebutuhan Kabel FO (meter)			100,000



Mapping SMPN

No	Nama_SMP
1	SMPN 1 JATIREJO
2	SMPN 2 JATIREJO
3	SMPN 1 GONDANG
4	SMPN 2 GONDANG
5	SMPN 3 GONDANG
6	SMPN 1 PACET
7	SMPN 2 PACET
8	SMPN 3 PACET
9	SMPN 1 TRAWAS
10	SMPN 2 TRAWAS
11	SMPN 1 NGORO
12	SMPN 2 NGORO
13	SMPN 3 NGORO SATU ATAP
14	SMPN 1 PUNGGING
15	SMPN 2 PUNGGING
16	SMPN 1 KUTOREJO
17	SMPN 2 KUTOREJO
18	SMPN 3 KUTOREJO
19	SMPN 1 MOJOSARI
20	SMPN 2 MOJOSARI
21	SMPN 1 BANGSAL
22	SMPN 2 BANGSAL
23	SMPN 1 MOJOANYAR
24	SMPN 2 MOJOANYAR
25	SMPN 1 DLANGGU
26	SMPN 2 DLANGGU
27	SMPN 1 PURI
28	SMPN 1 TROWULAN
29	SMPN 2 TROWULAN
30	SMPN 1 SOOKO
31	SMPN 2 SOOKO
32	SMPN 1 GEDEG
33	SMPN 2 GEDEG
34	SMPN 1 KEMLAGI
35	SMPN 1 JETIS
36	SMPN 2 JETIS
37	SMPN 1 DAWARBLANDONG
38	SMPN 2 DAWARBLANDONG





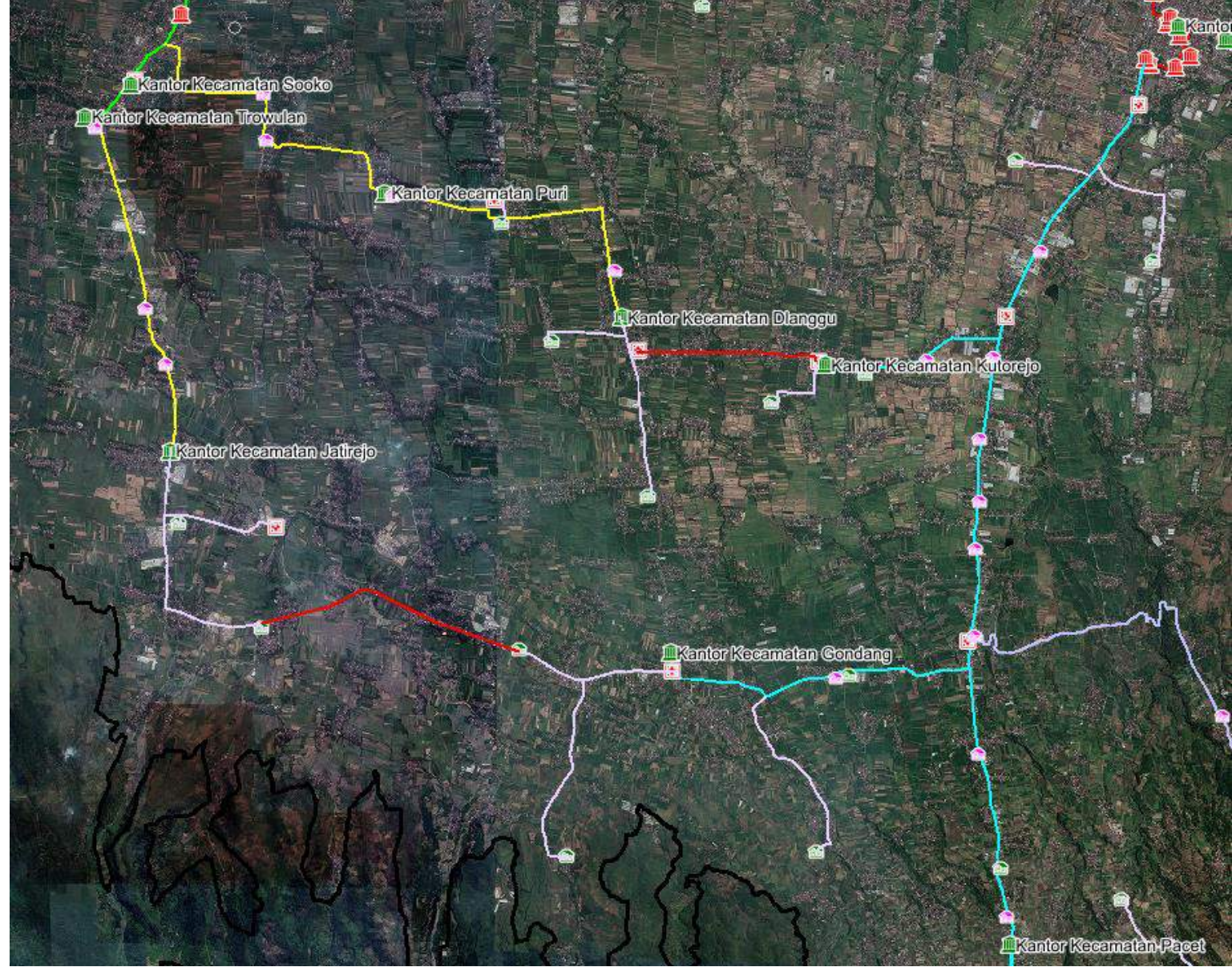
Backup Broadband Network

FO-Backup & Radio Broadband PtP



FO-Ring

- Menghubungkan Kecamatan Jatirejo ke Kecamatan Gondang sepanjang 6 km
- Menghubungkan Kecamatan Dlanggu ke Kecamatan Kutorejo





Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

- Penjelasan IKK Output:

IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

IKK Output :

- 2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo.

Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sebanyak 57 Perangkat Daerah melalui koneksi fiber optik Indosat dengan kapasitas *bandwith* 1,5 gbps dan Indihome Telkom (*up to*) dengan kapasitas *bandwith up to* 20 mbps.

Data pendukung :

- Screenshot penggunaan bandwidth opd di kabupaten mojokerto (terlampir)
- Screenshot traffic bandwidth main router diskominfo kab. Mojokerto Tahun 2021 (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

[INDOSAT] Average & Peak Interface Utilization - Last Month



Summary of Orion Objects: **All Nodes**

Summary of Time Periods: **Last Month (Dec 1 - Dec 31, 2021)**

Average & Peak bps Interface Utilization for All Nodes from Last Month (Dec 1 - Dec 31, 2021)

Ordered by: Node Name - Ascending then by Interface Name - Ascending then by Timestamp - Ascending

INTERFACE NAME	TIMESTAMP	AVERAGE RECEIVE BPS	PEAK RECEIVE BPS	AVERAGE TRANSMIT BPS	PEAK TRANSMIT BPS
BLI-DPS-SW-DATACENTER#					
Alcatel-Lucent 1/22	December 2021	223.10 bps	26.63 Kbps	1.79 Kbps	1.07 Mbps
SBY-MOJOKERTO-ME					
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	December 2021	36.15 Mbps	299.79 Mbps	226.78 Mbps	921.86 Mbps

Average & Peak bps Interface Utilization for All Nodes from Last Month (Dec 1 - Dec 31, 2021)

Ordered by: Node Name - Ascending then by Interface Name - Ascending then by Timestamp - Ascending

INTERFACE NAME	TIMESTAMP	AVERAGE RECEIVE BPS	PEAK RECEIVE BPS	AVERAGE TRANSMIT BPS	PEAK TRANSMIT BPS
BLI-DPS-SW-DATACENTER#					
Alcatel-Lucent 1/22	12/1/2021	243.92 bps	19.52 Kbps	5.40 Kbps	704.32 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/2/2021	361.78 bps	25.67 Kbps	9.92 Kbps	784.87 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/3/2021	209.38 bps	12.42 Kbps	1.19 Kbps	85.44 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/4/2021	211.73 bps	12.23 Kbps	888.74 bps	59.81 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/5/2021	200.95 bps	11.71 Kbps	1.24 Kbps	88.31 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/6/2021	194.70 bps	11.63 Kbps	1.22 Kbps	88.41 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/7/2021	223.02 bps	12.15 Kbps	1.15 Kbps	81.56 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/8/2021	209.41 bps	12.61 Kbps	2.46 Kbps	193.95 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/9/2021	218.79 bps	11.16 Kbps	1.10 Kbps	86.16 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/10/2021	288.31 bps	26.63 Kbps	6.86 Kbps	1.07 Mbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/11/2021	220.36 bps	11.61 Kbps	1.04 Kbps	74.25 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/12/2021	203.04 bps	11.15 Kbps	1.15 Kbps	82.94 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/13/2021	256.14 bps	12.63 Kbps	1.22 Kbps	83.95 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/14/2021	226.37 bps	15.02 Kbps	1.26 Kbps	99.07 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/15/2021	199.59 bps	12.02 Kbps	1.41 Kbps	107.67 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/16/2021	263.11 bps	12.13 Kbps	2.14 Kbps	210.17 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/17/2021	205.96 bps	12.48 Kbps	1.16 Kbps	82.98 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/18/2021	220.56 bps	10.80 Kbps	902.40 bps	67.31 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/19/2021	218.67 bps	13.47 Kbps	1.80 Kbps	137.14 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/20/2021	241.99 bps	12.42 Kbps	1.34 Kbps	108.07 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/21/2021	202.19 bps	11.35 Kbps	878.87 bps	70.89 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/22/2021	209.58 bps	11.97 Kbps	977.52 bps	82.88 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/23/2021	198.87 bps	12.28 Kbps	903.13 bps	72.57 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/24/2021	177.29 bps	13.22 Kbps	601.54 bps	49.70 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/25/2021	220.71 bps	12.51 Kbps	1.26 Kbps	101.55 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/26/2021	194.00 bps	11.24 Kbps	758.25 bps	53.56 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/27/2021	290.53 bps	13.09 Kbps	1.33 Kbps	92.06 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/28/2021	208.52 bps	12.88 Kbps	872.87 bps	64.89 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/29/2021	192.28 bps	10.54 Kbps	872.09 bps	64.81 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/30/2021	194.06 bps	11.34 Kbps	1.07 Kbps	76.43 Kbps
Alcatel-Lucent 1/22	12/31/2021	210.28 bps	12.21 Kbps	1.10 Kbps	76.44 Kbps
SBY-MOJOKERTO-ME					
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/1/2021	52.53 Mbps	103.37 Mbps	261.04 Mbps	532.13 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/2/2021	51.64 Mbps	96.29 Mbps	243.92 Mbps	618.78 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/3/2021	39.54 Mbps	171.92 Mbps	226.08 Mbps	457.87 Mbps

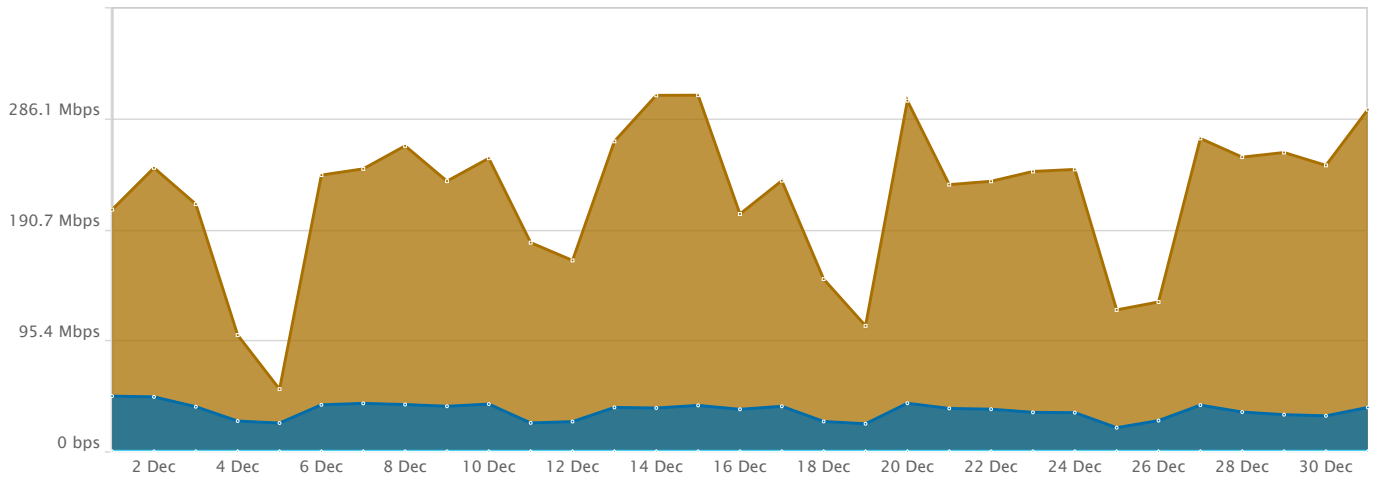
INTERFACE NAME	TIMESTAMP	AVERAGE RECEIVE BPS	PEAK RECEIVE BPS	AVERAGE TRANSMIT BPS	PEAK TRANSMIT BPS
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/4/2021	28.88 Mbps	54.28 Mbps	111.07 Mbps	423.15 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/5/2021	26.08 Mbps	39.49 Mbps	65.68 Mbps	377.07 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/6/2021	41.13 Mbps	92.96 Mbps	238.82 Mbps	772.97 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/7/2021	42.94 Mbps	97.09 Mbps	254.15 Mbps	582.82 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/8/2021	41.66 Mbps	83.74 Mbps	274.20 Mbps	743.58 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/9/2021	40.71 Mbps	77.75 Mbps	242.86 Mbps	599.62 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/10/2021	44.27 Mbps	96.88 Mbps	261.31 Mbps	595.37 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/11/2021	25.54 Mbps	40.58 Mbps	182.21 Mbps	464.60 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/12/2021	26.72 Mbps	46.15 Mbps	175.50 Mbps	478.40 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/13/2021	39.93 Mbps	91.60 Mbps	288.64 Mbps	621.78 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/14/2021	39.03 Mbps	78.91 Mbps	309.43 Mbps	687.13 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/15/2021	38.12 Mbps	87.19 Mbps	322.56 Mbps	709.35 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/16/2021	37.96 Mbps	94.88 Mbps	212.12 Mbps	599.94 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/17/2021	41.77 Mbps	116.26 Mbps	245.83 Mbps	725.21 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/18/2021	27.79 Mbps	52.21 Mbps	156.05 Mbps	510.70 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/19/2021	23.50 Mbps	53.80 Mbps	114.01 Mbps	487.29 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/20/2021	42.33 Mbps	89.31 Mbps	291.38 Mbps	764.16 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/21/2021	35.44 Mbps	94.16 Mbps	236.52 Mbps	691.32 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/22/2021	37.46 Mbps	95.63 Mbps	243.32 Mbps	599.94 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/23/2021	36.78 Mbps	90.76 Mbps	253.15 Mbps	740.56 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/24/2021	34.50 Mbps	98.01 Mbps	247.56 Mbps	921.86 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/25/2021	22.80 Mbps	44.65 Mbps	126.23 Mbps	502.98 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/26/2021	24.26 Mbps	87.05 Mbps	133.94 Mbps	430.22 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/27/2021	44.19 Mbps	140.71 Mbps	282.68 Mbps	691.38 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/28/2021	35.33 Mbps	98.22 Mbps	268.69 Mbps	815.78 Mbps

INTERFACE NAME	TIMESTAMP	AVERAGE RECEIVE BPS	PEAK RECEIVE BPS	AVERAGE TRANSMIT BPS	PEAK TRANSMIT BPS
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/29/2021	34.13 Mbps	86.96 Mbps	266.02 Mbps	615.31 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/30/2021	31.29 Mbps	96.25 Mbps	257.81 Mbps	617.22 Mbps
5/2/5, 10-Gig Ethernet, "rsrvd for DISKOMINFO MOJOKERTO"	12/31/2021	32.56 Mbps	299.79 Mbps	238.32 Mbps	586.57 Mbps

Average Interface Utilization for All Nodes from Last Month (Dec 1 - Dec 31, 2021)

Average Interface Utilization

Dec 1 2021, 12:00 am - Dec 31 2021, 12:00 am



- Average Receive bps SBY-MOJOKERTO-ME - Port 5/2/5 · IDIA AP-LA MJK 190462
- Average Receive bps BLI-DPS-SW-DATACENTER# - Port 1/22 · IDIA KMNFO KUT 210016
- Average Transmit bps SBY-MOJOKERTO-ME - Port 5/2/5 · IDIA AP-LA MJK 190462
- Average Transmit bps BLI-DPS-SW-DATACENTER# - Port 1/22 · IDIA KMNFO KUT 210016

Created on 1/13/2022, © SolarWinds Worldwide, LLC. All Rights Reserved.



Lampiran Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Screenshot penggunaan *bandwidth* opd di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

#	Name	Upload Max Limit	Download Max Limit	Total Download	Upload	Download
32	Adm-Keres	500M	500M	7.2 GB 537.3 kbps	0.2 Mbits	4.2 Mbits
59	Adm-Pembangunan	500M	500M	4337.1 MB 343.9 kbps	10.2 Mbits	10.2 Mbits
79	Adm-Pemerintahan	500M	500M	486.7 MB 39.5 kbps	673.3 kbps	15.5 kbps
74	Adm-Pembangunan	500M	500M	2659.5 MB 2.3 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
30	Astasi-Pemerintahan	500M	500M	175.2 MB 12.4 kbps	548.7 kbps	0.0 kbps
67	Astasi-Pemerintahan	500M	500M	20.2 MB 0.0 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
63	Astasi-Umum	500M	500M	484.7 MB 15.3 kbps	2.3 kbps	0.0 kbps
19	BACKUP LPSE	30M	30M	812.0 MB 224.0 kbps	224.0 kbps	0.0 kbps
36	BAPPEDA 1	500M	500M	17.5 GB 493.1 kbps	9.2 Mbits	0.0 kbps
37	BAPPEDA 2	500M	500M	9.5 GB 327.8 kbps	3.3 Mbits	0.0 kbps
62	BAPPEDA 1	500M	500M	1908.1 MB 109.9 kbps	50.7 kbps	0.0 kbps
61	BAPPEDA 2	500M	500M	9.0 GB 482.3 kbps	8.7 Mbits	0.0 kbps
31	BANASE	500M	500M	0.0 GB 0.0 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
16	BAPESDM	500M	500M	22.5 GB 102.1 kbps	14.3 Mbits	0.0 kbps
57	BAPESDM 2	500M	500M	4.8 GB 400.0 kbps	509.7 kbps	0.0 kbps
75	BAPESDM Bridge	500M	500M	0.0 GB 0.0 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
21	BP Lempadangan	500M	500M	1085.1 MB 39.2 kbps	53.5 kbps	0.0 kbps
126	BPKD	500M	500M	23.3 GB 206.0 kbps	1200.0 kbps	0.0 kbps
1	BPKAD	500M	500M	2889.9 MB 356.6 kbps	16.8 Mbits	0.0 kbps
52	BPKAD 2	500M	500M	2659.4 MB 16.1 kbps	25.2 kbps	0.0 kbps
51	BPKAD 1	500M	500M	1984.0 MB 441.3 kbps	1002.4 kbps	0.0 kbps
107	BPPM Mekarjaya	500M	500M	3921.9 MB 111.2 kbps	2.3 kbps	0.0 kbps
47	Beg. Umum	500M	500M	0.0 GB 0.0 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
49	Bekembangdi	500M	500M	5.2 GB 321.9 kbps	1919.5 kbps	0.0 kbps
12	Bekembangdi	500M	500M	0.0 GB 0.0 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
15	Bekembangdi	500M	500M	0.0 GB 0.0 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
77	CNPS	unlimited	unlimited	0.0 GB 0.0 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
43	CNPS Isidari	500M	500M	0.0 GB 0.0 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
42	CNPS Uluhe	500M	500M	0.0 GB 0.0 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
79	DLH 1	500M	500M	10.7 GB 1273.5 kbps	17.7 Mbits	0.0 kbps
84	DLH 2	500M	500M	11.5 GB 740.6 kbps	8.1 Mbits	0.0 kbps
115	DPD&P2	500M	500M	12.0 GB 410.6 kbps	4.4 Mbits	0.0 kbps
95	DPD&P 1	500M	500M	1688.4 MB 295.3 kbps	1.1 Mbits	0.0 kbps
60	DPD&P 2	500M	500M	3361.4 MB 476.4 kbps	11.5 Mbits	0.0 kbps
109	DPD&P 1	500M	500M	16.0 GB 580.4 kbps	19.8 Mbits	0.0 kbps
140	DPD&P 1	500M	500M	4314.6 MB 2.8 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
141	DPD&P 2	500M	500M	56.1 MB 23.5 kbps	23.0 kbps	0.0 kbps
132	DPUPR	500M	500M	20.9 GB 500.1 kbps	8.1 Mbits	0.0 kbps
16	Desa Panggajene	500M	500M	0.0 GB 0.0 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
128	Desa Jabon	500M	500M	6.9 GB 8.0 kbps	30.2 kbps	0.0 kbps
136	Desa Jambongan	500M	500M	6.9 GB 293.0 kbps	11.3 Mbits	0.0 kbps
129	Desa Japen	500M	500M	0.0 GB 0.0 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
88	Desa Kebundalem	500M	500M	16.1 GB 50.4 kbps	123.2 kbps	0.0 kbps
138	Desa Kemantren	500M	500M	16.0 GB 10.9 kbps	180 kbps	0.0 kbps
139	Desa Kertanegara Flame	500M	500M	16.0 GB 21.0 kbps	213.3 kbps	0.0 kbps
87	Desa Moutanegara	500M	500M	4395.5 MB 17.0 kbps	637.8 kbps	0.0 kbps

#	Name	Upload Max Limit	Download Max Limit	Total Download	Upload	Download
198	Desa Kertanegara Flame	500M	500M	16.0 GB 39.1 kbps	2.2 Mbits	0.0 kbps
62	Desa Mekarjaya	500M	500M	4396.9 MB 85.3 kbps	672.2 kbps	0.0 kbps
51	Desa Ngirawan	500M	500M	12.4 GB 3.4 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
100	Desa Sedulur	500M	500M	0.0 GB 0.0 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
81	Desa Selamkulam	500M	500M	9.2 MB 0.0 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
142	Desa Sembelangan Nulung	500M	500M	104.8 GB 0.0 kbps	0.0 kbps	0.0 kbps
133	Desa Sooko	500M	500M	3716.9 MB 120.0 kbps	544 kbps	0.0 kbps
103	Desa Tegal	500M	500M	374.4 MB 1003.0 kbps	3.2 kbps	0.0 kbps
86	Desa Turugalwager	500M	500M	8.2 GB 245.2 kbps	43.0 kbps	0.0 kbps
110	Desa Pambidikan	500M	500M	19.7 GB 200.7 kbps	3.0 Mbits	0.0 kbps
108	Desa	500M	500M	46.0 GB 995.3 kbps	38.8 Mbits	0.0 kbps
109	Desa	500M	500M	5.6 GB 493.2 kbps	941.3 kbps	0.0 kbps
114	Dedaklapan	500M	500M	11.9 GB 3.0 kbps	6.6 Mbits	0.0 kbps
94	Duhub 2	500M	500M	18.0 GB 130.6 kbps	4.9 Mbits	0.0 kbps
121	Dukuhmulyo Barat	500M	500M	41.3 GB 301.0 kbps	27.0 Mbits	0.0 kbps
63	Dukuhmulyo	500M	500M	8.2 GB 295.3 kbps	6.7 Mbits	0.0 kbps
5	Duraker	500M	500M	12.0 GB 414.7 kbps	17.1 Mbits	0.0 kbps
120	Dyapan	500M	500M	8.3 GB 107.3 kbps	1780.7 kbps	0.0 kbps
123	Dyapanegara	500M	500M	9.2 GB 1152.8 kbps	41.1 Mbits	0.0 kbps
122	Dyapanegara	500M	500M	20.9 GB 741.3 kbps	14.1 Mbits	0.0 kbps
127	Dyapuh	500M	500M	6.5 GB 760.4 kbps	24.1 Mbits	0.0 kbps
19	Dyapanegara	500M	500M	9.1 GB 1201.0 kbps	22.4 Mbits	0.0 kbps
95	GOR	500M	500M	13.4 GB 35.2 kbps	1121.3 kbps	0.0 kbps
104	Gending Diklat	500M	500M	2612.0 MB 38.9 kbps	1109.5 kbps	0.0 kbps
9	Hakum	500M	500M	782.0 MB 10.2 kbps	35.9 kbps	0.0 kbps
56	Hakum 2	500M	500M	5.3 GB 143.7 kbps	3.0 Mbits	0.0 kbps
65	Hakum 1 1	500M	500M	1944.3 MB 34.6 kbps	740.2 kbps	0.0 kbps
61	Hakum 1 2	500M	500M	8.0 GB 114.1 kbps	63.7 kbps	0.0 kbps
114	Impakom	500M	500M	18.7 GB 165.6 kbps	586.2 kbps	0.0 kbps
124	Kec. Bangsal	500M	500M	21.4 GB 34.6 kbps	3.5 Mbits	0.0 kbps
41	Kec. Chongoi	500M	500M	8.7 GB 132.3 kbps	8.8 Mbits	0.0 kbps
102	Kec. Gedeg	500M	500M	5.4 GB 261.5 kbps	7.8 Mbits	0.0 kbps
35	Kec. Janyan	500M	500M	17.1 GB 63.2 kbps	195.1 kbps	0.0 kbps
80	Kec. Noyanegara	500M	500M	10.7 GB 92.1 kbps	70.0 kbps	0.0 kbps
2	Kec. Mojokerto	500M	500M	10.6 GB 453.2 kbps	3.1 Mbits	0.0 kbps
99	Kec. Pungging	500M	500M	14.0 GB 54.3 kbps	440.2 kbps	0.0 kbps
40	Kec. Puri	500M	500M	8.7 GB 790.0 kbps	20.0 Mbits	0.0 kbps
117	Kec. Soko	500M	500M	15.0 GB 294.5 kbps	8.3 Mbits	0.0 kbps
119	Kec. Toulaman	500M	500M	39.5 GB 410.4 kbps	9.1 Mbits	0.0 kbps
96	Kel. Kauman	500M	500M	10.0 GB 34.1 kbps	2.3 Mbits	0.0 kbps
89	Kel. Mijanan	500M	500M	8.7 GB 144.7 kbps	1703 kbps	0.0 kbps
83	Kel. Satrian	500M	500M	2411.8 MB 0.0 kbps	1109 kbps	0.0 kbps
86	Kel. Sawahan	500M	500M	573.9 MB 160.2 kbps	1432 kbps	0.0 kbps
98	Kel. Wonorejo	500M	500M	2299.0 MB 9.7 kbps	54.9 kbps	0.0 kbps
14	Kedungjati	500M	500M	743.9 MB 2.4 kbps	32.4 kbps	0.0 kbps
4	Kel. PTP	500M	500M	131.0 GB 6.8 Mbits	1620.3 kbps	0.0 kbps



Lampiran Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

#	Name	Upload Max Limit	Download Max Limit	Total Download	Upload	Download
23	REG_2PPPoE	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
73	Opusman	500M	500M	1013.8 MB 1984bps	0 bps	3.8 Mbps
87	PDAM	500M	500M	16.2 GB 553.5 kbps	0 bps	11.7 Mbps
72	PKK	500M	500M	363.8 MB 29.4 kbps	0 bps	1040.4 kbps
50	Pasar Lingsidangan	500M	500M	19.7 GB 377.2 kbps	0 bps	39.8 Mbps
85	Pasar Mojolan	500M	500M	2093.1 MB 675.4 kbps	0 bps	21.8 Mbps
8	Pendopo	500M	500M	1037.4 MB 0 bps	0 bps	0 bps
70	Pendopo 2	500M	500M	9.1 GB 278bps	0 bps	3.8 Mbps
64	Peneruku	500M	500M	1206.2 MB 23.5 kbps	0 bps	745.5 kbps
13	Pemungutan	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
39	Pemungutan 2	500M	500M	526.7 MB 263.9 kbps	0 bps	3.1 Mbps
26	Pis 1 Suptol	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
20	Pis 2 Suptol	500M	500M	5.2 GB 0 bps	0 bps	2.1 kbps
87	Pusat Clew-veh	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
125	Puskesmas Geyaman	500M	500M	5.6 GB 214.7 kbps	0 bps	2.8 Mbps
101	Puskesmas Lingsidangan	500M	500M	2426.7 MB 647.7 kbps	0 bps	12.6 Mbps
118	Puskesmas Sokol	500M	500M	2169.3 MB 74.8 kbps	0 bps	237.2 kbps
106	RADIO TA Bawean	500M	500M	15.5 GB 38.9 kbps	0 bps	69.4 kbps
71	Ruang Apelan	500M	500M	618.6 MB 542bps	0 bps	3.9 kbps
66	Ruang Bpwt	500M	500M	336.8 MB 0 bps	0 bps	626 bps
40	Ruang Koba Bpwt	500M	500M	471.5 MB 652bps	0 bps	195 bps
69	Ruang Ruang Asisten	500M	500M	4626.3 MB 131.4 kbps	0 bps	104.8 kbps
68	Ruang Ruang DBK	500M	500M	4.9 GB 37.5 kbps	0 bps	84.5 kbps
34	Ruang Sehidu	500M	500M	2021.9 MB 3.9 kbps	0 bps	1805 bps
65	Ruang Waku	500M	500M	1645.4 MB 327 kbps	0 bps	185 bps
33	Rumah Tangga	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
76	Suptol PP	500M	500M	15.3 GB 1675 kbps	0 bps	11.2 Mbps
11	Selwan 1	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
30	Selwan 1.1	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
46	Selwan 1.2	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
27	Staf Ais 2	500M	500M	8.4 GB 0 bps	0 bps	0 kbps
3	Staf Ais	500M	500M	1050.2 MB 0 bps	0 bps	0 bps
17	TEST_BW	unlimited	unlimited	0 B	0 bps	0 bps
22	TK Partes	500M	500M	489.8 MB 0 bps	0 bps	0 bps
4	Turneting	128k	128k	2.76 B 0 bps	0 bps	0 bps
0	Un-1	20M	20M	0 B	0 bps	0 bps
76	radio AP	unlimited	unlimited	0 B	0 bps	0 bps
15	128k	128k	128k	0 B	0 bps	0 bps
23	Back Up Link Soko	500M	500M	29.9 GB 0 bps	0 bps	0 bps
106	Widhayan	500M	500M	3322.2 MB 170.2 kbps	0 bps	1881.5 kbps
49	zphom	500M	500M	14.5 GB 975.2 kbps	0 bps	13.8 Mbps
130	zphom	500M	500M	33.1 GB 446.5 kbps	0 bps	3.8 Mbps
111	zPengadilan Negeri	500M	500M	3.2 GB 229.9 kbps	0 bps	1919.0 kbps
93	zPhoma Mojokerto	500M	500M	141.9 GB 173.4 kbps	0 bps	6.5 Mbps
112	zPundin Camer	50M	50M	3371.1 MB 0 bps	0 bps	0 bps
24	zPundin Seida	500M	500M	5.4 GB 477bps	0 bps	371 bps

#	Name	Upload Max Limit	Download Max Limit	Total Download	Upload	Download
14	Bandung	500M	500M	744.3 MB 23.1 Mbps	0 bps	22.1 Mbps
6	LARI POE	500M	500M	131.5 GB 4.1 Mbps	0 bps	45.5 Mbps
131	Lubukwatu	500M	500M	3942.4 MB 0 bps	0 bps	0 bps
34	Lobby 1.1	500M	500M	4626.3 MB 50.3 kbps	0 bps	2.3 Mbps
44	Lobby 1.2	500M	500M	3362.1 MB 55.4 kbps	0 bps	5.7 Mbps
18	MAIL_SERVER	20M	20M	88.5 MB 5.4 kbps	0 bps	5.5 kbps
134	Melodip	500M	500M	15.6 GB 251.7 kbps	0 bps	1690.2 kbps
25	REG_2PPPoE	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
73	Opusman	500M	500M	1013.8 MB 27.5 kbps	0 bps	63.5 kbps
87	PDAM	500M	500M	16.2 GB 71.6 kbps	0 bps	13.8 Mbps
72	PKK	500M	500M	362.5 MB 28.1 kbps	0 bps	1005.4 kbps
50	Pasar Lingsidangan	500M	500M	19.7 GB 188.3 kbps	0 bps	2.7 Mbps
85	Pasar Mojolan	500M	500M	2091.0 MB 609.4 kbps	0 bps	37.4 Mbps
8	Pendopo	500M	500M	1037.4 MB 0 bps	0 bps	0 bps
70	Pendopo 2	500M	500M	9.1 GB 9.3 kbps	0 bps	6.9 kbps
64	Peneruku	500M	500M	1206.2 MB 23.5 kbps	0 bps	379.4 kbps
13	Pemungutan	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
39	Pemungutan 2	500M	500M	526.7 MB 61.4 kbps	0 bps	31.4 kbps
26	Pis 1 Suptol	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
20	Pis 2 Suptol	500M	500M	5.2 GB 0 bps	0 bps	0 bps
87	Pusat Clew-veh	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
125	Puskesmas Geyaman	500M	500M	5.6 GB 671.7 kbps	0 bps	130.3 kbps
101	Puskesmas Lingsidangan	500M	500M	2426.4 MB 969.9 kbps	0 bps	19.5 Mbps
118	Puskesmas Sokol	500M	500M	2169.3 MB 50.2 kbps	0 bps	471.7 kbps
106	RADIO TA Bawean	500M	500M	15.5 GB 1802bps	0 bps	2.8 kbps
71	Ruang Apelan	500M	500M	613.6 MB 16.3 kbps	0 bps	171.3 kbps
66	Ruang Bpwt	500M	500M	336.8 MB 0 bps	0 bps	1940 bps
40	Ruang Koba Bpwt	500M	500M	471.5 MB 0 bps	0 bps	194 bps
69	Ruang Ruang Asisten	500M	500M	4626.3 MB 130.2 kbps	0 bps	307.3 kbps
68	Ruang Ruang DBK	500M	500M	4.9 GB 115.7 kbps	0 bps	180.3 kbps
34	Ruang Sehidu	500M	500M	2021.9 MB 1350 bps	0 bps	1072 bps
65	Ruang Waku	500M	500M	1645.4 MB 0 bps	0 bps	0 bps
33	Rumah Tangga	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
76	Suptol PP	500M	500M	15.3 GB 1620.7 kbps	0 bps	329.9 kbps
11	Selwan 1	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
30	Selwan 1.1	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
46	Selwan 1.2	500M	500M	0 B	0 bps	0 bps
27	Staf Ais 2	500M	500M	8.4 GB 0 bps	0 bps	0 bps
3	Staf Ais	500M	500M	1050.2 MB 0 bps	0 bps	0 bps
17	TEST_BW	unlimited	unlimited	0 B	0 bps	0 bps
22	TK Partes	500M	500M	489.8 MB 0 bps	0 bps	0 bps
4	Turneting	128k	128k	2.76 B 0 bps	0 bps	0 bps
0	Un-1	20M	20M	0 B	0 bps	0 bps
76	radio AP	unlimited	unlimited	0 B	0 bps	0 bps
15	128k	128k	128k	0 B	0 bps	0 bps
23	Back Up Link Soko	500M	500M	29.9 GB 42.1 kbps	0 bps	69.5 kbps
106	Widhayan	500M	500M	3315.0 MB 151.8 kbps	0 bps	6.5 Mbps



- **Penjelasan IKK Output:**

IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

IKK Output :

- 3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah.

Telah tersedia sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo Kab.Mojokerto (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah.

Data pendukung :

- Screenshot Aplikasi Dashboard Kabupaten Mojokerto (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc

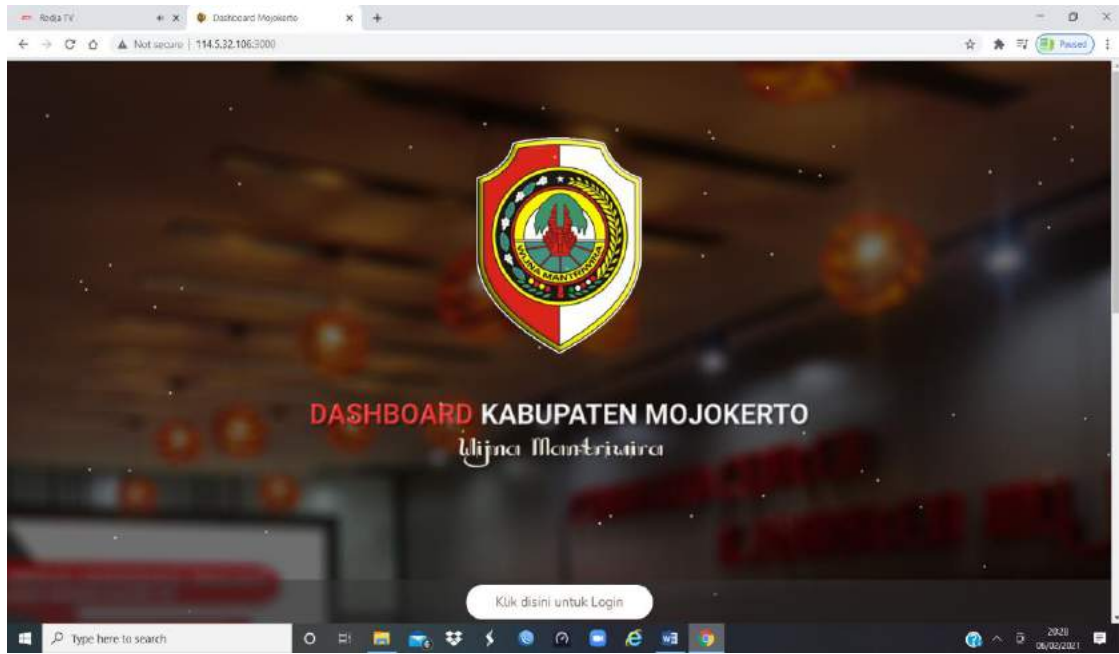


Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto



Screenshot Aplikasi Dashboard Kabupaten Mojokerto



DATA PENDUKUNG KABUPATEN MOJOKERTO TERHADAP LPPD TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA KUNCI Urusan Komunikasi dan Informatika

2) IKK Outcome :

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

Konsep/Definisi

Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKK Output :

1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015.
2. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang Sesuai standar.
3. Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik.
5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik.
6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah.
8. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah.
9. Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah.
10. Persentase Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)
11. Persentase data yang dapat berbagi pakai.
12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung *smart city*.
13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi
14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi *e-government*.



2) **IKK Outcome** : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

- Penjelasan IKK Outcome :

Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

Jumlah layanan publik berbasis elektronik yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, perhubungan, energi, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya ada sebanyak 178 layanan publik. Sedangkan untuk layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di Kabupaten Mojokerto masih 5 aplikasi antara lain : Aplikasi SIPANJOL (Sistem Informasi Pajak Daerah Online), JDIH Kab. Mojokerto , Portal Satu Data Palapa, *Covid Information System* dan aplikasi layanan perizinan.

Data pendukung :

- Screenshot Aplikasi SIPANJOL (Sistem Informasi Pajak Daerah Online), Aplikasi SIPANJOL (Sistem Informasi Pajak Daerah Online), JDIH Kab. Mojokerto , Portal Satu Data Palapa, *Covid Information System* dan aplikasi layanan perizinan (terlampir)
- Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP Analysis hal. 40-41 (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

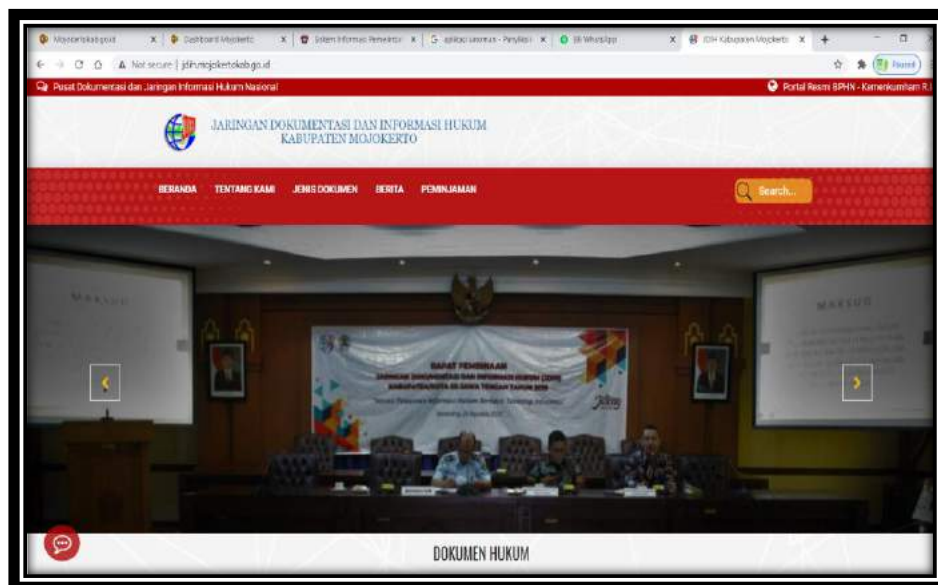
Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



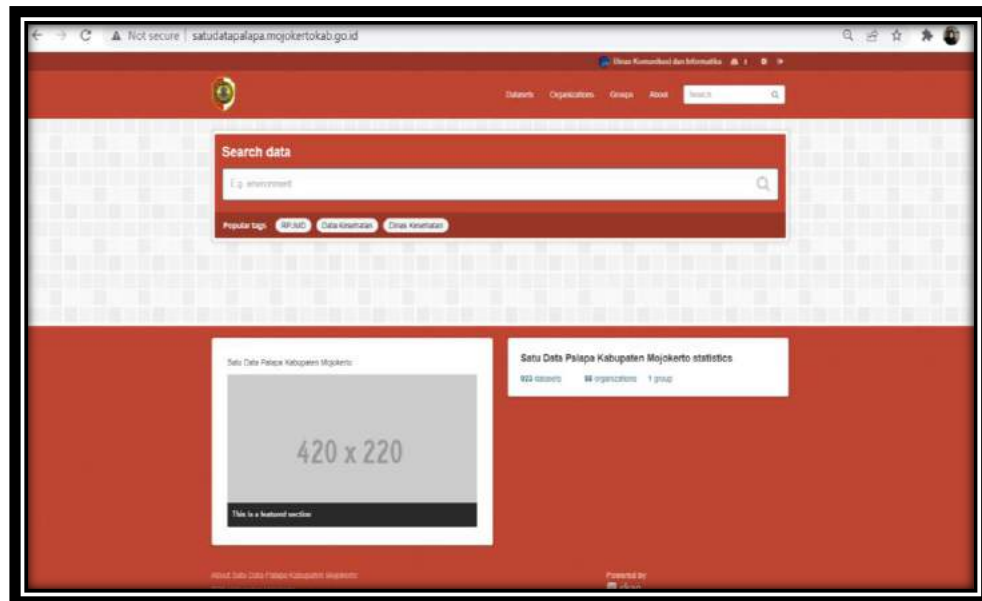
Lampiran Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Screenshot Aplikasi SIPANJOL (Sistem Informasi Pajak Daerah Online), JDIH Kab. Mojokerto, Portal Satu Data Palapa, Covid Information System dan aplikasi layanan perizinan





Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto





- **Penjelasan IKK Output:**

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKK Output :

- 1) Persentase kegiatan (*event*), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015.

Jumlah kegiatan (*event*), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring di *Command Center* Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 tercatat sejumlah 87 kegiatan (*event*) yang meliputi 84 kegiatan (*event*) daring dan 3 kegiatan non daring.


Data pendukung :

- Jumlah kegiatan (*event*), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring di *Command Center* Tahun 2021. (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDianto, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



**DAFTAR PENGGUNAAN COMMAND CENTER
KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Tanggal	Acara	Penyelenggara	Daring/ Non Daring
1	6 Januari 2021	Penandatanganan nota kesepahaman antara mendagri dengan menkeu, menteri ppnka, bappenas, ka bpkp dan ketua kpk tentang kerja sama pelaksanaan evaluasi RAPBD dan rencana perubahan APBD	Kemendagri	Daring
2	7 Januari 2021	vidcon penandatanganan MOU kemendagri, Kemenkeu, KPK, Bappenas dan BPKP.	Kemendagri	Daring
3	8 Januari 2021	Rakor Penanganan Covid 19 di Jawa Timur	Gubernur Jawa Timur	Daring
4	11 Januari 2021	Vidcon Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021	Kemendagri	Daring
5	20 Januari 2021	Percepatan pelaksanaan APBD TA 2021 dan kemudahan investasi di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah	Kemendagri	Daring
6	21 Januari 2021	Rilis Bersama Data Sensus Penduduk dan Data Adm. Kependudukan 2020 menuju Satu Data Kependudukan Indonesia	Kemendagri dan BPS	Daring
7	22 Januari 2021	Rakor PPKM	Gubernur Jawa Timur	Daring
8	26 Januari 2021	Rakor Evaluasi PPKM secara vidcon	Setda Prov Jatim	Daring
9	28 Januari 2021	Koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Pemprov Jawa Timur	Pj. Sekda	Daring
10	30 Januari 2021	Rakor Prokes Covid 19 yang di pimpin langsung Bapak Menko Maritim dan Investasi secara vidcon	Kemendagri	Daring
11	9 Februari 2021	Rapat koordinasi kebijakan penanganan COVID-19 dan refocusing TKKD TA 2021 via zoom meeting	Pj. Sekda	Daring
12	15 Februari 2021	Kerjasama BPN dengan Pemda se Jatim	Gubernur Jawa Timur	Daring
13	15 Februari 2021	Rakor terkait Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan Percepatan Pencairan DD	Setda Prov Jatim	Daring
14	23 Februari 2021	Penyelenggaraan perizinan, berusaha di daerah terkait kesiapan Online Single Submission (OSS)	Kemendagri	Daring
15	23 Februari 2021	Rapat Evaluasi PPKM Mikro	Gubernur Jawa Timur	Daring
16	2 Maret 2021	Rapat Evaluasi PPKM Mikro	Gubernur Jawa Timur	Daring
17	4 Maret 2021	Evaluasi Kinerja TPID Kabupaten/Kota tahun 2020	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan	Daring
18	9 Maret 2021	Rapat Evaluasi PPKM Mikro	Gubernur Jawa Timur	Daring
19	13 April 2021	Rapat Evaluasi PPKM Mikro	Gubernur Jawa Timur	Daring
20	14 April 2021	Arahan Presiden kepada Kepala Daerah dan Wakin Kepala Daerah Terpilih	Kemendagri	Daring
21	22 April 2021	Rakor terkait PPKM Persiapan Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442H di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2021	Gubernur Jawa Timur	Daring
22	30 April 2021	Rapat Evaluasi PPKM Mikro	Gubernur Jawa Timur	Daring



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

23	4 Mei 2021	Tindak Lanjut Arahan Mendagri dalam rangka penegakan disiplin proses dan penanganan Covid-19 di Jawa Timur	Gubernur Jawa Timur	Daring
24	6 Mei 2021	Penanganan Kepulangan PMI dan WNI serta kedatangan WNA melalui Bandara Internasional Juanda	Gubernur Jawa Timur	Daring
25	9 Mei 2021	Rapat Persiapan Sholat Idul Fitri 1442 H/ tahun 2021	Gubernur Jawa Timur	Daring
26	17 Mei 2021	Rakor Kepala Daerah Seluruh Indonesia	Kemendagri	Daring
27	17 Mei 2021	Rakor Gubernur Jatim dengan Bupati/Walikota se-Jawa Timur terkait persiapan distribusi vaksinasi dan presentasi persiapan pembelajaran tatap muka oleh Kepala Dinas Pendidikan Prov Jawa Timur	Gubernur Jawa Timur	Daring
28	20 Mei 2021	Peluncuran Kegiatan Literasi Digital Dengan Tema Indonesia Makin Cakap Digital	Kemendagri	Daring
29	21 Mei 2021	Rapat Evaluasi PPKM Mikro	Gubernur Jawa Timur	Daring
30	1 Juni 2021	DUMM	kemendagri	Daring
31	4 Juni 2021	PKP PAUD HI	Direktur GTK PAUD	Daring
32	9 Juni 2021	Rapat Evaluasi PPKM Mikro	Gubernur Jawa Timur	Daring
33	14 Juni 2021	Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Kemendagri	Daring
34	15 Juni 2021	Rakor Evaluasi PPKM Mikro yg dipimpin Ibu Gubernur Jatim.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	Daring
35	24 Juni 2021	Peluncuran RAN PAUD HI	Kemendagri	Daring
36	25 Juni 2021	Analisis dan Evaluasi penerapan PPKM berbasis mikro di tingkat desa dan kelurahan	Kemendagri	Daring
37	1 Juli 2021	Musrenbang RPJMD Prov Jatim	Gubernur Jawa Timur	Daring
38	1 Juli 2021	Rapat Evaluasi PPKM Mikro	Gubernur Jawa Timur	Daring
39	5 Juli 2021	Rapat staff opd dengan bupati	Bupati	Non Daring
40	7 Juli 2021	Literasi Digital	Diskominfo	Daring
41	11 Juli 2021	Rapat Evaluasi PPKM Mikro	Gubernur Jawa Timur	Daring
42	11 Juli 2021	Pembatasan Mobilitas Selama PPKM Darurat di Jawa dan Bali	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretaris Kementerian Koordinator	Daring
43	16 Juli 2021	Literasi Digital	Diskominfo	Daring
44	19 Juli 2021	Rakor Pemulasaran dan pemakaman jenazah covid	Bupati	Non Daring
45	19 Juli 2021	Pertemuan Presiden - Penanganan Pandemi Covid-19	Kemendagri	Daring
46	23 Juli 2021	Hari Anak Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Daring
47	23 Juli 2021	Pelatihan Isi Piringku bagi guru	Spektra	Daring



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

48	29 Juli 2021	Evaluasi Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA),	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Daring
49	30 Juli 2021	Rekomendasi FK Unair untuk percepatan penanganan Covid-19	Universitas Airlangga	Daring
50	30 Juli 2021	DIALOG INDUSTRI Bersama Bupati Mojokerto	Disperindag	Daring
51	31 Juli 2021	Sharing penanganan covid	Wakil Bupati	Daring
52	2 Agustus 2021	FGD dukungan kegiatan kajian operasional membangun kepemimpinan kolaboratif dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19	Tim Pakar Satgas COVID-19	Daring
53	3 Agustus 2021	Rapat staff opd dengan bupati	Bupati	Non Daring
54	13 Agustus 2021	Literasi digital	Diskominfo	Daring
55	14 Agustus 2021	Upacara hari pramuka	Sekretariat Daerah	Daring
56	17 Agustus 2021	Upacara hari kemerdekaan	Sekretariat Presiden	Daring
57	19 Agustus 2021	Pengarahan Bpk. Presiden RI kepada Forkopimda Se-Jawa Timur	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	Daring
58	20 Agustus 2021	Literasi digital	Diskominfo	Daring
59	1 Oktober 2021	Upacara	Bupati	Daring
60	5 Oktober 2021	Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Mojokerto dengan Universitas Negeri Surabaya	Bupati	Daring
61	5 Oktober 2021	Gladi KOVABLIK 2021	Bagian Organisasi	Daring
62	6 Oktober 2021	KOVABLIK 2021	Bagian Organisasi	Daring
63	8 Oktober 2021	NUS DLA 2021	Kemenkominfo	Daring
64	11 Oktober 2021	Pembinaan Penyelesaian Kasus Rumah Tangga PNS	BKPP	Daring
65	12 Oktober 2021	Pembinaan Penyelesaian Kasus Rumah Tangga PNS	BKPP	Daring
66	13 Oktober 2021	Pembinaan Penyelesaian Kasus Rumah Tangga PNS	BKPP	Daring
67	13 Oktober 2021	Penerimaan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya	Bappeda	Daring
68	14 Oktober 2021	FGD Laporan Pendahuluan Updating Data Potensi Ekonomi Kreatif 2021	Bappeda	Daring
69	18 Oktober 2021	Kegiatan pelatihan pengelolaan Program dan penyuluhan PKK	DPMD	Daring
70	18 Oktober 2021	Maulid Nabi	Kesra	Daring
71	22 Oktober 2021	Upacara Bendera Hari Santri Nasional Tahun 2021	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	Daring
72	22 Oktober 2022	Maulid Nabi Muhamma SAW Tahun 1443 H	Asisten Pemerintahan Perintahan dan Kesra	Daring
73	25 Oktober 2021	Pembukaan Pelatihan Manajemen Puskesmas Tahun 2021 di Kab. Mojokerto	BKPP	Daring
74	27 Oktober 2021	Webinar Koordinasi Pusat Dan Daerah Program Pertashop	Kemendagri	Daring
75	27 Oktober 2021	Lokarya Kotaku Mojokerto	Bappeda	Daring
76	31 Oktober 2021	Gotong Royong	Bupati	Daring
77	2 November 2021	Pembukaan Pelatihan Guru	BKPP	Daring




Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

78	18 November 2021	TP2DD	Bapenda	Daring
79	7 Desember 2021	PMT-AS	DPMD	Daring
80	7 Desember 2021	Rakorda TPAKD	Bupati	Daring
81	8 Desember 2021	PMT-AS	DPMD	Daring
82	8 Desember 2021	Inovasi TTG	DPMD	Daring
83	14 Desember 2021	PMT-AS	DPMD	Daring
84	15 Desember 2021	PMT-AS	DPMD	Daring
85	16 Desember 2021	PMT-AS	DPMD	Daring
86	17 Desember 2021	PMT-AS	DPMD	Daring
87	20 Desember 2021	PMT-AS	DPMD	Daring

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

- Penjelasan IKK Output:

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKK Output :

- 2) Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang Sesuai standar.

Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar sebanyak 47 OPD dari total 57 OPD dan telah terkoneksi secara langsung pada website Pemerintah Daerah <https://mojokertokab.go.id>.

Data pendukung :

- Screenshot submenu *link website* <https://mojokertokab.go.id> pada website Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
- Screenshot *monitoring subdomain*.

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

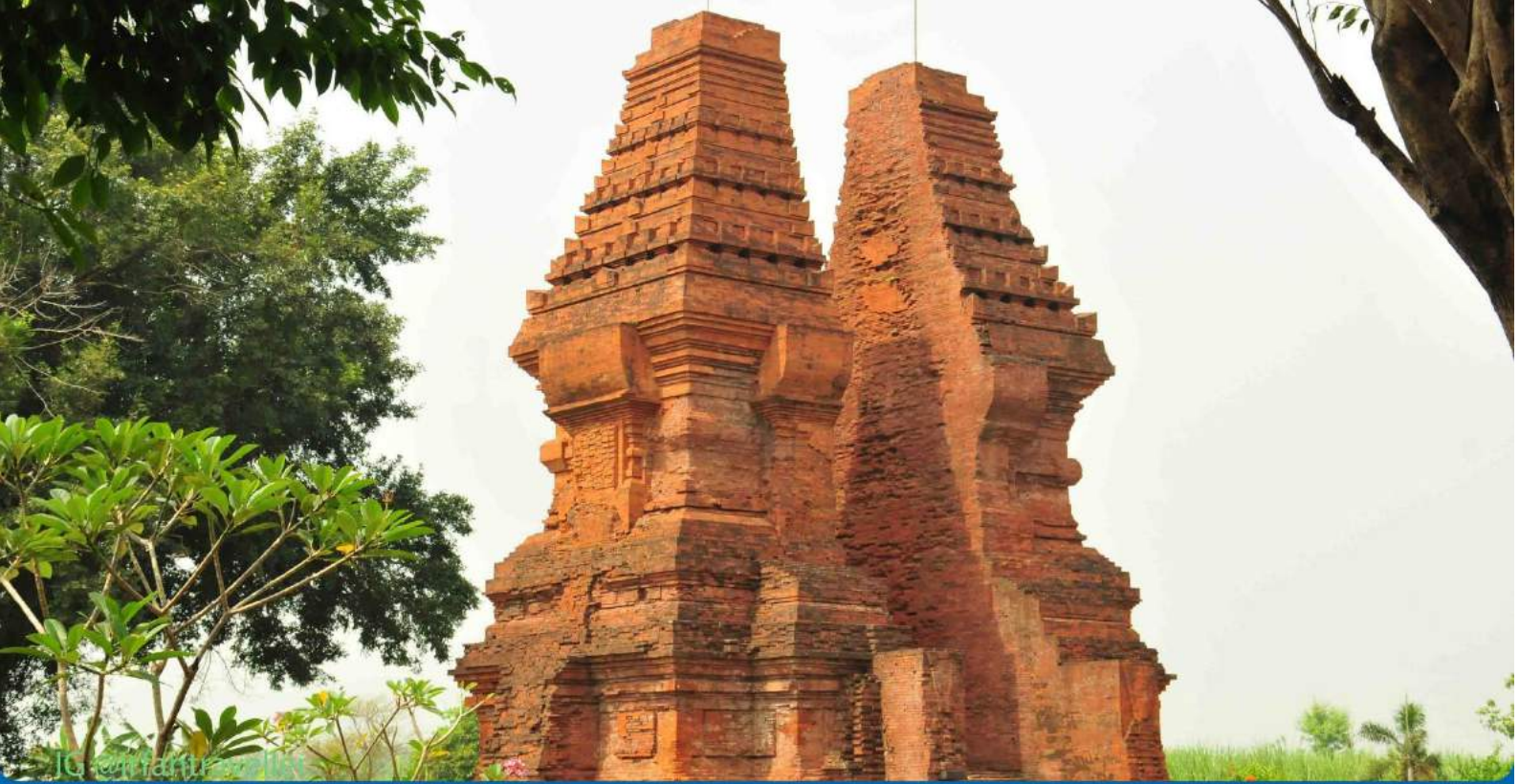
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



BUKU 1

Kondisi Eksisting SPBE

Pemerintah Kabupaten Mojokerto

dan GAP Analysis

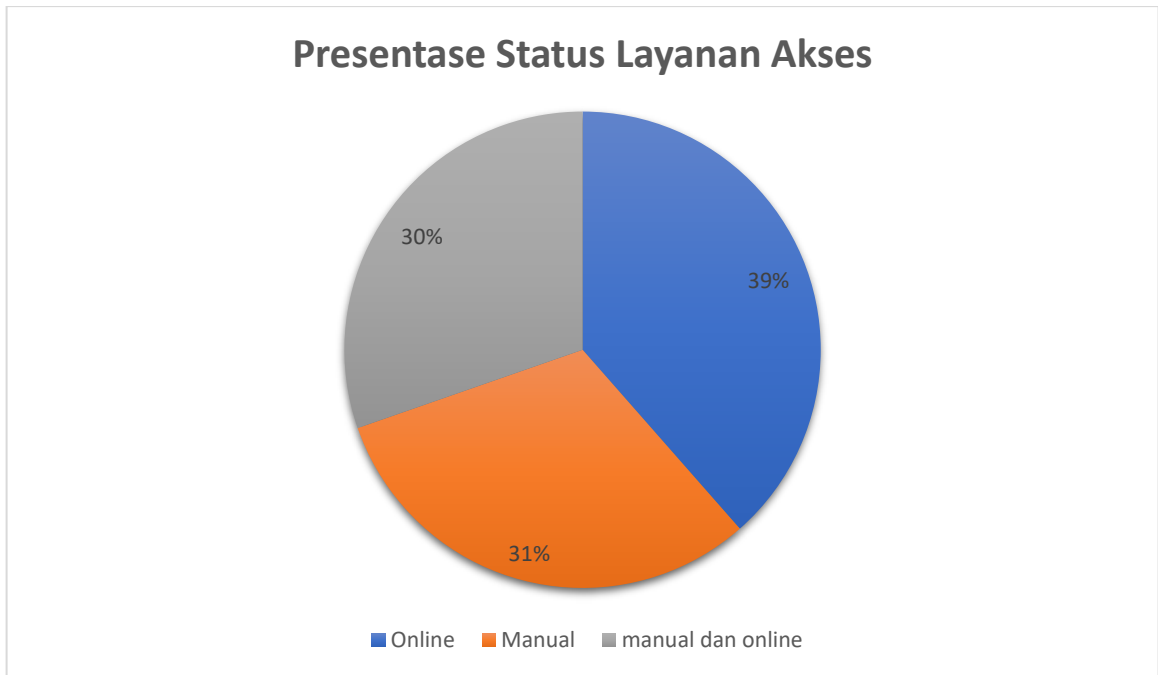
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021



Pemerintah Kabupaten Mojokerto



PT Tatacipta Teknologi Indonesia



Gambar 3. 4 Presentase Status Akses Layanan

Dari **Gambar 3.4** pada 43 PD dapat dilihat bahwa layanan yang **sudah Online dan didukung aplikasi** sebanyak **94 layanan online atau 39%**, **belum didukung oleh aplikasi atau masih Manual** sebanyak **76 layanan manual atau 31%**, dan **layanan yang Online dan memiliki opsi Manual** sebanyak **74 layanan atau 30%**.

Pada **Tabel 3.3** merupakan penjabaran kondisi eksisting layanan yang tersebar pada 43 PD di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 3. 3 Kondisi Eksisting Layanan Publik

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	Layanan Pengaduan Masyarakat	Manual
2		1	Penerbitan dan penetapan PD/SPPT/DHKP	Manual&Online
		2	Perumusan dan penyampaian blangko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	Manual&Online
		3	Layanan Menghitung kerugian daerah	Manual&Online
		4	Pencatatan barang	Manual&Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
	Badan Pendapatan Daerah	5	Penjabaran APBD	Online
		6	Layanan PBB P2	Online
		7	Perumusan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)	Manual
		8	Pelayanan SPTPD BPHTB	Online
		9	Pendaftaran dan penetapan Nomor Obyek Pajak (NOP)	Online
		10	Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerbitan dan penyampaian Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	Manual&Online
		11	Rekonsiliasi	Manual
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	Online
		2	SIMBADA	Online
		3	SIMDA	Online
		4	SIMDAGO	Online
		5	E-Persediaan	Online
		6	Layanan Aset	Manual&Online
		7	Layanan penganggaran	Online
		8	Layanan Penggajian	Online
		9	Layanan SP2B	Online
		10	Layanan Pelaporan	Manual&Online
		11	Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset	Manual
		12	Pendataan dan Penatausahaan Aset	Manual&Online
		13	Layanan aset tanah dan bangunan	Manual
		14	Bagi Hasil Retribusi kepada pihak lain	Manual&Online
		15	Bantuan Keuangan Desa (Infrastruktur)	Manual&Online
		16	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Manual&Online
4	Badan Perencanaan	1	SIPD	Online
		2	Layanan Informasi Tata Ruang	Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
	Pembangunan Daerah			
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1	Pelayanan Permintaan Data dan Informasi	Manual&Online
		2	Pembuatan Karpeg, Karis, Karsu, KPE dan Konversi NIP	Manual&Online
		3	Rekonsiliasi dan Validasi Data SIMPEG	Manual&Online
		4	Pelaksanaan Update Data Simpeg	Manual&Online
		5	Pelaporan Kepegawaian Semester	Manual&Online
		6	Pelaporan Kepegawaian Tribulan	Manual&Online
		7	Kenaikan Pangkat	Manual&Online
		8	Pengangkatan Dalam jabatan Struktural	Manual&Online
		9	Mutasi Pegawai Antar Unit Kerja/PD	Manual&Online
		10	Mutasi Pegawai Antar Daerah/Departemen	Manual&Online
		11	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun	Manual&Online
		12	Peninjauan Masa Kerja	Manual&Online
		13	Pembuatan Kartu Peserta Taspen	Manual&Online
		14	Pengadaan Pegawai ASN	Manual&Online
		15	Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional	Manual&Online
		16	Fasilitasi Izin Belajar	Manual&Online
		17	Fasilitasi Izin Tugas Belajar	Manual&Online
		18	Fasilitasi Diklat Teknis/ Fungsional	Manual&Online
		19	Melaksanakan Pembinaan Perkawinan	Manual&Online
		20	Pembinaan Kepegawaian	Manual&Online
		21	Pelayanan Penilaian Kinerja ASN dan Perhitungan TPP	Online
		22	Pelayanan Penilaian Kehadiran ASN	Online
		23	Pelayanan Arsip Kepegawaian	Online
		24	Pelayanan Dashboard ASN	Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		25	Pelayanan Update Data Jabatan	Online
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Pemberian Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan	Manual
		2	Layanan Kelembagaan	Manual&Online
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Destana (penyuluhan ke masyarakat)	Manual
8	Bagian Administrasi Pemerintahan		Tidak ada Layanan	
9	Bagian Organisasi	1	E-Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Online
10	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1	Layanan Permohonan Hibah	Manual
11	Bagian Hukum	1	Layanan produk hukum melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)	Manual&Online
12	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	Layanan Pelaporan Adanya Rokok Ilegal	Keduanya
13	Bagian Administrasi Pembangunan		Tidak ada Layanan	
14	Bagian Umum		Tidak ada Layanan	
15	Bagian Perencanaan dan Keuangan		Tidak ada Layanan	
16	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	Publikasi kegiatan Pemerintahan Daerah	Manual
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Layanan pengaduan online, LAPORSPAN	Online
		2	Layanan Data di PPID	Manual&Online
		3	Portal Covid-19 Kabupaten Mojokerto	Manual&Online
18	Dinas Pendidikan	1	Bantuan Operasional PAUD	Manual&Online
		2	Pendirian Sekolah	Manual&Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan		
		3	Manajemen Tenaga Pendidikan	Manual&Online		
		4	Penerimaan Peserta Didik Baru	Manual&Online		
		5	Pengembangan Keprofesian	Manual&Online		
		6	Pengajuan nilai angka kredit	Manual&Online		
		7	Program Indonesia Pintar	Manual&Online		
		8	Penggantian Ijazah Hilang	Manual		
		9	Penilaian Akreditasi Sekolah PAUD	Manual&Online		
		10	Pengajuan Sarana Prasarana Sekolah	Manual&Online		
		11	Layanan Manajemen Surat	Online		
		12	Mutasi Siswa	Manual&Online		
		13	Menghimpun data pokok pendidikan PAUD	Online		
		14	Pemindahan konversi mata pelajaran tenaga pendidik	Manual&Online		
		15	Layanan Tunjangan Profesi	Manual&Online		
		19	Dinas Kesehatan	1	Surat Ijin Praktek Apoteker	Manual&Online
				2	Layanan SIPTTK	Manual&Online
3	Layanan UMOT			Manual		
4	Layanan Surat Ijin Praktek Dokter dll			Manual&Online		
5	Layanan PIRT			Manual		
6	Layanan PKRT			Manual		
7	Laik Higienis Jasa Boga			Manual		
8	Pelayanan Kesehatan Rujukan			Manual		
9	Surat ijin kerja rekam medis			Manual&Online		
10	Surat Ijin Perawat			Manual&Online		
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Layanan konsultasi BUMDES	Manual		
		2	Layanan PKK	Manual&Online		
		3	Layanan Klinik Lakon Penggoda	Manual&Online		
		4	Layanan Posyandu	Manual&Online		
		5	Layanan Teknologi Tepat Guna	Manual		
21		1	Penerbitan Kartu Keluarga	Online		

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Online
		3	Penerbitan Surat Pindah Keluar	Online
		4	Pencatatan Akta Perkawinan	Online
		5	Pencatatan Akta Perceraian	Online
		6	Pemberian Catatan Pinggir Pengesahan Anak	Online
		7	Pemberian Catatan Pinggir Pengakuan Anak	Online
		8	Penerbitan Akta Kematian	Online
		9	Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran	Online
		10	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi WNI	Online
		11	Penerbitan Surat Pindah Datang	Online
		12	Legalisir Dokumen Kependudukan	Online
		13	Pengendalian Dokumen	Online
		14	Pengendalian arsip	Online
		15	Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai	Online
		16	Penanganan Keluhan Pelanggan	Online
		17	Pengukuran Kepuasan Pelanggan	Online
		18	Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data	Online
		19	Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang Atau Rusak	Online
		20	Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang Atau Rusak Bagi Orang Asing	Online
		21	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi WNA	Online
		22	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Karena Perubahan Data	Online
		23	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Karena Pindah Datang	Online
		24	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Karena Hilang Atau Rusak	Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		25	Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (Bagi Orang Asing)	Online
		26	Penerbitan Surat Pindah Keluar	Online
		27	Pelayanan KK & KTP Pada Mobil Layanan	Online
		28	Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Online
		28	Pencatatan Pembatalan Perceraian	Online
		30	Pemberian Catatan Pinggir Pengangkatan Anak	Online
		31	Pemberian Catatan Pinggir Perubahan Nama	Online
		32	Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran	Online
		33	Penerbitan Kutipan II Akta Kematian	Online
		34	Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan	Online
		35	Penerbitan Kutipan II Akta Perceraian	Online
		36	Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Online
		37	Penanganan Keluhan Pelanggan	Online
		38	Permintaan Data	Online
		39	Pelayanan Pendaftaran Administrasi Kependudukan	Online
		40	Pengambilan Dokumen Kependudukan Berbasis Digital	Online
		41	Pelayanan Balaputra (Baru Lahir Pulang Bawa Akta)	Online
		42	Pelayanan Motor Sakti (Motor Siap Antar Akta Kematian)	Online
		43	Pelayanan Sinden Katut Mas Hardi (Sekali Datang Kk, Ktp, Akta Kelahiran Jadi)	Online
		44	Pelayanan Drive Thru Untuk Cetak KK & KTP (Tanpa Perubahan)	Online
22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1	Fasilitasi pemasaran koperasi dan UMKM	Manual&Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		2	Pelatihan terkait produksi usaha mikro	Manual&Online
		3	pelatihan wirausaha	Manual&Online
		4	Pembinaan perubahan anggaran dasar koperasi	Manual
		5	Pembinaan produksi usaha mikro	Manual&Online
		6	Pembinaan Tata cara pembentukan koperasi	Manual
		7	Penyuluhan manajemen koperasi	Manual
		8	Surat Keterangan Kepengurusan	Manual
		9	Layanan penilaian kesehatan koperasi	Manual
		10	Fasilitasi klinik bisnis	Manual&Online
		11	Layanan Sibolasi	Online
		23	Dinas Lingkungan Hidup	
24	Dinas Pangan dan Perikanan	1	Penjualan Benih Ikan	Manual
		2	Layanan Toko Tani Indonesia Center	Manual&Online
25	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	1	Rekomendasi Penggunaan Stadion/Indoor	Manual
		2	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Online
		3	Rekomendasi Kartu Induk Kesenian	Manual&Online
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Laporan PJU	Manual
		2	Rekomendasi Peil Banjir	Manual
		3	Perlindungan garis sepadan jalan untuk pembangunan pagar	Manual
		4	Informasi tataruang secara tertulis	Manual
		5	Laporan Pohon tumbang	Manual
		6	Perijinan membuat jembatan keluar masuk diatas saluran air	Manual
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	1	Izin Dasar	Manual&Online
		2	Izin Sektor Kesehatan	Online
		3	Izin Sektor Koperasi Dan Ukm	Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
	Terpadu Satu Pintu	4	Izin Sektor Pendidikan	Online
		5	Izin Sektor Lingkungan Hidup	Online
		6	Izin Sektor Perdagangan	Online
		7	Izin Sektor Perhubungan	Online
		8	Izin Sektor Perindustrian	Online
		9	Izin Sektor Pertanian	Online
		10	Izin Sektor Ketenagakerjaan	Online
		11	Izin Sektor Pupr	Online
28	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	1	Sosialisasi KB	Manual&Online
		2	Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Manual&Online
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Perpustakaan keliling	Manual
		2	Pustaka Terapan berbasis Inklusi Nasional	Manual
		3	Pustaka Asiek	Manual
		4	Sirkulasi (EPusda)	Online
		5	Layanan Sirkulasi	Manual&Online
		6	Pelayanan Masyarakat kearsipan	Manual
30	Dinas Pertanian	1	Rumah Potong Hewan	Manual
		2	Lab Kesehatan Hewan	Manual
		3	Pasar Kesehatan Hewan	Manual
		4	Rumah Potong Unggas	Manual
31	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	1	Pengurusan rekomendasi andalalin	Manual
		2	Pengujian Kendaraan	Online
		3	Layanan Ijin Trayek	Manual
32	Dinas Sosial	1	Pemulangan Orang Terlantar	Manual
		2	Pembinaan Pekerja Sosial	Manual
		3	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Manual

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		4	Pembinaan Karang Taruna	Manual
33	Dinas Tenaga Kerja	1	Pembuatan Rekom Paspor Calon Pekerja Imigran Indonesia	Online
		2	Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Manual
		3	Pendaftaran Bursa Kerja Khusus	Manual
		4	Pengesahan perjanjian pemagangan	Manual
		5	Pendaftaran Transmigrasi	Manual
		6	Pendaftaran AK 1 (Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja)	Manual&Online
		7	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Manual
		8	Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Manual
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Pembinaan dan penyuluhan	Manual
		2	Pembinaan kepada masyarakat tentang alat ukur	Manual
		3	Pengurusan SNI Produk	Manual
		4	Pengadaan Event promosi dan pameran produk industri	Manual
		5	Pengawasan alat ukur	Manual
		6	Pengurusan Merk Produk	Manual
		7	Penyuluhan alat ukur	Manual
		8	Manajemen data rekap export import	Manual&Online
		9	Manajemen retribusi pasar rakyat	Manual
35	INSPEKTORAT	1	Pelayanan Konsultasi	Manual
		2	SimHP (Hasil Pengawasan) Internal	Manual&Online
		3	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Manual
36	RSUD R.A. Basuni	1	Layanan Antrian	Manual&Online
		2	Layanan CSSD	Manual
		3	Layanan Farmasi	Online
		4	Layanan Foto XRay	Manual

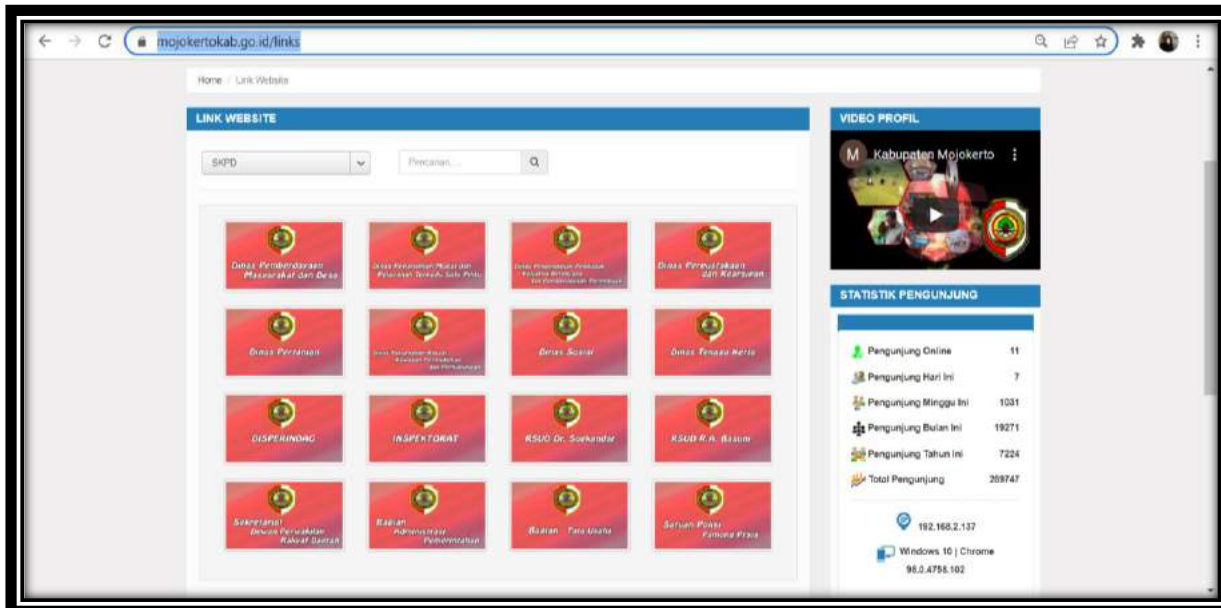
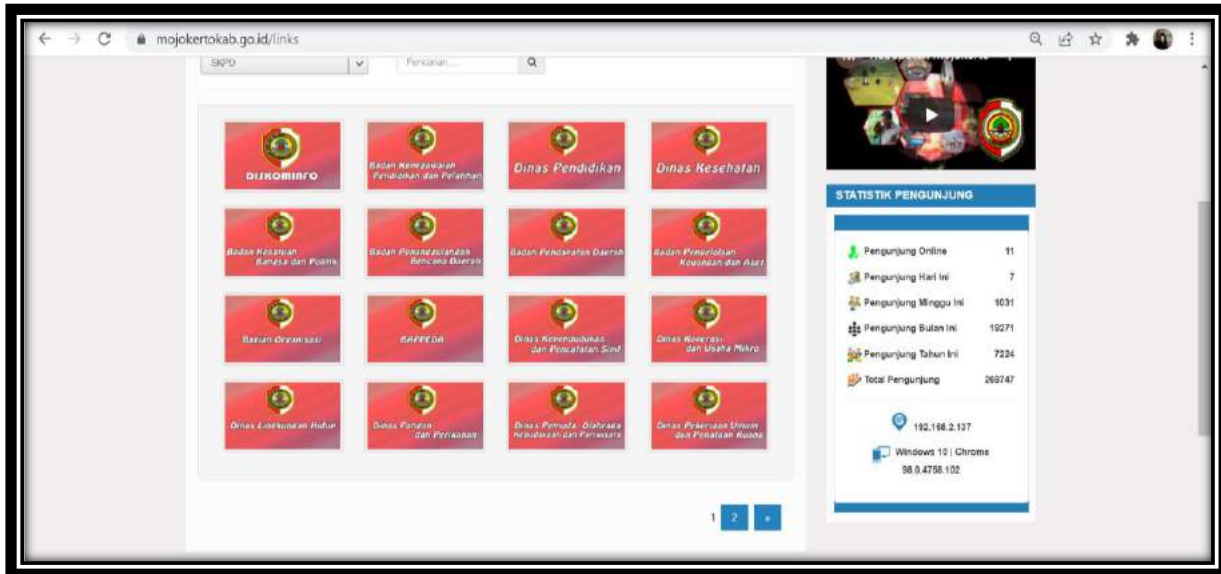
Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		5	Layanan Gizi	Online
		6	Layanan Kamar Operasi	Online
		7	Layanan Pengadaan	Online
		8	Layanan Rawat Inap	Online
		9	Layanan Rawat Jalan (POLI)	Online
		10	Layanan Rekam Medis	Manual
		11	Layanan Bayi	Online
		12	Layanan Emergency Ibu Bersalin	Online
		13	Layanan ICU	Online
		14	Layanan IGD	Online
		15	Layanan Laborat	Online
		16	Layanan USG	Manual
37	SATPOL PP	1	Pengamanan Rumah Dinas Pejabat / Asset	Manual
		2	Pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang-orang penting	Manual
38	Kecamatan Jetis	1	Pelayanan Administrasi (PATEN)	Manual
39	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	Layanan Pengadaan dengan LPSE	Online
40	RSUD Prof dr Soekandar	1	Layanan Kesehatan	Manual&Online
		2	Layanan Anjungan Pendaftaran Mandir	Manual&Online
41	Kecamatan Pungging	1	Pelayanan Administrasi (PATEN)	Manual
		2	Dispensasi Nikah	Manual
42	Kecamatan Mojosari	1	Layanan administrasi kependudukan	Online
43	Kecamatan Sooko	1	Layanan administrasi kependudukan	Online
		2	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pelayanan Sosial	Manual
		3	Layanan Rekomendasi Izin Keramaian	Manual
		4	Layanan Pengesahan Proposal dan Rekomendasi	Manual

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		5	Layanan Dispensasi Nikah	Manual
		6	Layanan Legalisasi Surat-surat	Manual
		7	Layanan Evaluasi APBDesa	Manual



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Screenshot submenu *link website* pada <https://mojokertokab.go.id/links>





Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

- Penjelasan IKK Output:

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKK Output :

- 3) Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Seluruh Perangkat Daerah (57 OPD) di kabupaten Mojokerto telah mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus.


Data pendukung :

- Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP Analysis hal. 172-179 (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



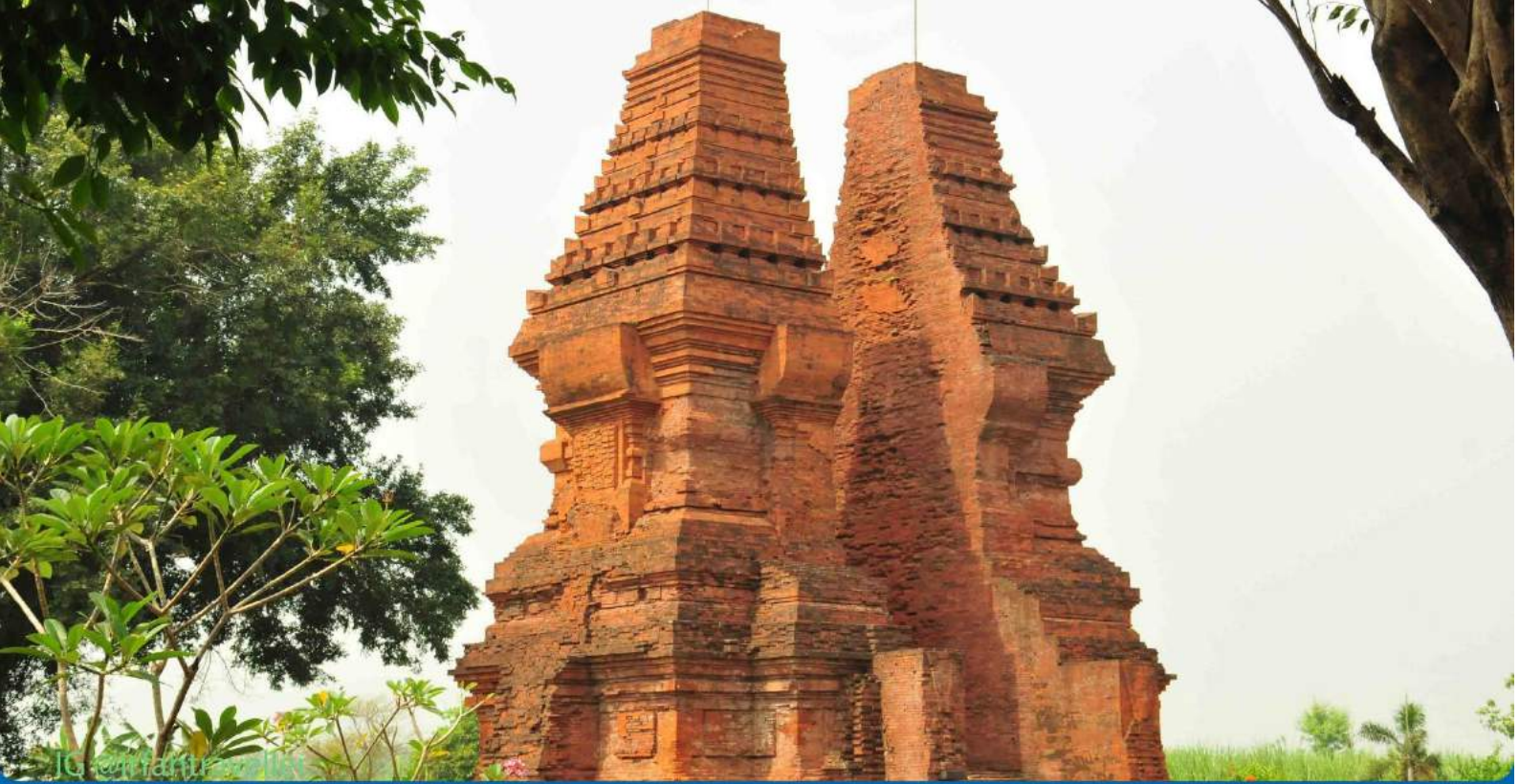
	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si Pembina Utama Muda/IVc
---	--



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



BUKU 1

Kondisi Eksisting SPBE

Pemerintah Kabupaten Mojokerto

dan GAP Analysis

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021



Pemerintah Kabupaten Mojokerto



PT Tatacipta Teknologi Indonesia

Lampiran 1.2 Ketersediaan Aplikasi

Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Setwan.mojokertokab
2	Badan Pendapatan Daerah	SISMIOP
2	Badan Pendapatan Daerah	RKBMD
2	Badan Pendapatan Daerah	SIPANJOL
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	SIMBADA/SIMAGO
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	bpkad.mojokertokab
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	SIMGAJI
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	SIMDA Keuangan
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda.mojokertokab
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIPR
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TKPK
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aksara
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Website TSP/CSR Kabupaten Mojokerto
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	SIMPEG
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	E-Personal
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	SIMARTA
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	SIMPONI

Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	E-Rekon
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	SUHITA
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	PRASASTI
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	bakesbangpol.mojokertokab
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SIJAMAS (Sistem Informasi Pendataan Aktivitas LSM dan Ormas)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	EWS (Early warning system)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.mojokertokab
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SIMONA
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAINBOW
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	INDRA
8	Bagian Administrasi Pemerintahan	E-Paten
8	Bagian Administrasi Pemerintahan	LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
8	Bagian Administrasi Pemerintahan	Sistem Informasi Batas Desa
8	Bagian Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Toponimi
9	Bagian Organisasi	SI SAKIP
9	Bagian Organisasi	organisasi.mojokertokab
9	Bagian Organisasi	E-ANJAB
10	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SI ABAH (Sistem Aplikasi Hibah Daerah)
11	Bagian Hukum	IPROHDA
11	Bagian Hukum	JDIH (Pemprov)
12	Bagian Administrasi Perekonomian	E-BUMD
12	Bagian Administrasi Perekonomian	DBHCHT
12	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Si Roleg

Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi
13	Bagian Administrasi Pembangunan	e-pelaporan
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mojokertokab.go.id
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.mojokertokab
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Satu Data
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	e-office
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan e-pelaporan
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	SI Dashboard satu data
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Covid Information System
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	E-SPPD
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	http://damarmojo.lapor.go.id
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	E-Sign
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	SI SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
18	Dinas Pendidikan	dispendik.mojokertokab
18	Dinas Pendidikan	PIP
18	Dinas Pendidikan	PPDB
18	Dinas Pendidikan	DAPODIK PAUD
18	Dinas Pendidikan	SISPENA PAUD
18	Dinas Pendidikan	SIM Tendik
18	Dinas Pendidikan	SIM Konversi Mapel
18	Dinas Pendidikan	SIM PKB
18	Dinas Pendidikan	AP2SG (aplikasi penetapan peserta sertifikasi guru)
18	Dinas Pendidikan	SIM Rasio
18	Dinas Pendidikan	ERKAS
18	Dinas Pendidikan	SIM BAK
18	Dinas Pendidikan	SIM Surat
18	Dinas Pendidikan	SI Sarpras Pendidikan

Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi
18	Dinas Pendidikan	DAPODIK
18	Dinas Pendidikan	SISPENA MADRASAH
19	Dinas Kesehatan	e-puskesmas
19	Dinas Kesehatan	dinkes.mojokertokab
19	Dinas Kesehatan	Komdat
19	Dinas Kesehatan	e-Renggar
19	Dinas Kesehatan	KRISNA
19	Dinas Kesehatan	OM Span
19	Dinas Kesehatan	SIHA
19	Dinas Kesehatan	SITT
19	Dinas Kesehatan	E-Sismal
19	Dinas Kesehatan	ISPA
19	Dinas Kesehatan	Diare
19	Dinas Kesehatan	Hepatitis
19	Dinas Kesehatan	RS Online
19	Dinas Kesehatan	SISRUTE
19	Dinas Kesehatan	SIRS Jatim
19	Dinas Kesehatan	SIM PKT
19	Dinas Kesehatan	PBE (Perencanaan berbasis elektronik)
19	Dinas Kesehatan	Maternal Perinatal Dead Notification
19	Dinas Kesehatan	EPPGBM
19	Dinas Kesehatan	STBM Smart
19	Dinas Kesehatan	Emonev HSP (Higien Sanitasi Pangan)
19	Dinas Kesehatan	Emonev PKAM (Pengawasan Kualitas Air Minum)
19	Dinas Kesehatan	Dashboard JKN
19	Dinas Kesehatan	EWARS
19	Dinas Kesehatan	Siskohart
19	Dinas Kesehatan	RENBUT
19	Dinas Kesehatan	SIPNAP
19	Dinas Kesehatan	Monev katalog obat
19	Dinas Kesehatan	E-Logistik Obat
19	Dinas Kesehatan	Smart BPOM
19	Dinas Kesehatan	E-desk
19	Dinas Kesehatan	Aladin
19	Dinas Kesehatan	Aplikasi Keluarga Sehat
19	Dinas Kesehatan	ASPAK
19	Dinas Kesehatan	E-Fornas

Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi
19	Dinas Kesehatan	Si-SDMK
19	Dinas Kesehatan	SITB
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SIM Posyandu
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SIM PKK
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dpmd.mojokertokab
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SISKEUDES
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Profil Desa dan Kelurahan)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SIPADES
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Permutakhiran IDM
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SIK KONSOLIDASI
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	dispendukcapil.mojokertokab
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	PERCETAKAN KTP-el
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	SIK
22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Online Data System
22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	dinkop.mojokertokab
22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Mojopahit Shopping Center (Website pemasaran UMKM)
22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Sistem Informasi Usaha Mikro
22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	SIBOLASI
23	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.mojokertokab
23	Dinas Lingkungan Hidup	SI Layanan dan Perijinan LH
24	Dinas Pangan dan Perikanan	dispari.mojokertokab
24	Dinas Pangan dan Perikanan	Aplikasi PASTANI
24	Dinas Pangan dan Perikanan	SIMHARPA
25	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	https://disparpora.mojokertokab.go.id/

Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi
25	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata	pariwisata.mojokertokab.go.id
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dpupr.mojokertokab
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIM SEWA
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmpmsp.mojokertokab
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Online Single Submission
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Izin.mojokertokab.go.id
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	LKPM Online
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	investasi.mojokertokab.go.id berbasis GIS
28	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	info-layak-anak-mojokertokab.com
28	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	P2TP2A
28	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	SIMFONI e-kekerasan
28	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Morena
28	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Sistem informasi Kampung KB
28	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	SR (Statistik Rutin)
28	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	SIGA (Sistem Informasi Keluarga)
28	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Orang Tua Hebat
28	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Siap Bahagia

Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi
28	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	RANGKUL (Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Online)
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	INLIS Lite
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	E-Pusdakab Mojokerto
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	disperka.mojokertokab
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PADI (Perpus Digital)
30	Dinas Pertanian	ERDKK
30	Dinas Pertanian	SIMLUHTAN
30	Dinas Pertanian	disperta.mojokertokab
30	Dinas Pertanian	LUAS TAMBAH TANAM
30	Dinas Pertanian	e-Proposal
30	Dinas Pertanian	iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional)
30	Dinas Pertanian	Si-PDPS
30	Dinas Pertanian	Aplikasi Krisna DAK
30	Dinas Pertanian	SiVerval
30	Dinas Pertanian	E-Reporting
30	Dinas Pertanian	SINITA (Sistem Informasi Pertanian dan Perkebunan)
30	Dinas Pertanian	Aplikasi LTT Hortikultura
31	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	dprkp2.mojokertokab
31	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	ATCS
31	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	SIM Pengujian Kendaraan
31	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Integrated Information System Penanganan Permukiman Kumuh
32	Dinas Sosial	dinsos.mojokertokab
32	Dinas Sosial	Sistem Informasi Kesejahteraan (SIKSNG)
32	Dinas Sosial	E-PKH
33	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.mojokertokab

Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi
33	Dinas Tenaga Kerja	SISKOTKLN
33	Dinas Tenaga Kerja	Sistem Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	disperindag.mojokertokab
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	E-Retribusi
35	INSPEKTORAT	inspektorat.mojokertokab
35	INSPEKTORAT	SIPTL (dari BPK)
35	INSPEKTORAT	Jaga.id (dari KPK)
35	INSPEKTORAT	SI TPS Whistle Blower (wbs.mojokertokab.go.id)
36	RSUD R.A. Basuni	SIM RS
36	RSUD R.A. Basuni	E-KLAIM
36	RSUD R.A. Basuni	DASHBOARD KAMAR
36	RSUD R.A. Basuni	MESIN ANTRIAN
36	RSUD R.A. Basuni	E-TIKET
36	RSUD R.A. Basuni	SISMADAK
36	RSUD R.A. Basuni	PENDAFTARAN ONLINE
36	RSUD R.A. Basuni	SIKBLUD Rsud Ra Basoeni
38	Kecamatan Jetis	jetis.mojokertokab.go.id
39	Bag LPBJ (Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)	LPSE
40	RSUD Prof dr Soekandar	Aplikasi Anjungan Pendaftaran Mandiri
41	Kecamatan Pungging	pungging.mojokertokab.go.id
42	Kecamatan Mojosari	mojosari.mojokertokab.go.id
43	Kecamatan Sooko	sooko.mojokertokab.go.id



Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

- Penjelasan IKK Output:

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKK Output :

- 4) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik.

Terdapat 168 layanan yang bisa diakses secara online dari total 244 layanan yang dimiliki Pemkab Mojokerto meliputi layanan publik umum serta sektoral dan layanan administrasi pemerintah.


Data pendukung :

- Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP Analysis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021 hal. 41-53 (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



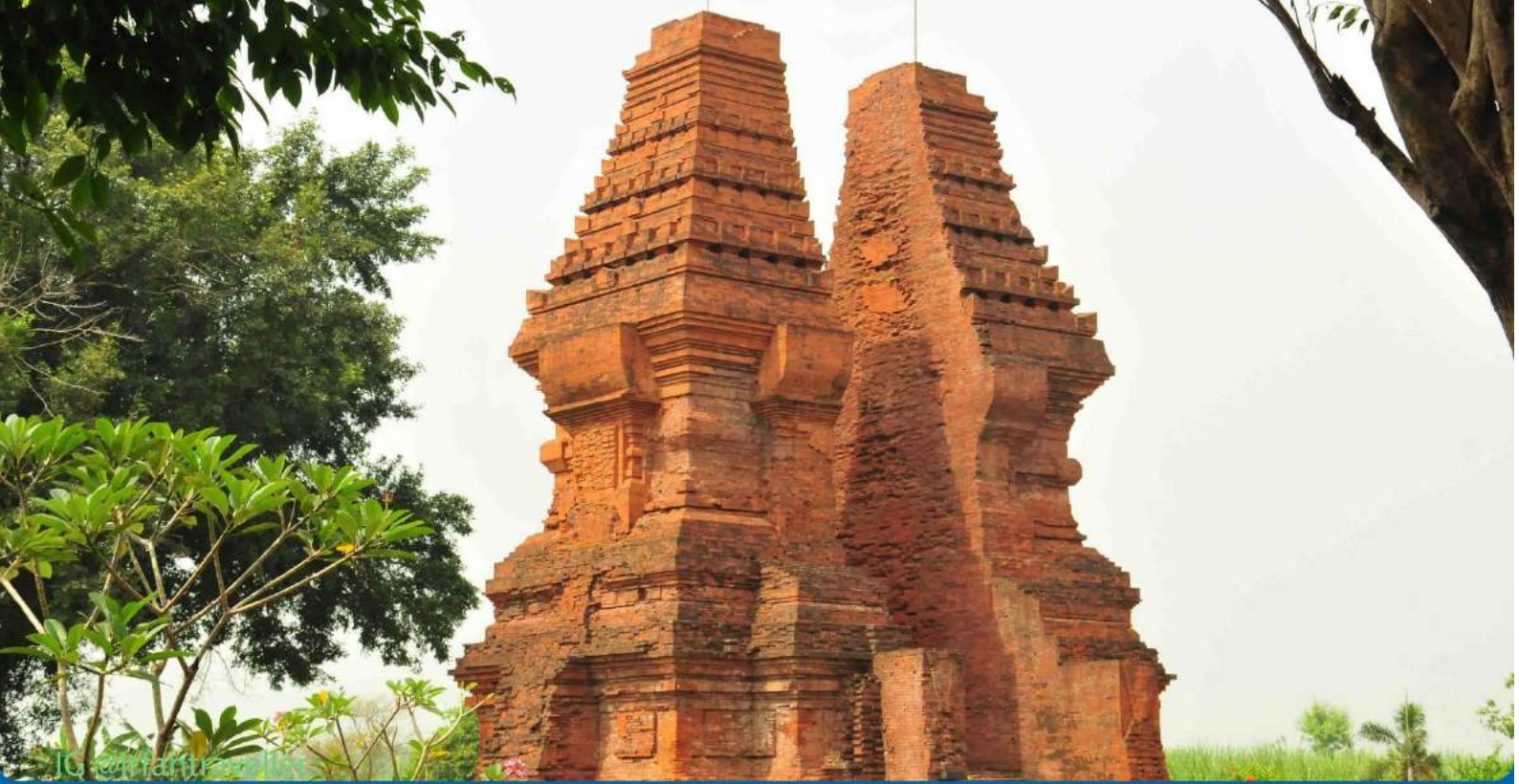
 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



BUKU 1

Kondisi Eksisting SPBE

Pemerintah Kabupaten Mojokerto

dan GAP Analysis

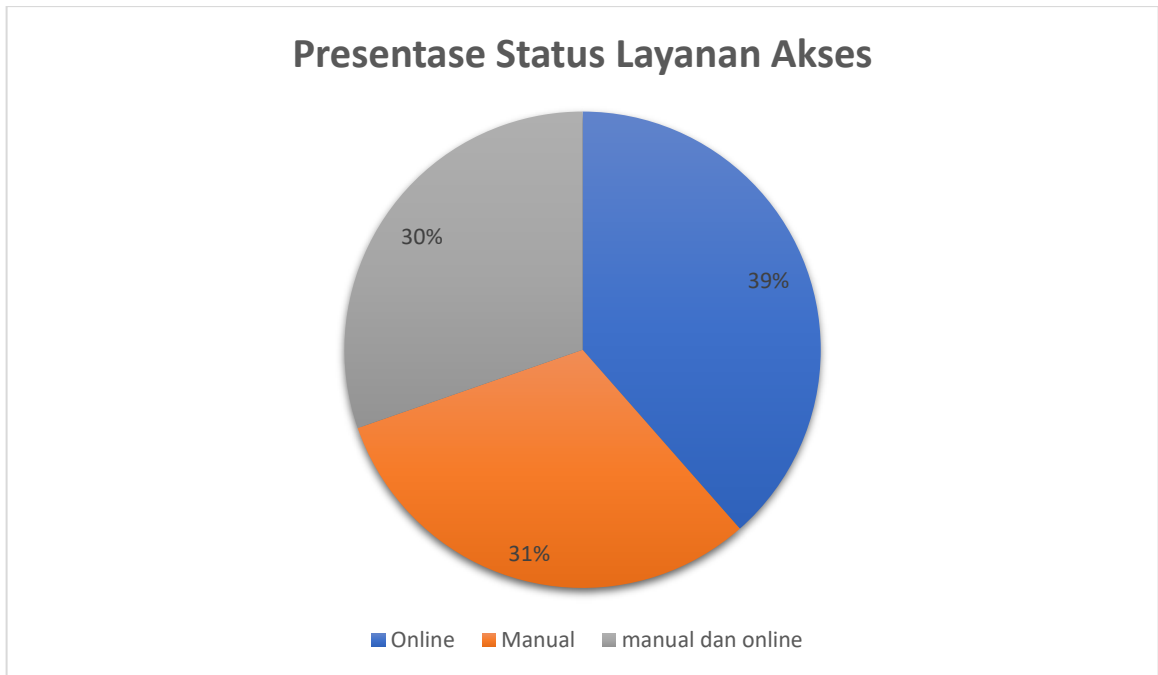
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021



Pemerintah Kabupaten Mojokerto

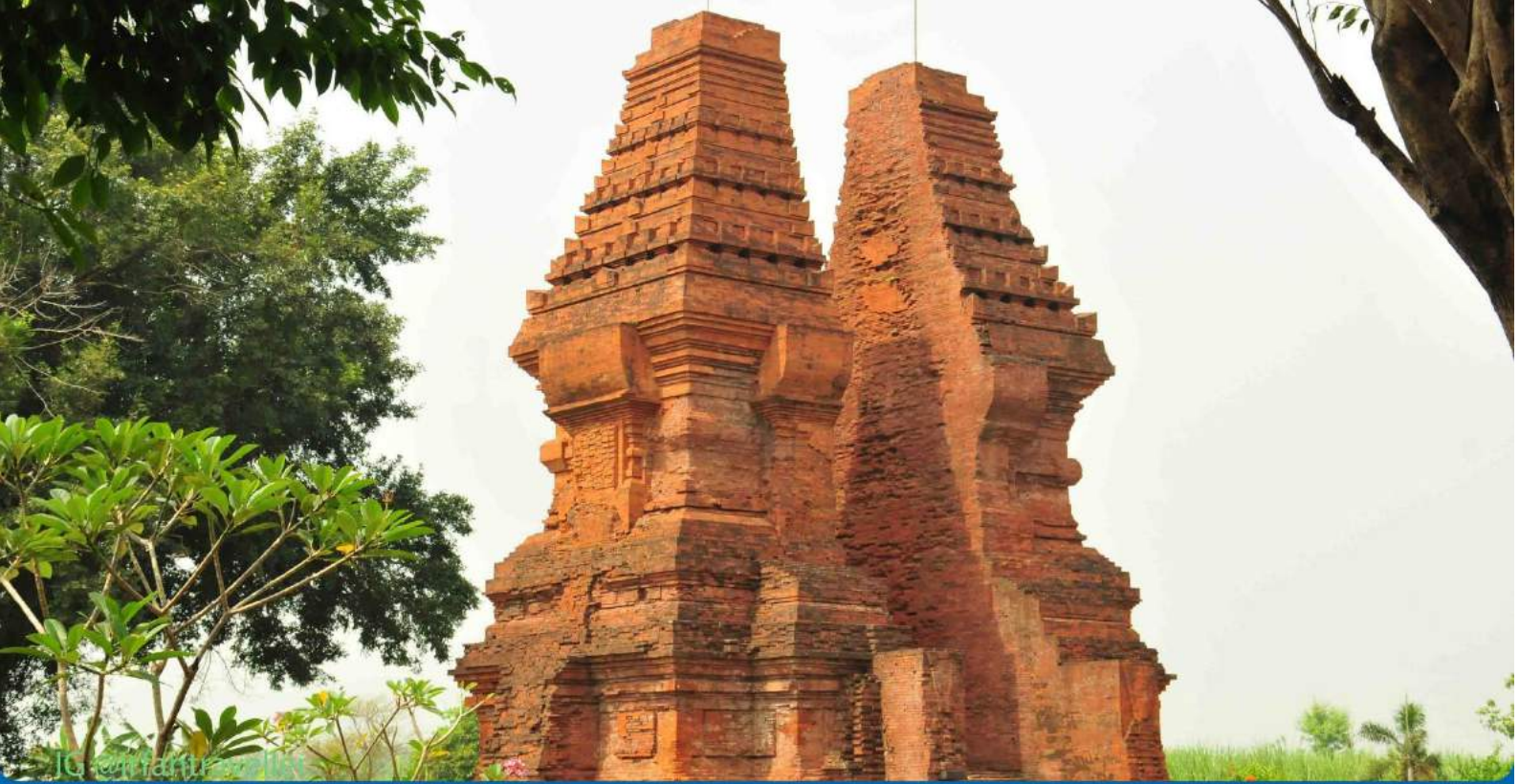


PT Tatacipta Teknologi Indonesia



Gambar 3. 4 Presentase Status Akses Layanan

Dari **Gambar 3.4** pada 43 PD dapat dilihat bahwa layanan yang **sudah Online dan didukung aplikasi** sebanyak **94 layanan online atau 39%**, **belum didukung oleh aplikasi atau masih Manual** sebanyak **76 layanan manual atau 31%**, dan **layanan yang Online dan memiliki opsi Manual** sebanyak **74 layanan atau 30%**.



BUKU 1

Kondisi Eksisting SPBE

Pemerintah Kabupaten Mojokerto

dan GAP Analysis

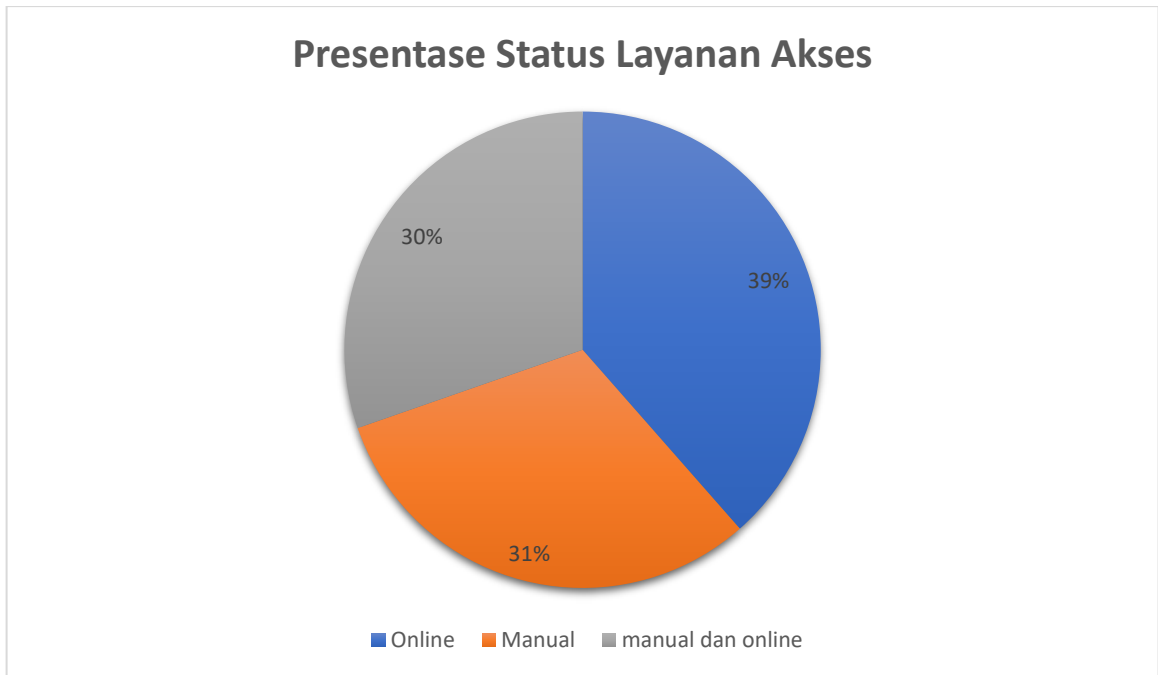
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021



Pemerintah Kabupaten Mojokerto



PT Tatacipta Teknologi Indonesia



Gambar 3. 4 Presentase Status Akses Layanan

Dari **Gambar 3.4** pada 43 PD dapat dilihat bahwa layanan yang **sudah Online dan didukung aplikasi** sebanyak **94 layanan online atau 39%**, **belum didukung oleh aplikasi atau masih Manual** sebanyak **76 layanan manual atau 31%**, dan **layanan yang Online dan memiliki opsi Manual** sebanyak **74 layanan atau 30%**.

Pada **Tabel 3.3** merupakan penjabaran kondisi eksisting layanan yang tersebar pada 43 PD di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 3. 3 Kondisi Eksisting Layanan Publik

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	Layanan Pengaduan Masyarakat	Manual
2		1	Penerbitan dan penetapan PD/SPPT/DHKP	Manual&Online
		2	Perumusan dan penyampaian blangko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	Manual&Online
		3	Layanan Menghitung kerugian daerah	Manual&Online
		4	Pencatatan barang	Manual&Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
	Badan Pendapatan Daerah	5	Penjabaran APBD	Online
		6	Layanan PBB P2	Online
		7	Perumusan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)	Manual
		8	Pelayanan SPTPD BPHTB	Online
		9	Pendaftaran dan penetapan Nomor Obyek Pajak (NOP)	Online
		10	Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerbitan dan penyampaian Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	Manual&Online
		11	Rekonsiliasi	Manual
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	Online
		2	SIMBADA	Online
		3	SIMDA	Online
		4	SIMDAGO	Online
		5	E-Persediaan	Online
		6	Layanan Aset	Manual&Online
		7	Layanan penganggaran	Online
		8	Layanan Penggajian	Online
		9	Layanan SP2B	Online
		10	Layanan Pelaporan	Manual&Online
		11	Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset	Manual
		12	Pendataan dan Penatausahaan Aset	Manual&Online
		13	Layanan aset tanah dan bangunan	Manual
		14	Bagi Hasil Retribusi kepada pihak lain	Manual&Online
		15	Bantuan Keuangan Desa (Infrastruktur)	Manual&Online
		16	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Manual&Online
4	Badan Perencanaan	1	SIPD	Online
		2	Layanan Informasi Tata Ruang	Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
	Pembangunan Daerah			
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1	Pelayanan Permintaan Data dan Informasi	Manual&Online
		2	Pembuatan Karpeg, Karis, Karsu, KPE dan Konversi NIP	Manual&Online
		3	Rekonsiliasi dan Validasi Data SIMPEG	Manual&Online
		4	Pelaksanaan Update Data Simpeg	Manual&Online
		5	Pelaporan Kepegawaian Semester	Manual&Online
		6	Pelaporan Kepegawaian Tribulan	Manual&Online
		7	Kenaikan Pangkat	Manual&Online
		8	Pengangkatan Dalam jabatan Struktural	Manual&Online
		9	Mutasi Pegawai Antar Unit Kerja/PD	Manual&Online
		10	Mutasi Pegawai Antar Daerah/Departemen	Manual&Online
		11	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun	Manual&Online
		12	Peninjauan Masa Kerja	Manual&Online
		13	Pembuatan Kartu Peserta Taspen	Manual&Online
		14	Pengadaan Pegawai ASN	Manual&Online
		15	Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional	Manual&Online
		16	Fasilitasi Izin Belajar	Manual&Online
		17	Fasilitasi Izin Tugas Belajar	Manual&Online
		18	Fasilitasi Diklat Teknis/ Fungsional	Manual&Online
		19	Melaksanakan Pembinaan Perkawinan	Manual&Online
		20	Pembinaan Kepegawaian	Manual&Online
		21	Pelayanan Penilaian Kinerja ASN dan Perhitungan TPP	Online
		22	Pelayanan Penilaian Kehadiran ASN	Online
		23	Pelayanan Arsip Kepegawaian	Online
		24	Pelayanan Dashboard ASN	Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		25	Pelayanan Update Data Jabatan	Online
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Pemberian Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan	Manual
		2	Layanan Kelembagaan	Manual&Online
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Destana (penyuluhan ke masyarakat)	Manual
8	Bagian Administrasi Pemerintahan		Tidak ada Layanan	
9	Bagian Organisasi	1	E-Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Online
10	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1	Layanan Permohonan Hibah	Manual
11	Bagian Hukum	1	Layanan produk hukum melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)	Manual&Online
12	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	Layanan Pelaporan Adanya Rokok Ilegal	Keduanya
13	Bagian Administrasi Pembangunan		Tidak ada Layanan	
14	Bagian Umum		Tidak ada Layanan	
15	Bagian Perencanaan dan Keuangan		Tidak ada Layanan	
16	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	Publikasi kegiatan Pemerintahan Daerah	Manual
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Layanan pengaduan online, LAPORSPAN	Online
		2	Layanan Data di PPID	Manual&Online
		3	Portal Covid-19 Kabupaten Mojokerto	Manual&Online
18	Dinas Pendidikan	1	Bantuan Operasional PAUD	Manual&Online
		2	Pendirian Sekolah	Manual&Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan		
		3	Manajemen Tenaga Pendidikan	Manual&Online		
		4	Penerimaan Peserta Didik Baru	Manual&Online		
		5	Pengembangan Keprofesian	Manual&Online		
		6	Pengajuan nilai angka kredit	Manual&Online		
		7	Program Indonesia Pintar	Manual&Online		
		8	Penggantian Ijazah Hilang	Manual		
		9	Penilaian Akreditasi Sekolah PAUD	Manual&Online		
		10	Pengajuan Sarana Prasarana Sekolah	Manual&Online		
		11	Layanan Manajemen Surat	Online		
		12	Mutasi Siswa	Manual&Online		
		13	Menghimpun data pokok pendidikan PAUD	Online		
		14	Pemindahan konversi mata pelajaran tenaga pendidik	Manual&Online		
		15	Layanan Tunjangan Profesi	Manual&Online		
		19	Dinas Kesehatan	1	Surat Ijin Praktek Apoteker	Manual&Online
				2	Layanan SIPTTK	Manual&Online
3	Layanan UMOT			Manual		
4	Layanan Surat Ijin Praktek Dokter dll			Manual&Online		
5	Layanan PIRT			Manual		
6	Layanan PKRT			Manual		
7	Laik Higienis Jasa Boga			Manual		
8	Pelayanan Kesehatan Rujukan			Manual		
9	Surat ijin kerja rekam medis			Manual&Online		
10	Surat Ijin Perawat			Manual&Online		
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Layanan konsultasi BUMDES	Manual		
		2	Layanan PKK	Manual&Online		
		3	Layanan Klinik Lakon Penggoda	Manual&Online		
		4	Layanan Posyandu	Manual&Online		
		5	Layanan Teknologi Tepat Guna	Manual		
21		1	Penerbitan Kartu Keluarga	Online		

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Online
		3	Penerbitan Surat Pindah Keluar	Online
		4	Pencatatan Akta Perkawinan	Online
		5	Pencatatan Akta Perceraian	Online
		6	Pemberian Catatan Pinggir Pengesahan Anak	Online
		7	Pemberian Catatan Pinggir Pengakuan Anak	Online
		8	Penerbitan Akta Kematian	Online
		9	Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran	Online
		10	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi WNI	Online
		11	Penerbitan Surat Pindah Datang	Online
		12	Legalisir Dokumen Kependudukan	Online
		13	Pengendalian Dokumen	Online
		14	Pengendalian arsip	Online
		15	Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai	Online
		16	Penanganan Keluhan Pelanggan	Online
		17	Pengukuran Kepuasan Pelanggan	Online
		18	Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data	Online
		19	Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang Atau Rusak	Online
		20	Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang Atau Rusak Bagi Orang Asing	Online
		21	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi WNA	Online
		22	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Karena Perubahan Data	Online
		23	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Karena Pindah Datang	Online
		24	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Karena Hilang Atau Rusak	Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		25	Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (Bagi Orang Asing)	Online
		26	Penerbitan Surat Pindah Keluar	Online
		27	Pelayanan KK & KTP Pada Mobil Layanan	Online
		28	Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Online
		28	Pencatatan Pembatalan Perceraian	Online
		30	Pemberian Catatan Pinggir Pengangkatan Anak	Online
		31	Pemberian Catatan Pinggir Perubahan Nama	Online
		32	Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran	Online
		33	Penerbitan Kutipan II Akta Kematian	Online
		34	Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan	Online
		35	Penerbitan Kutipan II Akta Perceraian	Online
		36	Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Online
		37	Penanganan Keluhan Pelanggan	Online
		38	Permintaan Data	Online
		39	Pelayanan Pendaftaran Administrasi Kependudukan	Online
		40	Pengambilan Dokumen Kependudukan Berbasis Digital	Online
		41	Pelayanan Balaputra (Baru Lahir Pulang Bawa Akta)	Online
		42	Pelayanan Motor Sakti (Motor Siap Antar Akta Kematian)	Online
		43	Pelayanan Sinden Katut Mas Hardi (Sekali Datang Kk, Ktp, Akta Kelahiran Jadi)	Online
		44	Pelayanan Drive Thru Untuk Cetak KK & KTP (Tanpa Perubahan)	Online
22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1	Fasilitasi pemasaran koperasi dan UMKM	Manual&Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		2	Pelatihan terkait produksi usaha mikro	Manual&Online
		3	pelatihan wirausaha	Manual&Online
		4	Pembinaan perubahan anggaran dasar koperasi	Manual
		5	Pembinaan produksi usaha mikro	Manual&Online
		6	Pembinaan Tata cara pembentukan koperasi	Manual
		7	Penyuluhan manajemen koperasi	Manual
		8	Surat Keterangan Kepengurusan	Manual
		9	Layanan penilaian kesehatan koperasi	Manual
		10	Fasilitasi klinik bisnis	Manual&Online
		11	Layanan Sibolasi	Online
		23	Dinas Lingkungan Hidup	
24	Dinas Pangan dan Perikanan	1	Penjualan Benih Ikan	Manual
		2	Layanan Toko Tani Indonesia Center	Manual&Online
25	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	1	Rekomendasi Penggunaan Stadion/Indoor	Manual
		2	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Online
		3	Rekomendasi Kartu Induk Kesenian	Manual&Online
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Laporan PJU	Manual
		2	Rekomendasi Peil Banjir	Manual
		3	Perlindungan garis sepadan jalan untuk pembangunan pagar	Manual
		4	Informasi tataruang secara tertulis	Manual
		5	Laporan Pohon tumbang	Manual
		6	Perijinan membuat jembatan keluar masuk diatas saluran air	Manual
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	1	Izin Dasar	Manual&Online
		2	Izin Sektor Kesehatan	Online
		3	Izin Sektor Koperasi Dan Ukm	Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
	Terpadu Satu Pintu	4	Izin Sektor Pendidikan	Online
		5	Izin Sektor Lingkungan Hidup	Online
		6	Izin Sektor Perdagangan	Online
		7	Izin Sektor Perhubungan	Online
		8	Izin Sektor Perindustrian	Online
		9	Izin Sektor Pertanian	Online
		10	Izin Sektor Ketenagakerjaan	Online
		11	Izin Sektor Pupr	Online
28	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	1	Sosialisasi KB	Manual&Online
		2	Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Manual&Online
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Perpustakaan keliling	Manual
		2	Pustaka Terapan berbasis Inklusi Nasional	Manual
		3	Pustaka Asiek	Manual
		4	Sirkulasi (EPusda)	Online
		5	Layanan Sirkulasi	Manual&Online
		6	Pelayanan Masyarakat kearsipan	Manual
30	Dinas Pertanian	1	Rumah Potong Hewan	Manual
		2	Lab Kesehatan Hewan	Manual
		3	Pasar Kesehatan Hewan	Manual
		4	Rumah Potong Unggas	Manual
31	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	1	Pengurusan rekomendasi andalalin	Manual
		2	Pengujian Kendaraan	Online
		3	Layanan Ijin Trayek	Manual
32	Dinas Sosial	1	Pemulangan Orang Terlantar	Manual
		2	Pembinaan Pekerja Sosial	Manual
		3	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Manual

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		4	Pembinaan Karang Taruna	Manual
33	Dinas Tenaga Kerja	1	Pembuatan Rekom Paspor Calon Pekerja Imigran Indonesia	Online
		2	Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Manual
		3	Pendaftaran Bursa Kerja Khusus	Manual
		4	Pengesahan perjanjian pemagangan	Manual
		5	Pendaftaran Transmigrasi	Manual
		6	Pendaftaran AK 1 (Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja)	Manual&Online
		7	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Manual
		8	Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Manual
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Pembinaan dan penyuluhan	Manual
		2	Pembinaan kepada masyarakat tentang alat ukur	Manual
		3	Pengurusan SNI Produk	Manual
		4	Pengadaan Event promosi dan pameran produk industri	Manual
		5	Pengawasan alat ukur	Manual
		6	Pengurusan Merk Produk	Manual
		7	Penyuluhan alat ukur	Manual
		8	Manajemen data rekap export import	Manual&Online
		9	Manajemen retribusi pasar rakyat	Manual
35	INSPEKTORAT	1	Pelayanan Konsultasi	Manual
		2	SimHP (Hasil Pengawasan) Internal	Manual&Online
		3	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Manual
36	RSUD R.A. Basuni	1	Layanan Antrian	Manual&Online
		2	Layanan CSSD	Manual
		3	Layanan Farmasi	Online
		4	Layanan Foto XRay	Manual

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		5	Layanan Gizi	Online
		6	Layanan Kamar Operasi	Online
		7	Layanan Pengadaan	Online
		8	Layanan Rawat Inap	Online
		9	Layanan Rawat Jalan (POLI)	Online
		10	Layanan Rekam Medis	Manual
		11	Layanan Bayi	Online
		12	Layanan Emergency Ibu Bersalin	Online
		13	Layanan ICU	Online
		14	Layanan IGD	Online
		15	Layanan Laborat	Online
		16	Layanan USG	Manual
37	SATPOL PP	1	Pengamanan Rumah Dinas Pejabat / Asset	Manual
		2	Pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang-orang penting	Manual
38	Kecamatan Jetis	1	Pelayanan Administrasi (PATEN)	Manual
39	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	Layanan Pengadaan dengan LPSE	Online
40	RSUD Prof dr Soekandar	1	Layanan Kesehatan	Manual&Online
		2	Layanan Anjungan Pendaftaran Mandir	Manual&Online
41	Kecamatan Pungging	1	Pelayanan Administrasi (PATEN)	Manual
		2	Dispensasi Nikah	Manual
42	Kecamatan Mojosari	1	Layanan administrasi kependudukan	Online
43	Kecamatan Sooko	1	Layanan administrasi kependudukan	Online
		2	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pelayanan Sosial	Manual
		3	Layanan Rekomendasi Izin Keramaian	Manual
		4	Layanan Pengesahan Proposal dan Rekomendasi	Manual

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		5	Layanan Dispensasi Nikah	Manual
		6	Layanan Legalisasi Surat-surat	Manual
		7	Layanan Evaluasi APBDesa	Manual

3.2.4 Ketersediaan Layanan Terhadap Program

Dalam upaya melaksanakan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka dikembangkan layanan yang mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat serta menjadi gambaran bahwa program pemerintah terealisasi dengan baik. Jabaran ketersediaan layanan terhadap program RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Mojokerto dijabarkan pada **Lampiran 4.1 Identifikasi Layanan Terhadap Program RPJMD.**

Dari data yang telah dikumpulkan, diketahui bahwa tidak seluruh program pada RPJMD didukung oleh layanan SPBE, hal ini dikarenakan yang tertuliskan di RPJMD adalah program prioritas, sehingga program setiap PD hanya disebutkan beberapa saja. Pada RPJMD, terdapat 32 program yang tersebutkan untuk keseluruhan PD, terdapat beberapa program yang sama seperti Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Dari keseluruhan program tersebut, terdapat program yang didukung oleh layanan pada yaitu sejumlah 11 Program. Sedangkan terdapat 21 Program yang tidak didukung oleh layanan. Dari data yang dianalisis, terdapat program yang didukung oleh lebih dari satu layanan. Hasil pemetaan yang dilakukan, sebanyak 17 layanan mendukung program RPJMD dan sebanyak 232 layanan tidak mendukung program RPJMD. Jumlah data memang terdapat perbedaan dengan data layanan, dikarenakan terdapat layanan yang mendukung lebih dari satu program dan sebaliknya. Layanan-layanan yang ada sudah mendukung tugas dan fungsi dari setiap PD. Karena memang program yang tercantum pada RPJMD merupakan program prioritas dari setiap PD, yang nantinya dijabarkan pada RENSTRA dan RENJA. Sehingga tidak keseluruhan layanan mendukung daari program yang disebutkan pada RPJMD.

3.2.5 Metadata Layanan SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data



- **Penjelasan IKK Output:**

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKK Output :

- 5) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik.

Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik baru ada 1 layanan yaitu layanan tata naskah dinas "e-office" yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dari total 244 layanan SPBE yang ada di Kab. Mojokerto.


Data pendukung :

- Screenshot <https://e-office.mojokertokab.go.id>
- Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP Analysis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021 hal. 41-42 & hal 172-179 (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

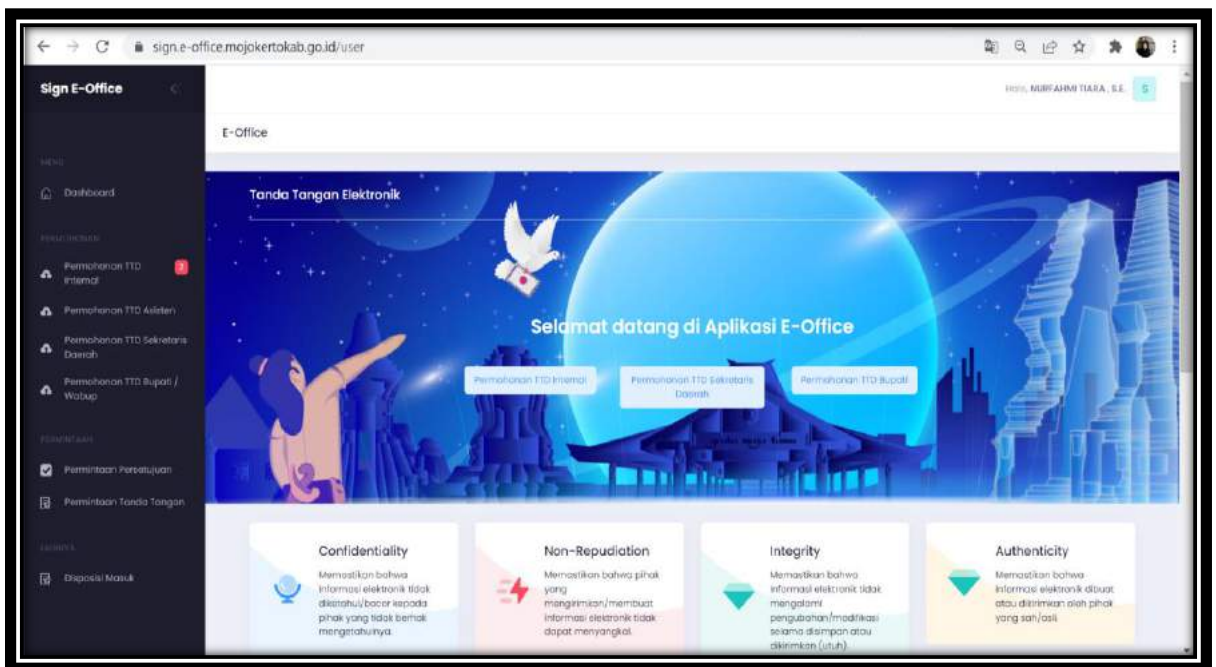
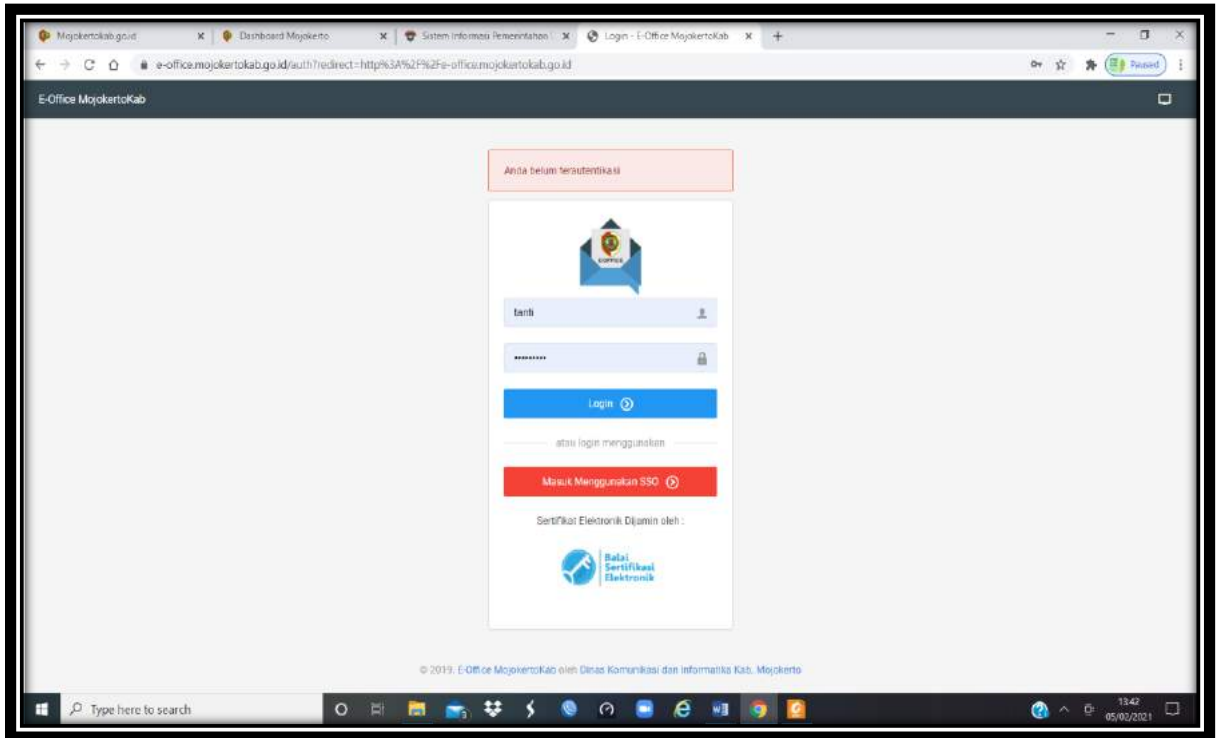
Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Screenshot <https://e-office.mojokertokab.go.id>



Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi (User Manual)

APLIKASI E-OFFICE KABUPATEN MOJOKERTO

Panduan berupa video : <https://s.id/panduan-eoffice-2021/>



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO**

2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
1. PENDAHULUAN	1
2. MENU DAN CARA PENGGUNAAN	1
3.1. Struktur Menu.....	1
3.1.1. Menu Tugas	1
3.1.2. Menu Surat Masuk	1
3.1.3. Menu Surat Terkirim.....	1
3.1.4. Menu Draf	1
3.1.5. Menu Agenda Surat Masuk	1
3.1.6. Menu Agenda Surat Keluar.....	1
3.2. Pengguna	1
3.2.1. Cara Membuka Aplikasi.....	1
3.2.2. Halaman Tugas	2
3.2.3. Surat Masuk.....	3
3.2.4. Detail Surat Masuk	4
3.2.5. Respon Terhadap Surat Masuk.....	4
3.2.6. Disposisi.....	4
3.2.7. Halaman Terkirim	5
3.2.8. Detail Surat Terkirim.....	5
3.2.9. Revisi Disposisi.....	6
3.2.10. Halaman Draf	6
3.2.11. Detail Halaman Draf.....	7
3.2.12. Notifikasi	7
3.2.13. Logout	8
3.3. Admin Surat	8
3.3.1. Agenda Surat Masuk.....	8
3.3.2. Ekspedisi Agenda Surat Masuk.....	12
3.3.3. Agenda Surat Keluar	14
3.3.4. Status Persetujuan.....	17
3.3.5. Pemberian Nomor	17
3.3.6. Kotak Pesan	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Halaman Login E-Office	1
Gambar 3. 2 Klik Tombol Masuk SSO	2
Gambar 3. 3 Tampilan Single Sign On Kabupaten Mojokerto	2
Gambar 3. 4 Halaman Tugas	3
Gambar 3. 5 Halaman Surat Masuk	3
Gambar 3. 6 Gambar Detail Surat Masuk	4
Gambar 3. 7 Gambar Melakukan Respon	4
Gambar 3. 8 Halaman Disposisi	5
Gambar 3. 9 Data Agenda Surat Masuk	13
Gambar 3. 10 Status Surat Masuk	13
Gambar 3. 11 Ekspedisi Surat Masuk	14
Gambar 3. 12 Data Agenda Surat Keluar	14
Gambar 3. 13 Menambahkan Penyetuju	15
Gambar 3. 14 Menambahkan Dokumen	16
Gambar 3. 15 Menambah Dokumen Lain	16
Gambar 3. 16 Daftar Penyetuju	17
Gambar 3. 17 Pemberian Nama Surat	18
Gambar 3. 18 Melihat Referensi Surat Keluar	18
Gambar 3. 19 Kotak pesan pada setiap OPD	19
Gambar 3. 20 Melihat surat masuk	19

1. PENDAHULUAN

2. MENU DAN CARA PENGGUNAAN

3.1. Struktur Menu

- 3.1.1. Menu Tugas
- 3.1.2. Menu Surat Masuk
- 3.1.3. Menu Surat Terkirim
- 3.1.4. Menu Draf
- 3.1.5. Menu Agenda Surat Masuk
- 3.1.6. Menu Agenda Surat Keluar

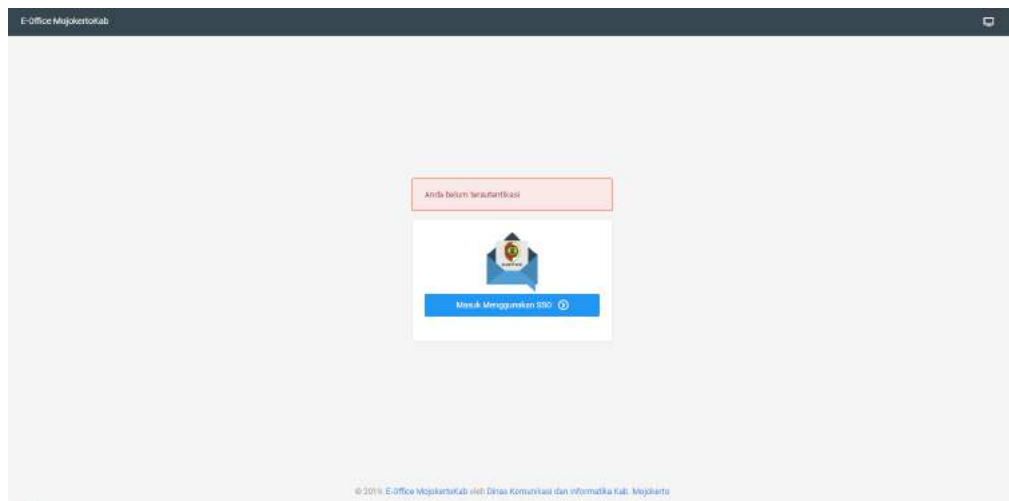
3.2. Pengguna

3.2.1. Cara Membuka Aplikasi

Berikut cara untuk menggunakan aplikasi E-Office :

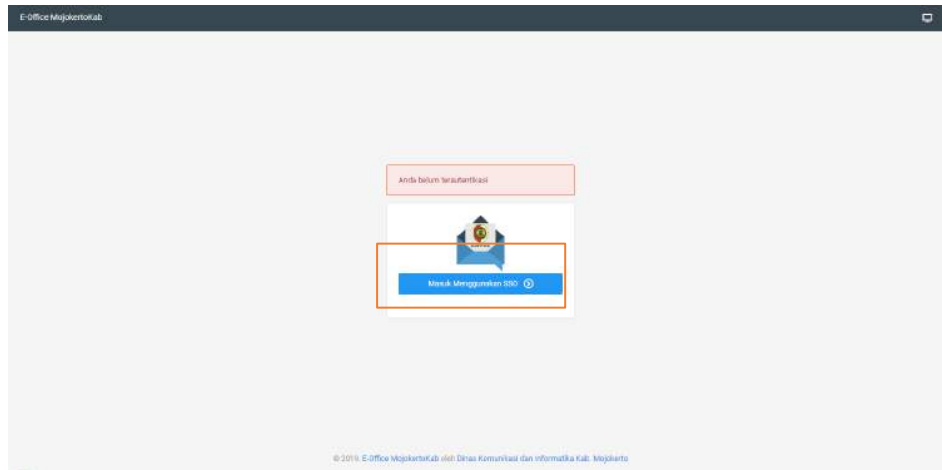
1. Aplikasi E-Office dibuka dengan menggunakan browser (IE, Chrome atau Mozilla Firefox) dengan alamat url <http://eoffice.mojokertokab.go.id>.
2. Tekan tombol “Enter”. Maka akan diarahakan pada halaman untuk aplikasi E-Office.

Maka pada layar komputer akan tambah halaman seperti pada gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Halaman Login E-Office

Untuk login pada aplikasi, klik tombol “Masuk dengan SSO”



Gambar 3. 2 Klik Tombol Masuk SSO

Setelah itu akan diarahkan ke halaman Single Sign On Kabupaten Mojokerto. Masukkan Username dan Password yang di diberikan.

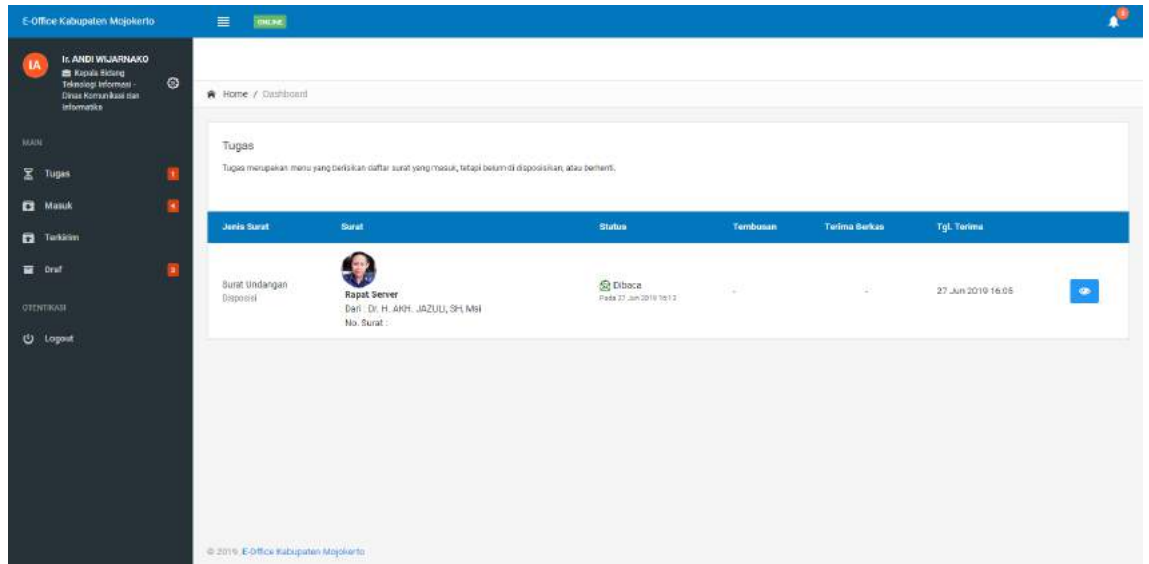


Gambar 3. 3 Tampilan Single Sign On Kabupaten Mojokerto

Jika berhasil melakukan login, akan diarahkan ke halaman tugas dari E-Office Kabupaten Mojokerto.

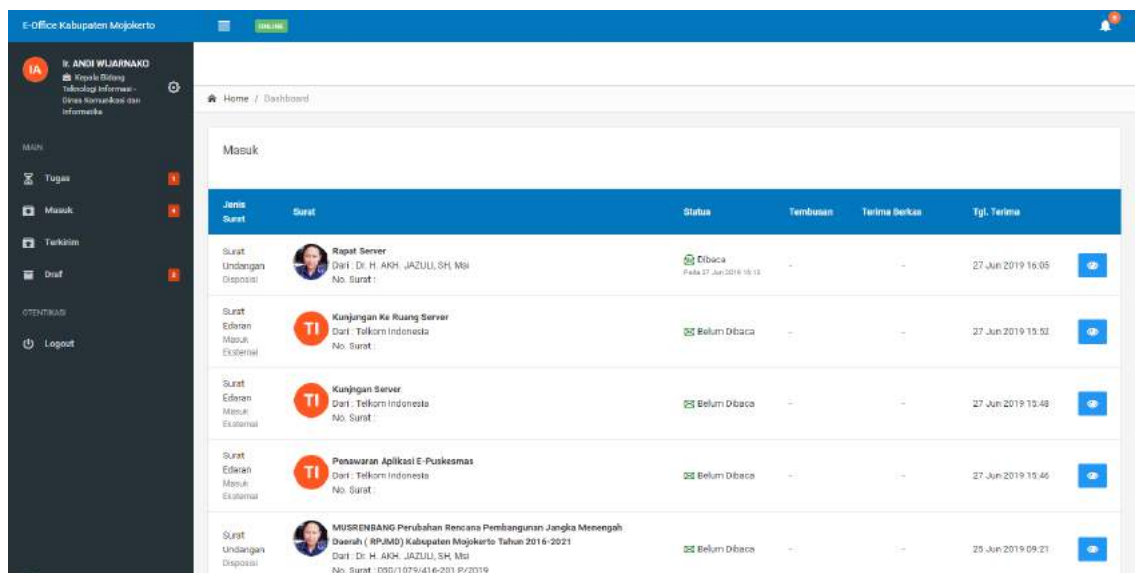
3.2.2. Halaman Tugas

Halaman tugas berisikan informasi mengenai surat masuk atau disposisi yang hanya dibaca atau belum di disposisikan.



Gambar 3. 4 Halaman Tugas

3.2.3. Surat Masuk



Gambar 3. 5 Halaman Surat Masuk

3.2.4. Detail Surat Masuk

Disposisi Masuk

Di Disposisikan Oleh: **Dr. H. AKH. JAZULI, SH, Msi**
Kepala - Dinas Komunikasi dan Informatika

Surat: **SD Kunjungan Ke Ruang Server**
Sekretariat Daerah - asdasdasd
Surat Masuk Eksternal [Lihat Surat](#)

Berkas Fisik: **Disertai Berkas Fisik**
Berkas sudah diterima pada 20 Jun 2019 07:21

Isi Disposisi: **Proses Lebih Lanjut**
Lanjutkan kang

Respon:

[Perbarui Respon](#)

[Penerima \(2\)](#) [Riwayat](#) [Disposisi](#)

Gambar 3. 6 Gambar Detail Surat Masuk

3.2.5. Respon Terhadap Surat Masuk

Isi Disposisi: **Proses Lebih Lanjut**
Cepet

Respon:

[Perbarui Respon](#)

Gambar 3. 7 Gambar Melakukan Respon

Respon memiliki fungsi untuk memberi informasi pemberi disposisi terhadap disposisi yang telah diberikan. Cara memberikan respon adalah klik **Pilih Respon**. Pilih respon yang diinginkan. Lalu isi uraian respon, klik **Perbarui Respon**.

3.2.6. Disposisi

Untuk melakukan disposisi / meneruskan disposisi dengan cara memilih arahan dan mengisi uraian dari arahan. Selanjutnya menentukan penerima dari disposisi. Lalu klik tombol **"Kirim"**.

Meneruskan Disposisi

Arahan * - Pilih Arahan -

Uraian Arahan

[Tambah Penerima](#)

#	Pegawai	Sebagai Tembusan	Disertai Berkas Fisik
Tidak ada data.			

[Kirim dan Cetak](#)
[Kirim](#)

Gambar 3. 8 Halaman Disposisi

3.2.7. Halaman Terkirim

Halaman terkirim merupakan halaman yang digunakan untuk melihat riwayat surat yang telah di disposisikan.

Terkirim

Jenis Surat	Surat	Arahan	Tgl. Riwayat
Surat Edaran Disposisi	Kunjungan Ke Ruang Server Dari : Sekretariat Daerah No. Surat : asdasdasd	Proses Lebih Lanjut, asdasdasdasd 1 Orang	20 Jun 2019 07:20

© 2010. E-Office Kabupaten Mojokerto

3.2.8. Detail Surat Terkirim

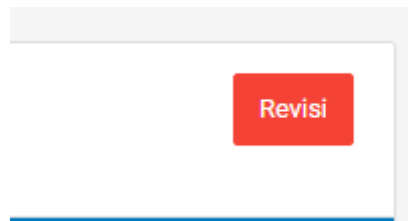
Pada gambar detail surat terkirim memiliki informasi tentang penerima disposisi, serta status disposisi yang terkirim.

Status Disposisi [Revisi](#)

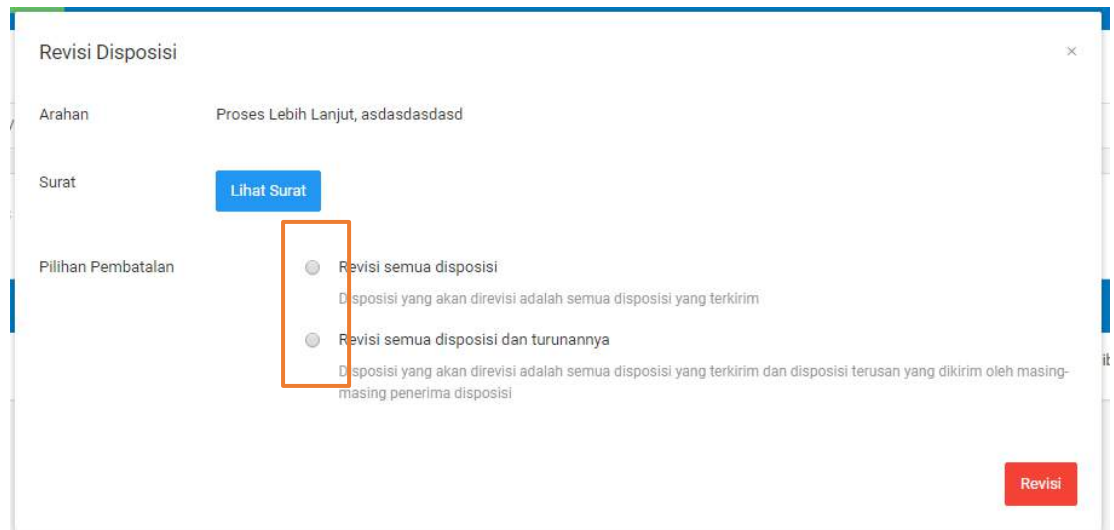
No.	Nama Penerima	Status
1	Wirat Moko Hadi S - Staf Seksi Sistem Informasi	✉ Belum dibaca

Apabila disposisi memiliki kesalahan, klik tombol revisi pada pojok kanan atas. Seperti pada gambar.

3.2.9. Revisi Disposisi

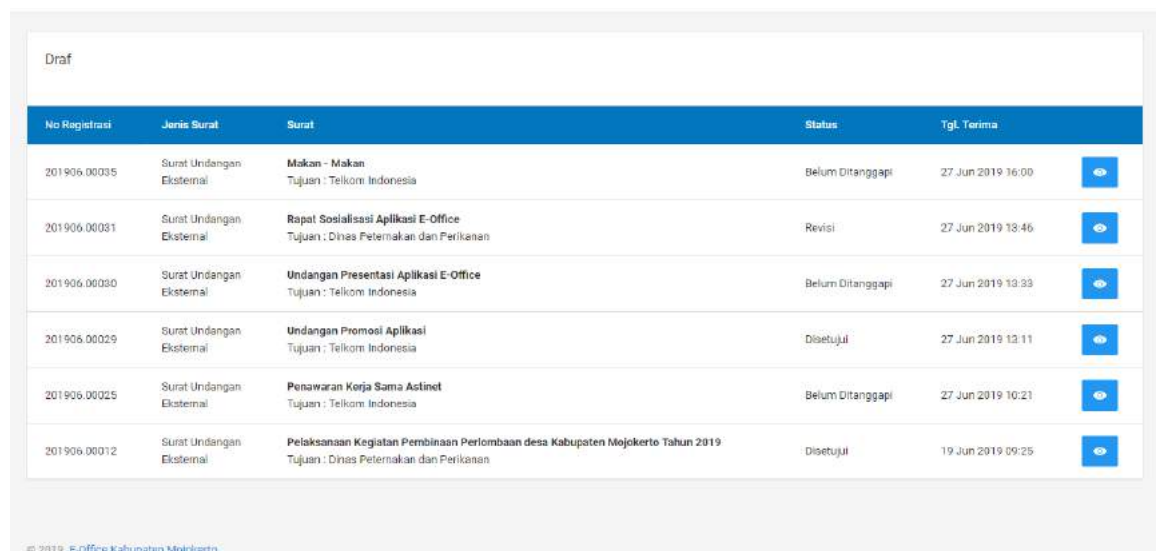


Maka akan muncul popup formulir revisi yang harus diisi.



Pilih salah satu pilihan alasan dari pembatalan disposisi. Lalu klik Revisi

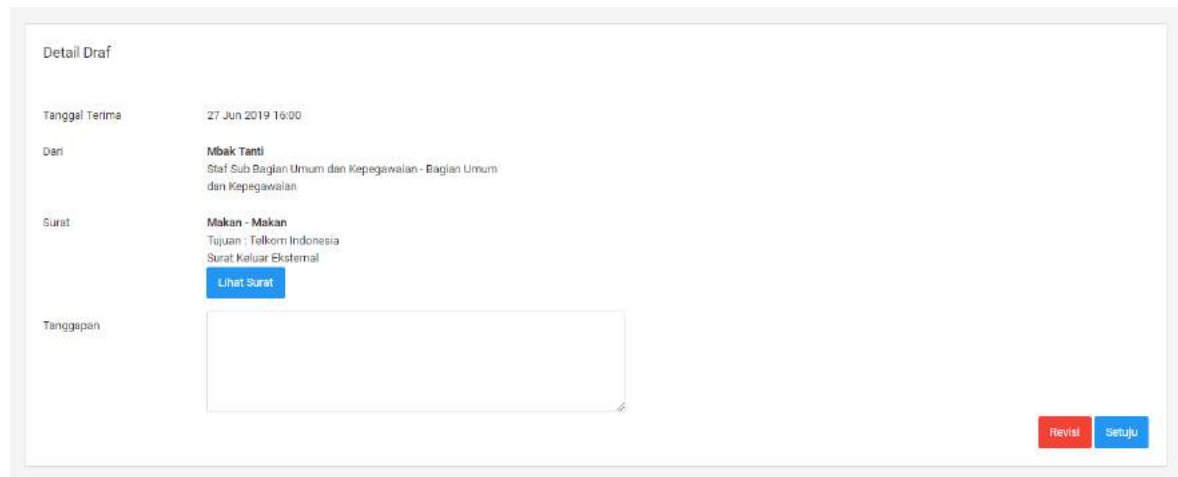
3.2.10. Halaman Draf



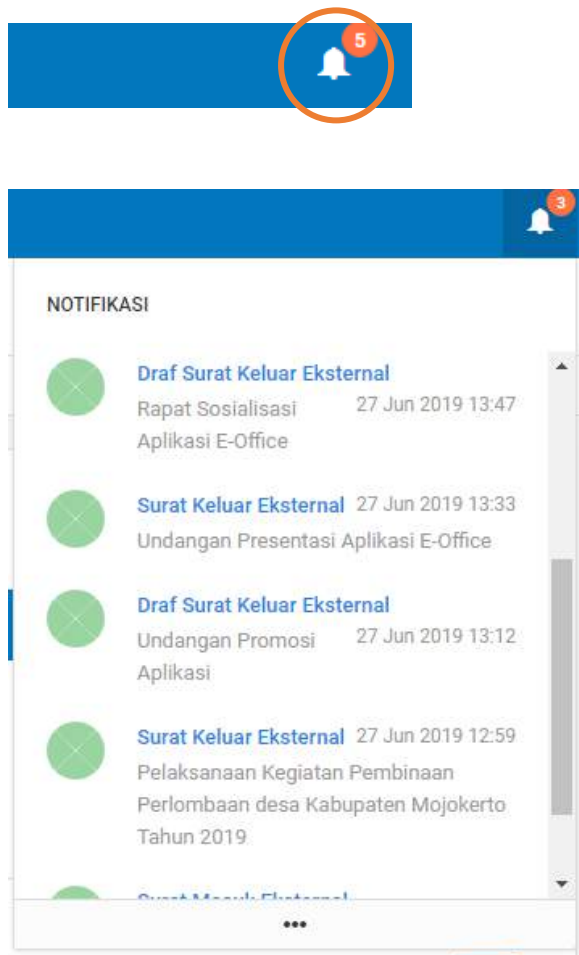
No Registrasi	Jenis Surat	Surat	Status	Tgl. Terima	
201906.00035	Surat Undangan Eksternal	Makan - Makan Tujuan : Telkom Indonesia	Belum Ditanggapi	27 Jun 2019 16:00	
201906.00031	Surat Undangan Eksternal	Rapat Sosialisasi Aplikasi E-Office Tujuan : Dinas Peternakan dan Perikanan	Revisi	27 Jun 2019 18:46	
201906.00030	Surat Undangan Eksternal	Undangan Presentasi Aplikasi E-Office Tujuan : Telkom Indonesia	Belum Ditanggapi	27 Jun 2019 19:33	
201906.00029	Surat Undangan Eksternal	Undangan Promosi Aplikasi Tujuan : Telkom Indonesia	Disetujui	27 Jun 2019 12:11	
201906.00025	Surat Undangan Eksternal	Penawaran Kerja Sama Astinet Tujuan : Telkom Indonesia	Belum Ditanggapi	27 Jun 2019 10:21	
201906.00012	Surat Undangan Eksternal	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perombaan desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Tujuan : Dinas Peternakan dan Perikanan	Disetujui	19 Jun 2019 09:25	

© 2019. E-Office Kabupaten Mojokerto

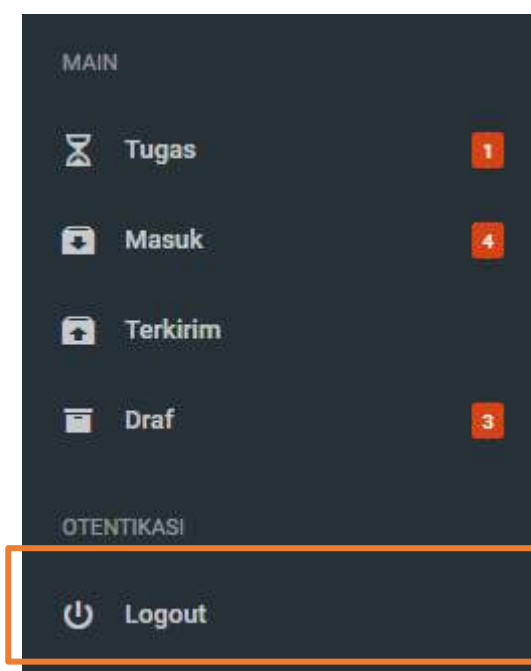
3.2.11. Detail Halaman Draf



3.2.12. Notifikasi



3.2.13. Logout



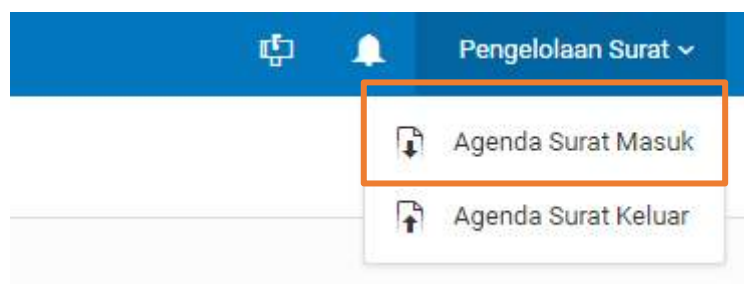
3.3. Admin Surat

Tugas dari admin surat adalah melakukan input terhadap agenda surat masuk, melakukan input agenda surat keluar, dan memantau kotak surat apabila terdapat surat masuk dari OPD lainnya yang melalui aplikasi E-Office.

Yang dimaksud agenda surat masuk adalah surat yang ditujukan kepada OPD baik secara manual ataupun melalui aplikasi. Sedangkan agenda surat keluar adalah surat yang akan dikirimkan kepada OPD / instansi lain. Berikut adalah penjelasan menggunakan menu agenda surat masuk, agenda surat keluar serta kotak surat.

3.3.1. Agenda Surat Masuk

Untuk masuk pada halaman agenda surat masuk, klik tombol pengelolaan surat. Maka akan muncul menu **Agenda Surat Masuk** dan **Agenda Surat Keluar**. Klik pada **Agenda Surat Keluar**.



Akan ditampilkan halaman utama dari agenda surat masuk. Halaman ini menampilkan data agenda surat masuk yang telah di tambahkan. Untuk menambahkan data baru, klik tombol tambah di pojok kanan atas.

Agenda Surat Masuk

+ Tambah

No. Registrasi	Surat	Status	Sifat Surat	Tanggal Surat	
201906.00036	Rapat Server Dari : Telkom Indonesia No. Surat :	✓ Telah Di Distribusikan	Penting	27 Jun 2019	
201906.00034	Kunjungan Ke Ruang Server Dari : Telkom Indonesia No. Surat :	✓ Telah Di Distribusikan	Penting	27 Jun 2019	
201906.00033	Kunjungan Server Dari : Telkom Indonesia No. Surat :	✓ Telah Di Distribusikan	Biasa	27 Jun 2019	
201906.00032	Penawaran Aplikasi E-Puskesmas Dari : Telkom Indonesia No. Surat :	✓ Telah Di Distribusikan	Penting	27 Jun 2019	
201906.00027	Penawaran Server Dari : Telkom Indonesia No. Surat :	✓ Telah Di Distribusikan	Penting	27 Jun 2019	

Setelah klik tombol tambah, akan diarahkan pada halaman tambah agenda surat masuk sesuai pada gambar.

Agenda Surat Masuk

No Registrasi *

Dari *

Perihal *

Kepada *

No. Surat

Tanggal Surat

Lampiran:

No. Agenda:

Jenis Surat *

Sifat Surat *

Lokasi Arsip:

#	Pegawai	Sebagai Tembusan	Disertai Berkas Fisik
Tidak ada data			

No file selected

Isikan data yang dibutuhkan untuk agenda surat masuk, antara lain :

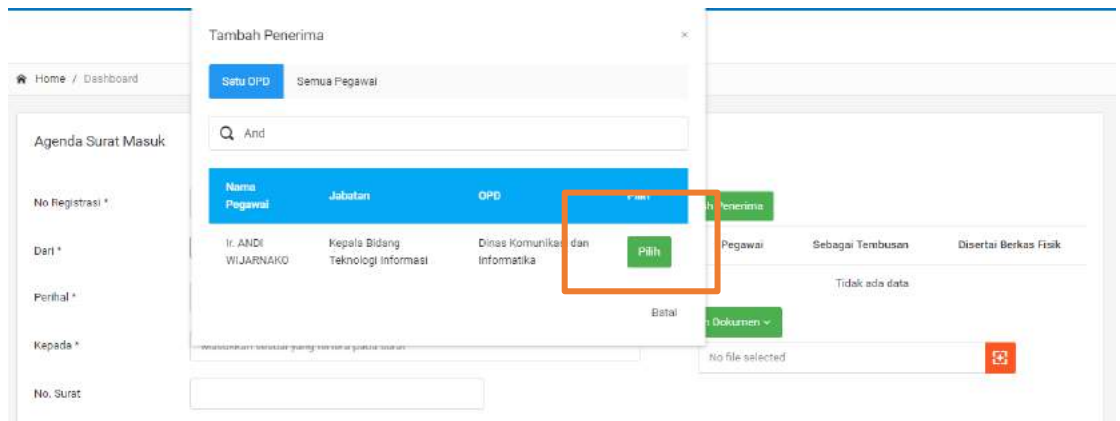
- No Registrasi (Akan terisi secara otomatis)
- Dari, instansi asal surat
- Perihal, sesuai dengan surat yang diterima

- Kepada, sesuai dengan yang tertulis di surat
- No Surat sesuai dengan surat
- Tanggal surat, tanggal surat masuk
- No Agenda, secara otomatis terisi, tetapi dapat diubah
- Jenis Surat
- Sifat Surat
- Lokasi penyimpanan arsip

Selanjutnya tambah penerima surat. Klik tombol Tambah Penerima.



Maka akan muncul popup tambah penerima sesuai dengan gambar.

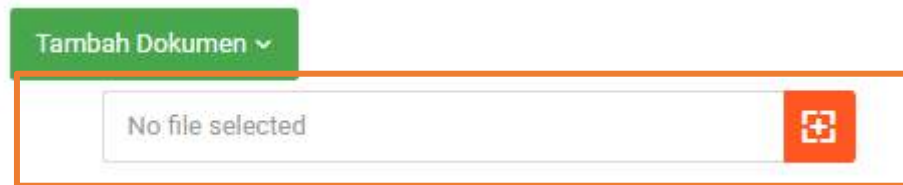


Cari pegawai dengan parameter nama. Jika pegawai sudah ditemukan, klik tombol Pilih/

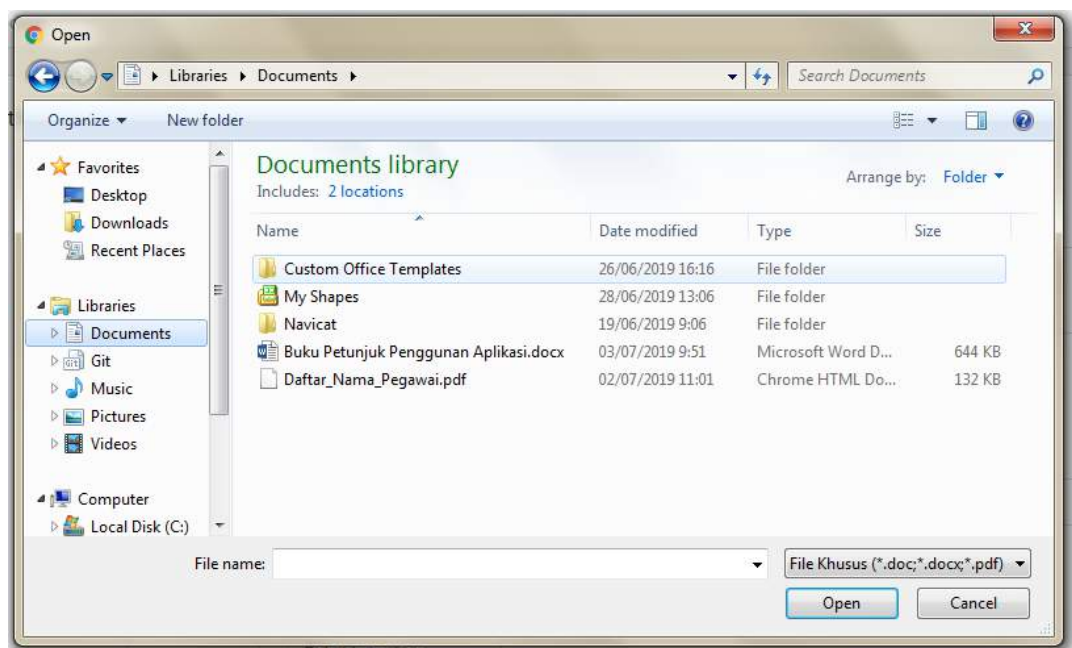


Secara langsung akan ditambahkan ditabel pegawai penerima. Jika penerima yang sebagai tembusan, centang sebagai tembusan. Jika penerima meminta berkas fisik, centang pada berkas fisik.

Selanjutnya menambahkan file yang dibutuhkan. File yang digunakan harus memiliki format **pdf**, **doc**, atau **docx**. Klik pada masukan file, seperti pada gambar.



Maka akan muncul popup untuk memilih berkas yang akan di upload.



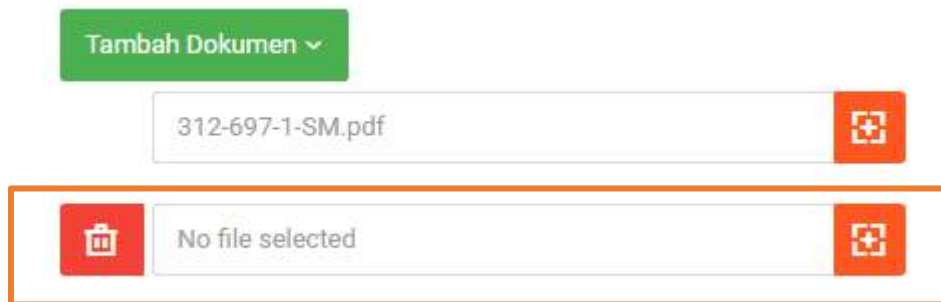
Pilih berkas yang akan digunakan, lalu klik open.



Apabila berhasil nama berkas akan tampil. Apabila ingin menambahkan dokumen lain, klik tombol tambah dokumen. Pilih menu **Upload Dokumen**.



Maka akan bertambah untuk masukan file sesperti pada gambar








Selanjutnya pilih tombol simpan pada bagian akhir formulir. Simpan sebagai draft akan menyimpan data dari formulir, tetapi tidak dikirimkan ke penerima. Sedangkan untuk Simpan dan Kirim, agenda surat masuk akan dikirimkan kepada penerima.



3.3.2. Ekspedisi Agenda Surat Masuk

Ekspedisi merupakan seluruh alur diposisi pada agenda surat masuk tersebut. Dengan Ekspedisi, admin surat dapat mengetahui sampai sejauh mana proses diposisi. Ekspedisi surat masuk dapat dilihat pada menu detail agenda surat masuk.

Agenda Surat Masuk + Tambah

No. Registrasi	Surat	Status	Sifat Surat	Tanggal Surat	
201906.00036	Rapat Server Dari : Telkom Indonesia No. Surat :	Telah Di Distribusikan	Penting	27 Jun 2019	
201906.00034	Kunjungan Ke Ruang Server Dari : Telkom Indonesia No. Surat :	Telah Di Distribusikan	Penting	27 Jun 2019	
201906.00033	Kunjungan Server Dari : Telkom Indonesia No. Surat :	Telah Di Distribusikan	Biasa	27 Jun 2019	
201906.00032	Penawaran Aplikasi E-Puskesmas Dari : Telkom Indonesia No. Surat :	Telah Di Distribusikan	Penting	27 Jun 2019	
201906.00027	Penawaran Server Dari : Telkom Indonesia No. Surat :	Telah Di Distribusikan	Penting	27 Jun 2019	

Gambar 3. 9 Data Agenda Surat Masuk

MT

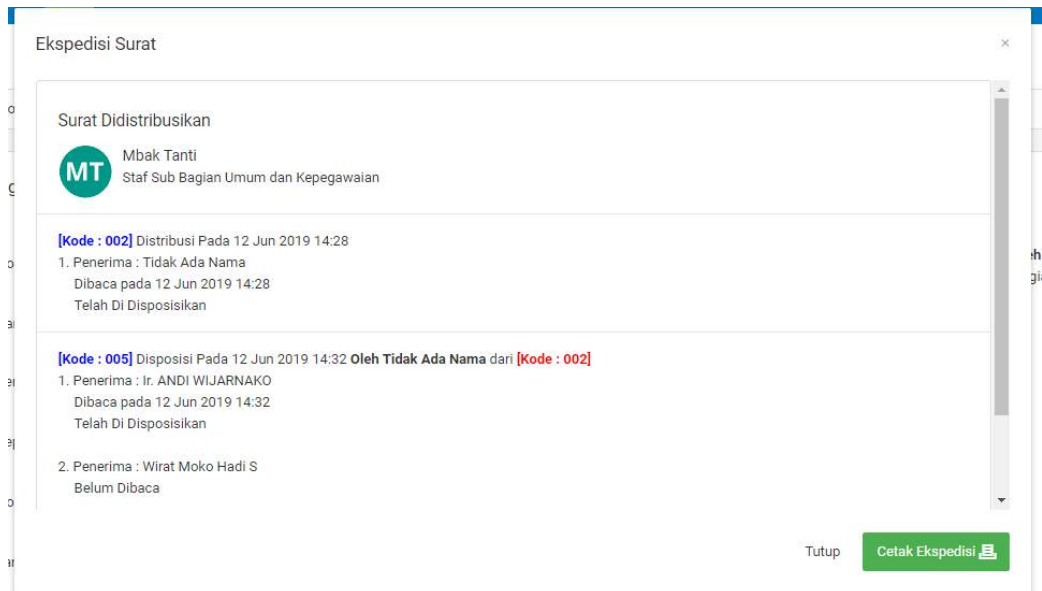
Surat di distribusikan oleh :

Mbak Tanti - Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

12 Jun 2019 14:28

EKSPEDISI SURAT

Gambar 3. 10 Status Surat Masuk



Gambar 3. 11 Ekspedisi Surat Masuk

3.3.3. Agenda Surat Keluar

No. Registrasi	Surat	Status	Sifat Surat	Tanggal Surat
201906.00035	Makan - Makan No. Registrasi : 201906.00035	Belum Disetujui 0/1	Penting	27 Jun 2019
201906.00031	Rapat Sosialisasi Aplikasi E-Office No. Registrasi : 201906.00031	Belum Disetujui 1/2	Segara	27 Jun 2019
201906.00030	Undangan Presentasi Aplikasi E-Office No. Registrasi : 201906.00030	Belum Disetujui 0/2	Penting	27 Jun 2019
201906.00029	Undangan Promosi Aplikasi No. Registrasi : 201906.00029	Telah Disetujui Belum diberi nomor	Segara	27 Jun 2019
201906.00028	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perombaan desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No. Registrasi : 201906.00028	Belum Disetujui 0/1	Rahasia	27 Jun 2019
201906.00025	Penawaran Kerja Sama Astinet No. Registrasi : 201906.00025	Draft	Segara	27 Jun 2019

Gambar 3. 12 Data Agenda Surat Keluar

Selanjutnya adalah halaman dari Agenda Surat Keluar. Modul ini digunakan untuk melakukan persetujuan terhadap surat yang akan dikirim keluar dari instansi.

Tambah Penyetuju

Persetujuan harus dilakukan secara berurut. Surat harus disetujui penyetuju pertama lalu akan masuk ke penyetuju selanjutnya

Tambah Penyetuju ×

Satu OPD Semua Pegawai

Q Andi|

Nama Pegawai	Jabatan	OPD	Pilih
Ir. ANDI WIJARNAKO	Kepala Bidang Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pilih

Batal

Gambar 3. 13 Menambahkan Penyetuju

Tambah Penyetuju

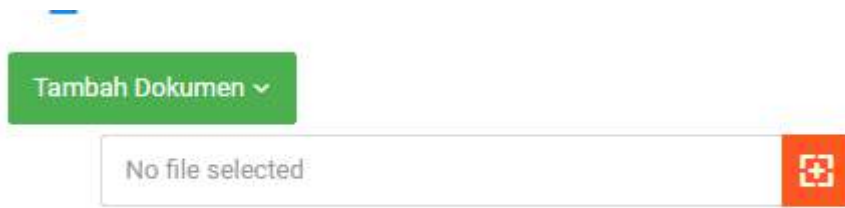
Persetujuan harus dilakukan secara berurut. Surat harus disetujui penyetuju pertama lalu akan masuk ke penyetuju selanjutnya

#

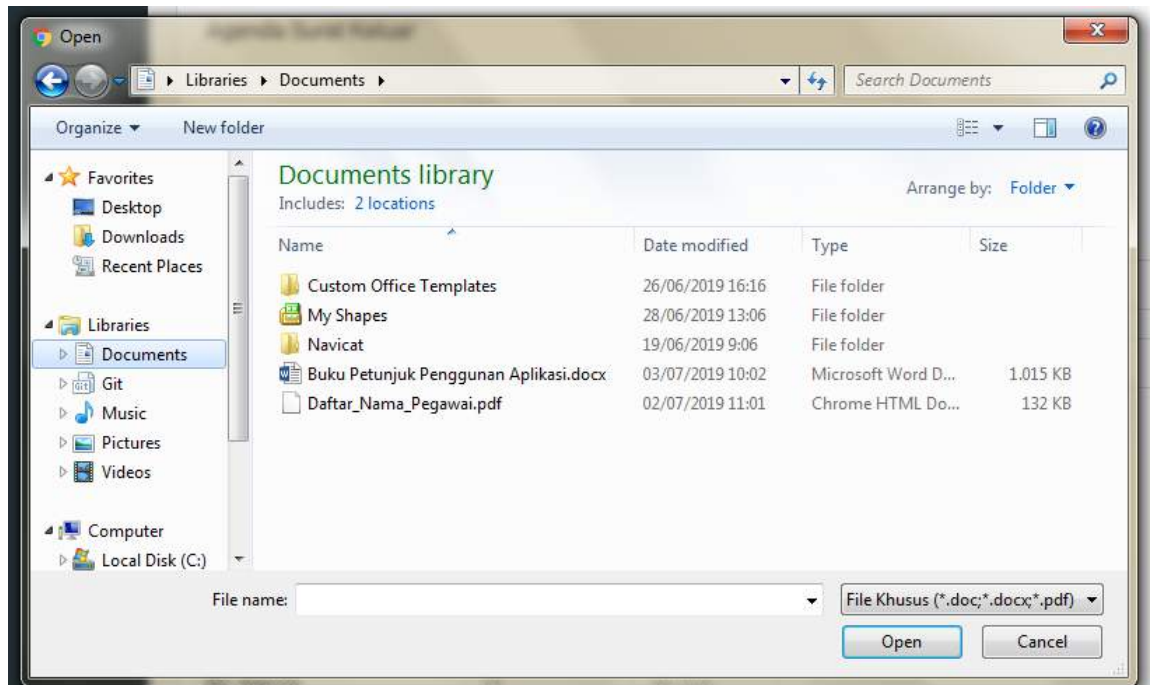
Pegawai



Ir. ANDI WIJARNAKO



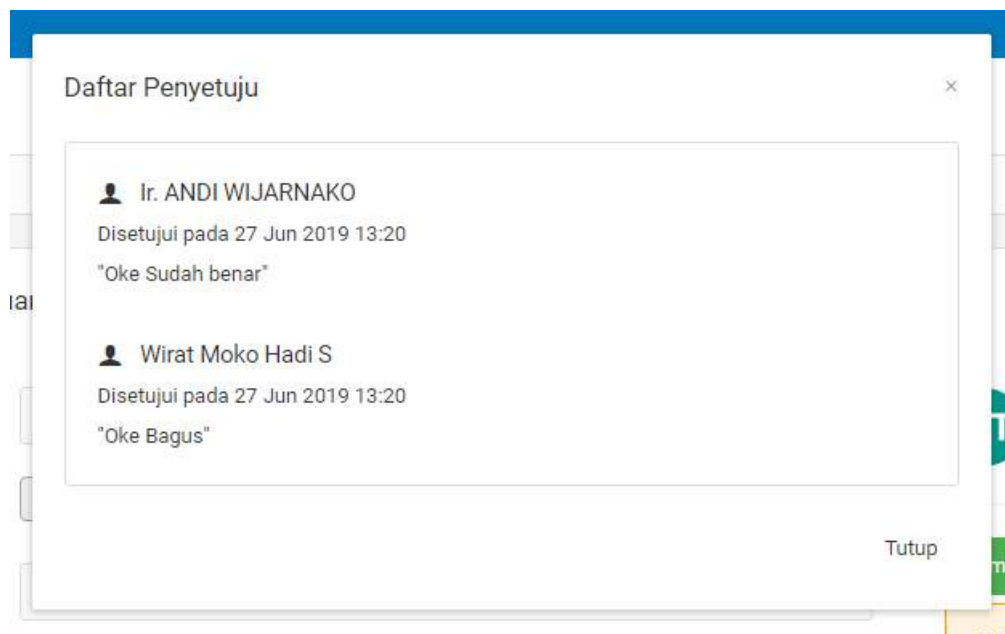
Gambar 3. 14 Menambahkan Dokumen



Gambar 3. 15 Menambah Dokumen Lain



3.3.4. Status Persetujuan



Gambar 3. 16 Daftar Penyetuju

Status persetujuan menunjukkan apakah surat telah disetujui atau tidak, beserta alasan.

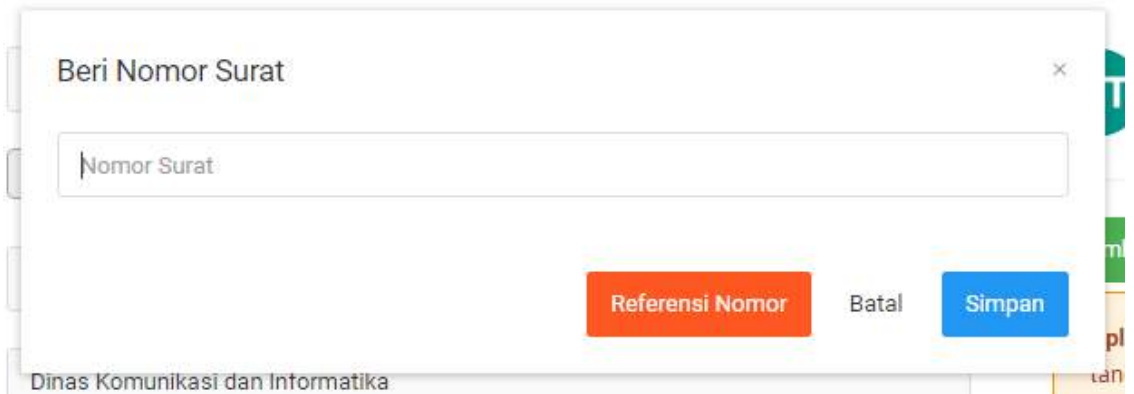
3.3.5. Pemberian Nomor

No. Surat

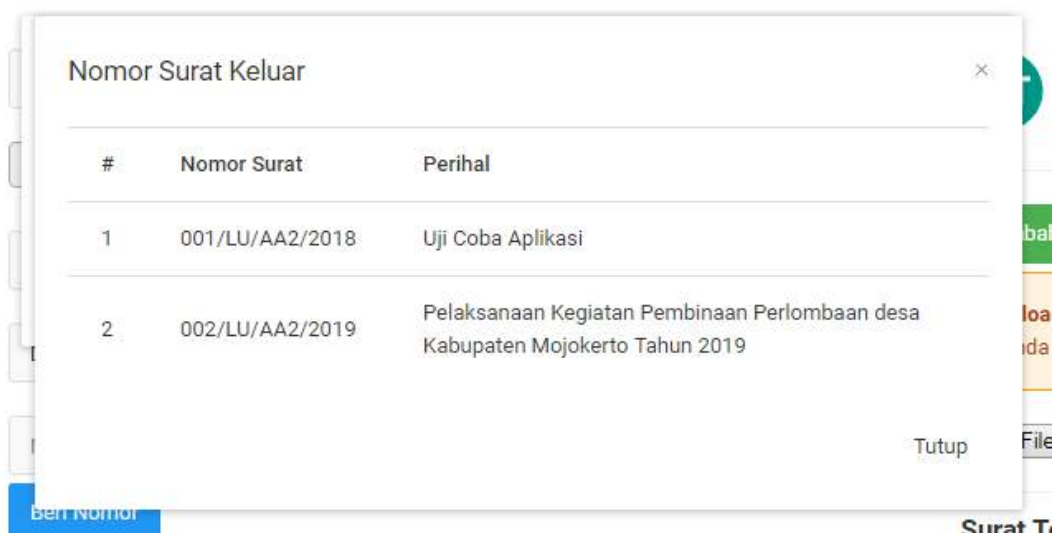
Nomor surat bisa diberikan ketika sudah disetujui

Beri Nomor

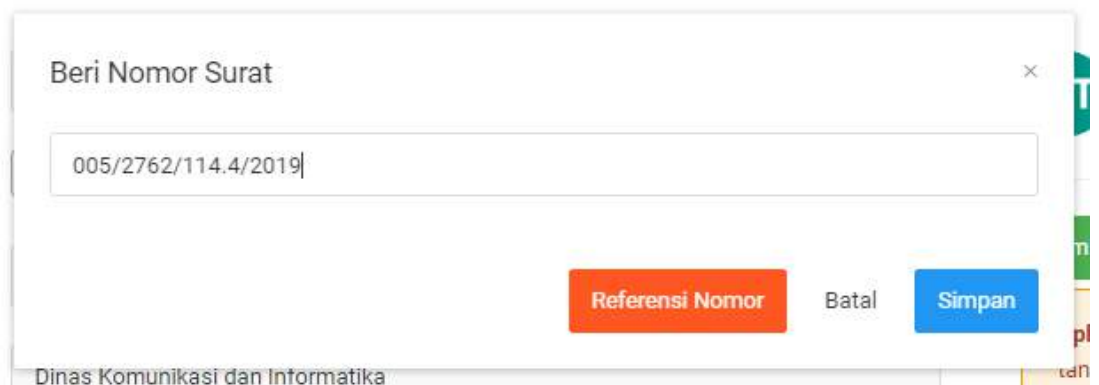
Nomor surat hanya dapat diberikan ketika surat telah disetujui oleh atasan, dan hanya bisa diberikan oleh Admin Surat.



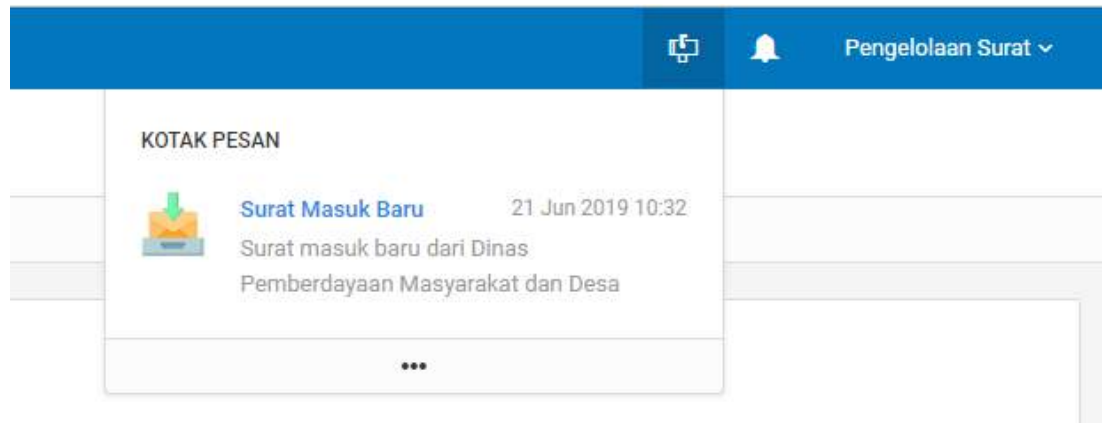
Gambar 3. 17 Pemberian Nama Surat



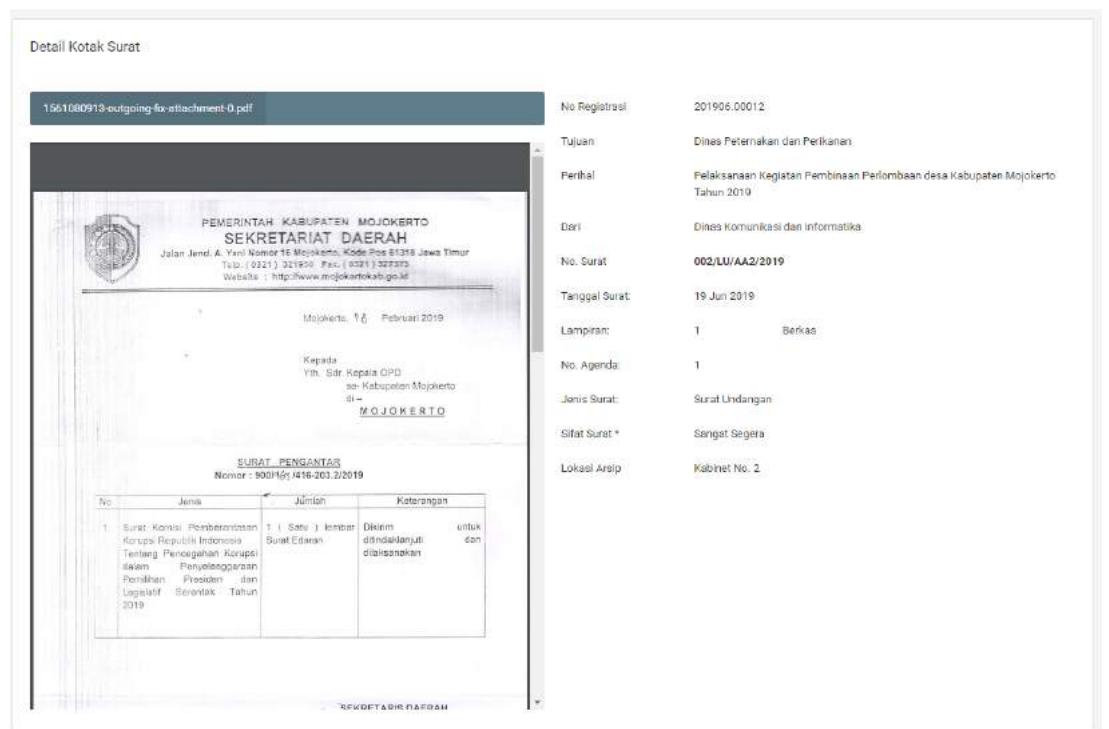
Gambar 3. 18 Melihat Referensi Surat Keluar



3.3.6. Kotak Pesan



Gambar 3. 19 Kotak pesan pada setiap OPD



Gambar 3. 20 Melihat surat masuk



Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

- Penjelasan IKK Output:

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKK Output :

- 6) Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem elektronik yang ada di Kabupaten Mojokerto di tahun 2021 belum ada yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hingga saat ini masih dalam tahapan proses pendaftaran.

Data pendukung :

- Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP Analysis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021 hal. 41-42 (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



- **Penjelasan IKK Output:**

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKK Output :

- 7) Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah.

Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah masih 9 aplikasi antara lain : Aplikasi E-Office, Suhita, Prasasti, E-Agenda, Simpeg, JDIH, Sipanjol, Izin Mojokertokab, CIS.

Data pendukung :

- *Screenshot* Aplikasi E-Office, Suhita, Prasasti, E-Agenda, Simpeg, JDIH, Sipanjol, Izin Mojokertokab, *Covid Information System*. (terlampir)
- Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP Analysis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021 hal. 41-42 & hal 172-179 (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



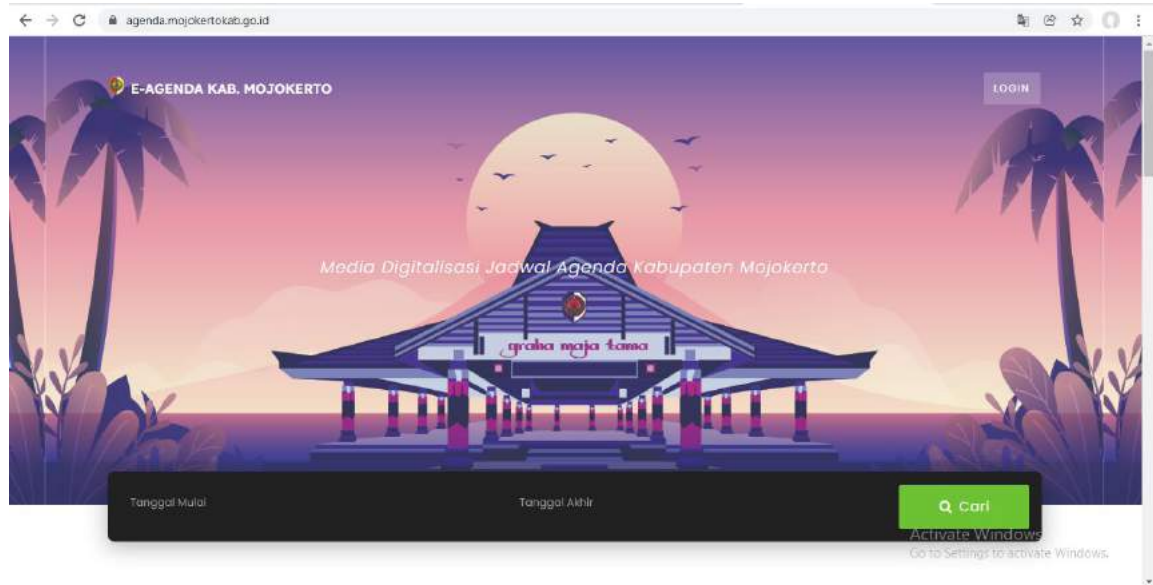
**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

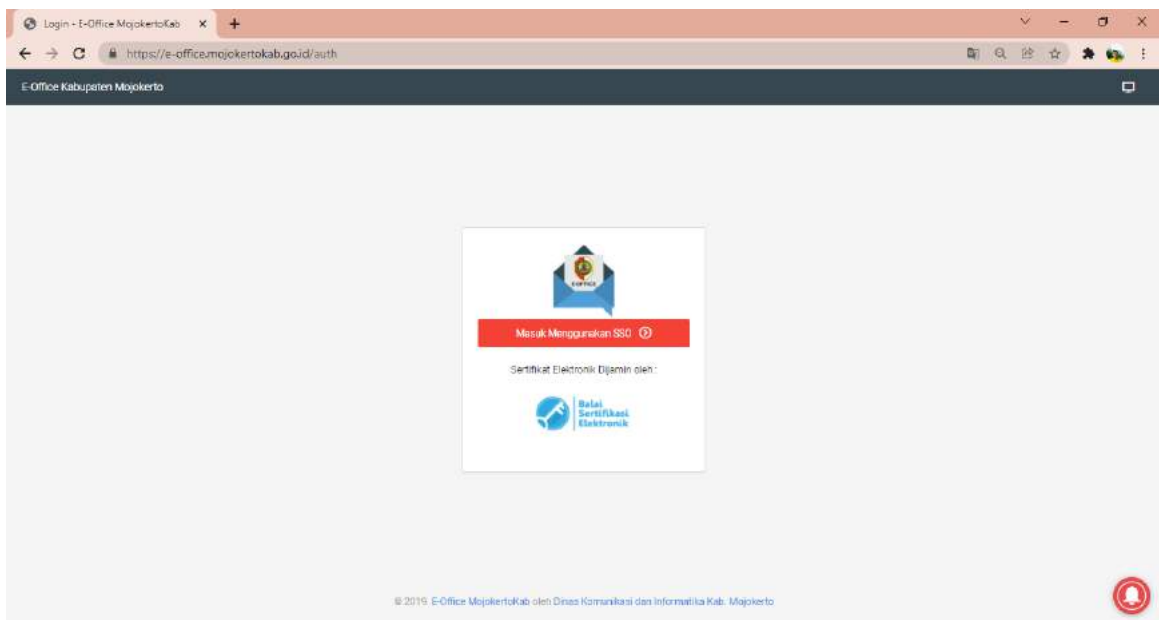
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



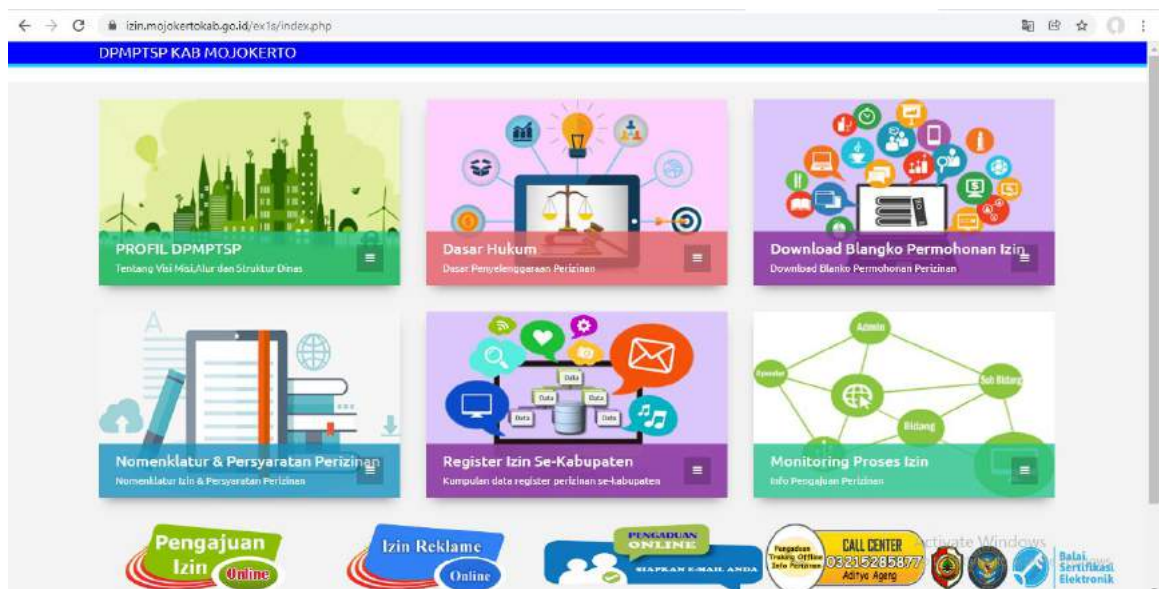
Lampiran Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto



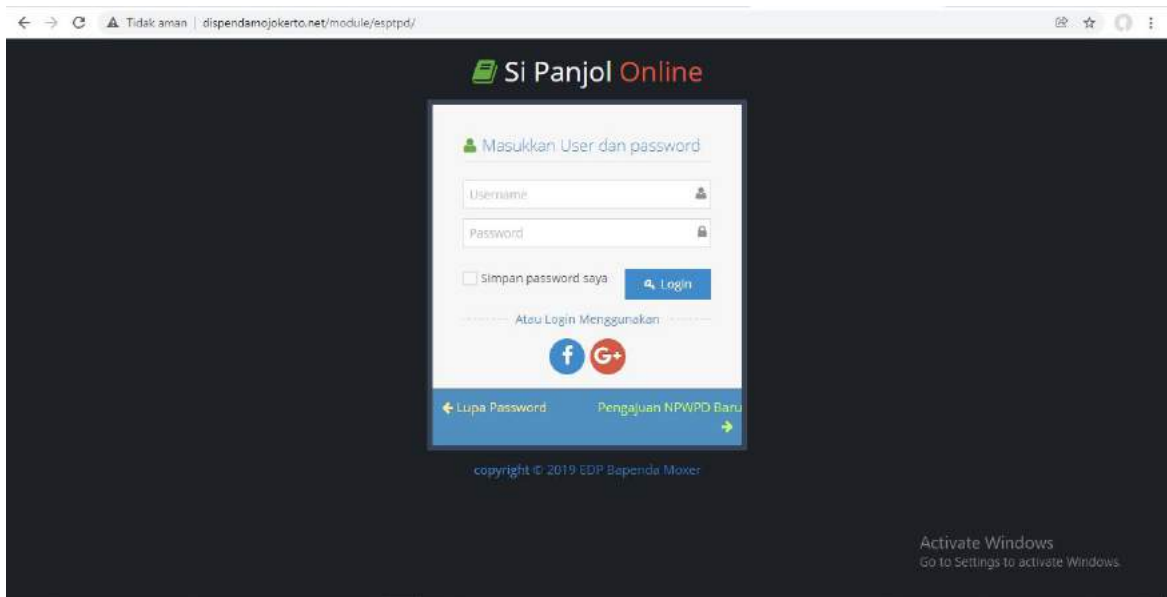
Screenshot Aplikasi E-Agenda Kabupaten Mojokerto



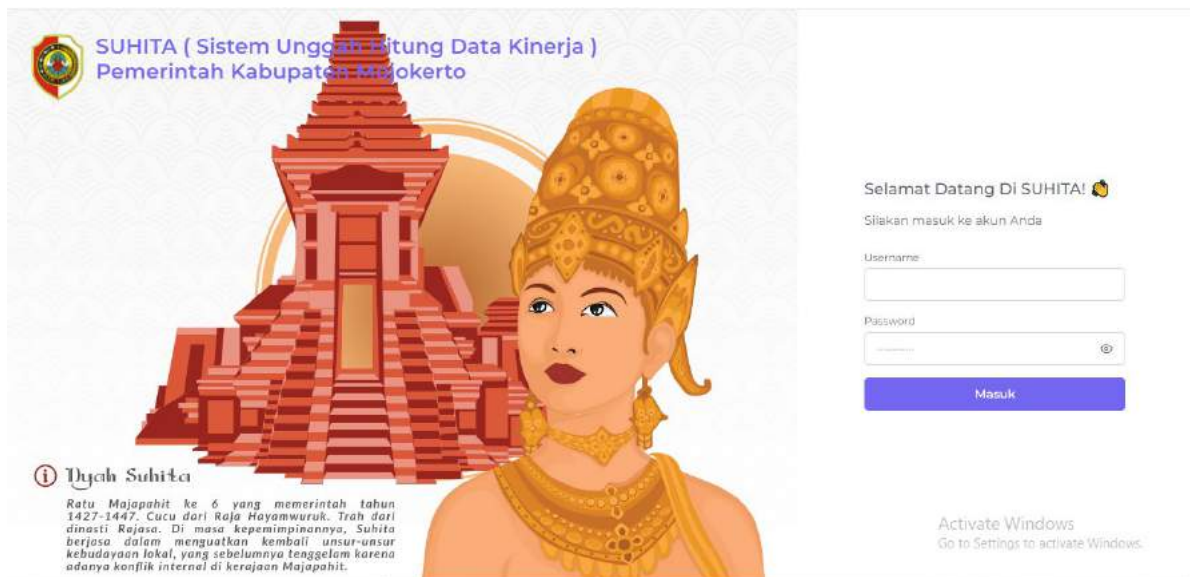
Screenshot Aplikasi E-Office Kabupaten Mojokerto



Screenshot Aplikasi Izin Kabupaten Mojokerto



Screenshot Aplikasi Si Panjol Kabupaten Mojokerto



Screenshot Aplikasi Suhita Kabupaten Mojokerto



Screenshot Aplikasi SIMPEG Kabupaten Mojokerto



Screenshot Aplikasi JDIIH Kabupaten Mojokerto



- **Penjelasan IKK Output:**

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKK Output :

- 8) Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah

Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto (57 OPD) telah menggunakan layanan pusat data pemerintah Daerah.


Data pendukung :

- Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP Analysis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021 hal. 16-32 (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc





BUKU 1

Kondisi Eksisting SPBE

Pemerintah Kabupaten Mojokerto

dan GAP Analysis

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021



Pemerintah Kabupaten Mojokerto



PT Tatacipta Teknologi Indonesia

Lampiran 2.1 Metadata Data dan Informasi

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E.001	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bagian Keuangan	Sub Bagian Anggaran	Data program kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Informasi terkait kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan data kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD	Server Pusat	Layanan input data kegiatan	SIPD	Bagian Administrasi Pembangunan
D.E.002	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Sub Bagian Persidangan	Data pengaduan masyarakat	Informasi terkait dengan pengaduan masyarakat	RD 05.01 Data Hukum	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat	Komputer Internal PD	Layanan Pengaduan Masyarakat	Tidak ada	Sekretariat Daerah
D.E.003	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pendataan dan Penetapan	Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Data SSPD, BPHTB, APHB	Informasi terkait BPHTB secara online	RD 03.06 Data Pertanahan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan BPHTB mulai dari penginputan SSPD, BPHTB, dan APHB	Server Diskominfo	Pelayanan SPTPD BPHTB, Penerbitan dan penetapan PD/SPPT/DHKP	BPHTB Online	Badan Pendapatan Daerah

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E.004	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pendapatan dan Penetapan	Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Data pelayanan PBB	Informasi terkait Tanda terima, History WP/OP, Rekap pengajuan	RD 09.02 Data Keuangan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pengintegrasian administrasi kegiatan PBB dengan melakukan pendataan, penilaian, penetapan, penerimaan, penagihan, dan pelayanan	Server Pusat	Layanan PBB P2, Pendaftaran dan penetapan Nomor Obyek Pajak (NOP)	SISMIOP	Badan Pendapatan Daerah
D.E.005	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pendapatan dan Penetapan	Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya	Data pembayaran wajib pajak	Informasi terkait Bukti pembayaran SSPD	RD 09.02 Data Keuangan	Publik	Informasi yang berkaitan pemungutan pajak daerah dan informasi mengenai perpajakan yang relevan, tepat waktu, dan akurat	Server Diskominfo	Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerbitan dan penyampaian Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Perumusan dan penyampaian blangko	SIPANJOL	Badan Pendapatan Daerah

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
										Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)		
D.E.006	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi	Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Data Rekonsiliasi	Informasi terkait dengan jumlah dan pemilik rekening	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan saldo dalam rekening bank dengan catatan akuntansi perusahaan	Komputer Internal PD	Layanan Rekonsiliasi	-	Badan Pendapatan Daerah
D.E.007	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kependidikan	Data aset daerah	Informasi terkait dengan laporan aset daerah	RD 10.04 Data Dukungan Lainnya	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah	Server Pusat	Layanan Aset, Layanan aset tanah dan bangunan, Pendataan dan Penatausahaan Aset, Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset, Layanan aset tanah dan bangunan,L	SIMBADA /SIMAGO	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
										ayanan Pelaporan, Layanan Penganggaran		
D.E.008	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kpegawaiain	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait profil, berita,dokumen, galeri, artikel, dan kontak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan profil, berita,dokumen, galeri, artikel, dan kontak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat	Server Diskominfo	-	bpkad.mojokertokab	Diskominfo
D.E.009	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Perbendaharaan Daerah	Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan	Data penggajian pegawai	Informasi terkait dokumen penggajian pegawai	RD 06.02 Data Ketenagakerjaan	Administrasi	Informasiyang berkaitan dengan proses penggajian secara lebih cepat, akurat serta menghasilkan dokumen penggajian yang dapat diandalkan.	Server Pusat	Layanan Penggajian	SIMGAJI	Pusat
D.E.010	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Perbendaharaan Daerah	Sub Bidang Akuntansi	Data keuangan daerah	Informasi terkait dokumen laporan rekapitulasi	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan baik di tingkat SKPKD	Server Pusat	Layanan penganggaran	SIMDA Keuangan	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	Aset Daerah				data keuangan daerah			(sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi) secara lebih cepat dan akurat				
D.E .01 1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Perbendaharaan Daerah	Sub Bidang Akuntansi	Data anggaran perencanaan	Informasi terkait dengan data anggaran perencanaan	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan data dan informasi keuangan daerah	Server Pusat	Layanan SIPD	SIPD	Pusat
D.E .01 2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Perbendaharaan Daerah	Sub Bidang Akuntansi	Data penerima hasil pajak dan retribusi	Informasi terkait penerima hasil pajak dan retribusi	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan Pembagian pajak yang berasal dari pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah daerah	Server Pusat	Layanan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	SIMDA	Pusat
D.E .01 3	Badan Pengelolaan Keuangan dan	Bidang Perbendaharaan Daerah	Sub Bidang Akuntansi	Data penerima dan pembayar retribusi	Informasi terkait penerima dan pembayar retribusi	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan Pembagian pajak kepada pihak lain yang berasal dari pembayaran atas	Server Pusat	Layanan Bagi Hasil Retribusi kepada pihak lain	SIMDA	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	Aset Daerah							jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah daerah				
D.E .01 4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Perbendaharaan Daerah	Sub Bidang Akuntansi	Data Penerima Bantuan Hibah	Informasi terkait data penerima bantuan hibah	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pendataan penerima bantuan sosial agar memudahkan monitoring aliran dan penggunaan dana	Komputer Internal PD	Layanan Hibah	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
D.E .01 5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretariat	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Data Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Informasi terkait bantuan keuangan kepada desa	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Untuk Meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa	Komputer Internal PD	-	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
D.E .01 6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretariat	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Data Bantuan Keuangan Infrastruktur Khusus	Informasi terkait bantuan yang diberikan Oleh pemerintah daerah kepada Desa berupa	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Untuk dana keuangan pembangunan fisik desa	Komputer Internal PD	-	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
					bantuan keuangan khusus							
D.E .01 7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kependidikan	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Server Diskominfo	-	bappeda. mojokertokab	Diskominfo
D.E .01 8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Perencanaan, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Wilayah	Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Data lokasi dan rencana tata ruang	Informasi berupa Peta Online, Data Tabular, dan Statistik yang teranimasi	RD 03.01 Data Pekerjaan Umum	Administrasi	Memudahkan dalam mengetahui informasi rencana tata ruang Kabupaten Mojokerto	Server Diskominfo	Layanan Informasi Tata Ruang	SIPR	Pemerintah Daerah
D.E .01 9	Badan Perencanaan Pembangunan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Data kemiskinan, data agenda dan sosialisasi	Informasi terkait agenda dan sosialisasi TKPK (Tim	RD 04.02 Data Sosial	Administrasi	Informasi yang berkaitan berita sosialisasi TKPK	Server Pusat	-	TKPK	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	gunan Daerah	gunan Manusia		TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)	Koordinasi Penanggungangan Kemiskinan)							
D.E .02 0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Data program usulan	Informasi terkait pendanaan program usulan oleh perusahaan	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pendanaan sehingga dapat menunjang dalam pembuatan website TSP/CSR	Server Diskominfo	Layanan TSP/CSR	Aplikasi Website TSP/CSR Kabupaten Mojokerto	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
D.E .02 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan	Data Renja	Informasi terkait data Renja	RD 09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan laporan evaluasi Renja	Server Diskominfo	-	Aksara	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
D.E .02 2	Badan Kepegawaian	Bidang Pengadaan,	Sub Bidang Data dan	Data Kepegawaian	Informasi terkait data Identitas	RD 09.06 Data	Administrasi	Memberikan informasi terkait	Server PD	- Pelayanan Permintaan Data dan	SIMPEG	Badan Kepegawaian

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	Pendidikan dan Pelatihan	Data, dan Informasi ASN	Informasi ASN		pegawai, Pangkat, Gaji, Jabatan, Pendidikan, Diklat, Keluarga, Hukuman Disiplin, Organisasi, Penghargaan, Cuti dan Penilaian kinerja, Pernikahan	Aparatur Negara		biodata masing-masing pegawai		Informasi - Rekonsiliasi dan Validasi Data SIMPEG - Pelaporan Kepegawaian Semester - Pelaporan Kepegawaian Tribulan		Pendidikan dan Pelatihan
D.E.02.3	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN	Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Data Kinerja dan TPP Pegawai	Informasi terkait data Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, Aktivitas Harian Pegawai, Jabatan, Kelas Jabatan, Basic TPP	RD 09.06 Data Aparatur Negara	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan perhitungan prosentase Kinerja dan TPP Pegawai	Server PD	- Pelayanan Penilaian Kinerja ASN - Pelayanan Perhitungan TPP	SUHITA	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
D.E.02.4	Badan Kepegawaian Pendidikan	Bidang Penilaian Kinerja	Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan ASN	Data presensi pegawai	Informasi terkait dokumen laporan	RD 09.06 Data Aparatur	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan	Server PD	- Pelayanan Penilaian Kehadiran ASN	PRASASTI	Badan Kepegawaian Pendidikan

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	kan dan Pelatihan	dan Disiplin ASN			rekapitulasi presensi pegawai	r Negara		pemantauan data presensi				an dan Pelatihan
D.E .02 5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Pengadaan, Data, dan Informasi ASN	Sub Bidang Data dan Informasi ASN	Data arsip digital PNS	Informasi terkait kelengkapan Arsip Kepegawaian Digital	RD 09.06 Data Aparatur Negara	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan Arsip Digital PNS	Server PD	- Pelayanan Arsip Kepegawaian	SIMARTA	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
D.E .02 6	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Mutasi dan Promosi PNS	Sub Bidang Mutasi dan Promosi PNS	Data Simulasi Jabatan Struktural dari SIMPONI /SIMPEG	Informasi terkait Simulasi Promosi dan Rotasi Jabatan Struktural	RD 09.06 Data Aparatur Negara	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan kandidat Pejabat Struktural	Server Pusat	- Pengangkatan Dalam jabatan Struktural - Mutasi Pegawai Antar Unit Kerja/PD	SIMPONI	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
D.E .02 7	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data laporan harta kekayaan penyelenggara negara	Informasi terkait laporan kekayaan penyelenggara negara	RD 09.06 Data Aparatur Negara	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara	Server Pusat	-	e-LHKPN	Pusat
D.E .02 8	Badan Kesatuan Bangsa	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program kegiatan	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan	RD 10.02 Data Manajemen	Publik	Informasi yang berkaitan dengan profil dan informasi Badan Kesatuan Bangsa	Server Diskominfo	-	bakesbangpol.mojo kertokab	Diskominfo

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	dan Politik			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto	kontak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto	Kegiatan		dan Politik Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat				
D.E.029	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Data ormas, data organisasi profesi, data LSM, data kegiatan ormas, data kegiatan organisasi, dan data kegiatan LSM	Informasi terkait ormas, organisasi profesi, LSM dan kegiatannya	RD 09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan dokumen laporan rekapitulasi pengelolaan data ormas, data organisasi profesi, dan data LSM	Server Diskominfo	Layanan kelembagaan	SIJAMAS (Sistem Informasi Pendataan Aktivitas LSM dan Ormas)	Pemerintah Daerah
D.E.030	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Data responden survey	Informasi terkait responden survey	RD 09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Publik	Informasi yang berkaitan dengan Pemberian ijin masih manual, sedangkan secara online aplikasi masih dalam proses	Komputer Internal PD	Layanan Pemberian Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan	-	Pemerintah Daerah

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
		arakatan										
D.E.03.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Pencegahan	Data titik sensor daerah rawan bencana	Informasi terkait peringatan dini bencana	RD 04.02 Data Sosial	Publik	Informasi yang berkaitan dengan evakuasi bencana	Server Diskominfo	-	EWS (Early warning system)	Pemerintah Daerah
D.E.03.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan profil dan berita Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat	Server Diskominfo	-	bpbd.mojokertokab	Diskominfo
D.E.03.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Pencegahan	Data curah hujan	Informasi peringatan dini cuaca ekstrem	RD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Publik	Informasi yang berkaitan dengan curah hujan yang sangat lebat yang dapat mengakibatkan bencana	Server Pusat	-	SIMONA	Pusat
D.E.03.4	Badan Penanggulangan	Bidang Pencegahan dan	Seksi Pencegahan	Data arah angin dan hujan	Informasi peringatan dini	RD 07.05 Data	Publik	Informasi yang berkaitan dengan arah angin dan	Server Pusat	-	RAINBOW	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	n Bencana Daerah	Kesiapsiagaan				Lingkungan Hidup		hujan yang sangat lebat yang dapat mengakibatkan bencana				
D.E.035	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Seksi Rekonstruksi	Data pelaporan bencana setiap daerah	Informasi terkait dokumen laporan rekapitulasi bencana	RD 10.04 Data Dukung Lainnya	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pelaporan pasca terjadinya bencana	Server Pusat	-	INDRA	Pusat
D.E.036	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Kesiapsiagaan	Data program kegiatan dan berita seputar penyuluhan	Informasi terkait dengan program kegiatan dan berita seputar penyuluhan	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan fasilitasi dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat	Komputer Internal PD	Layanan Destayana	-	Pemerintah Daerah
D.E.037	Bagian Administrasi Pemerintahan	Bagian Administrasi Pemerintahan	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama	Data permohonan perijinan/rekomendasi setiap kecamatan	Memberikan kemudahan pelayanan perizinan maupun pelayanan non perizinan	RD 09.01 Data Dalam Negeri	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pengurusan surat	Server Diskominfo	-	E-PATEN	Pemerintah Daerah
D.E.038	Bagian Administrasi Pemerintahan	Bagian Administrasi Pemerintahan	Sub Bagian Otonomi Daerah	Data penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Informasi terkait dengan data laporan penyelenggara	RD 09.01 Data Dalam Negeri	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Server Diskominfo	-	LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah)	Pemerintah Daerah

ID DA TA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Refere nsi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyim panan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Penduku ng	PD Pemilik Data yang Terkait
					a pemerintah daerah sesuai dengan masing-masing PD						han Daerah)	
D.E .03 9	Bagian Admini strasi Pemer ntahan	Bagian Adminis trasi Pemer ntahan	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	Data batas desa	Informasi terkait batas desa	RD 03.05 Data Pemban gunan kawasa n atau daerah tertingg al	Admini strasi	Informasi yang berkaitan dalam hal penentuan batas wilayah desa	Server Diskomi nfo	-	Sistem Informasi Batas Desa	Diskomin fo
D.E .04 0	Bagian Admini strasi Pemer ntahan	Bagian Adminis trasi Pemer ntahan	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	Data rupabumi	Informasi terkait penanaman geografis	RD 07.01 Data Pertam bangan	Admini strasi	Informasi yang berkaitan dengan rupabumi	Server Diskomi nfo	-	Aplikasi Sistem Informasi Manajeme n Toponimi	Diskomin fo
D.E .04 1	Bagian Organis asi	Bagian Organis asi	Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Data perangkat daerah	Informasi dan dokumen terkait laporan kinerja PD	RD 09.01 Data Dalam Negeri	Admini strasi	Informasi yang berkaitan dengan proses pemantauan dan pengendalian SKPD serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD	Server Diskomi nfo	-	SI SAKIP	Pemerint ah Daerah

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E .04 2	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Bagian Organisasi Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Bagian Organisasi Kabupaten Mojokerto	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan profil dan berita Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat	Server Diskominfo	-	organisasi .mojokertokab	Diskominfo
D.E .04 3	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Data Anjab, ABK, SKJ dan Evaluasi Jabatan	Informasi terkait ANJAB, ABK, SKJ, dan Evaluasi Jabatan	RD 09.06 Data Aparatur Negara	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pengisian ANJAB, ABK, SKJ, dan Evaluasi Jabatan	Server Diskominfo	-	E-ANJAB	Bagian Organisasi
D.E .04 4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	Data Pengajuan Proposal	Informasi terkait pengajuan proposal keagamaan untuk bantuan hibah	RD 09.02 Data Keuangan	Publik	Layanan untuk memfasilitasi Lembaga keagamaan untuk permohonan hibah baik berupa uang/barang	Server Pihak Ketiga	Layanan Permohonan Hibah	SI ABAH	Bagian Kesejahteraan
D.E .04 5	Bagian Hukum	Bagian Hukum	Sub Bagian Perundang-undangan	Data rancangan kepBup/Perbup	Informasi terkait Produk Hukum	RD 05.01 Data Hukum	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan proses verifikasi Produk Hukum secara online sehingga lebih efektif dan efisien tanpa harus	Server Diskominfo	-	IPROHDA	Bagian Hukum

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
								berkunjung ke Bagian Hukum.				
D.E .04 6	Bagian Hukum	Bagian Hukum	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	Data Produk Hukum Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait Softcopy Produk Hukum Kabupaten Mojokerto	RD 05.01 Data Hukum	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi produk hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat kepada masyarakat	Server Pusat	Layanan produk hukum melalui JDIIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)	JDIIH (Pemprov)	Pemerintah Daerah
D.E .04 7	Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	Data BUMD	Informasi terkait data BUMD	RD 02.07 Data Badan Usaha Milik negara	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan data-data Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Server Pusat	-	E-BUMD	Pusat
D.E .04 8	Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Sub Bagian Pengendalian dan Perekonomian	Data dana bagi hasil cukai hasil tembakau	Informasi terkait dokumen laporan rekapitulasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau	RD 02.02 Data Perdagangan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan data pelaporan penggunaan anggaran DBHCHT secara efektif dan efisien	Server Pusat	-	DBHCHT	Pusat
D.E .04 9	Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Subbag Perencanaan	Data gambar/lok	Informasi terkait data	RD 02.11 Data	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan operasi terhadap	Server Pusat	Layanan Pelaporan Adanya	Si Roleg	Ditjen Bea dan Cukai

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	dan Sumber Daya Alam	dan Sumber Daya Alam	Pengawasan Ekonomi Mikro dan Sumber Daya Alam	asi rokok ilegal	gambar/lokasi rokok ilegal	Pariwisata		peredaran rokok ilegal		Rokok Ilegal		
D.E.050	Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Data laporan realisasi anggaran	Informasi terkait laporan realisasi anggaran	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan mereview laporan realisasi anggaran dari PD lain	Server Diskominfo	-	e-pelaporan	Bagian Administrasi Pembangunan
D.E.051	Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Sub Bagian Pengendalian Program	Data Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait proposal pengajuan, proposal pencairan, dan laporan pelaksanaan BK Desa Kabupaten Mojokerto	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi terkait proposal pengajuan, proposal pencairan, dan laporan pelaksanaan BK Desa Kabupaten Mojokerto	Komputer Internal PD	Layanan Bantuan Keuangan Desa	-	Bagian Administrasi Pembangunan
D.E.052	Bagian Umum	Bagian Umum	Sub Bagian Rumah Tangga	Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Informasi terkait laporan rekapitulasi barang milik daerah	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah dengan pencatatan dan pelaporan berlangsung secara efektif, efisien dan	Server Pusat	-	SIMBADA	Pemerintah Daerah

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
								tingkat kesalahan yang minim				
D.E.053	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan	Data Perencanaan dan Laporan Keuangan	Informasi terkait Perencanaan dan Laporan meliputi anggaran dan kinerja	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi yang bertujuan untuk pelaporan keuangan dari kegiatan dan program yang telah dilakukan oleh masing-masing bidang	Komputer Internal PD	-	-	Bagian Perencanaan dan Keuangan
D.E.054	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Keuangan	Data Keuangan	Informasi terkait realisasi keuangan	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi pengelolaan keuangan dari realisasi program dan kegiatan	Komputer Internal PD	-	-	Bagian Perencanaan dan Keuangan
D.E.055	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sub Bagian Protokol	Data Informasi program dan kegiatan keprotokolanan dan pimpinan	Informasi terkait program dan kegiatan keprotokolanan dan pimpinan	RD 09.07 Data Kesekretariatan Negara	Publik	Informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan keprotokolanan dan pimpinan	Komputer Internal PD	Layanan Publikasi kegiatan Pemerintahan Daerah	-	Pemerintah Daerah
D.E.056	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Seksi Pelayanan Informasi	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Dinas	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Dinas	RD 10.02 Data Manajemen	Publik	Informasi yang berkaitan dengan profil dan berita terkait Dinas Komunikasi dan Informatika	Server Diskominfo	-	diskominfo.mojokertokab	Diskominfo

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
				Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Kegiatan		Kabupaten Mojokerto				
D.E .05 7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik - Seksi Pelayanan Informasi	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik - Seksi Pelayanan Informasi	Data permohonan informasi	Informasi terkait Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	RD 09.03 Data Informasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan data secara online yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi	Server Diskominfo	Layanan Data di PPID	PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika
D.E .05 8	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	Seksi Survey dan Akuisisi Data	Seluruh data yang ada di Pemkab Mojokerto	Informasi terkait seluruh data yang ada di Pemkab Mojokerto	RD 09.03 Data Informasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pengelolaan data sektoral	Server Diskominfo	-	Satu Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
D.E .05 9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Informatika	Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi	Data tata naskah	Terciptanya pengaturan dokumen yang teratur, terstruktur, dan terarah	RD 09.03 Data Informasi	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan layanan administrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti surat menyurat tanda tangan digital, dll.	Server Diskominfo	-	e-office/ e-sign	Pemerintah Daerah

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E.060	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	Seksi Survey dan Akuisisi Data	Seluruh data yang ada di Pemkab Mojokerto	Menampilkan informasi terkait seluruh data yang ada di Pemkab Mojokerto	RD 09.03 Data Informasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan seluruh data yang ada di Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Server Diskominfo	-	SI Dashboard satu data	Pemerintah Daerah
D.E.061	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Informatika	Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi	Data terkait covid 19	Informasi terkait data Covid 19 di Kabupaten Mojokerto	RD 04.01 Data Kesehatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan monitoring, pengembangan, penyebaran informasi, agenda tentang penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Mojokerto	Server Diskominfo	-	Covid Information System	Dinas Komunikasi dan Informatika
D.E.062	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data ttd digital	Informasi terkait dengan tanda tangan digital	RD 09.03 Data Informasi	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan perjalanan dinas	Server Diskominfo	Upload image untuk verifikasi dan menggunakan ttd digital	E-SPPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
D.E.063	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Informatika	Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola	Data usulan pembuatan atau pengadaan SPBE	Informasi terkait dokumen laporan rekapitulasi	RD 09.06 Data Aparatu	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pencatatan data usulan pembuatan atau pengadaan	Server Diskominfo	Layanan pengajuan usulan pembuatan atau	SI SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	Informatika		Teknologi Informasi		usulan pembuatan atau pengadaan SPBE	r Negara		arsitektur SPBE pengajuan usulan pembuatan atau pengadaan arsitektur SPBE secara online pelaporan, rekapitulasi dan filter data aduan usulan pembuatan atau pengadaan arsitektur SPBE dashboard progress pengajuan atau pengadaan SPBE sinkronisasi usulan dengan masterplan SPBE rekomendasi persetujuan usulan (usulan harus sesuai dengan tupoksi PD)		pengadaan arsitektur SPBE	Elektronik)	
D.E .06 4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Seksi Pelayanan Informasi	Data pengaduan masyarakat	Informasi terkait progress penanganan yang merupakan tindak lanjut dari	RD 04.02 Data Sosial	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pencatatan data aduan layanan publik dan respon/tindak lanjut pengaduan layanan publik	Server Diskominfo	Layanan pengaduan	http://darmamojo.lapor.go.id	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
					pengaduan masyarakat			secara online pelaporan, rekapitulasi dan filter data aduan layanan publik dan respon/tindak lanjut dashboard aduan layanan publik aduan yang terselesaikan dan direspon pengkategorian atau clustering aduan dan memberikan notifikasi kepada PD terkait				
D.E .06 5	Dinas Pendidikan	Bidang Pendidikan Dasar	Seksi Bina Sekolah Pendidikan Dasar	Data siswa	Informasi terkait rekapitulasi data siswa	RD 06.01 Data Pendidikan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pendataan siswa	Komputer Internal PD	-	-	Pemerintah Daerah
D.E .06 6	Dinas Pendidikan	Bidang Pendidikan Dasar	Seksi Bina Sekolah Pendidikan Dasar	Data sekolah	Informasi terkait rekapitulasi data sekolah	RD 06.01 Data Pendidikan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pendataan sekolah	Komputer Internal PD	-	-	Pemerintah Daerah
D.E .06 7	Dinas Pendidikan	Bidang Pendidikan dan Tenaga	Seksi Tenaga Kependidikan	Data PTK	Informasi terkait rekapitulasi data Pendidik	RD 06.01 Data	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pendataan sekolah data Pendidik dan	Komputer Internal PD	-	-	Pemerintah Daerah

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
		Kependidikan			dan Tenaga Kependidikan (PTK)	Pendidikan		Tenaga Kependidikan (PTK)				
D.E .068	Dinas Pendidikan	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan profil dan berita terkait Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat	Server Diskominfo	-	dispendik.mojokertokab	Diskominfo
D.E .069	Dinas Pendidikan	Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan	Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Data sarana dan prasarana pendidikan	Informasi terkait pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan	RD 06.01 Data Pendidikan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara transparansi dan akuntabilitas	Server Pusat	Pengajuan Sarana Prasarana Sekolah	SI Sarpras Pendidikan	Pusat
D.E .070	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	Data pasien	Informasi terkait penyakit di daerah kecamatan	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pelayanan dan manajemen psukesmas secara online dan terintegrasi	Server Diskominfo	-	e-puskesmas	Pemerintah Daerah
D.E .071	Dinas Kesehatan	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan	Data yang berkaitan dengan	Informasi terkait profil, berita, dokumen	RD 10.02 Data	Publik	Informasi yang berkaitan dengan data kesehatan,	Server Diskominfo	-	dinkes.mojokertokab	Diskominfo

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
			Kepegawaian	program kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	en, galeri, artikel, dan kontak Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	Manajemen Kegiatan		data layanan kesehatan, profil, dan berita terkait Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto				
D.E.072	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	Data kesehatan	Informasi kesehatan yang mencakup Data Derajat Kesehatan, Upaya Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan dan Determinan Kesehatan	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan data dan informasi kesehatan yang mencakup Data Derajat Kesehatan, Upaya Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan dan Determinan Kesehatan	Server Pihak Ketiga	-	Komdat	Pusat
D.E.073	Dinas Kesehatan	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Data usulan Dana Alokasi Khusus	Informasi data Dana Alokasi Khusus	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam proses, perencanaan, penganggaran serta pelaporan informasi kinerja	Server Pusat	-	KRISNA	Pusat
D.E.074	Dinas Kesehatan	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Data DAK Nonfisik	Informasi terkait laporan DAK Nonfisik	RD 09.02 Data	Administrasi	Informasi yang berkaitan dalam penyusunan dan penyampaian	Server Pusat	-	Aladin	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
						Keuangan		data laporan penyerapan dan penggunaan DAK Nonfisik				
D.E .07 5	Dinas Kesehatan	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Data transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)	Informasi dan dokumen hasil monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)	Server Pusat	-	OM Span	Pusat
D.E .07 6	Dinas Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Seksi Kefarmasian	Data pasien HIV-AIDS	Informasi terkait pasien HIV-AIDS	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan data pasien HIV di puskesmas dan RS di Kabupaten Mojokerto	Server Pusat	-	SIHA	Pusat
D.E .07 7	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Data pasien Malaria	Informasi terkait pasien malaria	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan data pasien malaria di puskesmas dan RS di Kabupaten Mojokerto	Server Pusat	-	E-Sismal	Pusat
D.E .07 8	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan dan	Seksi Pencegahan dan	Data pasien Infeksi	Informasi terkait pasien infeksi	RD 04.01 Data	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan data pasien ISPA di	Server Pusat	-	ISPA	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
		Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Saluran Pernafasan	saluran pernafasan	Kesehatan		puskesmas dan RS di Kabupaten Mojokerto				
D.E.079	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Data pasien diare	Informasi terkait pasien diare	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan data pasien diare di puskesmas dan RS di Kabupaten Mojokerto	Server Pusat	-	Diare	Pusat
D.E.080	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Data pasien hepatitis	Informasi terkait pasien hepatitis	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Untuk memonitoring data pasien hepatitis di puskesmas dan RS di Kabupaten Mojokerto	Server Pusat	-	Hepatitis	Pusat
D.E.081	Dinas Kesehatan	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data rumah sakit	Informasi terkait rumah sakit	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas data yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan RI.	Server Pusat	-	RS Online	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E .08 2	Dinas Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Data Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Informasi dan pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan melalui ketersediaan data ataupun informasi yang valid, terbaru dan tepat waktu	Server Pusat	-	ASPAK	Pusat
D.E .08 3	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Data pengobatan tradisional	Informasi terkait data pengobatan tradisional	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan proses pengelolaan data pengobatan tradisional dan mendapatkan informasi yang akurat	Server Pusat	-	SIM PKT	Pusat
D.E .08 4	Dinas Kesehatan	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data usulan kegiatan tahun anggaran selanjutnya	Informasi terkait perencanaan kegiatan	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan proses perencanaan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun anggaran berikutnya	Server Pusat	-	PBE (Perencanaan berbasis elektronik)	Pusat
D.E .08 5	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Data keluarga sehat	Informasi terkait data keluarga sehat	RD 04.01 Data	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan data dan status pendataan dan	Server Pusat	-	Aplikasi Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
		Masyarakat				Kesehatan		Indeks Keluarga Sehat				
D.E.08.06	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Data kematian kehamilan atau keguguran	Informasi terkait data kematian kehamilan atau keguguran	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan laporan kematian kehamilan atau keguguran	Server Pusat	-	Maternal Perinatal Dead Notification	Pusat
D.E.08.07	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Data gizi masyarakat	Informasi terkait data gizi masyarakat	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan tenaga pelaksana gizi dan pemangku kebijakan di daerah dalam mengamati permasalahan gizi di wilayah	Server Pusat	-	EPPGBM	Pusat
D.E.08.08	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Data tempat pengelolaan makanan (TPM)	Informasi terkait TPM	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan data TPM	Server Pusat	-	Emonev HSP (Higien Sanitasi Pangan)	Pusat
D.E.08.09	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Data kualitas air minum	Informasi terkait data pengawasan kualitas air minum	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang terkait dengan data PKAM dengan cepat dan akurat	Server Pusat	-	Emonev PKAM (Pengawasan Kualitas Air Minum)	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E .09 0	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Data Peserta BPJS	Informasi terkait data-data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)	Server Pusat	-	Dashboard JKN	Pusat
D.E .09 1	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Data penyakit	Informasi terkait pendeteksian dini ancaman KLB penyakit menular	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pendeteksian dini ancaman KLB penyakit menular.	Server Pusat	-	EWARS	Pusat
D.E .09 2	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Seksi Surveilans dan Imunisasi	Data pendaftaran haji	Informasi terkait peserta haji	RD 08.01 Data Agama	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan haji	Server Pusat	-	Siskohart	Pusat
D.E .09 3	Dinas Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Data SDM	Informasi terkait hasil pengelolaan data SDM	RD 06.02 Data Ketenagakerjaan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan data perencanaan kebutuhan SDM secara efektif dan efisien	Server Pihak Ketiga	-	RENBUT	Pusat
D.E .09 4	Dinas Kesehatan	Bidang Sumber Daya	Seksi Kefarmasian	Data kelayakan dan	Informasi terkait kelayakan	RD 04.01 Data	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan persebaran obat di	Server Pusat	-	SIPNAP	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
		Kesehatan		persebaran obat	dan persebaran obat	Kesehatan		Indonesia, dan apakah obat yang digunakan itu sesuai dan tidak berbahaya				
D.E .09 5	Dinas Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Seksi Kefarmasian	Data ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Informasi ketersediaan obat dan BMHP	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pemantauan ketersediaan obat dan BMHP	Server Pusat	-	E-Logistik Obat	Pusat
D.E .09 6	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Data pengawasan obat dan makanan	Informasi terkait hasil pengawasan obat dan makanan, serta rekomendasi BPOM	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan hasil pengawasan obat dan makanan	Server Pusat	-	Smart BPOM	Pusat
D.E .09 7	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Data pasien TBC, Data logistik OAT dan non OAT	Informasi terkait suspek TB, pasien TBC, jumlah logistik OAT dan non OAT	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan suspek TBC, pasien TBC, jumlah logistik OAT dan non OAT	Server Pusat	-	SITB	Pusat
D.E .09 8	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan	Seksi Promosi dan Pemberdayaan	Data Informasi makanan yang telah	Informasi terkait data makanan yang telah	RD 04.01 Data	Publik	Informasi yang berkaitan dengan layanan kepada masyarakat guna	Komputer Internal PD	Layanan Laik Higienis Jasa Boga	-	Dinas Kesehatan

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
		Masyarakat	an Masyarakat	lulus uji dan bersertifikat	lulus uji dan bersertifikat	Kesehatan		memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga dalam rangka mengendalikan faktor makanan, orang, tempat serta proses dan perlengkapan pengolahan makanan				
D.E .09 9	Dinas Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Data Diri Pemohon Surat ijin Apoteker	Informasi terkait data permohonan surat ijin apoteker	RD 04.01 Data Kesehatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pengajuan surat izin praktik yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian	Komputer Internal PD	Layanan Surat Ijin Apoteker	-	Dinas Kesehatan
D.E .10 0	Dinas Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Seksi Kefarmasian	Data diri pemohon ijin kefarmasian	Informasi terkait data permohonan ijin kefarmasian	RD 04.01 Data Kesehatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan permohonan pengajuan Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian baik secara online maupun offline	Komputer Internal PD	Layanan SIPTTK	-	Dinas Kesehatan

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E .10 1	Dinas Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Seksi Kefarmasian	Data Pemohon Usaha mikro obat tradisional	Informasi terkait data pemohon usaha mikro obat tradisional	RD 04.01 Data Kesehatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan surat izin Usaha Mikro Obat Tradisional	Server Pihak Ketiga	Layanan UMOT	-	Dinas Kesehatan
D.E .10 2	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Data pemohon ijin praktek dokter	Informasi terkait data pemohon ijin praktek dokter	RD 04.01 Data Kesehatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan izin praktik dokter agar mendapat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik	Komputer Internal PD	Layanan Surat Ijin Praktek Dokter	-	Dinas Kesehatan
D.E .10 3	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Data pemohon ijin produksi makanan dan minuman	Informasi terkait data pemohon ijin produksi makanan dan minuman	RD 04.01 Data Kesehatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan industri rumahan dalam mendapatkan izin produksi makanan dan minuman berskala rumahan	Komputer Internal PD	Layanan PIRT	-	Dinas Kesehatan
D.E .10 4	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	Data pemohon ijin rekam medis	Informasi terkait data pemohon ijin rekam medis	RD 04.01 Data Kesehatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pengajuan surat izin kerja rekam medis yang berperan sebagai bukti tertulis yang	Komputer Internal PD	Layanan Surat Ijin Rekam Medis	-	Dinas Kesehatan

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
								diberikan kepada tenaga kesehatan				
D.E.10.5	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Data pemohon ijin perawat	Informasi terkait data pemohon ijin perawat	RD 04.01 Data Kesehatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan permohonan surat ijin perawat sebagai bukti telah teregistrasi sebagai tenaga kesehatan	Komputer Internal PD	Layanan Surat Ijin Perawat	-	Dinas Kesehatan
D.E.10.6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa	Seksi Pembangunan Desa dan Keswadayaan Masyarakat	Data posyandu	Informasi dan dokumen laporan rekapitulasi terkait posyandu	RD 04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan posyandu yang tepat guna dan tepat waktu	Server Diskominfo	Layanan Posyandu	SIM Posyandu	Pemerintah Daerah
D.E.10.7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	Seksi Tata Laksana Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Data PKK	Informasi dan dokumen laporan rekapitulasi terkait PKK	RD 03.07 Data Kependudukan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan PKK yang tepat guna dan tepat waktu	Server Diskominfo	Layanan PKK	SIM PKK	Pemerintah Daerah
D.E.10.8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri,	RD 10.02 Data Manajemen	Publik	Informasi yang berkaitan dengan profil dan berita terkait Dinas	Server Diskominfo	-	dpmd.mojokertokab	Diskominfo

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	akat dan Desa			kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto	artikel, dan kontak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto	men Kegiatan		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dan diberika ke masyarakat				
D.E.109	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Data Siskuedes	Informasi dan dokumen laporan rekapitulasi terkait kelola keuangan desa	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan kualitas tata kelola keuangan desa dan memudahkan dalam pelaporan keuangan	Server Diskominfo	Layanan Klinik Lakon Penggoda	SISKEUDES	Pusat
D.E.110	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Data Aset Desa	Informasi terkait aset desa	RD 03.05 Data pambangunan kawasan atau daerah tertinggal	Publik	Informasi yang berkaitan dengan manajemen aset desa untuk menimalisir kehilangan	Server Pusat	-	SIPADES	Pusat
D.E.111	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa	Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa	Data Perkembangan Kemandirian Desa	Informasi terkait perkembangan kemandirian desa	RD 03.05 Data Pambangunan Kawasa	Publik	Informasi yang berkaitan dengan perkembangan kemandirian desa berdasarkan	Server Pusat	-	Pemutakhiran IDM	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	dan Desa					n atau Daerah Tertinggal		Undang-Undang Desa				
D.E .11 2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa	Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa	Data Profil Desa dan Kelurahan	Informasi terkait profil desa dan kelurahan	RD 09.03 Data Informasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan profil desa dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto	Server Pusat	-	Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Profil Desa dan Kelurahan)	Pusat
D.E .11 3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Data kependudukan	Informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana	RD 03.07 Data Kependudukan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir	Server Pusat	-	SIAK KONSOLIDASI	Pusat
D.E .11 4	Dinas Kependudukan	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan	Data yang berkaitan dengan	Informasi terkait profil, berita, dokum	RD 10.02 Data	Publik	Informasi yang berkaitan dengan profil dan berita	Server Diskominfo	-	dispendukcapil.mojo kertokab	Diskominfo

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	dan Pendaftaran Sipil		Kepegawaian	program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Sipil Kabupaten Mojokerto	en, galeri, artikel, dan kontak Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Sipil Kabupaten Mojokerto	Manajemen Kegiatan		terkait Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Sipil Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat				
D.E.11.5	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Seksi Organisasi dan Tatalaksana	Data koperasi	Informasi dan dokumen laporan rekapitulasi terkait rincian tiap koperasi	RD 02.09 Data Koperasi	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan data rincian tiap koperasi, bisa menginputkan data koperasi baru, memberi ranking dan laporan	Server Diskominfo	-	Online Data System	Pemerintah Daerah
D.E.11.6	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan profil dan berita terkait Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat	Server Diskominfo	-	dinkop.mojokertokab	Diskominfo
D.E.11.7	Dinas Koperasi dan	Bidang Pemasaran -	Bidang Pemasaran -	Data barang dan jasa UMKM	Informasi terkait UMKM meliputi	RD 02.10 Data	Publik	Informasi yang berkaitan dengan UMKM meliputi	Server Diskominfo	Fasilitasi pemasaran	Mojopahit Shopping Center	Dinas Koperasi dan

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	Usaha Mikro	Seksi Promosi	Seksi Promosi		melihat barang dan jasa yang ditawarkan oleh UMKM sebagai sarana pemasaran	Usaha Kecil dan Menengah		melihat barang dan jasa yang ditawarkan oleh UMKM sebagai sarana pemasaran		koperasi dan UMKM	(Website pemasaran UMKM)	Usaha Mikro
D.E.118	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pemasaran - Seksi Fasilitas Pengembangan Informasi dan Wirausaha	Bidang Pemasaran - Seksi Fasilitas Pengembangan Informasi dan Wirausaha	Data usaha mikro setiap desa dan cluster usaha	Informasi terkait data usaha mikro setiap cluster usaha dan kecamatan	RD 02.10 Data Usaha Kecil dan Menengah	Publik	Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pendataan usaha mikro	Server Diskominfo	Layanan pendataan usaha mikro	Sistem Informasi Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
D.E.119	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pembinaan	Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan	Data laporan berkala koperasi meliputi laporan keuangan dan laporan manajerial	Informasi terkait data laporan berkala koperasi	RD 02.09 Data Koperasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan layanan koperasi dalam melaporkan laporan berkala secara online	Server Diskominfo	Layanan SIBOLASI	SIBOLASI	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E .12 0	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Seksi Organisasi dan Tatalaksana	Data Pemohon dan Perihal Permohonan anggota koperasi	Informasi terkait data permohonan anggota koperasi	RD 02.09 Data Koperasi	Publik	Informasi yang berperan dengan bukti pendukung legalitas anggota koperasi	Komputer Internal PD	Layanan Surat Keterangan Kepengurusan	Tidak ada	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
D.E .12 1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Seksi Organisasi dan Tatalaksana	Data Anggaran Koperasi	Informasi terkait anggaran koperasi	RD 02.09 Data Koperasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar koperasi	Komputer Internal PD	Layanan Pembinaan perubahan anggaran dasar koperasi	Tidak ada	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
D.E .12 2	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pemasaran	Seksi Fasilitas Pengembangan Informasi dan Wirausaha	Data Klien dan Produk Bisnis	Informasi terkait produk bisnis klien	RD 02.10 Data Usaha Kecil dan Menengah	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pengurusan legalitas usaha	Komputer Internal PD	Layanan Fasilitas klinik bisnis	Sosial Media (WA dan Instagram)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
D.E .12 3	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Seksi Produksi	Data Pemilik Usaha dan Produk Usaha Mikro	Informasi terkait produk pemilik usaha mikro	RD 02.10 Data Usaha Kecil dan Menengah	Publik	Informasi yang berkaitan dengan kualitas produk agar dapat bersaing dengan produk-produk modern lainnya	Komputer Internal PD	Layanan Pembinaan produksi usaha mikro	Whatsapp	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
D.E .12 4	Dinas Koperasi dan	Bidang Kelembagaan	Seksi Penyuluhan,	Data Peserta Penyuluhan	Informasi terkait data	RD 02.09 Data	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pembinaan	Komputer Internal PD	Layanan Penyuluhan	Tidak ada	Dinas Koperasi dan

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	Usaha Mikro	dan Pengawasan	Advokasi dan Hukum		peserta penyuluhan	Koperasi		penyuluhan manajemen koperasi, meliputi: sosialisasi, pengembangan penyuluhan dan kaderisasi penyuluhan koperasi		manajemen koperasi		Usaha Mikro
D.E.12.5	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pemasaran	Seksi Fasilitas Pengembangan Informasi dan Wirausaha	Data Peserta Pelatihan	Informasi terkait data peserta pelatihan	RD 02.09 Data Koperasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan program pelatihan pengetahuan kepada masyarakat tentang wirausaha agar dapat membuka usaha sendiri sehingga mendapatkan penghasilan sendiri dari usaha yang telah dibuat	Komputer Internal PD	Layanan Pelatihan wirausaha	Zoom Meeting	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
D.E.12.6	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pemasaran	Seksi Fasilitas Pengembangan Informasi dan Wirausaha	Data Usaha Mikro	Informasi terkait data usaha mikro	RD 02.10 Data Usaha Kecil dan Menengah	Publik	Informasi yang berkaitan dengan produk usaha mikro dengan memberikan pelatihan terkait pelayanan produksi usaha mikro	Komputer Internal PD	Layanan Pelatihan terkait produksi usaha mikro	Zoom Meeting	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E .12 7	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Seksi Organisasi dan Tatalaksana	Data Peserta Pembinaan	Informasi terkait data peserta pembinaan	RD 02.10 Data Usaha Kecil dan Menengah	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pembinaan organisasi dan tata laksana koperasi, yang meliputi: perangkat organisasi, administrasi, akuntabilitas koperasi.	Komputer Internal PD	Layanan Pembinaan Tata cara pembentukan koperasi	Tidak ada	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
D.E .12 8	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Seksi Pengawasan, Akuntabilitas dan Kepatuhan	Data koperasi sehat, cukup sehat, dan dalam pengawasan	Informasi terkait pengawasan koperasi	RD 02.09 Data Koperasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan penilaian kesehatan bagi koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam	Komputer Internal PD	Layanan Penilaian Kesehatan Koperasi	Tidak ada	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
D.E .12 9	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan profil dan berita terkait Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat	Server Diskominfo	-	dlh.mojokertokab	Diskominfo

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E.130	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup	Data permohonan perizinan Lingkungan Hidup	Informasi terkait penerbitan dokumen surat perizinan	RD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Publik	Informasi yang berkaitan dengan kualitas pengelolaan pengurusan perijinan, terkait dokumen lingkungan, pembuangan air limbah industri/domestik ke badan air, dan penyimpanan sementara limbah B3 yang akurat, lengkap, dan mutakhir	Server Diskominfo	-	SI Layanan dan Perijinan LH	Pemerintah Daerah
D.E.131	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Seksi Penanganan Sampah	Data Pengelolaan Persampahan	Informasi terkait dengan pengelolaan persampahan	RD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Administrasi	Informasi yang bersikan seputar program yang berhubungan dengan persampahan	Komputer Internal PD	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
D.E.132	Dinas Pangan dan	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri,	RD 10.02 Data Manaje	Publik	Informasi yang berkaitan dengan Dinas Pangan dan Perikanan	Server Diskominfo	-	dispari.mojokertokab	Diskominfo

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	Perikanan			kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto	artikel, dan kontak Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto	men Kegiatan		Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat				
D.E .13 3	Dinas Pangan dan Perikanan	Bidang Keterseediaan dan Distribusi Pangan	Seksi Distribusi Pangan	Data Penjualan Bahan Pokok	Informasi terkait penjualan bahan pokok	RD 02.09 Data Koperasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan penjualan bahan pokok	Server Diskominfo	Layanan Tani Indonesia Center	PASTANI	Dinas Pangan dan Perikanan
D.E .13 4	Dinas Pangan dan Perikanan	Bidang Keterseediaan dan Distribusi Pangan	Seksi Distribusi Pangan	Data harga pangan yang bersumber dari survei pasar	Informasi terkait harga pangan pokok	RD 09.03 Data Informasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan harga pangan pokok	Server Diskominfo	Layanan informasi harga pangan	SIMHARPA	Dinas Pangan dan Perikanan
D.E .13 5	Dinas Pangan dan Perikanan	Bidang Produksi Perikanan	Seksi Perikanan Budidaya	Data Perikanan	Mengetahui informasi tentang data budidaya perikanan	RD 02.06 Data Perikanan	Administrasi	Memberikan Informasi terkait budidaya ikan, produksi perikanan Data kelompok perikanan (data tangkap, budidaya) (POKDAKAN)	Komputer Internal PD	-	-	Dinas Pangan dan Perikanan

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E.136	Dinas Pangan dan Perikanan	Bidang Usaha dan Agribisnis Perikanan	Seksi Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Data pengolahan perikanan	Mengetahui informasi terkait data pengolahan hasil perikan di kelompok masyarakat pengolahan dan pemasaran ikan	RD 02.06 Data Perikanan	Administrasi	Informasi yang menghimpun data hasil pengolahan perikanan yang dari POKLAHSAR (Kelompok pengolahan dan pemasaran)	Komputer Internal PD	-	-	Dinas Pangan dan Perikanan
D.E.137	Dinas Pangan dan Perikanan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Seksi Konsumsi Pangan	Data Desa rentan rawan pangan	Mengetahui informasi rincian data laporan desa rawan pangan	RD 09.03 Data Informasi	Administrasi	Memberikan informasi untuk hasil pengolahan Output peta rawan pangan (FVSA) desa yang rentan rawan pangan	Server Diskominfo	-	SIMHARPA	Dinas Pangan dan Perikanan
D.E.138	Dinas Pangan dan Perikanan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Seksi Ketersediaan Pangan	Data neraca bahan makanan (NBM) dan skor pola pangan harapan (PPH)	Mengetahui informasi rincian ketersediaan bahan pangan Kabupaten Mojokerto	RD 09.03 Data Informasi	Administrasi	Memberikan informasi untuk mengetahui ketersediaan bahan pangan	Server Diskominfo	-	SIMHARPA	Dinas Pangan dan Perikanan
D.E.139	Dinas Pangan dan Perikanan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi	Seksi Ketersediaan Pangan	Data konsumsi (Data kelompok	Mengetahui informasi rincian data kelompok wanita tani	RD 06.02 Data Ketenag	Administrasi	Informasi terkait kelompok wanita tani yang dibentuk untuk pemanfaatan pekarangan untuk	Server Diskominfo	-	SIMHARPA	Dinas Pangan dan Perikanan

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
		si Pangan		Wanita Tani)	yang memanfaatkan pekarangan rumah untuk ketersediaan pangan rumah tangga	akerjaan		ketersediaan pangan rumah tangga (P2L)				
D.E.140	Dinas Pangan dan Perikanan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Seksi Ketersediaan Pangan	Data PPH Konsumsi Pangan	Mengetahui rincian informasi data konsumsi pangan	RD 09.03 Data Informasi	Administrasi	Memberikan Informasi terkait data konsumsi pangan	Server Diskominfo	-	SIMHARPA	Dinas Pangan dan Perikanan
D.E.141	Dinas Pangan dan Perikanan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Seksi Keamanan Pangan	Data Sampel Keamanan Pangan	Mengetahui laporan data sampel makanan yang telah diambil dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mojokerto	RD 09.03 Data Informasi	Administrasi	Informasi terkait sampel keamanan pangan yang diambil dari seperti kantin sekolah	Komputer Internal PD	-	-	Dinas Pangan dan Perikanan
D.E.142	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Dinas	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Dinas	RD 10.02 Data Manajemen	Publik	Informasi yang berkaitan dengan profil dan berita terkait Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan	Server Diskominfo	Layanan Rekomendasi Kartu Induk Kesenian Layanan	https://disparpora.mojokertoba.go.id/	Diskominfo

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	dan Pariwisata			Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto	Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto	Kegiatan		Olahraga Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat		Rekomendasi Penggunaan Stadion/Indoor		
D.E.14.3	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Bidang Pariwisata	Seksi Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Data Pemohon Usaha Pariwisata	Informasi terkait data pemohon usaha	RD 02.11 Data Pariwisata	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pelayanan izin usaha pariwisata dengan memberikan dokumen bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata	Server Diskominfo	Layanan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	oss.go.id	Pemerintah Daerah
D.E.14.4	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Bidang Pariwisata	Seksi Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Data pariwisata	Informasi terkait pariwisata	RD 02.11 Data Pariwisata	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pariwisata di Kabupaten Mojokerto	Server Diskominfo	-	pariwisata.mojokertokab.go.id	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E .14 5	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Bidang Pariwisata	Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Data tiket pariwisata	Informasi terkait tiket pariwisata	RD 02.11 Data Pariwisata	Publik	Informasi yang berkaitan dengan tiket pariwisata secara online	Server Diskominfo	-	pariwisata.mojokertokab.go.id	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
D.E .14 6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan profil dan berita Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat	Server Diskominfo	-	dpupr.mojokertokab	Diskominfo
D.E .14 7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Seksi Operasional Peralatan dan Perbekalan	Data sewa alat berat	Informasi terkait dengan penyewaan alat berat	RD 03.01 Data Pekerjaan Umum	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan administrasi sewa alat berat	Server Diskominfo	Layanan administrasi sewa alat	SIM SEWA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
D.E .14 8	Dinas Pekerjaan	Bidang Penataan Ruang	Seksi Pelaksanaan	Data Tataruang kota dan	Informasi terkait penataan dan	RD 03.01 Data	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan tata ruang dan	Komputer Internal PD	Layanan tataruang secara	-	Dinas Pekerjaan Umum

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	Umum dan Penataan Ruang		Penataan Ruang	perencanaan pembangunan kota	perencanaan pembangunan kota	Pekerjaan Umum		batas wilayah dibangun		tertulis Layanan Perlindungan garis sepadan jalan untuk pembangunan pagar		dan Penataan Ruang
D.E.149	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Data Pemohon pembuatan jalan dan jembatan	Informasi terkait permohonan pembuatan jalan dan jembatan	RD 03.01 Data Pekerjaan Umum	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan penerbitan ijin kegiatan pembuatan jalan dan jembatan	Komputer Internal PD	Layanan perijinan membuat jembatan keluar masuk diatas saluran air	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
D.E.150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bidang Sumber Daya Air	Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Penyuluhan Sumber Daya Air	Data Pemohon Peil Banjir	Informasi terkait pemohon peil banjir	RD 07.05 Data Lingkungan Hidup	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pedoman pembuatan surat izin peil banjir	Komputer Internal PD	Layanan Rekomendasi Peil Banjir	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
D.E.151	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Seksi Pemeliharaan Jalan	Data Ruas Jalan Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait ruas jalan	RD 03.01 Data Pekerjaan Umum	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan ruas jalan di Kabupaten Mojokerto	Komputer Internal PD	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E.15.2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Seksi Pemeliharaan Jembatan	Data Jembatan Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait jumlah jembatan	RD 03.01 Data Pekerjaan Umum	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan jumlah jembatan yang terdapat di Kabupaten Mojokerto	Komputer Internal PD	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
D.E.15.3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan dasar hukum perizinan, blangko permohonan izin, nomenklatur dan persyaratan perizinan, register izin se-kabupaten, monitoring proses izin, pengajuan izin online, serta profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto	Server Diskominfo	-	dpmptsp.mojokertokab	Diskominfo
D.E.15.4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Operasional	Data perizinan dan non perizinan	Penerbitan dokumen perizinan	RD 02.08 Data Investasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan	Server Diskominfo	Izin Dasar, Izin Sektor Kesehatan, Izin Sektor Koperasi Dan Ukm, Izin Sektor	Online Single Submission Izin.mojokertokab.go.id	Pemerintah Daerah

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	Terpadu Satu Pintu									Pendidikan, Izin Sektor Lingkungan Hidup, Izin Sektor Perdagangan, Izin Sektor Perhubungan, Izin Sektor Perindustrian, Izin Sektor Pertanian, Izin Sektor Ketenagakerjaan, Izin Sektor Pupr, Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Surat Izin Praktek Apoteker, Layanan Surat Izin Praktek		

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
										Dokter dll., Surat izin kerja rekam medis, Surat Izin Perawat		
D.E.155	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Tanah	Data Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan Pelayanan Penanaman Modal	RD 02.08 Data Investasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pelayanan penanaman modal	Server Diskominfo	Izin Dasar, Izin Sektor Kesehatan, Izin Sektor Koperasi Dan Ukm, Izin Sektor Pendidikan, Izin Sektor Lingkungan Hidup, Izin Sektor Perdagangan, Izin Sektor Perhubungan, Izin Sektor Perindustrian, Izin Sektor Pertanian, Izin Sektor Ketenagakerjaan, Izin	Online Single Submission Izin.mojokertokab.go.id investasi.mojokertokab.go.id	Pemerintah Daerah

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
										Sektor Pupr, Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Surat Izin Praktek Apoteker, Layanan Surat Izin Praktek Dokter dll., Surat izin kerja rekam medis, Surat Izin Perawat		
D.E.156	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data berita info-layak-anak-kabmojokerto.com	Informasi terkait berita info-layak-anak-kabmojokerto.com	RD 04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan bidang perlindungan anak	Server Diskominfo	-	info-layak-anak-mojokertokab.com	Pemerintah Daerah

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	Perempuan											
D.E.157	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Perlindungan Anak	Seksi Perlindungan Anak	Data P2TP2A	Informasi terkait data P2TP2A	RD 04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan data dari Polres mengenai P2TP2A	Server Diskominfo	-	P2TP2A	Pemerintah Daerah
D.E.158	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Perlindungan Anak	Seksi Perlindungan Anak	Data kasus kekerasan	Informasi terkait dokumen hasil pendataan, monitoring dan evaluasi terkait kasus kekerasan	RD 04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan media pendataan, monitoring dan evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia	Server Pusat	Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	SIMFONI e-kekerasan	Pusat
D.E.159	Dinas Pengendalian	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Data Dana Alokasi Khusus	Informasi dokumen hasil	RD 09.02 Data	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan sistem pelaporan	Server Pusat	-	Morena	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan			(DAK) Fisik dan Non Fisik	pendataan, monitoring dan evaluasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik	Keuangan		dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam pelaporan				
D.E .16 0	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Keluarga Berencana	Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan	Data kampung KB	Informasi dokumen laporan terkait program kampung KB	RD 03.07 Data Kependudukan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pelaporan kegiatan dan perkembangan yang ada di Kampung KB	Server Pusat	Sosialisasi KB	Sistem informasi Kampung KB Aplikasi KB Kita	Pusat
D.E .16 1	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana	Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan	Data Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Informasi terkait Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga	RD 03.07 Data Kependudukan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara	Server Pusat	-	SR (Statistik Rutin)	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	na dan Pemberdayaan Perempuan		Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan		Berencana Nasional			mudah, tepat, dan akurat				
D.E.16.2	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga	Data Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Informasi terkait Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan data pelaporan dan pengelolaan (input-proses-output) maupun pengambilan keputusan	Server Pusat	-	SIGA (Sistem Informasi Keluarga)	Pusat
D.E.16.3	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Seksi Ketahanan Keluarga Balita dan Lanjut Usia	Data Keluarga Sejahtera	Informasi terkait cara pengasuhan anak balita	RD 04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan bagaimana cara pengasuhan anak balita	Server Pusat	-	Orang Tua Hebat	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E .16 4	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Seksi Ketahanan Keluarga Remaja dan Konseling Remaja	Data Remaja	Pelayanan konsultasi secara online seputar kehidupan remaja	RD 04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan layanan konsultasi dengan maksimal dan secara online seputar kehidupan remaja, meliputi: Konsultasi perkembangan remaja Konsultasi kesehatan reproduksi remaja Konsultasi masalah umum remaja	Server Pusat	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Siap Bahagia	Pusat
D.E .16 5	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Data korban kekerasan	Informasi terkait dengan data korban kekerasan	RD 04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pelaporan, rekapitulasi dan filter kegiatan pembinaan pelaksanaan peningkatan penguatan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan monitoring	Server Diskominfo	Layanan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak	RANGKUL (Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Online)	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
								pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak pendaftaran pendampingan online pencatatan kejadian kekerasan pada perempuan dan anak penanganan masalah kekerasan perempuan anak dan status prosesnya layanan konsultasi online pengelolaan data Pengarusutamaan gender				
D.E .16 6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Perpustakaan	Seksi Layanan Perpustakaan	Data perpustakaan	Informasi terkait data perpustakaan dan penerbitan katalog elektronik	RD 06.01 Data Pendidikan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pengembangan otomasi perpustakaan dan pembentukan katalog elektronik	Server Diskominfo	Layanan Sirkulasi	INLIS Lite	Pusat
D.E .16 7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Perpustakaan	Seksi Layanan Perpustakaan	Data buku	Pelayanan perpustakaan online (ebook)	RD 06.01 Data Pendidikan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pelayanan perpustakaan secara online	Server Diskominfo	Sirkulasi (EPusda)	E-Pusdakab Mojokerto	Pemerintah Daerah

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E.168	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan profil dan berita Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat	Server Diskominfo	-	disperka. mojokertokab	Diskominfo
D.E.169	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Perpustakaan	Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca	Data ebook	Informasi terkait kumpulan ebook	RD 06.01 Data Pendidikan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan daftar kumpulan ebook	Server Pusat	-	PADI (Perpus Digital)	Pusat
D.E.170	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data koleksi dan aset perpustakaan	Informasi terkait koleksi (inlis) dan aset perpustakaan	RD 06.01 Data Pendidikan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan koleksi buku (inlis) dan aset perpustakaan	Komputer Internal PD	Layanan Perpustakaan Keliling	Tidak ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
D.E.171	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Kearsipan	Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis	Data Arsip dokumen	Informasi terkait arsip dokumen	RD 06.01 Data Pendidikan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan dan akses arsip kepada masyarakat	Komputer Internal PD	Layanan Masyarakat kearsipan	Tidak ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E .17 2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Perpustakaan	Seksi Layanan Perpustakaan	Data Pelayanan Perpustakaan	Informasi terkait pelayanan perpustakaan	RD 06.01 Data Pendidikan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan layanan perpustakaan umum dengan melakukan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan	Komputer Internal PD	Layanan Pustaka Terapan berbasis Inklusi Nasional	Tidak ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
D.E .17 3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Pengembangan	Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka	Data Keputusan Kepala Dinas	Informasi terkait data keputusan kepala dinas	RD 09.03 Data Informasi	Publik	Informasi yang berkaitan pengoptimalan peran serta Perpustakaan sebagai wahana belajar, memperluas wawasan dan pengetahuan serta mengembangkan potensi masyarakat, maka, perlu di	Komputer Internal PD	Layanan Pustaka ASIEK	Tidak ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID DA TA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Refere nsi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyim panan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Penduku ng	PD Pemilik Data yang Terkait
								kembangkan suatu Kegiatan Pustaka Terapan-Asistensi Dan Eksplorasi ("Pustaka Asiek") yang dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan eksplorasi keterampilan bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih cakap, kreatif dan mandiri dari segi pengetahuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkannya menjadi suatu kegiatan ekonomi yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan program Literasi Untuk Kesejahteraan				

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E .17 4	Dinas Pertanian	Bidang Prasarana dan Sarana	Seksi Pupuk dan Pesticida	Data petani	Informasi penerima pupuk bersubsidi	RD 02.03 Data Pertanian	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan daftar penerima pupuk bersubsidi jumlah kelompok tani	Server Pusat	-	ERDKK	Pusat
D.E .17 5	Dinas Pertanian	Bidang Penyuluhan	Seksi Tatalaksana Penyuluhan	Data kegiatan pertanian, kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pemerintah, serta data kelembagaan petani	Informasi yang berkaitan dengan dokumen laporan rekapitulasi dan informasi terkait kegiatan pertanian, kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pemerintah, serta data kelembagaan petani	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan perolehan dan pemantauan kebutuhan terkait dengan data Penyuluh, Kelompok Tani Hutan (KTH) dan sarana/prasarana pendukungnya	Server Pusat	-	SIMLUHTAN	Pusat
D.E .17 6	Dinas Pertanian	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Dinas	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Dinas	RD 10.02 Data Manajemen	Publik	Informasi yang berkaitan dengan profil dan berita Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dan	Server Diskominfo	-	disperta.mojokertokab	Diskominfo

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
				Pertanian Kabupaten Mojokerto	Pertanian Kabupaten Mojokerto	Kegiatan		diberikan ke masyarakat				
D.E .17 7	Dinas Pertanian	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Data luas tambah tanam	Informasi dan dokumen laporan terkait luas tambah tanam	RD 02.03 Data Pertanian	Administrasi	Informasi yang terkait luas tambah tanam komoditas pajale (padi, jagung, kedelai) dilaporkan harian	Server Pusat		LUAS TAMBAH TANAM	Pusat
D.E .17 8	Dinas Pertanian	Sekretariat	Sub Bagian Penyusunan Program	Data usulan kegiatan	Informasi terkait dokumen proposal program/kegiatan	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan dokumen proposal program atau kegiatan, bantuan alat, bibit dsbnya dari kelompok tani ke dinas pertanian	Server Pusat		e-Proposal	Pusat
D.E .17 9	Dinas Pertanian	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Data hewan	Informasi terkait kesehatan hewan	RD 02.05 Data Peternakan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan kesehatan hewan	Server Pusat	Layanan Pasar Kesehatan Hewan	iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional)	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E.180	Dinas Pertanian	Bidang Perkebunan	Seksi Produksi Perkebunan	Data luas panen/tanam kotor	Informasi terkait dokumen laporan terkait validasi data luas panen/ tanam kotor	RD 02.03 Data Pertanian	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan kualitas data luas panen/ tanam kotor	Server Pusat	-	Si-PDPS	Pusat
D.E.181	Dinas Pertanian	Sekretariat	Sub Bagian Penyusunan Program	Data Usulan Anggaran, Data Produksi	Informasi terkait usulan anggaran dan data produksi	RD 09.02 Data Keuangan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang ditargetkan, lengkap dengan daya dukung yang akurat dan legalitas dari dinas terkait	Server Pusat	-	Krisna DAK	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
D.E.182	Dinas Pertanian	Bidang Penyuluhan	Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan	Data kios pupuk, kelompok tani, jumlah alokasi pupuk	Informasi terkait kios pupuk, kelompok tani, dan jumlah alokasi pupuk	RD 02.03 Data Pertanian	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan usulan terkait kios pupuk, kelompok tani, jumlah alokasi pupuk	Server Pusat	Layanan penyaluran pupuk bersubsidi	SiVerval	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian
D.E.183	Dinas Pertanian	Bidang Perkebunan	Seksi Perbenihan dan Perlindungan	Data perkebunan dan pertanian	Informasi terkait data perkebunan	RD 02.04 Data	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan perbenihan, data produksi sampai	Server Diskominfo	Layanan pengelolaan data pertanian	SINTA (Sistem Informasi Pertanian)	Dinas Pertanian

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
			n Perkebunan	mulai perbenihan, data produksi sampai dengan pengolahan hasil perkebunan dan pemasarannya		Perkebunan		dengan pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran			dan Perkebunan)	
D.E .18 4	Dinas Pertanian	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura	Data Tanaman Hortikultura	Informasi terkait tanaman hortikultura	RD 02.03 Data Pertanian	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan Pelaporan Tanaman Hortikultura	Server Diskominfo	-	Aplikasi LTT Hortikultura	Pusat
D.E .18 5	Dinas Pertanian	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner	Data Rumah Potong, jumlah hewan dan unggas dan Penyaluran hewan dan unggas	Informasi terkait rumah potong dan penyaluran hewan dan unggas	RD 02.05 Data Peternakan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan tempat pemotongan hewan dan unggas yang hendak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Komputer Internal PD	Layanan rumah potong unggas Layanan rumah potong hewan	-	Dinas Pertanian

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E .18 6	Dinas Pertanian	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan	Data hasil uji kesehatan hewan	Informasi terkait uji kesehatan hewan	RD 02.05 Data Peternakan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan Pusat Layanan Pengujian kesehatan hewan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan hewan agar terhindar dari berbagai macam penyakit berbahaya yang dapat menular antar hewan ataupun manusia	Komputer Internal PD	Layanan Lab Kesehatan Hewan	-	Dinas Pertanian
D.E .18 7	Dinas Pertanian	Bidang Peternakan	Seksi Produksi dan Budidaya	Data Populasi Ternak, Data Produksi peternakan, Data produktivitas peternakan	Informasi yang memuat jumlah populasi (daging telur susu)	RD 02.05 Data Peternakan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan menginformasikan populasi ternak dan produksi peternakan	Komputer Internal PD	-	-	Dinas Pertanian
D.E .18 8	Dinas Pertanian	Bidang Penyuluhan	Seksi Tatalaksana Penyuluhan	Data penyuluh pertanian lapangan	Informasi yang memuat informasi penyuluh	RD 02.03 Data Pertanian	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan data sdm pertanian untuk melakukan	Komputer Internal PD	-	-	Dinas Pertanian

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
					pertanian lapangan			penyuluhan ke kelompok tani				
D.E.189	Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Perhubungan	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pencatatan data perkebunan dan pertanian mulai perbenihan, produksi sampai dengan pengolahan hasil perkebunan dan pemasarannya pelaporan, rekapitulasi dan filter data perkebunan mulai perbenihan, produksi sampai dengan pengolahan hasil perkebunan dan pemasarannya menampilkan dashboard statistik perkebunan mulai perbenihan, produksi sampai dengan pengolahan hasil perkebunan dan pemasarannya	Server Diskominfo	-	dprkp2.mojokertokab	Diskominfo

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E.190	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Perparkiran	Seksi Prasarana Lalu Lintas	Data lalu lintas	Informasi terkait data lalu lintas	RD 05.02 Data Keamanan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan profil dan berita Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat	Server Diskominfo	-	ATCS	Pemerintah Daerah
D.E.191	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Seksi Angkutan dan Terminal	Data kendaraan	Informasi terkait dokumen hasil uji kendaraan	RD 03.03 Data Transportasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan kinerja jaringan jalan melalui optimal dan koordinasi lampu lalu lintas disetiap persimpangan jalan	Server Diskominfo	Pengujian Kendaraan	SIM Pengujian Kendaraan	Pemerintah Daerah
D.E.192	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Seksi Angkutan dan Terminal	Data kendaraan bermotor	Informasi terkait dokumen hasil uji kendaraan bermotor	RD 03.03 Data Transportasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pelayanan pelaksanaan pengujian kendaraan secara mudah, akurat, dan efisien	Server Diskominfo	Layanan pengujian kendaraan	SIM Pengujian Kendaraan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	Perhubungan											
D.E.19.3	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Data pemohon izin andalalin	Informasi terkait pemohon izin andalalin	RD 09.03 Data Informasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pengurusan izin andalalin untuk rekomendasi pembangunan infrastruktur bangunan	Komputer Internal PD	Layanan Pengurusan rekomendasi andalalin	Tidak ada	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan
D.E.19.4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Seksi Angkutan dan Terminal	Data angkutan trayek	Informasi terkait angkutan trayek	RD 03.01 Data Pekerjaan Umum	Publik	informasi yang berkaitan dengan permohonan surat izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek	Komputer Internal PD	Layanan Ijin Trayek	Tidak ada	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan
D.E.19.5	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Bidang Kawasan Permukiman dan Perumahan	Seksi Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Data permukiman kumuh	Informasi terkait data permukiman kumuh	RD 03.05 Data Pembangunan Kawasan atau	Publik	Memberikan informasi terkait permasalahan dan penanganan permukiman kumuh	Server Diskominfo	-	Integrated Information System Penanganan Permukiman Kumuh	

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	iman dan Perhubungan	Pertanahan				Daerah Tertinggal						
D.E .19 6	Dinas Sosial	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan berita dan hal lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat	Server Diskominfo	-	dinsos.mojokertoba	Diskominfo
D.E .19 7	Dinas Sosial	Bidang Penanganan Fakir Miskin	Bidang Penanganan Fakir Miskin	Data kesejahteraan sosial terutama pada data kemiskinan	Informasi terkait data kesejahteraan sosial terutama pada data kemiskinan	RD 04.02 Data Sosial	Publik	Informasi yang berkaitan dengan data dan informasi kesejahteraan sosial terutama pada data kemiskinan	Server Pusat	-	Sistem Informasi Kesejahteraan (SIKSNG)	Pusat
D.E .19 8	Dinas Sosial	Bidang Penanganan Fakir Miskin - Seksi Pengelolaan dan Penyaluran	Bidang Penanganan Fakir Miskin - Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Data calon penerima BSP, KIP, pemutakhiran PKH	Informasi terkait data penerima BSP, KIP, PKH	RD 04.02 Data Sosial	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan akurasi data dan penyaluran bansos berjalan efektif	Server Pusat	-	E-PKH	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
		Bantuan Stimulan										
D.E.199	Dinas Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti dan/ atau Lembaga	Data orang terlantar	Informasi terkait data orang terlantar	RD 04.02 Data Sosial	Publik	Informasi yang berkaitan dengan proses pemulangan seorang warga yang terlantar sesuai alamat KTP dan Identitas yang dimiliki	Komputer Internal PD	Pemulangan Orang Terlantar	-	Dinas Sosial
D.E.200	Dinas Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial	Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil	Data Pekerja Sosial	Informasi terkait data pekerja sosial	RD 06.02 Data Ketenagakerjaan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pendampingan sekaligus menjalankan proses pelayanan pekerjaan sosial	Komputer Internal PD	Pembinaan Pekerja Sosial	-	Dinas Sosial
D.E.201	Dinas Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial	Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil	Data peserta pembinaan tenaga kesejahteraan	Informasi terkait data pembinaan tenaga kesejahteraan	RD 06.02 Data Ketenagakerjaan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pendampingan sosial untuk menggerakkan masyarakat dalam menangani masalah sosial pada setiap wilayah kecamatan	Komputer Internal PD	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	-	Dinas Sosial

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E.202	Dinas Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial	Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan	Data anggota karang taruna	Informasi terkait data karang taruna	RD 03.07 Data Kependudukan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pembinaan dan pembekalan kepada generasi muda yang ada di wilayah Desa/Kelurahan untuk turut serta dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat	Komputer Internal PD	Pembinaan Karang Taruna	-	Dinas Sosial
D.E.203	Dinas Tenaga Kerja	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan berita dan agenda Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat	Server Diskominfo	-	disnaker. mojokertokab	Diskominfo
D.E.204	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Seksi Penempatan Tenaga Kerja	Data Calon Pekerja Imigran Indonesia	Informasi terkait penerbitan paspor Calon Pekerja Imigran Indonesia	RD 06.02 Data Ketenagakerjaan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pendataan dan pengurusan paspor TKI dengan cepat, efektif, dan efisien	Server Pusat	Layanan Pembuatan Rekom Paspor Calon Pekerja Imigran Indonesia	SISKOTKLN	Pusat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E .20 5	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Hubungan Industrial	Seksi Penyelesaian Perselisihan	Data pengaduan perselisihan industrial	Informasi terkait dengan data pengaduan perselisihan industrial	RD 02.01 Data Industri	Publik	Informasi yang berkaitan dengan daftar perselisihan industrial	Server Diskominfo	Layanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Sistem Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
D.E .20 6	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Seksi Penempatan Tenaga Kerja	Data Pencari Kerja	Informasi terkait data pencari kerja	RD 06.02 Data Ketenagakerjaan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pelayanan pembuatan kartu Tanda pencari Kerja (Kartu AK-1)	Komputer Internal PD	-	-	Dinas Tenaga Kerja
D.E .20 7	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Hubungan Industrial	Seksi Penyelesaian Perselisihan	Data Perusahaan	Informasi terkait data perusahaan		Publik	Informasi yang berkaitan dengan informasi lowongan pekerjaan	Komputer Internal PD	-	-	Dinas Tenaga Kerja
D.E .20 8	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Seksi Transmigrasi	Data transmigrasi	Informasi terkait data transmigrasi	RD 03.02 Data Transmigrasi	Publik	Informasi yang berkaitan dengan media pendaftaran transmigrasi	Komputer Internal PD	-	-	Dinas Tenaga Kerja
D.E .20 9	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan	Seksi Pelatihan	Data peserta magang	Informasi terkait data	RD 06.02 Data	Publik	Informasi yang berkaitan dengan perjanjian antara	Komputer Internal PD	-	-	Dinas Tenaga Kerja

ID DA TA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
			Ketenagakerjaan		peserta magang	Ketenagakerjaan		peserta magang dengan penyelenggara				
D.E .21 0	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan	Seksi Bina Lembaga Pelatihan	Data peserta pelatihan kerja	Informasi terkait data peserta pelatihan kerja	RD 06.02 Data Ketenagakerjaan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan surat ijin lembaga pelatihan kerja	Komputer Internal PD	-	-	Dinas Tenaga Kerja
D.E .21 1	Dinas Tenaga Kerja	Bidang Hubungan Industrial	Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan	Data Peraturan Perusahaan	Informasi terkait data peraturan perusahaan	RD 06.02 Data Ketenagakerjaan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan tata tertib serta norma syarat kerja di perusahaan	Komputer Internal PD	-	-	Dinas Tenaga Kerja
D.E .21 2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan berita dan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dan diberikan ke masyarakat	Server Diskominfo	-	disperindag.mojokertokab	Diskominfo
D.E .21 3	Dinas Perindustrian dan	Bidang Metrologi Legal	Seksi Pengawasan	Data retribusi	Informasi terkait dengan pembayaran	RD 09.02 Data	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan layanan	Server Pihak Ketiga	Layanan Pemungutan Retribusi	E-Retribusi	Dinas Perindustrian dan

ID DA TA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	Perdagangan				pemungutan biaya	Keuangan		pemungutan retribusi				Perdagangan
D.E .21 4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Usaha Perdagangan	Seksi Ekspor Impor	Data Industri	Informasi terkait data produk	RD 02.01 Data Industri	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan hasil rekap data produk	Komputer Internal PD	Layanan Manajemen Data Rekap Export Import	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
D.E .21 5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Metrologi Legal	Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	Data kegiatan penyuluhan Barang dalam kemasan terbungkus, penyuluhan cukai, alat ukur takar, timbangan (Alat UTTP)	Informasi terkait kegiatan penyuluhan	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat melalui	Komputer Internal PD	Layanan Pembinaan dan Penyuluhan	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
D.E .21 6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Usaha Perdagangan	Seksi Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Pengembangan Usaha	Data hasil produk IKM (Pameran Hasil Produk Daerah)	Informasi terkait Pameran hasil produk daerah	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan promosi yang dilakukan pelaku usaha tentang produk yang telah dibuat sehingga dapat dipasarkan secara luas	Komputer Internal PD	Layanan Pengadaan Event Promosi dan Pameran Produk Industri	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E.217	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Metrologi Legal	Seksi Pengawasan	Data hasil pengawasan alat ukur takar, timbangan (UTTP)	Informasi terkait hasil pengawasan dan penyuluhan alat ukur	RD 03.01 Data Pekerjaan Umum	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan hasil pengawasan penggunaan alat ukur	Komputer Internal PD	Layanan Pengawasan Alat Ukur Layanan Penyuluhan Alat Ukur	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
D.E.218	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika	Seksi Industri Aneka dan Tekstil	Data perizinan merk	membantu data pelegalan merk dagang/hasil industri	RD 02.02 Data Perdagangan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pengurusan merk produk sekaligus penerbitan surat izin produk	Komputer Internal PD	Layanan Pengurusan Merk Layanan Pengurusan SNI Produk	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
D.E.219	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Metrologi Legal	Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	Data kegiatan pembinaan dan penyuluhan IKM	Informasi terkait kegiatan pembinaan IKM	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Memberikan informasi terkait kegiatan pembinaan dan penyuluhan IKM kepada masyarakat	Komputer Internal PD	Layanan Pembinaan kepada Masyarakat tentang Alat Ukur	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
D.E.220	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Metrologi Legal	Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	Data sosialisasi pengguna e-retribusi	Membantu masyarakat dalam pelaksanaan	RD 09.02 Data	Publik	Sosialisasi pelayanan berbasis elektronik kepada masyarakat yang	Komputer Internal PD	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
	Perdagangan				penggunaan e-retribusi	Keuangan		bekerjasama dengan bank jatim				Perdagangan
D.E .22 1	INSPEKTORAT	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data yang berkaitan dengan program kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto	Informasi terkait profil, berita, dokumen, galeri, artikel, dan kontak Inspektorat Kabupaten Mojokerto	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Bertujuan memberikan informasi terkait berita, pedoman serta jadwal kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto	Server Diskominfo	-	inspektorat.mojokertokab	Diskominfo
D.E .22 2	INSPEKTORAT	Sekretariat	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Data hasil pemeriksaan BPK	Informasi terkait dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK	RD 09.01 Data Dalam Negeri	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang dapat dilakukan secara online	Server Pusat	-	SIPTL (dari BPK)	Pusat
D.E .22 3	INSPEKTORAT	Inspektur Pembantu Wilayah	Inspektur Pembantu Khusus	Data laporan koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi	Informasi terkait dokumen laporan koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi	RD 09.07 Data Kesekretariatan Negara	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi yang dapat dilakukan secara online	Server Pusat	-	Jaga.id (dari KPK)	Pusat
D.E .22 4	INSPEKTORAT	Inspektur Pembantu	Inspektur Pembantu Khusus	Data Pengaduan Masyarakat berindikasi	Informasi dokumen laporan	RD 09.07 Data Kesekretariatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pelaporan suatu perbuatan yang	Server Diskominfo	-	SI TPS Whistle Blower	Inspektorat

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
		tu Wilayah		korupsi, Data tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat berindikasi korupsi.	pengaduan masyarakat	tariatan Negara		berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto				
D.E .22 5	INSPEKTORAT	Sekretariat	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Data hasil audit	Informasi terkait laporan hasil audit	RD 09.07 Data Kesekretariatan Negara	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pengawasan dalam kegiatan dan program yang dilakukan masing-masing PD	Server Diskominfo	Layanan Hasil Pengawasan	SimHP	Pemerintah Daerah
D.E .22 6	RSUD R.A. Basuni	Bidang Pelayanan	Bidang Pelayanan	Data pelayanan	Informasi terkait seluruh alur proses pelayanan rumah sakit	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit secara tepat dan akurat	Server PD	Layanan Rawat Inap, Layanan Rawat Jalan (POLI), Layanan Bayi, Layanan Emergency Ibu Bersalin, Layanan ICU, Layanan IGD, Layanan	SIM RS	Pemerintah Daerah

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
										Farmasi, Layana LABORAT, Layanan Gizi, Layanan Rekam Medis, Layanan Foto XRay, Layanan USG		
D.E .22 7	RSUD R.A. Basuni	Bidang Pelayanan	Seksi Pelayanan Medik	Data pasien	Informasi terkait pengurusan klaim BPJS	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pelayanan JKN terkait BPJS secara cepat, akurat, dan transparan serta mempercepat pengurusan klaim BPJS	Server PD	-	E-KLAIM	Pemerintah Daerah
D.E .22 8	RSUD R.A. Basuni	Bidang Pelayanan	Seksi Pelayanan Medik	Data kamar	Informasi terkait ketersediaan kamar	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan ketersediaan kamar inap yang ada pada RSUD R.A. Basuni	Server PD	Layanan Kamar Operasi	DASHBOARD KAMAR	Pemerintah Daerah
D.E .22 9	RSUD R.A. Basuni	Bidang Pelayanan	Seksi Pelayanan Medik	Data Pendaftaran Pasien	Informasi terkait nomor antrian	RD 04.01 Data	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pelayanan dalam pendaftaran pasien	Server PD	Layanan Antrian	MESIN ANTRIAN	Pemerintah Daerah

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
				secara online	pelayanan bagi pasien	Kesehatan		serta kemudahan dalam melihat jadwal poli di RSUD R.A. Basuni				
D.E.230	RSUD R.A. Basuni	Bidang Penunjang	Seksi Penunjang Medis	Data obat	Informasi terkait label intruksi konsumsi obat	RD 04.01 Data Kesehatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan instruksi konsumsi obat yang jelas	Server PD	Layanan Farmasi	E-TIKET	Pemerintah Daerah
D.E.231	RSUD R.A. Basuni	Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Perencanaan	Data akreditasi rumah sakit	Informasi terkait akreditasi rumah sakit	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan persiapan akreditasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mencari kembali dokumen bukti yang berhubungan dengan akreditasi	Server Pusat	-	SISMADAK	Pusat
D.E.232	RSUD R.A. Basuni	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Data anggaran BLUD dan APBD	Informasi terkait laporan keuangan	RD 09.02 Data Keuangan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan	Server PD	-	SIKBLUD RSUD R.A. Basuni	RSUD R.A Basuni
D.E.233	RSUD R.A. Basuni	Bidang Penunjang	Seksi Penunjang Non Medis	Data barang steril	Informasi terkait barang steril	RD 04.01 Data Kesehatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan pelayanan sterilisasi untuk pemenuhan kebutuhan paket peralatan dan	Server PD	Layanan CSSD	Tidak ada	RSUD R.A Basuni

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
								barang steril untuk rumah sakit				
D.E .23 4	SATPOL PP	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Seksi Pengamanan dan Pengawasan	Data pejabat orang-orang penting	Informasi terkait pejabat dan orang-orang penting	RD 06.02 Data Ketenagakerjaan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan pejabat dan orang-orang penting	Komputer Internal PD	Layanan Pengamanan dan pengawasan pejabat dan orang-orang penting	-	Pemerintah Daerah
D.E .23 5	SATPOL PP	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Seksi Pengamanan dan Pengawasan	Data aset dan rumah dinas pejabat	Informasi terkait aset dan rumah dinas pejabat	RD 09.06 Data Aparatur Negara	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan keamanan rumah dinas pejabat atau aset agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan	Komputer Internal PD	Layanan Pengamanan Rumah Dinas Pejabat/Aset	-	Pemerintah Daerah
D.E .23 6	Kecamatan Jetis	Sekretariat	Seksi Pelayanan	Data permohonan izin	Informasi terkait permohonan izin	RD 09.06 Data Aparatur Negara	Publik	Informasi yang berkaitan dengan permohonan izin yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesadaran tentang legalitas perizinan	Server Diskominfo	Layanan Administrasi	E-Paten	Pemerintah Daerah

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
D.E .23 7	Bag LPBJ (Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Data Penyedia, Data tender/seleksi, Dokumen tender/seleksi	Data Pemenang Tender/Seleksi, Data Penyedia	RD 09.06 Data Aparatur Negara	Publik	Informasi yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.	Server Pusat	Layanan Pengadaan dengan LPSE	LPSE	Pusat
D.E .23 8	RSUD Prof dr Soekandardar	Bidang Pelayanan Medis	Seksi Pelayanan Medis	Data antrian	Informasi terkait layanan kesehatan	RD 04.01 Data Kesehatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan layanan kesehatan kepada masyarakat	Komputer Internal PD	Layanan Kesehatan	Whatsapp	RSUD Prof dr Soekandardar
D.E .23 9	RSUD Prof dr Soekandardar	Bidang Pelayanan Medis	Seksi Pelayanan Medis	Data Pasien	Informasi terkait dengan pasien lama dengan	RD 04.01 Data Kesehatan	Administrasi	Informasi yang berkaitan dengan data pasien lama dengan penjamin bpjs melakukan	Server Diskominfo	-	Aplikasi Anjungan Pendaftaran Mandiri	RSUD Prof dr Soekandardar

ID DATA	Nama PD	Nama Bagian / Bidang	Nama Sub Bidang/ Seksi	Nama Data	Informasi	Kode Model Referensi Data	Jenis Akses Data	Tujuan Data	Tempat Penyimpanan Data	Layanan Terkait	Aplikasi Pendukung	PD Pemilik Data yang Terkait
					penjamin BPJS			pendaftaran ke poli secara mandiri melalui aplikasi APM yang dapat diakses melalui mesin atau pc APM,				
D.E.240	Kecamatan Punggiling	Sekretariat	Seksi Pelayanan	Data permohonan izin	Informasi terkait permohonan izin	RD 09.06 Data Aparatur Negara	Publik	Informasi yang berkaitan dengan permohonan izin yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesadaran tentang legalitas perizinan	Server Diskominfo	Layanan Administrasi Kependudukan	E-Paten	Pemerintah Daerah
D.E.241	Kecamatan Mojosari	Sekretariat	Seksi Pelayanan	Data permohonan izin	Informasi terkait permohonan izin	RD 09.06 Data Aparatur Negara	Publik	Informasi yang berkaitan dengan permohonan izin yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesadaran tentang legalitas perizinan	Server Diskominfo	Layanan Administrasi Kependudukan	E-Paten	Pemerintah Daerah
D.E.242	Kecamatan Sooko	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Data kegiatan Kecamatan Sooko	Informasi terkait kegiatan Kecamatan Sooko	RD 10.02 Data Manajemen Kegiatan	Publik	Informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kecamatan Sooko	Server Diskominfo	Layanan informasi terkait kegiatan Kecamatan Sooko	sooko.mojokertokab.go.id	Dinas Komunikasi dan Informatika



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto



Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

- Penjelasan IKK Output:

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKK Output :

- 9) Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah

Jumlah Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data Pemerintah Daerah yaitu sebanyak 43 OPD dari total 57 OPD yang ada di Kabupaten Mojokerto.


Data pendukung :

- Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP Analysis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021 hal. 16-32 (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



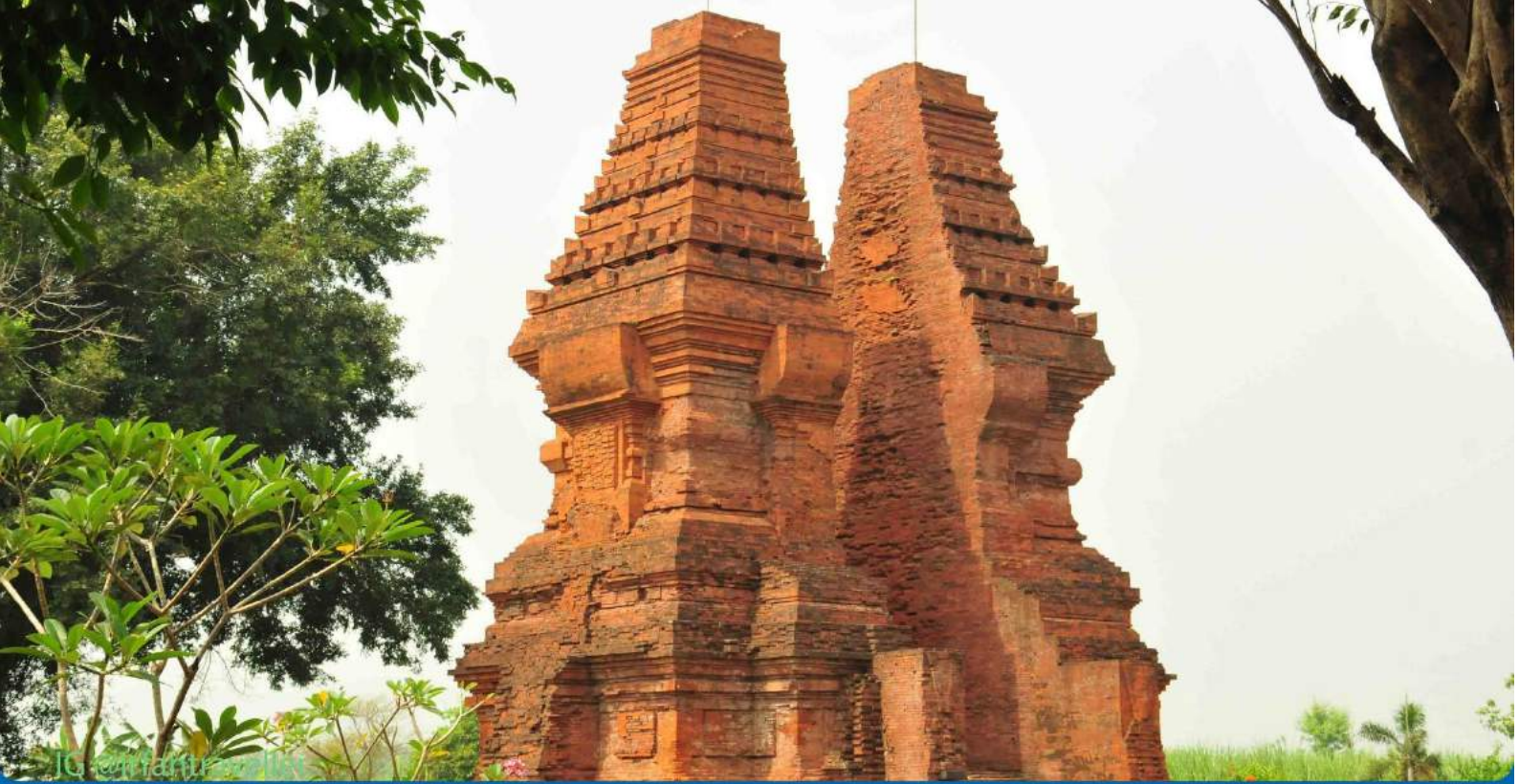
	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si Pembina Utama Muda/IVc
---	---



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



BUKU 1

Kondisi Eksisting SPBE

Pemerintah Kabupaten Mojokerto

dan GAP Analysis

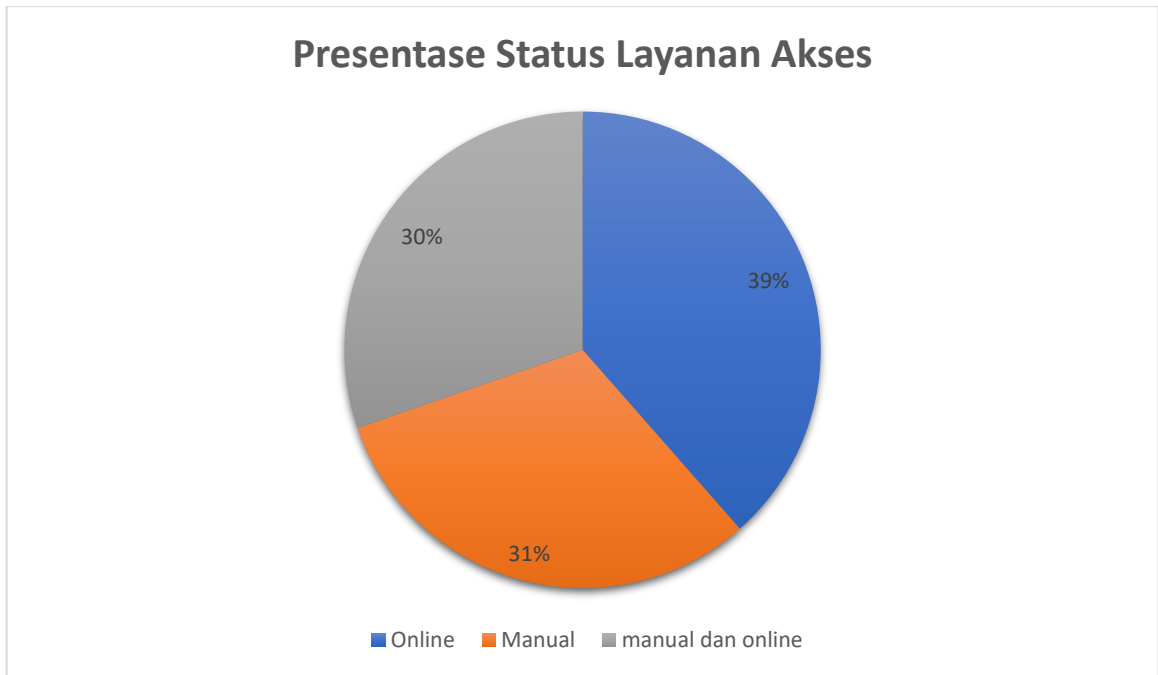
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021



Pemerintah Kabupaten Mojokerto



PT Tatacipta Teknologi Indonesia



Gambar 3. 4 Presentase Status Akses Layanan

Dari **Gambar 3.4** pada 43 PD dapat dilihat bahwa layanan yang **sudah Online dan didukung aplikasi** sebanyak **94 layanan online atau 39%**, **belum didukung oleh aplikasi atau masih Manual** sebanyak **76 layanan manual atau 31%**, dan **layanan yang Online dan memiliki opsi Manual** sebanyak **74 layanan atau 30%**.

Pada **Tabel 3.3** merupakan penjabaran kondisi eksisting layanan yang tersebar pada 43 PD di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 3. 3 Kondisi Eksisting Layanan Publik

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	Layanan Pengaduan Masyarakat	Manual
2		1	Penerbitan dan penetapan PD/SPPT/DHKP	Manual&Online
		2	Perumusan dan penyampaian blangko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	Manual&Online
		3	Layanan Menghitung kerugian daerah	Manual&Online
		4	Pencatatan barang	Manual&Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
	Badan Pendapatan Daerah	5	Penjabaran APBD	Online
		6	Layanan PBB P2	Online
		7	Perumusan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)	Manual
		8	Pelayanan SPTPD BPHTB	Online
		9	Pendaftaran dan penetapan Nomor Obyek Pajak (NOP)	Online
		10	Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerbitan dan penyampaian Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	Manual&Online
		11	Rekonsiliasi	Manual
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	Online
		2	SIMBADA	Online
		3	SIMDA	Online
		4	SIMDAGO	Online
		5	E-Persediaan	Online
		6	Layanan Aset	Manual&Online
		7	Layanan penganggaran	Online
		8	Layanan Penggajian	Online
		9	Layanan SP2B	Online
		10	Layanan Pelaporan	Manual&Online
		11	Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset	Manual
		12	Pendataan dan Penatausahaan Aset	Manual&Online
		13	Layanan aset tanah dan bangunan	Manual
		14	Bagi Hasil Retribusi kepada pihak lain	Manual&Online
		15	Bantuan Keuangan Desa (Infrastruktur)	Manual&Online
		16	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Manual&Online
4	Badan Perencanaan	1	SIPD	Online
		2	Layanan Informasi Tata Ruang	Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
	Pembangunan Daerah			
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1	Pelayanan Permintaan Data dan Informasi	Manual&Online
		2	Pembuatan Karpeg, Karis, Karsu, KPE dan Konversi NIP	Manual&Online
		3	Rekonsiliasi dan Validasi Data SIMPEG	Manual&Online
		4	Pelaksanaan Update Data Simpeg	Manual&Online
		5	Pelaporan Kepegawaian Semester	Manual&Online
		6	Pelaporan Kepegawaian Tribulan	Manual&Online
		7	Kenaikan Pangkat	Manual&Online
		8	Pengangkatan Dalam jabatan Struktural	Manual&Online
		9	Mutasi Pegawai Antar Unit Kerja/PD	Manual&Online
		10	Mutasi Pegawai Antar Daerah/Departemen	Manual&Online
		11	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun	Manual&Online
		12	Peninjauan Masa Kerja	Manual&Online
		13	Pembuatan Kartu Peserta Taspen	Manual&Online
		14	Pengadaan Pegawai ASN	Manual&Online
		15	Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional	Manual&Online
		16	Fasilitasi Izin Belajar	Manual&Online
		17	Fasilitasi Izin Tugas Belajar	Manual&Online
		18	Fasilitasi Diklat Teknis/ Fungsional	Manual&Online
		19	Melaksanakan Pembinaan Perkawinan	Manual&Online
		20	Pembinaan Kepegawaian	Manual&Online
		21	Pelayanan Penilaian Kinerja ASN dan Perhitungan TPP	Online
		22	Pelayanan Penilaian Kehadiran ASN	Online
		23	Pelayanan Arsip Kepegawaian	Online
		24	Pelayanan Dashboard ASN	Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		25	Pelayanan Update Data Jabatan	Online
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Pemberian Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan	Manual
		2	Layanan Kelembagaan	Manual&Online
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Destana (penyuluhan ke masyarakat)	Manual
8	Bagian Administrasi Pemerintahan		Tidak ada Layanan	
9	Bagian Organisasi	1	E-Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Online
10	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1	Layanan Permohonan Hibah	Manual
11	Bagian Hukum	1	Layanan produk hukum melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)	Manual&Online
12	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	Layanan Pelaporan Adanya Rokok Ilegal	Keduanya
13	Bagian Administrasi Pembangunan		Tidak ada Layanan	
14	Bagian Umum		Tidak ada Layanan	
15	Bagian Perencanaan dan Keuangan		Tidak ada Layanan	
16	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	Publikasi kegiatan Pemerintahan Daerah	Manual
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Layanan pengaduan online, LAPORSPAN	Online
		2	Layanan Data di PPID	Manual&Online
		3	Portal Covid-19 Kabupaten Mojokerto	Manual&Online
18	Dinas Pendidikan	1	Bantuan Operasional PAUD	Manual&Online
		2	Pendirian Sekolah	Manual&Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan		
		3	Manajemen Tenaga Pendidikan	Manual&Online		
		4	Penerimaan Peserta Didik Baru	Manual&Online		
		5	Pengembangan Keprofesian	Manual&Online		
		6	Pengajuan nilai angka kredit	Manual&Online		
		7	Program Indonesia Pintar	Manual&Online		
		8	Penggantian Ijazah Hilang	Manual		
		9	Penilaian Akreditasi Sekolah PAUD	Manual&Online		
		10	Pengajuan Sarana Prasarana Sekolah	Manual&Online		
		11	Layanan Manajemen Surat	Online		
		12	Mutasi Siswa	Manual&Online		
		13	Menghimpun data pokok pendidikan PAUD	Online		
		14	Pemindahan konversi mata pelajaran tenaga pendidik	Manual&Online		
		15	Layanan Tunjangan Profesi	Manual&Online		
		19	Dinas Kesehatan	1	Surat Ijin Praktek Apoteker	Manual&Online
				2	Layanan SIPTTK	Manual&Online
3	Layanan UMOT			Manual		
4	Layanan Surat Ijin Praktek Dokter dll			Manual&Online		
5	Layanan PIRT			Manual		
6	Layanan PKRT			Manual		
7	Laik Higienis Jasa Boga			Manual		
8	Pelayanan Kesehatan Rujukan			Manual		
9	Surat ijin kerja rekam medis			Manual&Online		
10	Surat Ijin Perawat			Manual&Online		
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Layanan konsultasi BUMDES	Manual		
		2	Layanan PKK	Manual&Online		
		3	Layanan Klinik Lakon Penggoda	Manual&Online		
		4	Layanan Posyandu	Manual&Online		
		5	Layanan Teknologi Tepat Guna	Manual		
21		1	Penerbitan Kartu Keluarga	Online		

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Online
		3	Penerbitan Surat Pindah Keluar	Online
		4	Pencatatan Akta Perkawinan	Online
		5	Pencatatan Akta Perceraian	Online
		6	Pemberian Catatan Pinggir Pengesahan Anak	Online
		7	Pemberian Catatan Pinggir Pengakuan Anak	Online
		8	Penerbitan Akta Kematian	Online
		9	Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran	Online
		10	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi WNI	Online
		11	Penerbitan Surat Pindah Datang	Online
		12	Legalisir Dokumen Kependudukan	Online
		13	Pengendalian Dokumen	Online
		14	Pengendalian arsip	Online
		15	Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai	Online
		16	Penanganan Keluhan Pelanggan	Online
		17	Pengukuran Kepuasan Pelanggan	Online
		18	Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data	Online
		19	Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang Atau Rusak	Online
		20	Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang Atau Rusak Bagi Orang Asing	Online
		21	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi WNA	Online
		22	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Karena Perubahan Data	Online
		23	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Karena Pindah Datang	Online
		24	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Karena Hilang Atau Rusak	Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		25	Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (Bagi Orang Asing)	Online
		26	Penerbitan Surat Pindah Keluar	Online
		27	Pelayanan KK & KTP Pada Mobil Layanan	Online
		28	Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Online
		28	Pencatatan Pembatalan Perceraian	Online
		30	Pemberian Catatan Pinggir Pengangkatan Anak	Online
		31	Pemberian Catatan Pinggir Perubahan Nama	Online
		32	Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran	Online
		33	Penerbitan Kutipan II Akta Kematian	Online
		34	Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan	Online
		35	Penerbitan Kutipan II Akta Perceraian	Online
		36	Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Online
		37	Penanganan Keluhan Pelanggan	Online
		38	Permintaan Data	Online
		39	Pelayanan Pendaftaran Administrasi Kependudukan	Online
		40	Pengambilan Dokumen Kependudukan Berbasis Digital	Online
		41	Pelayanan Balaputra (Baru Lahir Pulang Bawa Akta)	Online
		42	Pelayanan Motor Sakti (Motor Siap Antar Akta Kematian)	Online
		43	Pelayanan Sinden Katut Mas Hardi (Sekali Datang Kk, Ktp, Akta Kelahiran Jadi)	Online
		44	Pelayanan Drive Thru Untuk Cetak KK & KTP (Tanpa Perubahan)	Online
22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1	Fasilitasi pemasaran koperasi dan UMKM	Manual&Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		2	Pelatihan terkait produksi usaha mikro	Manual&Online
		3	pelatihan wirausaha	Manual&Online
		4	Pembinaan perubahan anggaran dasar koperasi	Manual
		5	Pembinaan produksi usaha mikro	Manual&Online
		6	Pembinaan Tata cara pembentukan koperasi	Manual
		7	Penyuluhan manajemen koperasi	Manual
		8	Surat Keterangan Kepengurusan	Manual
		9	Layanan penilaian kesehatan koperasi	Manual
		10	Fasilitasi klinik bisnis	Manual&Online
		11	Layanan Sibolasi	Online
		23	Dinas Lingkungan Hidup	
24	Dinas Pangan dan Perikanan	1	Penjualan Benih Ikan	Manual
		2	Layanan Toko Tani Indonesia Center	Manual&Online
25	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	1	Rekomendasi Penggunaan Stadion/Indoor	Manual
		2	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Online
		3	Rekomendasi Kartu Induk Kesenian	Manual&Online
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Laporan PJU	Manual
		2	Rekomendasi Peil Banjir	Manual
		3	Perlindungan garis sepadan jalan untuk pembangunan pagar	Manual
		4	Informasi tataruang secara tertulis	Manual
		5	Laporan Pohon tumbang	Manual
		6	Perijinan membuat jembatan keluar masuk diatas saluran air	Manual
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	1	Izin Dasar	Manual&Online
		2	Izin Sektor Kesehatan	Online
		3	Izin Sektor Koperasi Dan Ukm	Online

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
	Terpadu Satu Pintu	4	Izin Sektor Pendidikan	Online
		5	Izin Sektor Lingkungan Hidup	Online
		6	Izin Sektor Perdagangan	Online
		7	Izin Sektor Perhubungan	Online
		8	Izin Sektor Perindustrian	Online
		9	Izin Sektor Pertanian	Online
		10	Izin Sektor Ketenagakerjaan	Online
		11	Izin Sektor Pupr	Online
28	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	1	Sosialisasi KB	Manual&Online
		2	Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Manual&Online
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Perpustakaan keliling	Manual
		2	Pustaka Terapan berbasis Inklusi Nasional	Manual
		3	Pustaka Asiek	Manual
		4	Sirkulasi (EPusda)	Online
		5	Layanan Sirkulasi	Manual&Online
		6	Pelayanan Masyarakat kearsipan	Manual
30	Dinas Pertanian	1	Rumah Potong Hewan	Manual
		2	Lab Kesehatan Hewan	Manual
		3	Pasar Kesehatan Hewan	Manual
		4	Rumah Potong Unggas	Manual
31	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	1	Pengurusan rekomendasi andalalin	Manual
		2	Pengujian Kendaraan	Online
		3	Layanan Ijin Trayek	Manual
32	Dinas Sosial	1	Pemulangan Orang Terlantar	Manual
		2	Pembinaan Pekerja Sosial	Manual
		3	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Manual

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		4	Pembinaan Karang Taruna	Manual
33	Dinas Tenaga Kerja	1	Pembuatan Rekom Paspor Calon Pekerja Imigran Indonesia	Online
		2	Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Manual
		3	Pendaftaran Bursa Kerja Khusus	Manual
		4	Pengesahan perjanjian pemagangan	Manual
		5	Pendaftaran Transmigrasi	Manual
		6	Pendaftaran AK 1 (Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja)	Manual&Online
		7	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Manual
		8	Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Manual
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Pembinaan dan penyuluhan	Manual
		2	Pembinaan kepada masyarakat tentang alat ukur	Manual
		3	Pengurusan SNI Produk	Manual
		4	Pengadaan Event promosi dan pameran produk industri	Manual
		5	Pengawasan alat ukur	Manual
		6	Pengurusan Merk Produk	Manual
		7	Penyuluhan alat ukur	Manual
		8	Manajemen data rekap export import	Manual&Online
		9	Manajemen retribusi pasar rakyat	Manual
35	INSPEKTORAT	1	Pelayanan Konsultasi	Manual
		2	SimHP (Hasil Pengawasan) Internal	Manual&Online
		3	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Manual
36	RSUD R.A. Basuni	1	Layanan Antrian	Manual&Online
		2	Layanan CSSD	Manual
		3	Layanan Farmasi	Online
		4	Layanan Foto XRay	Manual

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		5	Layanan Gizi	Online
		6	Layanan Kamar Operasi	Online
		7	Layanan Pengadaan	Online
		8	Layanan Rawat Inap	Online
		9	Layanan Rawat Jalan (POLI)	Online
		10	Layanan Rekam Medis	Manual
		11	Layanan Bayi	Online
		12	Layanan Emergency Ibu Bersalin	Online
		13	Layanan ICU	Online
		14	Layanan IGD	Online
		15	Layanan Laborat	Online
		16	Layanan USG	Manual
37	SATPOL PP	1	Pengamanan Rumah Dinas Pejabat / Asset	Manual
		2	Pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang-orang penting	Manual
38	Kecamatan Jetis	1	Pelayanan Administrasi (PATEN)	Manual
39	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	Layanan Pengadaan dengan LPSE	Online
40	RSUD Prof dr Soekandar	1	Layanan Kesehatan	Manual&Online
		2	Layanan Anjungan Pendaftaran Mandir	Manual&Online
41	Kecamatan Pungging	1	Pelayanan Administrasi (PATEN)	Manual
		2	Dispensasi Nikah	Manual
42	Kecamatan Mojosari	1	Layanan administrasi kependudukan	Online
43	Kecamatan Sooko	1	Layanan administrasi kependudukan	Online
		2	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pelayanan Sosial	Manual
		3	Layanan Rekomendasi Izin Keramaian	Manual
		4	Layanan Pengesahan Proposal dan Rekomendasi	Manual

Kode PD	Nama PD	No	Nama Layanan	Status Layanan
		5	Layanan Dispensasi Nikah	Manual
		6	Layanan Legalisasi Surat-surat	Manual
		7	Layanan Evaluasi APBDesa	Manual

3.2.4 Ketersediaan Layanan Terhadap Program

Dalam upaya melaksanakan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka dikembangkan layanan yang mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat serta menjadi gambaran bahwa program pemerintah terealisasi dengan baik. Jabaran ketersediaan layanan terhadap program RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Mojokerto dijabarkan pada **Lampiran 4.1 Identifikasi Layanan Terhadap Program RPJMD.**

Dari data yang telah dikumpulkan, diketahui bahwa tidak seluruh program pada RPJMD didukung oleh layanan SPBE, hal ini dikarenakan yang tertuliskan di RPJMD adalah program prioritas, sehingga program setiap PD hanya disebutkan beberapa saja. Pada RPJMD, terdapat 32 program yang tersebutkan untuk keseluruhan PD, terdapat beberapa program yang sama seperti Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Dari keseluruhan program tersebut, terdapat program yang didukung oleh layanan pada yaitu sejumlah 11 Program. Sedangkan terdapat 21 Program yang tidak didukung oleh layanan. Dari data yang dianalisis, terdapat program yang didukung oleh lebih dari satu layanan. Hasil pemetaan yang dilakukan, sebanyak 17 layanan mendukung program RPJMD dan sebanyak 232 layanan tidak mendukung program RPJMD. Jumlah data memang terdapat perbedaan dengan data layanan, dikarenakan terdapat layanan yang mendukung lebih dari satu program dan sebaliknya. Layanan-layanan yang ada sudah mendukung tugas dan fungsi dari setiap PD. Karena memang program yang tercantum pada RPJMD merupakan program prioritas dari setiap PD, yang nantinya dijabarkan pada RENSTRA dan RENJA. Sehingga tidak keseluruhan layanan mendukung daari program yang disebutkan pada RPJMD.

3.2.5 Metadata Layanan SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data



- **Penjelasan IKK Output:**

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKK Output :

10) Persentase Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)

Jumlah Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) atau yang aktif mengupdate *website* OPD nya yaitu sebanyak 28 OPD (status : OK) dari total 57 OPD yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Data pendukung :

- Screenshot data website OPD dalam status aktif pada www.e-mover.mojokertokab.go.id

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Dr. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc





Lampiran Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Host	Name	Number of steps	Last check	Status
Subdomain OPD	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1	2022-02-04 12:48:22	Step "BKPP" [1 of 1] failed: response code "302" did not match any of the required status codes "200"
Subdomain OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	2022-02-04 12:48:22	OK
Subdomain OPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	2022-02-04 12:48:22	OK
Subdomain OPD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1	2022-02-04 12:48:22	Step "Bappeda" [1 of 1] failed: response code "302" did not match any of the required status codes "200"
Subdomain OPD	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1	2022-02-04 12:48:23	OK
Subdomain OPD	Bagian Organisasi	1	2022-02-04 12:48:24	OK
Subdomain OPD	Bagian Pemerintahan	1	2022-02-04 12:48:24	Step "Pemerintahan" [1 of 1] failed: response code "502" did not match any of the required status codes "200"
Subdomain OPD	Bagian Tata Usaha	1	2022-02-04 12:48:24	Step "Bagian Tata Usaha" [1 of 1] failed: response code "502" did not match any of the required status codes "200"
Subdomain OPD	Dinas Kependidikan dan Perincatan Sipil	1	2022-02-04 12:48:24	Step "Dispendukcapil" [1 of 1] failed: response code "502" did not match any of the required status codes "200"
Subdomain OPD	Dinas Kesehatan	1	2022-02-04 12:48:24	OK
Subdomain OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	2022-02-04 12:48:25	OK
Subdomain OPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1	2022-02-04 12:48:25	OK
Subdomain OPD	Dinas Lingkungan Hidup	1	2022-02-04 12:48:26	OK
Subdomain OPD	Dinas Pangan dan Perikanan	1	2022-02-04 12:48:26	OK
Subdomain OPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	2022-02-04 12:48:27	OK
Subdomain OPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	2022-02-04 12:48:27	OK
Subdomain OPD	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	1	2022-02-04 12:48:28	OK
Subdomain OPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	2022-02-04 12:48:28	OK
Subdomain OPD	Dinas Pendidikan	1	2022-02-04 12:48:28	OK
Subdomain OPD	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan	1	2022-02-04 12:48:29	OK
Subdomain OPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	2022-02-04 12:48:29	OK
Subdomain OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	1	2022-02-04 12:48:30	OK
Subdomain OPD	Dinas Pertanian	1	2022-02-04 12:48:30	OK
Subdomain OPD	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perkubangan	1	2022-02-04 12:48:31	OK
Subdomain OPD	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perkubangan	1	2022-02-04 12:48:31	OK
Subdomain OPD	Dinas Tenaga Kerja	1	2022-02-04 12:48:31	OK
Subdomain OPD	Kepolisian Negara	1	2022-02-04 12:48:31	OK
Subdomain OPD	Rumah Sakit Umum Daerah Soekarno	1	2022-02-04 12:48:31	OK
Subdomain OPD	Satuan Pemangku Praja	1	2022-02-04 12:48:31	OK
Subdomain OPD	Sekretaris Dewan	1	2022-02-04 12:48:38	OK

Displaying 29 of 29 found

Tabel 5.0.9.46.2001-2021, Tabel 5.0.9.46.2001-2021

Host	Name	Number of steps	Last check	Status
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Bangsal	1	2022-02-04 12:58:16	OK
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Dawarblandong	1	2022-02-04 12:58:17	Step "Dawarblandong" [1 of 1] failed: response code "302" did not match any of the required status codes "200"
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Dlanggu	1	2022-02-04 12:58:17	OK
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Gedeg	1	2022-02-04 12:58:16	OK
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Gondang	1	2022-02-04 12:58:18	OK
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Jabrego	1	2022-02-04 12:58:18	OK
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Jetis	1	2022-02-04 12:58:19	OK
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Kemlagi	1	2022-02-04 12:58:19	OK
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Kutoarjo	1	2022-02-04 12:58:19	Step "Kutoarjo" [1 of 1] failed: response code "502" did not match any of the required status codes "200"
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Mojopayar	1	2022-02-04 12:58:20	OK
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Mojassar	1	2022-02-04 12:58:23	Step "Mojassar" [1 of 1] failed: response code "502" did not match any of the required status codes "200"
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Ngoro	1	2022-02-04 12:58:23	Step "Ngoro" [1 of 1] failed: response code "302" did not match any of the required status codes "200"
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Pacel	1	2022-02-04 12:58:23	Step "Pacel" [1 of 1] failed: response code "502" did not match any of the required status codes "200"
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Pungging	1	2022-02-04 12:58:23	OK
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Puri	1	2022-02-04 12:58:24	OK
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Soko	1	2022-02-04 12:58:11	OK
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Travas	1	2022-02-04 12:58:11	OK
Subdomain Kecamatan	Kecamatan Trovotan	1	2022-02-04 12:58:17	Step "Trovotan" [1 of 1] failed: response code "502" did not match any of the required status codes "200"

Displaying 18 of 18 found



- **Penjelasan IKK Output:**

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKK Output :

11) Persentase data yang dapat berbagi pakai.

Jumlah data yang dapat berbagi pakai yaitu 478 data dari total jumlah data yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto di tahun 2021 sejumlah 1249 elemen data pada portal : satudatapalapa.mojokertokab.go.id.

Data Pendukung :

- Rekap jumlah elemen data Kabupaten Mojokerto tahun 2021
- Screenshot data berbagi pakai tahun 2021 yang tersedia pada portal satudatapalapa.mojokertokab.go.id.

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto

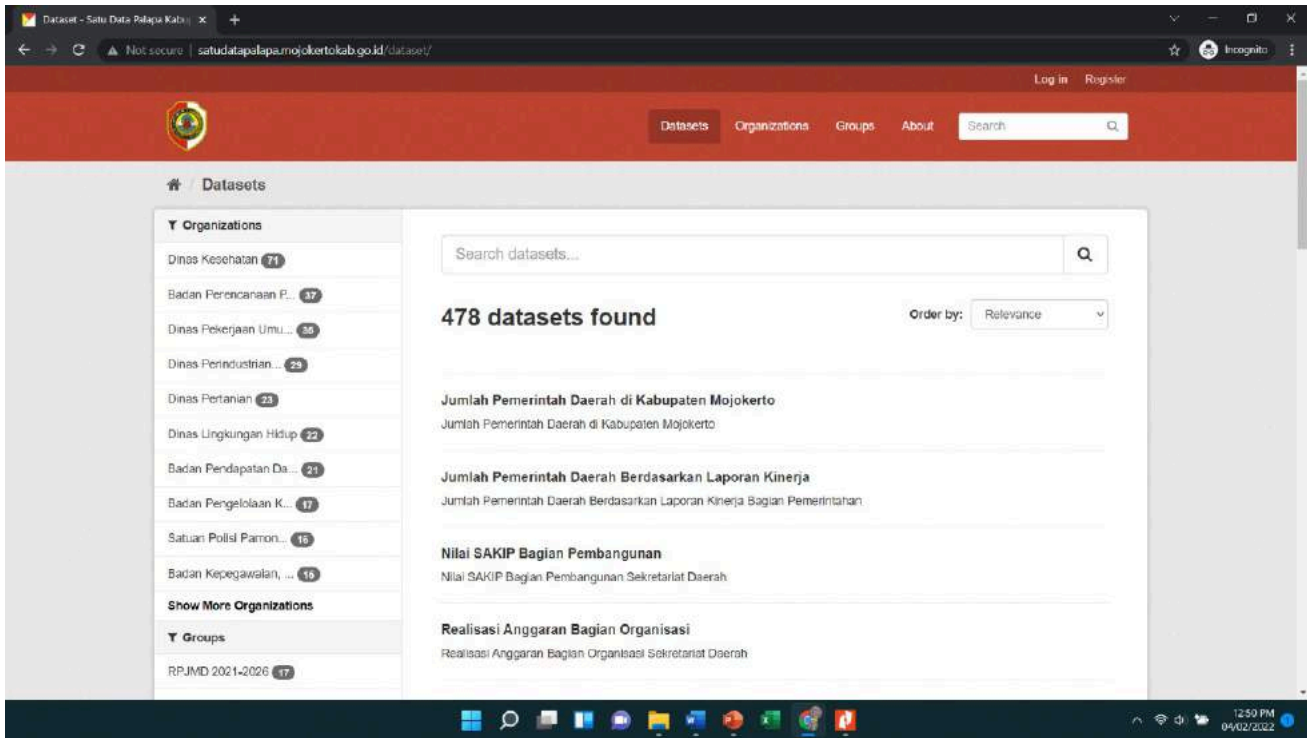


Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc





Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto



No	Username	Fullname	Jumlah Elemen Data		
1	diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	33		
2	bpkad	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41		v
3	bkpp	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	24		v
4	bakesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19		
5	bpbd	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27		v
6	bapenda	Badan Pendapatan Daerah	12		v
7	dinkes	Dinas Kesehatan	118		v
8	bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52		v
9	disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17		v
10	dinkopum	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	19		v
11	dih	Dinas Lingkungan Hidup	48		
12	dispari	Dinas Pangan dan Perikanan	52		v
13	disparpora	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	55		v
14	dpupr	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95		v
15	dpmd	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39		v
16	dpmptsp	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29		v
17	dp2kbp2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	78		
18	disdik	Dinas Pendidikan	36		v
19	disperindag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	38		
20	disperka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27		
21	disperta	Dinas Pertanian	33		v
22	dprkp2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	45		
23	dinsos	Dinas Sosial	17		
24	disnakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	61		v
25	inspektorat	Inspektorat	23		v
26	kec_dlanggu	Kecamatan Dlanggu	7		v
27	kec_bangsai	Kecamatan Bangsai	7		v
28	kec_dawarblandong	Kecamatan Dawarblandong	7		v
29	kec_gedeg	Kecamatan Gedeg	7		v
30	kec_jetis	Kecamatan Jetis	7		v
31	kec_gondang	Kecamatan Gondang	7		v
32	kec_jatirejo	Kecamatan Jatirejo	7		v
33	kec_kemlagi	Kecamatan Kemlagi	7		v
34	kec_mojosari	Kecamatan Mojosari	7		v
35	kec_kutorejo	Kecamatan Kutorejo	7		v
36	kec_mojoanyar	Kecamatan Mojoanyar	7		v
37	kec_ngoro	Kecamatan Ngoro	7		v
38	kec_puri	Kecamatan Puri	7		v
39	kec_pacet	Kecamatan Pacet	7		v
40	kec_pungging	Kecamatan Pungging	7		v
41	kec_sooko	Kecamatan Sooko	7		v
42	kec_trawas	Kecamatan Trawas	7		v
43	kec_trowulan	Kecamatan Trowulan	7		v
44	rsud_soekandar	RSUD Prof. Dr. Soekandar	10		v
45	rsud_basoeni	RSUD RA. Basoeni	10		v
46	satpolpp	Satuan Polisi Pamong Praja	39		v
47	sekretariat_dprd	Sekretariat DPRD	18		
48	pbj	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	4		v
49	bag_adm_perekonomian	Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah	1		
50	bag_organisasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	3		
Total			1249		39



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

REKAP ELEMEN DATA TAHUN 2021

No.	Username	Nama OPD	Jumlah Elemen Data
1	diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	33
2	bpkad	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41
3	bkpp	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	24
4	bakesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19
5	bpbd	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27
6	bapenda	Badan Pendapatan Daerah	12
7	dinkes	Dinas Kesehatan	118
8	bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52
9	disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17
10	dinkopum	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	19
11	dlh	Dinas Lingkungan Hidup	48
12	dispari	Dinas Pangan dan Perikanan	52
13	disparpora	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	55
14	dpupr	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95
15	dpmd	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39
16	dpmptsp	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29
17	dp2kbp2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	78
18	disdik	Dinas Pendidikan	36
19	disperindag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	38
20	disperka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27
21	disperta	Dinas Pertanian	33
22	dprkp2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	45
23	dinsos	Dinas Sosial	17
24	disnakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	61
	inspektorat	Inspektorat	
	kec_dlanggu	Kecamatan Dlanggu	
	kec_bangs	Kecamatan Bangsal	
	kec_dawar	Kecamatan Dawarblandong	
29	kec_gedeg	Kecamatan Gedeg	7
30	kec_jetis	Kecamatan Jetis	7
31	kec_gondang	Kecamatan Gondang	7
32	kec_jatirejo	Kecamatan Jatirejo	7
33	kec_kemlagi	Kecamatan Kemlagi	7
34	kec_mojosari	Kecamatan Mojosari	7
35	kec_kutorejo	Kecamatan Kutorejo	7
36	kec_mojoanyar	Kecamatan Mojoanyar	7
37	kec_ngoro	Kecamatan Ngoro	7
38	kec_puri	Kecamatan Puri	7
39	kec_pacet	Kecamatan Pacet	7
40	kec_pungging	Kecamatan Pungging	7
41	kec_sooko	Kecamatan Sooko	7
42	kec_trawas	Kecamatan Trawas	7
43	kec_trowulan	Kecamatan Trowulan	7
44	rsud_soekandar	RSUD Prof. Dr. Soekandar	10



Balai Sertifikasi Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda/IVc

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".




Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

45	rsud_basoeni	RSUD RA. Basoeni	10
46	satpolpp	Satuan Polisi Pamong Praja	39
47	sekretariat_dprd	Sekretariat DPRD	18
48	pbj	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	4
49	bag_adm_perekonomian	Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah	1
50	bag_organisasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	3
TOTAL			1249

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



Balai
Sertifikasi
Elektronik

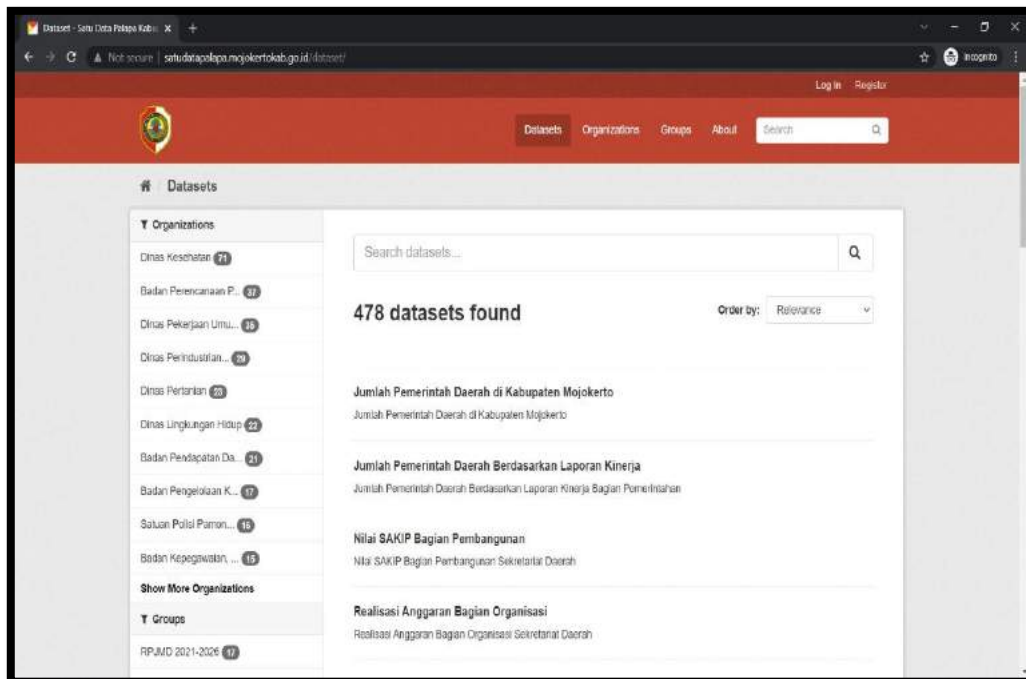
Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Screenshot data berbagi pakai tahun 2021 yang tersedia pada portal
satudatapalapa.mojokertokab.go.id.



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



- **Penjelasan IKK Output:**

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKK Output :

12) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung *smart city*.

Belum ada perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung *smart city* di tahun 2021 karena masih tahap *trial* aplikasi yang mendukung *smart city* pada 4 opd yaitu :

- Dinas Lingkungan Hidup : *Waste management*
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : *Smart Lighting*
- Perumdam : *Water Management*
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : *Tracking Assets*
- RSUD Soekandar : *Tracking Assets*

Data Pendukung :

- MoU PT.Indosat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang Penerapan Ujicoba *Internet Of Things* untuk Kota Cerdas di Lingkungan Kabupaten Mojokerto.

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc





**KESEPAKATAN BERSAMA /
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**ANTARA /
BETWEEN**

PT INDOSAT TBK

DAN/AND

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

**TENTANG/
CONCERNING**

**PENERAPAN UJI COBA *INTERNET OF THINGS (IOT)* UNTUK KOTA CERDAS DI
LINGKUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO/
*PROOF OF CONCEPT (POC) IMPLEMENTATION OF INTERNET OF THINGS (IOT)
FOR SMART CITY IN MOJOKERTO LOCAL GOVERNMENT REGENCY***

NOMOR/NUMBER : 512 /IET-1ETB/LGL/21

NOMOR/NUMBER : 14 Tahun 2021

Pada hari ini, senin, tanggal dua puluh satu bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu (21-06-2021), telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama Tentang Penerapan Uji Coba *Internet Of Things (Iot)* untuk Kota Cerdas di Lingkungan Kabupaten Mojokerto (untuk selanjutnya disebut sebagai "Kesepakatan Bersama"), oleh dan antara :

On monday June, 21th 2021, a Memorandum of Understanding on the Application of Internet of Things (Iot) Trials for Smart Cities in Mojokerto Regency has been made and signed (hereinafter referred to as "Memorandum of Understanding"), by and between:

I. BAYU HANANTASENA

: Chief Business Officer, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT INDOSAT TBK selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Chief Business Officer, domiciled at Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110, in this case acting for and on behalf of PT INDOSAT TBK, hereinafter is called **FIRST PARTY**.

Handwritten signature in blue ink

II. IKFINA FAHMAWATI

: Bupati Mojokerto, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 16 Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Regent of Mojokerto that based on Ministerial Decree of Internal Affair concerning ratification and appointment of Regent and vice Regent of Mojokerto as concurrent election result in 2020 to districts and city in east Java Province, located on Jl. A. Yani 16 Mojokerto, in this case acting for and on behalf of Mojokerto local Government regency, hereinafter is called **SECOND PARTY**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

FIRST PARTY and **SECOND PARTY** hereinafter referred to collectively as the "**Parties**" and each of them be referred to as "**Party**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ijin yang dimilikinya;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Mojokerto;
3. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan dan dilandasi dengan iktikad baik serta tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud menjalin kerja sama di bidang penerapan teknologi informasi dan *Internet of Things* (IoT) untuk Kota Cerdas dan hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut.



THE PARTIES first explain the following matters:

- a. That **FIRST PARTY** is a telecommunications network and service operator in the territory of the Republic of Indonesia in accordance with its license;
- b. That **SECOND PARTY** hereinafter is called Local Government consist head and department of regent as element of Mojokerto local government regency;
- c. That **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY** intends to establish mutually beneficial cooperation based on good faith and adhering to the prevailing laws and regulations;
- d. That **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY** collaborates in the field of application of information technology and IoT (Internet of Things) for Smart City and matters related to these fields.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penerapan Uji Coba *Internet Of Things (IoT)* untuk Kota Cerdas di Lingkungan Kabupaten Mojokerto, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Based on the above matters, in accordance with respective position, **THE PARTIES** have agreed for doing this Memorandum of Understanding concerning Proof of concept (POC) Implementation Of Internet Of Things (IoT) For Smart City in Mojokerto Local Government Regency , with the following terms and conditions:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mewujudkan *Smart City* Kabupaten Mojokerto.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto.

Article 1 PURPOSE AND OBJECTIVES

- (1) This Memorandum of Understanding is purposed for develop electronic governance in order to manifest *Smart City* in Mojokerto local government regency.
- (2) This Memorandum of Understanding aim at as base for **THE PARTIES** to doing cooperation for enhancement government administration and public services in Mojokerto local government regency.

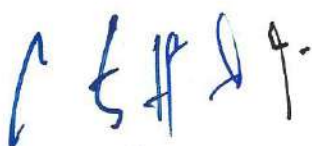
Handwritten signature in blue ink.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penerapan Uji Coba *Internet Of Things (IoT)* untuk Kota Cerdas di Lingkungan Kabupaten Mojokerto.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama terdiri dari :
 - a. *Smart Government*, yaitu tata kelola pemerintahan cerdas yang memanfaatkan teknologi informasi pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif;
 - b. *Smart Economy*, yaitu tata kelola perekonomian cerdas guna mendorong berkembangnya ekonomi daerah melalui industri kreatif digital;
 - c. *Smart Environment*, yaitu tata kelola lingkungan cerdas dalam rangka memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, lingkungan yang bersih tertata dan ruang terbuka hijau yang representatif;
 - d. *Smart Living*, yaitu penyediaan fasilitas informasi digital dengan tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti informasi kesehatan, pengembangan kurikulum melek digital, dan membangun fasilitas ramah difabel;
 - e. *Smart People*, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang tidak hanya mengacu pada kualifikasi edukasi seseorang, tapi juga kualitas interaksi sosial dan bermedia sosial dalam penggunaan teknologi informasi;
 - f. *Smart Mobility*, yaitu peningkatan kualitas transportasi bagi masyarakat.

Article 2
OBJECT AND SCOPE OF COORPORATION

- (1) *The object of Memorandum of Understanding are Proof of concept (POC) Implementation Of Internet Of Things (IoT) For Smart City in Mojokerto Local Government Regency.*
- (2) *The scope of Memorandum of Understanding are consists :*
 - a. *Smart Government, that is Smart Governance that make use of information technology apply for public services on government sector efectively;*
 - b. *Smart Economy, that is Smart economic governance for encourage regency economic through digital creative industry;*
 - c. *Smart Environment, that is Smart environment governance in order to giving convinience, continuity resources, physical and non physical beauty, clean and orderly environment and representative green open space;*
 - d. *Smart Living, that is provision digital information facilities that purpose for enhancment public quality life like health information, development digital literacy curriculum and development disabled house facilities;*
 - e. *Smart People, that is human resources development that not only based on someone's educational qualifications, but also social interaction quality and social media in use information technology;*
 - f. *Smart Mobility, that is enhancment public transportation quality.*



Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK

- (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini **PIHAK KESATU** bertugas:
 - a. Memberikan bantuan pemikiran, ide dan konsep dalam pengembangan *Smart City* di Kabupaten Mojokerto;
 - b. Memberikan bantuan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan *Smart City* di Kabupaten Mojokerto;
 - c. Menjaga kerahasiaan informasi, keterangan dan atau yang sejenisnya mengenai Informasi Rahasia kepada Pihak lain, kecuali informasi yang bersifat publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini **PIHAK KEDUA** bertugas untuk :
 - a. Memberikan akses informasi yang diperlukan dalam pengembangan *Smart City* di Kabupaten Mojokerto;
 - b. Memfasilitasi koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan *Smart City* di Kabupaten Mojokerto;
 - c. Memberikan kemudahan perijinan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Mojokerto;
 - d. Menjaga kerahasiaan informasi, keterangan dan atau yang sejenisnya mengenai informasi rahasia kepada Pihak lain, kecuali informasi yang bersifat publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 3
DUTIES OF THE PARTIES

- (1) *In implementing this memory of understanding, the **FIRST PARTY** obliged:*
 - a. *Provide thought assistance, idea and concept in smart city development in Mojokerto Regency;*
 - b. *Provide Corporate Social Responsibility (CSR) in order to Smart City development in Mojokerto Regency;*
 - c. *Keep confidential information, explanation and/or alike regarding to Confidential Information to the other Party, except public information according to statutory regulations;*

- (2) *In implementing this Memory of Understanding, the **SECOND PARTY** obliged*
 - a. *Provide access to the necessary information in order Smart City development in Mojokerto Regency;*
 - b. *Facilitate coordinate to regional apparatus organization in order to Smart City implementation in Mojokerto Regency;*
 - c. *Give it easy to coordinate for **FIRST PARTY** in order to Smart City implementation Mojokerto Regency;*
 - d. *Keep confidential information, explanation and/or alike regarding to Confidential Information to the other Party, except public information according to statutory regulations.*

[Handwritten signature]

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

**Article 4
IMPLEMENTATION**

- (1) *Implementation of activities according to scope as referred to article 3, are followed up by cooperation agreement.*
- (2) *Corporation agreement as referred to article (1) are done by officials who appointed by **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY** corresponding authority, duties and functions each.*
- (3) *Signing of cooperation agreement as referred to article (2), are done by head of departement in charge.*

**Pasal 5
KERAHASIAAN**

- (1) Kepemilikan informasi yang terkait dengan bisnis, teknologi atau hal-hal lain dari salah satu **PIHAK** ("**Pemberi Informasi**") atau afliasinya, yang:
 - a. Dinyatakan atau diindikasikan sebagai milik atau informasi rahasia dari salah satu **PIHAK** atau afliasinya; atau
 - b. Disampaikan:
 - 1) Secara lisan atau tertulis dalam bentuk apapun; atau
 - 2) Sebelum, pada saat atau setelah tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama; atau
 - 3) Oleh Pemberi Informasi, afliasi, perwakilan-perwakilannya atau oleh pihak ketiga manapun.Selanjutnya disebut sebagai "**Informasi Rahasia**", yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** ke **PIHAK** lainnya ("**Penerima Informasi**") akan tetap menjadi milik Pemberi Informasi. Selain sebagaimana dinyatakan di atas, Informasi Rahasia juga mencakup ketentuan-ketentuan atau isi dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak berlaku untuk informasi :
 - a. yang telah menjadi milik umum tanpa melanggar Kesepakatan Bersama ini atau kewajiban kerahasiaan terhadap Pemberi Informasi; atau

1 6 11 24

- b. yang telah diketahui secara sah oleh Penerima Informasi pada saat diungkapkan oleh Pemberi Informasi atau perwakilannya; atau
 - c. yang diperoleh oleh Penerima Informasi dari pihak ketiga lainnya yang berhak mengungkapkannya; atau
 - d. yang diharuskan untuk diungkapkan berdasarkan perintah pengadilan atau lembaga Pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Informasi Rahasia harus dijaga kerahasiaannya oleh Penerima Informasi (termasuk komisaris, direktur dan karyawannya) dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Informasi Rahasia hanya akan digunakan untuk pelaksanaan dan tujuan dari Kesepakatan Bersama ini dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Informasi.
- (4) Informasi Rahasia harus dijaga kerahasiaannya oleh Penerima Informasi (termasuk komisaris, direktur dan karyawannya) dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Informasi Rahasia hanya akan digunakan untuk pelaksanaan dan tujuan dari Kesepakatan Bersama ini dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Informasi.

Article 5
CONFIDENTIALITY

- (1) *Ownership of information related to business, technology, or other matters of one of the **PARTY** ("**Information Provider**") or its affiliates, which:*
- a. *Stated or indicated as the property or confidential information of one of the **PARTY** or its affiliates; or*
 - b. *Conveyed:*
 - 1) *Verbally or in writing in any kind of form; or*
 - 2) *Before, on or after the signing date of the Memorandum of Understanding; or*
 - 3) *By the Information Provider, its affiliates, representatives or by any third party.*
- Hereinafter referred to as "**Confidential Information**", which is provided by one of the **PARTY** to the other ("**Information Recipient**") will remain the property of the Information Provider. Apart from those stated above, Confidential Information also includes the terms or contents of this Memorandum of Understanding .*
- (2) *The confidentiality provisions stipulated in this Article do not apply to information:*
- a) *Which has become public domain without violating this Memorandum of Understanding or the obligation of confidentiality to the Information Provider; or*
 - b) *Which has been legally known by the Information Recipient at the time disclosed by the Information Provider or its representatives; or*
 - c) *Which is obtained by the Recipient of Information from other third parties who have the right to disclose it; or*
 - d) *Which is required to be disclosed based on a court order or an authorized Government agency based on the prevailing laws and regulations.*
- (3) *The Confidential Information must be kept confidential by Information Recipients (including its commissioners, directors, and employees) and will not be disclosed to*



third parties. Confidential Information will only be used for the implementation and purpose of this Memorandum of Understanding and will not be used for any other purpose without the prior written consent of the Information Provider.

- (4) *Confidential Information will be immediately destroyed or returned to the Information Provided upon written request. If requested, the Information Recipient will issue a written confirmation that the Confidential Information has been destroyed or returned.*

Pasal 6 FORCE MAJEURE

- (1) Untuk keperluan Kesepakatan Bersama ini, *Force Majeure* berarti setiap peristiwa yang menghambat atau menghalangi suatu Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, dimana peristiwa tersebut di luar kekuasaan Pihak yang terkena peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (2) Peristiwa *Force Majeure* termasuk tetapi tidak terbatas terhadap peristiwa berikut:
- a. bencana alam;
 - b. perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan;
 - c. perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme, tindakan kriminal;
 - d. serangan siber; dan
 - e. pemogokan, penutupan kegiatan.
- (3) Tidak satu Pihak pun bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak lainnya yang disebabkan oleh *Force Majeure*.
- (4) Pelaksanaan kewajiban suatu Pihak yang terkena *Force Majeure* patut ditangguhkan sepanjang dan untuk jangka waktu selama pelaksanaan tersebut terhambat karena *Force Majeure*.
- (5) Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya *Force Majeure*.
- (6) Pihak yang terkena Peristiwa *Force Majeure* wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerjasama dengan Pihak lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban Pihak yang terkena Peristiwa *Force Majeure*. Apabila akibat *Force Majeure* berlangsung selama jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka salah satu Pihak berhak mengakhiri Kesepakatan Bersama tanpa kompensasi apapun.

Article 6 FORCE MAJEURE

- (1) *For the purpose of this Memorandum of Understanding, Force Majeure means any event that obstructs or hampers a Party from performing any of its obligations under*



this Memorandum of Understanding, where such event is beyond control of the affected Party.

- (2) *Force Majeure events include:*
 - a. *natural disaster;*
 - b. *change or stipulation of Government policies or rules and regulations, or judgments/orders of any courts;*
 - c. *wars, riot, chaos, rebellions, sabotage, terrorism, criminal activities;*
 - d. *cyber-attack: and*
 - e. *strikes, lockouts.*
- (3) *Neither Party shall be liable for any loss incurred by the other Party due to Force Majeure.*
- (4) *The performance of a Party's obligation affected by a Force Majeure shall be suspended to the extent that and for the period during which such performance is prevented by that Force Majeure.*
- (5) *The affected Party shall notify the other Party in writing not later than 14 (fourteen) calendar days after the occurrence of Force Majeure completed with official statement from authorized government institution.*
- (6) *The Party affected by the Force Majeure shall use best efforts with cooperation of the other Party to resume the performance of such affected Party's obligation as soon as reasonably possible. In the event of Force Majeure continues for 3 (three) months concurrently, the other Party reserve the right to terminate this Memorandum of Understanding without any compensation.*

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila :
 - a. berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama;
 - b. tujuan Kesepakatan Bersama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kesepakatan Bersama tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek Kesepakatan Bersama hilang atau musnah; dan/atau
 - f. diakhiri lebih awal oleh salah satu Pihak dengan memberitahukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya ke Pihak lainnya.

Article 7 TERM

- (1) *This memorandum of understanding is valid for time period 3 (three) years since signed by **THE PARTIES**.*



- (2) *This memorandum of understanding ends if:*
- a. *Expiration of the period;*
 - b. *The purpose of memorandum of understanding have been achieved.*
 - c. *There are any deals of parties to end memorandum of understanding.*
 - d. *There was a change in policy based on the law that cause memorandum of understanding cant be implemented; and/or*
 - e. *The object of memorandum of understanding lost or destroyed.*
 - f. *terminated early by one of the Party by giving prior written notification within a period of 30 (thirty) days in advance to the other Party.*

Pasal 8
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :
- a. **PIHAK KESATU**
PT Indosat Tbk
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110
Telepon : 021 3000 3001
Email :
 - b. **PIHAK KEDUA**
Diskominfo Kabupaten Mojokerto
Alamat : Jalan A. Yani No. 16 Mojokerto
Telepon : (0321) 323246
Email :
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Article 8
CORRESPONDENCE

- (1) *For correspondence purposes in implementation of Memorandum of Understanding, THE PARTIES appoint their respectives as follows :*
- a. **THE FIRST PARTY**
PT Indosat Tbk
Address : Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110
Phone : 021 3000 3001
Email :

Handwritten signature in blue ink.

b. THE SECOND PARTY

Diskominfo Kabupaten Mojokerto

Address : Jalan A. Yani No. 16 Mojokerto

Phone : (0321) 323246

Email :


- (2) In term one of **PARTY** change their address or something related to identity, then the party that made change is obliged to notify their replacement through registered letter, email or other media officialy.
- (3) Change of the address or something related to identity as referred to article (2), doesn't affect the effectivness of Memorandum of Understanding.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini :
 - a. tidak ditafsirkan sebagai menciptakan komitmen yang mengikat secara hukum, keuangan atau sebaliknya;
 - b. tidak dimaksudkan sebagai pembuatan usaha patungan dan tidak ada **PIHAK** yang akan menjadi agen, perwakilan atau mitra bersama dari **PIHAK** lainnya;
 - c. masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaiannya serta karyawan, kontraktor dan subkontraktornya, sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** ingin membuat kewajiban hukum atau keuangan sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** akan berkonsultasi satu sama lain, jika sesuai dan jika keadaan mengharuskannya, tentang masalah yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan hak-haknya, termasuk keharusan untuk membuat perjanjian terpisah untuk mengatur masalah dan hak tersebut.

Article 9
MISCELLANEOUS

- (1) *Notwithstanding anything in this Memorandum of Understanding to the contrary:*
 - a. *this Memorandum of Understanding is an expression of intent and does not constitute a legally binding document;*
 - b. *nothing herein shall be construed as creating a legally binding commitment, financial or otherwise;*
 - c. *nothing herein shall be construed as creating a joint venture, and neither PARTY shall be an agent, representative, or joint partner of the other PARTY;*
 - d. *each PARTY shall be responsible for its acts and omissions and its employees, contractor, and subcontractors connected with this Memorandum of Understanding and its implementation.*



- (2) *To the extent that **THE PARTIES** wish to create legal or financial obligations concerning or resulting from any activity contemplated in this Memorandum of Understanding , a separate agreement related to that will be concluded between **THE PARTIES** before such activity being undertaken.*
- (3) ***THE PARTIES** will consult each other, as appropriate and if circumstances so require, on issues relating to intellectual property and rights, including the necessity of entering into a separate agreement(s) to regulate such matters and rights.*

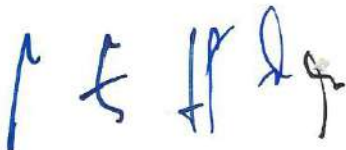
**Pasal 10
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kerja sama ini tetap berlaku dan tetap mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran di antara teks bahasa Indonesia dengan teks Bahasa Inggris dalam Kesepakatan Bersama ini, maka yang berlaku adalah teks bahasa Indonesia.

**Article 10
CLOSING STATEMENT**

- (1) *Things that havent been set in this memorandum of understanding, will be written in addendum which are an integral part of this memorandum of understanding.*
- (2) *If there is a change of leadership or a change in organizational structure of **THE PARTIES**, they deal that any term and condition in this memorandum of understanory regulations. ding still bind and applies to the signing **PARTIES** and their successors in accordance with statutory regulations.*
- (3) *If there is any discrepancy in interpretation between the Bahasa Indonesia text and the English text of this Memorandum of Understanding, the Bahasa Indonesia text shall prevail.*

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Mojokerto pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 5 (lima) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.



Thus this memorandum of understanding are made and signing in Mojokerto on Monday June, 21th 2021 reffered to the begining of memorandum of understanding in 5 copies, stamped sufficiently and each of them has same legal force for THE PARTIES.

PIHAK KEDUA,



IKFINA FAHMAWATI

PIHAK KESATU,



BAYU HANANTASENA





Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

- Penjelasan IKK Output:

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKK Output :

13) Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi

Di tahun 2021 seluruh ASN pengelola TIK sejumlah 9 orang pada Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto telah tersertifikasi kompetensi.

Data Pendukung :

- Data ASN Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.
- Sertifikat kompetensi ASN Bidang Informatika.

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



**DATA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN BIDANG INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Nama Pegawai	NIP	Sertifikasi Kompetensi
1	Ir. ANDI WIJANARKO, MM.	19641114 199302 1 003	ITIL V4, Network Operation Center (NOC), Security Operation Center (SOC)
2	DIDING ADI PARWOTO, S.Kom.,M.Eng.	19830119 201001 1 010	Enterprise Architecture with TOGAF, Information System Analysis, Information System Design, IT Governance with COBIT
3	WILLIAMSON HOTMATUA M ,ST	19840124 201001 1 010	ITIL V4, Network Operation Center (NOC), Security Operation Center (SOC), Enterprise Architecture with TOGAF, IT Governance with COBIT
4	WIRAT MOKO HADI S. , S.Kom	19951209 201903 1 004	Information System Design, Mobile Front-end with PWA, Front-end Web Development, Information System Analys, Beckend Web API Programming
5	DAROJAT NOOR ABIDIN , S.Kom.	19910701 201903 1 006	Mobile Front-end with PWA, Front-end Web Development, Beckend Web API Programming
6	ARIF SUBROTO , S.Kom	19961216 201903 1 002	Mobile Front-end with PWA, Front-end Web Development, Beckend Web API Programming
7	ULINNUHA NASHIRUDIN ,S.Kom	19911023 201903 1 005	Network Security With Mikrotik, Traffic Management with Mikrotik
8	DIONO, S.H	19701002 200112 1 002	Training Awereness Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001 :2013)
9	HANTON DIAN RUMANTO	19850223 201001 1 004	Training Awereness Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001 :2013)

Mengetahui
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Diding Adi Parwoto, S.Kom, M.Eng

Has successfully completed the Online Training Inixindo :
IT Governance with COBIT

From Desember 06 2021 until Desember 08 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number. 985e4c83-0c7b-4ca9-a5d1-b274e8ff72bd



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Diding Adi Parwoto, S.Kom, M.Eng

Has successfully completed the Online Training Inixindo :
Information System Design

From November 26 2021 until November 26 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number. 46d3a362-d517-4bdc-a3b2-0039f089cd80



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Diding Adi Parwoto, S.Kom, M.Eng

Has successfully completed the Online Training Inixindo :
Information System Analysis

From November 25 2021 until November 25 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number: 2b8f88cc-8c84-4f4d-9cc7-9c1d6d63919d



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Diding Adi Parwoto, S.Kom, M.Eng

Has successfully completed the Online Training Inixindo :
Enterprise Architecture with TOGAF

From November 22 2021 until November 23 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number: fa7cb1c0-08bb-457e-b9c0-537d63969477



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Diding Adi Parwoto, S.Kom, M.Eng

Has successfully completed the Online Training Inixindo :

ITIL V4

From September 01 2021 until September 03 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number: 040fbb4c-272d-4f1e-a44f-772c8418d602



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Ir. Andi Wijanarko, MM

Has successfully completed the Online Training Inixindo :
Security Operation Center (SOC)

From November 25 2021 until November 25 2021



Andi Yuniatoro
Director

Cert. Number. af8080da-375e-4c82-b2e3-441f24e80963



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Ir. Andi Wijanarko, MM

Has successfully completed the Online Training Inixindo :
Network Operation Center (NOC)

From November 26 2021 until November 26 2021



Cert. Number: 77dd96f6-7379-4a9a-8e32-47fc3e631147

Andi Yuniantoro
Director



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Ir. Andi Wijanarko, MM

Has successfully completed the Online Training Inixindo :

ITIL V4

From September 01 2021 until September 03 2021



Cert. Number. 1fa2f50d-e642-403e-a2d7-21a9c717561a

Andi Yudiantoro
Director

This is to certify that
Diding Adi Parwoto

Has achieved the
**ITIL[®] Foundation Certificate in
IT Service Management**

Effective from **09 Sep 2021**

Expiry date **N/A**

Certificate number **GR671308334DP**

Candidate number **9980037649186003**



Mark Basham, CEO, AXELOS



Panoraia Theleriti, Certification Qualifier, PeopleCert

ITIL 4 Edition

Printed on 20 September 2021

This certificate remains the property of the issuing Examination Institute and shall be returned immediately upon request.

AXELOS, the AXELOS logo, the AXELOS swirl logo, ITIL[®], PRINCE2[®], PRINCE2 Agile[®], AgileSHIFT[®], MSP[®], M.o.R[®], P3O[®], MoP[®] and MoV[®] are registered trademarks of AXELOS Limited. RESILIA[™] is a trademark of AXELOS Limited. PeopleCert and 'PeopleCert All talents, certified.' are registered trademarks of PeopleCert International Limited. All rights reserved.



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Williamson Hotmatua Manullang, ST, MH

Has successfully completed the Online Training Inixindo :
IT Governance with COBIT

From Desember 06 2021 until Desember 08 2021



Andi Yuniantoro
Director

Cert. Number: 1f5773ee-7c0f-47a7-9163-bfc413551018



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Williamson Hotmatua Manullang, ST, MH

Has successfully completed the Online Training Inixindo :
Network Operation Center (NOC)

From November 26 2021 until November 26 2021



Andi Yuniatoro
Director

Cert. Number: f42dbaa0-1d65-4015-ad15-2690d7b6a48c



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Williamson Hotmatua Manullang, ST, MH

Has successfully completed the Online Training Inixindo :
Security Operation Center (SOC)

From November 25 2021 until November 25 2021



Andi Yuniantoro
Director

Cert. Number: a4c4da87-a398-407a-a365-1dba15c57925



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Williamson Hotmatua Manullang, ST, MH

Has successfully completed the Online Training Inixindo :

Enterprise Architecture with TOGAF

From November 22 2021 until November 23 2021



Andi Yuniantoro
Director

Cert. Number: d07992a5-4697-41a3-ba98-b80d07ffdbb8



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Williamson Hotmatua Manullang, ST, MH

Has successfully completed the Online Training Inixindo :

ITIL V4

From September 01 2021 until September 03 2021



Cert. Number: dbcb7fc3-875b-463f-a204-461ce789d627

Andi Yuniatoro
Director



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Ulinnuha Nashirudin, S.Kom

Has successfully completed the Online Training Inixindo :
Traffic Management with Mikrotik

From Agustus 23 2021 until Agustus 24 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number: d88c077c-dc8b-4c49-b9ba-4e37897fa17d



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Ulinnuha Nashirudin, S.Kom

Has successfully completed the Online Training Inixindo :

Network Security with Mikrotik

From Agustus 24 2021 until Agustus 25 2021



Andi Yuniantoro
Director

Cert. Number: 93e9e2d4-de18-4f3f-b0bb-7883d03b5565



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Darojat Noor Abidin

Has successfully completed the Online Training Inixindo :

Mobile Front-end with PWA

From Agustus 20 2021 until Agustus 23 2021



Andi Yuniantoro
Director

Cert. Number: 68d3df2a-bbc4-4d7c-b981-4cbc02aaae9e



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Darojat Noor Abidin

Has successfully completed the Online Training Inixindo :

Front-end Web Development

From Agustus 18 2021 until Agustus 19 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number: 737415b2-2a71-47e6-9422-536252a3b839



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Darojat Noor Abidin

Has successfully completed the Online Training Inixindo :

Backend Web API Programming

From Agustus 16 2021 until Agustus 18 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number: ea9210c1-8003-4b9a-bf99-96ef8d223235



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Wirat Moko Hadi Sasmita

Has successfully completed the Online Training Inixindo :

Backend Web API Programming

From Agustus 16 2021 until Agustus 18 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number. 3a95ac27-6ba5-4160-a94b-7834bc91e180



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Wirat Moko Hadi Sasmita

Has successfully completed the Online Training Inixindo :
Information System Analysis

From November 25 2021 until November 25 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number: 52995127-a1ee-485c-a0fc-eb1edd6cd865



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Wirat Moko Hadi Sasmita

Has successfully completed the Online Training Inixindo :

Mobile Front-end with PWA

From Agustus 20 2021 until Agustus 23 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number: 0e8dee9e-6feb-4224-a1f1-1762fdc0bfb7



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Wirat Moko Hadi Sasmita

Has successfully completed the Online Training Inixindo :
Information System Design

From November 26 2021 until November 26 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number: cf1a7ba0-0dd6-4172-a5a0-dcaeddeef826



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Wirat Moko Hadi Sasmita

Has successfully completed the Online Training Inixindo :

Front-end Web Development

From Agustus 18 2021 until Agustus 19 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number: 12ea6cc8-486e-4943-82b1-4f3645951971



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Wirat Moko Hadi Sasmita

Has successfully completed the Online Training Inixindo :

Mobile Front-end with PWA

From Agustus 20 2021 until Agustus 23 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number: 0e8dee9e-6feb-4224-a1f1-1762fdc0bfb7



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Wirat Moko Hadi Sasmita

Has successfully completed the Online Training Inixindo :
Information System Design

From November 26 2021 until November 26 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number: cf1a7ba0-0dd6-4172-a5a0-dcaeddeef826



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Arif Subroto

Has successfully completed the Online Training Inixindo :

Backend Web API Programming

From Agustus 16 2021 until Agustus 18 2021



Andi Yuniatoro
Director

Cert. Number: a89d62fa-76d7-4d69-a41d-ff8b16140e03



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Arif Subroto

Has successfully completed the Online Training Inixindo :

Front-end Web Development

From Agustus 18 2021 until Agustus 19 2021



Andi Yuniatoro
Director

Cert. Number: ddbbe093f-2a49-4846-b12d-2d0793458d10



CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is awarded to :

Arif Subroto

Has successfully completed the Online Training Inixindo :

Mobile Front-end with PWA

From Agustus 20 2021 until Agustus 23 2021



Andi Yudiantoro
Director

Cert. Number: dd7a5baa-7ee2-4074-8d83-de7abc0ba4de



DELTA
SINERGI PRIMA

CERTIFICATE

NO : 0193404B21

Presented to

HANTON DIAN RUMANTO

Has attended and successfully completion the following course

**Training Awareness
Sistem Manajemen Keamanan Informasi
(ISO 27001 : 2013)**



On Behalf Of:
DELTA CONSULTANT
Mojokerto, 09 Juni 2021



Vico Delta Frihannedy, S.T., M.M.

Director

DELTA SINERGI PRIMA

✉ info@delta.id 🌐 www.delta.id

To check this certificate validity please visit www.delta.id



DELTA
SINERGI PRIMA

CERTIFICATE

NO : 0193104B21

Presented to

DIONO,SH

Has attended and successfully completion the following course

**Training Awareness
Sistem Manajemen Keamanan Informasi
(ISO 27001 : 2013)**



On Behalf Of:
DELTA CONSULTANT
Mojokerto, 09 Juni 2021



DELTA

SINERGI PRIMA

Vico Delta Frihannedy, S.T., M.M.

Director

DELTA SINERGI PRIMA

✉ info@delta.id 🌐 www.delta.id

To check this certificate validity please visit www.delta.id



- **Penjelasan IKK Output:**

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKK Output :

14) Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi *e-government*.

1. Dokumen Master Plan :

- *Roadmap Masterplan* TIK (Arsitektur SPBE) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023
- *Reviu Dokumen Arsitektur SPBE Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023*

2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer)

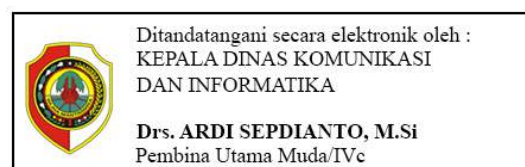
- Peraturan Bupati No.49 Tahun 2020 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Mojokerto.
- Peraturan Bupati No.15 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Bupati No.16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Satu Data Palapa
- Keputusan Bupati No.188.45/244/HK/216-012/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE

Data Pendukung :

- *Softcopy Roadmap Masterplan* TIK (Arsitektur SPBE) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023
- *Softcopy Reviu Dokumen Arsitektur SPBE Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023*
- *Softcopy* Peraturan Bupati No.49 Tahun 2020 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Mojokerto.
- *Softcopy* Peraturan Bupati No.15 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- *Softcopy* Peraturan Bupati No.16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Satu Data Palapa
- *Softcopy* Keputusan Bupati No.188.45/244/HK/216-012/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BUKU 2
ROADMAP
MASTERPLAN TIK
(ARSITEKTUR SPBE)
KABUPATEN
MOJOKERTO
2019 - 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Mojokerto



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GRAFIK.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	8
1. BAB 1 PENDAHULUAN	10
1.1 SPBE	10
1.2 Arsitektur SPBE.....	11
1.3 Landasan Hukum	12
1.4 Referensi Best Practice	13
1.5 Metodologi Penyusunan Arsitektur SPBE	13
2. BAB II KONDISI EKSISTING SUMBER DAYA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	17
2.1 Proses Bisnis	17
2.2 Data dan Infomasi	26
2.3 Aplikasi Eksisting	30
2.4 Infrastruktur Teknologi Informasi	41
2.4.1 Perangkat Keras TI	41
2.4.2 Jaringan TI	43
2.5 Keamanan Informasi	54
2.6 Layanan.....	56
2.6.1 Layanan pemerintah kepada pemerintah dan pegawai	56
2.6.2 Layanan pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha.....	58
2.7 Manajemen dan Tata Kelola Teknologi Informasi	59
2.8 Penyelenggara SPBE	59
2.9 Anggaran SI/TI	64
2.10 Pengelolaan Permasalahan SI/TI	64
3. BAB III ARSITEKTUR PROSES BISNIS	66
3.1 Kelompok Urusan	68
3.2 Sub Urusan	71
3.3 Peta Proses Bisnis.....	72
4. BAB IV ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI	73
4.1 Data yang diakses semua OPD.....	73

4.2	Integrasi Urusan dan Data Informasi	74
5.	BAB V ARSITEKTUR APLIKASI SPBE	75
5.1	Daftar Potensi Aplikasi.....	76
5.2	Kategori Aplikasi Berdasarkan Pengembangan	100
5.3	Kategori Aplikasi Berdasarkan Jenis.....	100
5.4	Kategori Aplikasi Berdasarkan Fungsi	101
6.	BAB VI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR	103
6.1	Topologi Jaringan Kabupaten Mojokerto (WAN).....	103
6.1.1	Analisis kekurangan dan permasalahan yang ada dengan arsitektur yang saat ini ada (terkait topologi dan juga perangkat jaringan yang saat ini ada)	103
6.1.2	Rekomendasi Arsitektur Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Masa Mendatang.....	106
6.2	Kebutuhan Server.....	113
6.3	Kebutuhan Bandwith	116
6.4	Kebutuhan PC	122
6.5	Kebutuhan Printer.....	123
7.	BAB VII ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE	126
7.1	Usulan Penambahan Perangkat Keamanan	126
7.2	Kebutuhan CCTV.....	135
7.3	Usulan Pembangunan Command Center	154
8.	BAB VIII ARSITEKTUR LAYANAN SPBE.....	159
8.1	Layanan Pemerintah kepada Pemerintah dan ASN	160
8.2	Layanan Pemerintah kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha	160
	BAB IX ARSITEKTUR TATA KELOLA DAN MANAJEMEN.....	168
9.1	Penguatan Kapasitas Pengelolaan dan Sistem Koordinasi Pelaksanaan SPBE	169
9.1.1	OPD Mandiri TIK.....	169
9.1.2	Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Pengelola TI	170
9.1.3	Sistem dan Layanan Service Desk TI	172
9.2	Penguatan Kebijakan SPBE	173
9.3	Proses Manajemen SPBE	176
9.4	Kegiatan Pendukung Tata Kelola dan Manajemen TI.....	178
9.5	Penyusunan SOP Manajemen SPBE	179
9.6	Evaluasi Penerapan SPBE	180

BAB X PENYELENGGARA SPBE	181
1.1 Tim Koordinasi SPBE.....	181
10.2 SDM TIK.....	184
10.2.1 Kompetensi SDM SPBE	185
10.2.2 Pengadaan Kebutuhan SDM SPBE.....	186
10.2.3 Program Peningkatan Kompetensi SPBE	189
11 BAB XI PRIORITISASI DAN PETA RENCANA SPBE	198
11.1 Prioritisasi dan Peta Rencana Aplikasi	198
11.2 Prioritisasi dan Peta Rencana Tata Kelola dan Manajemen SPBE.....	220
11.3 Program Peningkatan Kompetensi.....	228
11.4 Infrastruktur	232
11.4.1 Infrastruktur Jaringan	232
11.4.2 Prioritisasi PC	233
11.4.3 Prioritisasi Printer	235
12 BAB XII KISARAN ANGGARAN.....	239
12.1 Kisaran Anggaran Aplikasi.....	239
12.2 Kisaran Anggaran SDM TI.....	260
12.3 Kisaran Anggaran Training dan Sertifikasi	261
13.1 Kisaran Anggaran Pengadaan Infrastruktur	264
13.2 Rincian Kisaran Anggaran untuk Perangkat Komputer dan Printer.....	266

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1. Persentase Ketersediaan SOP Pada Layanan Publik.....	24
Grafik 2. 2. Persentase jenis layanan publik.....	25
Grafik 2. 3. Persentase ketersediaan alternatif manual pada layanan publik	25
Grafik 2. 4. Persentase Pengkategorian Sistem Informasi	38
Grafik 2. 5. Persentase Jenis Sistem Informasi.....	39
Grafik 2. 6. Persentase Pembuat Sistem Informasi.....	39
Grafik 2. 7. Persentase Pengelola Sistem Informasi.....	40
Grafik 2. 8. Perbandingan penggunaan akses internet	45
Grafik 2. 9. Perbandingan sumber akses internet PD	46
Grafik 2. 10. Perbandingan kelengkapan infrastruktur jaringan bagian 1	50
Grafik 2. 11. Perbandingan Kelengkapan Infrastruktur Jaringan TI Bagian 2.....	53
Grafik 2. 12. Jumlah SDM TI tiap PD	62
Grafik 2. 13. Perbandingan ketersediaan SDM TI OPD	63
Grafik 2. 14. Jumlah pegawai berdasarkan status pegawai	63
Grafik 2. 15. Jumlah pegawai berdasarkan ketersediaan TI.....	64
Grafik 5. 1 Jumlah SI Berdasarkan Jenis Pembangunan	100
Grafik 5. 2 Jumlah SI berdasarkan jenis aplikasi.....	101
Grafik 5. 3 Jumlah SI Berdasarkan Fungsi.....	102
Grafik 12. 1Jumlah SI berdasarkan perkiraan biaya pembangunan.....	260

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Jumlah layanan publik eksisting.....	18
Tabel 2. 2. Ringkasan layanan publik eksisting.....	26
Tabel 2. 3. Data Eksisting Hasil Survey	26
Tabel 2. 4. Jumlah sistem informasi eksisting	31
Tabel 2. 5. Status kepemilikan dan keaktifan website	35
Tabel 2. 6. Rangkuman sistem informasi eksisting.....	40
Tabel 2. 7. Jumlah kepemilikan perangkat keras masing-masing PD.....	41
Tabel 2. 8. Rincian akses internet.....	43
Tabel 2. 9. Jumlah perangkat infrastruktur jaringan bagian 1	46
Tabel 2. 10. Ringkasan rincian kelengkapan infrastruktur jaringan TI bagian 1.....	50
Tabel 2. 11. Ringkasan rincian kelengkapan nfrastruktur jaringan TI bagian 2	54
Tabel 2. 12. Jumlah Perangkat Keamanan Informasi Eksisting	54
Tabel 2. 13. Layanan Administrasi Berbasis Elektronik	56
Tabel 2. 14. Layanan Publik Berbasis Elektronik	58
Tabel 3. 1 Rincian urusan dan PD penanggung jawab.....	69
Tabel 5. 1 Usulan Aplikasi untuk Setiap OPD.....	77
Tabel 6. 1 Perhitungan Kebutuhan Bandwidth	118
Tabel 6. 2 Analisis Kebutuhan PC	122
Tabel 6. 3 Hasil Analisis Kebutuhan Printer.....	124
Tabel 7. 1 Rekomendasi Umum Terkait Kebutuhan Infrastruktur dan Keamanan Informasi	133
Tabel 7. 2 Detail Letak Pemasangan CCTV	148
Tabel 7. 3 Spesifikasi Server	156
Tabel 7. 4 Temperatur Minimum Pendingin Ruangan	157
Tabel 8. 1 Detail Analisis Layanan Administrasi	162
Tabel 8. 2 Detail Analisis Layanan Publik.....	164
Tabel 9. 1 Penjelasan Tanggung Jawab untuk Setiap Peran.....	170
Tabel 9. 2 Pembagian Peran dalam Pengelolaan SI/TI Berdasarkan Jenis	171
Tabel 9. 3 Tugas dan fungsi yang direkomendasikan	172

Tabel 10. 1 rekomendasi komposisi tim koordinasi SPBE	184
Tabel 10. 2 Program peningkatan kompetensi perencanaan SPBE	190
Tabel 10. 3 Program peningkatan kompetensi rekayasa proses bisnis pemerintahan.....	192
Tabel 10. 4 Program peningkatan kompetensi pengelolaann TIK yang terintegrasi, aman, dan andal	193
Tabel 10. 5 Detail Program Yang Ada Untuk Kompetensi Manajemen Layanan Dan Fasilitas	196
Tabel 11. 1 Rincian Pengembangan Aplikasi Per Tahun.....	200
Tabel 11. 2 Prioritisasi dan Peta Rencana Aplikasi	201
Tabel 11. 3 Jumlah Usulan Aplikasi Per Tahun	219
Tabel 11. 4 Rincian Prioritisasi dan Peta Rencana tata kelola dan manajemen	222
Tabel 11. 5 Prioritisasi dan Peta Rencana Program Peningkatan Kompetensi	228
Tabel 11. 6 Prioritas Usulan Infrastruktur	232
Tabel 11. 7 Prioritisasi Pengadaan PC	233
Tabel 11. 8 Prioritisasi Printer Setiap OPD	236
Tabel 11. 9 Total dari perangkat printer yang diusulkan dalam setiap tahun	238
Tabel 12. 1 hasil perhitungan <i>benchmark</i> dan range anggaran	240
Tabel 12. 2 Rentang biaya tingkatan SI.....	240
Tabel 12. 3 Kisaran Anggaran Training dan Sertifikasi	261
Tabel 12. 4 Kisaran Anggaran Pengadaan Infrastruktur.....	264
Tabel 12. 5 Kisaran Anggaran Komputer dan Printer	266

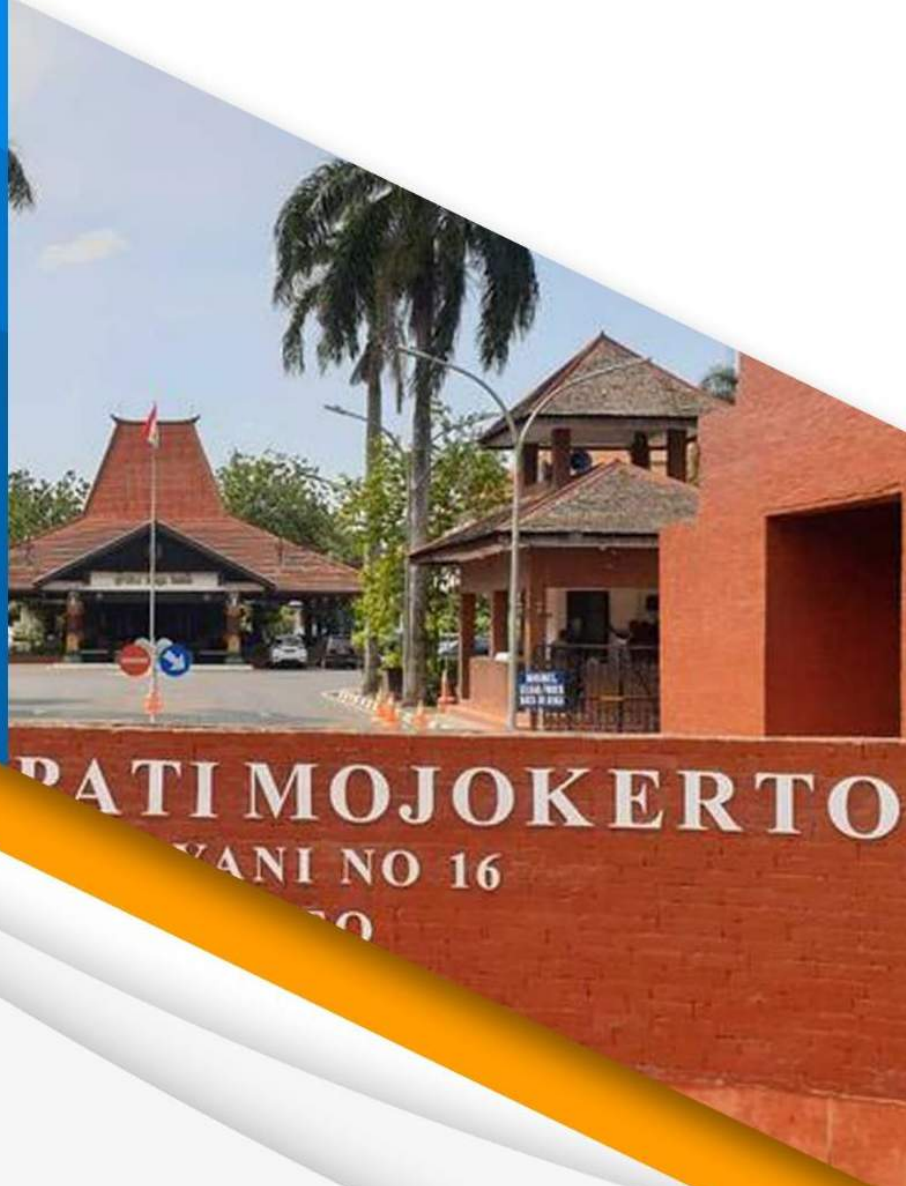
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Tahapan Pengerjaan Proyek Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto	14
Gambar 3. 1. Hierarki Peta Proses.....	67
Gambar 6. 1 Topologi Eksisting Jaringan FO dan Radio Wireless Pemerintah Kabupaten Mojokerto.....	104
Gambar 6. 2 Desain Usulan Sistem Infrastruktur Jaringan Diskominfo Kabupaten Mojokerto Beserta Data Center dan DRC.....	107
Gambar 7. 1 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Dawarblandong 1	135
Gambar 7. 2 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Dawarblandong 2.....	136
Gambar 7. 3 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Kemlagi.....	136
Gambar 7. 4 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Jetis 1.....	137
Gambar 7. 5 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Jetis 2.....	137
Gambar 7. 6 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Gedeg 1	138
Gambar 7. 7 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Gedeg 2	138
Gambar 7. 8 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Mojoanyar 1	139
Gambar 7. 9 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Mojoanyar 2	139
Gambar 7. 10 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Sooko 1.....	140
Gambar 7. 11 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Sooko 2.....	140
Gambar 7. 12 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Bangsal	141
Gambar 7. 13 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Puri	141
Gambar 7. 14 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Trowulan	142
Gambar 7. 15 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Jatirejo.....	142
Gambar 7. 16 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Dlanggu	143
Gambar 7. 17 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Mojosari	143
Gambar 7. 18 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Pungging 1.....	144
Gambar 7. 19 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Pungging 2.....	144
Gambar 7. 20 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Kutorejo.....	145
Gambar 7. 21 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Ngoro 1.....	145

Gambar 7. 22 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Ngoro 2.....	146
Gambar 7. 23 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Gondang.....	146
Gambar 7. 24 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Trawas	147
Gambar 7. 25 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Pacet 1.....	147
Gambar 7. 26 Letak Pemasangan CCTV Wilayah Kecamatan Pacet 2.....	148



**Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021**



BUKU 2

Reviu Dokumen Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Kabupaten Mojokerto 2019-2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1. Arsitektur Proses Bisnis.....	1
1.1.2. Arsitektur Data dan Informasi	1
1.1.3. Arsitektur Layanan	2
1.1.4. Arsitektur Aplikasi	2
1.1.5. Arsitektur Keamanan.....	2
1.1.6. Arsitektur Infrastruktur.....	2
1.2 Hasil Penilaian SPBE.....	2
BAB 2 METODELOGI.....	4
2.1 Analisis Kondisi Eksisting.....	4
2.2 Analisis Kesenjangan.....	4
2.3 Analisis Usulan	4
BAB 3 ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI	5
3.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE	5
3.2 Identifikasi Metadata Data dan Informasi.....	6
3.3 Identifikasi Daftar Data Setiap PD	7
3.3.1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	7
3.3.2 Badan Pendapatan Daerah	8
3.3.3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	9
3.3.4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	11
3.3.5 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.....	12
3.3.6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	14
3.3.7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15
3.3.8 Bagian Pemerintahan.....	16
3.3.9 Bagian Organisasi.....	17
3.3.10 Bagian Kesejahteraan Rakyat.....	17
3.3.11 Bagian Hukum.....	18
3.3.12 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	19
3.3.13 Bagian Administrasi Pembangunan.....	19
3.3.14 Bagian Umum.....	20

3.3.15	Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	21
3.3.16	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	21
3.3.17	Dinas Komunikasi dan Informatika.....	22
3.3.18	Dinas Pendidikan.....	24
3.3.19	Dinas Kesehatan	25
3.3.20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	31
3.3.21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	33
3.3.22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	34
3.3.23	Dinas Lingkungan Hidup.....	37
3.3.24	Dinas Pangan dan Perikanan	38
3.3.25	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.....	40
3.3.26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41
3.3.27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	43
3.3.28	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.....	43
3.3.29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	47
3.3.30	Dinas Pertanian.....	49
3.3.31	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan.....	52
3.3.32	Dinas Sosial	55
3.3.33	Dinas Tenaga Kerja	57
3.3.34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	59
3.3.35	Inspektorat	61
3.3.36	SATPOL PP.....	62
3.3.37	RSUD R.A. Basuni	63
3.3.38	Kecamatan Jetis	64
3.3.39	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.....	65
3.3.40	RSUD Prof dr Soekandar	66
3.3.41	Kecamatan Pungging.....	66
3.3.42	Kecamatan Mojosari.....	67
3.3.43	Kecamatan Sooko	67
3.4	Integrasi Urusan dan Data Informasi	68
3.5	Usulan Integrasi Data.....	68
3.5.1	Integrasi Data Kependudukan	69
3.5.2	Integrasi Data Kepegawaian.....	72
BAB 4 ARSITEKTUR LAYANAN SPBE.....		73
4.1	Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE	73
4.2	Identifikasi Metadata Layanan.....	74
4.3	Layanan Administrasi berbasis Elektronik	75
4.4	Layanan Publik berbasis Elektronik	76

BAB 5 ARSITEKTUR PROSES BISNIS	79
5.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Proses Bisnis	79
5.2 Identifikasi Metadata Proses Bisnis	80
5.3 Identifikasi Urusan Pemerintah.....	81
5.3.1 Pengkodean Proses Bisnis tiap PD Kabupaten Mojokerto	84
5.3.2 Identifikasi Peta Proses Bisnis Tiap PD	85
5.3.3 Level 0	86
5.4 Tahap Pengembangan Proses Bisnis.....	89
5.4.1 Sekertariat DPRD	89
5.4.2 Badan Pendapatan Daerah	95
5.4.3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	102
5.4.4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	112
5.4.5 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.....	127
5.4.6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	134
5.4.7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	142
5.4.8 Bagian Pemerintahan.....	148
5.4.9 Bagian Organisasi.....	154
5.4.10 Bagian Kesejahteraan Rakyat.....	159
5.4.11 Bagian Hukum.....	164
5.4.12 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	168
5.4.13 Bagian Administrasi Pembangunan.....	175
5.4.14 Bagian Umum.....	179
5.4.15 Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	182
5.4.16 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	185
5.4.17 Dinas Komunikasi dan Informatika.....	188
5.4.18 Dinas Pendidikan.....	199
5.4.19 Dinas Kesehatan	212
5.4.20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	226
5.4.21 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	236
5.4.22 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	248
5.4.23 Dinas Lingkungan Hidup.....	261
5.4.24 Dinas Pangan dan Perikanan	274
5.4.25 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.....	286
5.4.26 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302
5.4.27 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	317
5.4.28 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.....	326
5.4.29 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	338

5.4.30	Dinas Pertanian.....	345
5.4.31	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan.....	365
5.4.32	Dinas Sosial	378
5.4.33	Dinas Tenaga Kerja	386
5.4.34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	398
5.4.35	Inspektorat	410
5.4.36	Satuan Polisi Pamong Praja.....	412
5.4.37	RSUD R.A Basoeni	419
5.4.38	Kecamatan	423
5.4.39	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.....	428
5.4.40	RSUD Prof. dr. Soekandar	432
5.5	Peta Relasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto	439
5.6	Peta Lintas Fungsi.....	442
5.6.1	Peta Proses Bisnis Manajerial.....	442
5.6.2	Peta Proses Bisnis 10 Layanan Utama	443
5.6.3	Peta Lintas Unit Kerja Layanan Publik Sektoral Bidang Kesehatan.....	444
5.6.4	Peta Lintas Unit Kerja Layanan Publik Sektoral Bidang Perijinan.....	445
5.6.5	Peta Lintas Unit Kerja Pelayanan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara 447	
5.6.6	Peta Lintas Unit Kerja Pelayanan Administrasi Bidang Pengaduan Masyarakat 448	
5.6.7	Peta Lintas Unit Kerja Pelayanan Publik Bidang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	449
5.6.8	Peta Lintas Unit Kerja Pelayanan Administrasi Bidang Pengawasan Internal Terkait Pemerintah	450
5.6.9	Peta Lintas Unit Kerja Pelayanan Administrasi Bidang Kearsipan	451
5.6.10	Peta Lintas Unit Kerja Pelayanan Administrasi Bidang Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	452
5.7	Usulan SOP Layanan SPBE.....	452
BAB 6 ARSITEKTUR APLIKASI SPBE		455
6.1	Identifikasi Referensi Aplikasi SPBE.....	456
6.2	Identifikasi Metadata Aplikasi SPBE	457
6.3	Analisis Kondisi Eksisting Aplikasi	458
6.4	Kategori Usulan Aplikasi SPBE	464
6.4.1	Kategori Usulan Aplikasi berdasarkan Jenis Pembangunan	465
6.4.2	Kategori Aplikasi berdasarkan Refrensi Aplikasi	466
6.5	Analisis Usulan Aplikasi SPBE	467
6.5.1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	470
6.5.2	Badan Pendapatan Daerah	471
6.5.3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	471

6.5.4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	472
6.5.5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.....	473
6.5.6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	473
6.5.7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	474
6.5.8	Bagian Pemerintahan.....	474
6.5.9	Bagian Organisasi.....	475
6.5.10	Bagian Kesejahteraan Rakyat.....	475
6.5.11	Bagian Hukum.....	476
6.5.12	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	476
6.5.13	Bagian Administrasi Pembangunan.....	477
6.5.14	Bagian Umum.....	477
6.5.15	6.3.15 Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	478
6.5.16	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	478
6.5.17	Dinas Komunikasi dan Informatika.....	479
6.5.18	Dinas Pendidikan.....	480
6.5.19	Dinas Kesehatan	480
6.5.20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	481
6.5.21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	481
6.5.22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	482
6.5.23	Dinas Lingkungan Hidup.....	483
6.5.24	Dinas Pangan dan Perikanan	483
6.5.25	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata.....	484
6.5.26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	484
6.5.27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	485
6.5.28	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.....	486
6.5.29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	486
6.5.30	Dinas Pertanian.....	487
6.5.31	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan.....	488
6.5.32	Dinas Sosial	488
6.5.33	Dinas Tenaga Kerja	489
6.5.34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	489
6.5.35	Inspektorat	490
6.5.36	RSUD R.A. Basuni.....	491
6.5.37	SATPOL PP.....	491
6.5.38	Kecamatan Jetis	492
6.5.39	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.....	492
6.5.40	RSUD Prof dr. Soekandar	492

6.5.41	Kecamatan Trawas	493
6.5.42	Kecamatan Mojosari.....	493
6.5.43	Kecamatan Sooko	494
BAB 7 ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE		495
7.1	Identifikasi Referensi Infrastruktur SPBE	495
7.2	Identifikasi Metadata Infrastruktur	495
7.2.1	Identifikasi Metadata Perangkat Keras Server	496
7.2.2	Identifikasi Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	497
7.2.3	Identifikasi Metadata Jaringan Intra Pemerintah.....	497
7.2.4	Identifikasi Metadata Perangkat Keras Jaringan	498
7.3	Topologi Jaringan Kabupaten Mojokerto (WAN).....	499
7.3.1	Kondisi Eksisting Topologi Jaringan	499
7.3.2	Analisis Kekurangan dan Permasalahan.....	501
7.3.3	Rekomendasi Arsitektur Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Masa Mendatang	502
7.2	Usulan Kebutuhan Infrastruktur SPBE.....	510
7.2.1	Kebutuhan Server	510
7.2.2	Kebutuhan Bandwidth.....	512
7.2.3	Kebutuhan PC/Laptop	513
7.2.4	Kebutuhan Printer	515
BAB 8 ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE		518
8.1	Identifikasi Referensi Keamanan SPBE	518
8.2	Identifikasi Metadata Infrastruktur	519
8.2.1	Identifikasi Metadata Perangkat Keras Keamanan.....	519
8.2.2	Identifikasi Metadata Manajemen Keamanan	519
8.3	Usulan Penambahan Perangkat Keamanan SPBE	521
8.4	Usulan Kebutuhan CCTV	526
8.5	Usulan Keamanan Non-Teknis	526
BAB 9 ARSITEKTUR TATA KELOLA SPBE, MANAJEMEN SPBE DAN PENYELENGGARA SPBE.....		530
9.1	Usulan Tata Kelola SPBE.....	530
9.1.1	Perencanaan Strategis Tata Kelola SPBE.....	530
9.1.2	Penguatan Kebijakan Internal SPBE	531
9.2	Analisis Usulan Audit TIK	534
9.2.1	Audit Infrastruktur SPBE	534
9.2.2	Audit Aplikasi SPBE	538
9.2.3	Audit Keamanan SPBE	541
9.3	Analisis Usulan Manajemen SPBE.....	543
9.3.1	Manajemen Risiko.....	543

9.3.2	Manajemen Keamanan Informasi.....	550
9.3.3	Manajemen Data.....	553
9.3.4	Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	558
9.3.5	Manajemen Sumber Daya Manusia.....	559
9.3.6	Manajemen Pengetahuan.....	562
9.2	Manajemen Perubahan.....	566
9.3.8	Manajemen Layanan SPBE.....	570
9.3.9	Hasil Rekomendasi Masing-Masing Manajemen.....	578
9.4	Usulan Penyelenggara SPBE.....	581
9.4.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.....	581
9.4.3	PD Mandiri TIK.....	584
9.4.4	Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Pengelola TI.....	585
9.5	Analisis Usulan Sumber Daya Manusia SPBE.....	586
9.5.5	Kompetensi SDM SPBE.....	587
9.5.6	Pengadaan Kebutuhan SDM SPBE.....	588
9.5.7	Program Peningkatan Kompetensi SDM SPBE.....	596
9.5.8	Membangun Sistem dan Layanan Service Desk TI.....	602
9.6	Analisis Kebutuhan SDM TIK.....	603
LAMPIRAN 1 USULAN APLIKASI.....		604
LAMPIRAN 2 ARSITEKTUR SETIAP PD.....		609
L.1.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	609
L.1.02	Badan Pendapatan Daerah.....	610
L.1.03	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	611
L.1.04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	612
L.1.05	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.....	613
L.1.06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	614
L.1.07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	615
L.1.08	Bagian Administrasi Pemerintahan.....	616
L.1.09	Bagian Organisasi.....	617
L.1.10	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.....	618
L.1.11	Bagian Hukum.....	619
L.1.12	Bagian Administrasi Perekonomian.....	620
L.1.13	Bagian Administrasi Pembangunan.....	621
L.1.14	Bagian Umum.....	622
L.1.15	Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	623
L.1.16	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.....	624
L.1.17	Dinas Komunikasi dan Informatika.....	625

L.1.18 Dinas Pendidikan.....	626
L.1.19 Dinas Kesehatan	627
L.1.20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	628
L.1.21 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	629
L.1.22 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	630
L.1.23 Dinas Lingkungan Hidup	631
L.1.24 Dinas Pangan dan Perikanan	632
L.1.25 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.....	633
L.1.26 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	634
L.1.27 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	635
L.1.28 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	636
L.1.29 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	637
L.1.30 Dinas Pertanian.....	638
L.1.31 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	639
L.1.32 Dinas Sosial	640
L.1.33 Dinas Tenaga Kerja	641
L.1.34 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	642
L.1.35 INSPEKTORAT	643
L.1.36 RSUD R.A. Basuni	644
L.1.37 SATPOL PP.....	645
L.1.38 Kecamatan Jetis	646
L.1.39 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	647
L.1.40 RSUD Prof dr Soekandar	648
L.1.41 Kecamatan Pungging.....	649
L.1.42 Kecamatan Mojosari.....	650
L.1.43 Kecamatan Sooko	651
LAMPIRAN 3 METADATA USULAN APLIKASI	652

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Metadata Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	8
Tabel 3. 2 Metadata Badan Pendapatan Daerah.....	8
Tabel 3. 3 Metadata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	9
Tabel 3. 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12
Tabel 3. 5 Metadata Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.....	13
Tabel 3. 6 Metadata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	14
Tabel 3. 7 Metadata Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15
Tabel 3. 8 Metadata Bagian Pemerintahan	16
Tabel 3. 9 Metadata Bagian Organisasi	17
Tabel 3. 10 Metadata Bagian Kesejahteraan Rakyat.....	18
Tabel 3. 11 Metadata Bagian Hukum.....	18
Tabel 3. 12 Metadata Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	19
Tabel 3. 13 Metadata Bagian Administrasi Pembangunan.....	20
Tabel 3. 14 Metadata Bagian Umum.....	20
Tabel 3. 15 Metadata Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	21
Tabel 3. 16 Metadata Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	21
Tabel 3. 17 Metadata Dinas Komunikasi dan Informatika	22
Tabel 3. 18 Metadata Dinas Pendidikan.....	24
Tabel 3. 19 Metadata Dinas Kesehatan	25
Tabel 3. 20 Metadata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32
Tabel 3. 21 Metadata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	33
Tabel 3. 22 Metadata Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	34
Tabel 3. 23 Metadata Dinas Lingkungan Hidup.....	37
Tabel 3. 24 Metadata Dinas Pangan dan Perikanan	38
Tabel 3. 25 Metadata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.....	40
Tabel 3. 26 Metadata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	41
Tabel 3. 27 Metadata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	43
Tabel 3. 28 Metadata Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	44
Tabel 3. 29 Metadata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47
Tabel 3. 30 Metadata Dinas Pertanian	50
Tabel 3. 31 Metadata Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	53
Tabel 3. 32 Metadata Dinas Sosial	55
Tabel 3. 33 Metadata Dinas Tenaga Kerja.....	58
Tabel 3. 34 Metadata Dinas Perindustrian dan Perdagangan	59
Tabel 3. 35 Metadata Inspektorat.....	61
Tabel 3. 36 Metadata SATPOL PP	63
Tabel 3. 37 Metadata RSUD R.A. Basuni	63
Tabel 3. 38 Metadata Kecamatan Jetis	65
Tabel 3. 39 Metadata Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	65
Tabel 3. 40 Metadata RSUD Prof dr Soekandar	66

Tabel 3. 41 Metadata Kecamatan Pungging.....	67
Tabel 3. 42 Metadata Kecamatan Mojosari.....	67
Tabel 3. 43 Metadata Kecamatan Sooko	68
Tabel 3. 44 Integrasi Data Kependudukan Aplikasi Eksisting	69
Tabel 3. 45 Integrasi Data Kependudukan Aplikasi Usulan	71
Tabel 3. 46 Integrasi Data Kepegawaian Aplikasi Eksisting.....	72
Tabel 3. 47 Klasifikasi aplikasi pembanding/acuan pengadaan server	511
Tabel 4. 1 Identifikasi Metadata Layanan	74
Tabel 4. 2 Usulan Layanan Administrasi berbasis Elektronik	75
Tabel 4. 3 Usulan Aplikasi Layanan Publik Berbasis Elektronik.....	77
Tabel 5. 1 Identifikasi Metadata Layanan	80
Tabel 5. 2 Hasil Identifikasi Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto	81
Tabel 5. 3 Pengkodean PD	84
Tabel 5. 4 Pengkodean Proses Bisnis Manajerial Level 0	87
Tabel 5. 5 Pengkodean Proses Utama Level 0	88
Tabel 5. 6 Pengkodean Proses Utama Level 1	89
Tabel 5. 7 Level 0 Managerial Sekretariat DPRD.....	90
Tabel 5. 8 Level 0 Utama Sekretirat DPRD.....	90
Tabel 5. 9 Level 1 Utama Sekretariat DPRD.....	90
Tabel 5. 10 Level 0 Managerial Badan Pendapatan Daerah.....	95
Tabel 5. 11 Level 0 Utama Badan Pendapatan Daerah	95
Tabel 5. 12 Level 1 Utama Badan Pendapatan Daerah	96
Tabel 5. 13 Level 0 Managerial Badan Pengelolaan Keuangan.....	103
Tabel 5. 14 Level 0 Utama Badan Pengelolaan Keuangan	103
Tabel 5. 15 Level 1 Utama Badan Pengelolaan Keuangan	103
Tabel 5. 16 Level 0 Managerial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	112
Tabel 5. 17 Level 0 Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	112
Tabel 5. 18 Level 1 Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	113
Tabel 5. 19 Level 0 Managerial Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	128
Tabel 5. 20 Level 0 Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.....	128
Tabel 5. 21 Level 1 Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.....	128
Tabel 5. 22 Level 0 Managerial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	135
Tabel 5. 23 Level 0 Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	135
Tabel 5. 24 Level 1 Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	135
Tabel 5. 25 Level 0 Managerial Badan Penanggulangan Bencana	143
Tabel 5. 26 Level 0 Utama Badan Penanggulangan Bencana	143
Tabel 5. 27 Level 1 Utama Badan Penanggulangan Bencana	143
Tabel 5. 28 Level 0 Managerial Bagian Pemerintahan	148
Tabel 5. 29 Level 0 Utama Bagian Pemerintahan	148
Tabel 5. 30 Level 1 Utama Bagian Pemerintahan	149
Tabel 5. 31 Level 0 Managerial Bagian Organisasi	155
Tabel 5. 32 Level 0 Utama Bagian Organisasi	155
Tabel 5. 33 Level 1 Utama Bagian Organisasi	155
Tabel 5. 34 Level 0 Managerial Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat.....	160
Tabel 5. 35 Level 0 Utama Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	160

Tabel 5. 36 Level 1 Utama Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	160
Tabel 5. 37 Level 0 Managerial Bagian Hukum	165
Tabel 5. 38 Level 0 Utama Bagian Hukum	165
Tabel 5. 39 Level 1 Utama Bagian Hukum	165
Tabel 5. 40 Level 0 Managerial Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.....	169
Tabel 5. 41 Level 0 Utama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	169
Tabel 5. 42 Level 1 Utama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	169
Tabel 5. 43 Level 0 Managerial Administrasi Pembangunan	175
Tabel 5. 44 Level 0 Utama Bagian Administrasi Pembangunan.....	176
Tabel 5. 45 Level 1 Utama Bagian Administrasi Pembangunan.....	176
Tabel 5. 46 Level 0 Managerial Sekretariat Daerah Bagian Umum	180
Tabel 5. 47 Level 0 Utama Sekretariat Daerah Bagian Umum	180
Tabel 5. 48 Level 1 Utama Sekretariat Daerah Bagian Umum	180
Tabel 5. 49 Level 0 Managerial Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	183
Tabel 5. 50 Level 0 Utama Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	183
Tabel 5. 51 Level 1 Utama Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	183
Tabel 5. 52 Level 0 Managerial Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	186
Tabel 5. 53 Level 0 Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.....	186
Tabel 5. 54 Level 1 Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.....	186
Tabel 5. 55 Level 0 Managerial Dinas Komunikasi dan Informatika	189
Tabel 5. 56 Level 0 Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.....	189
Tabel 5. 57 Level 1 Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.....	189
Tabel 5. 58 Level 0 Managerial Dinas Pendidikan	199
Tabel 5. 59 Level 0 Utama Dinas Pendidikan	200
Tabel 5. 60 Level 1 Utama Dinas Pendidikan	200
Tabel 5. 61 Level 0 Managerial Dinas Kesehatan.....	213
Tabel 5. 62 Level 0 Utama Dinas Kesehatan	213
Tabel 5. 63 Level 1 Utama Dinas Kesehatan	213
Tabel 5. 64 Level 0 Managerial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	227
Tabel 5. 65 Level 0 Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	227
Tabel 5. 66 Level 1 Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	227
Tabel 5. 67 Level 0 Managerial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	237
Tabel 5. 68 Level 0 Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	237
Tabel 5. 69 Level 1 Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	238
Tabel 5. 70 Level 0 Managerial Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	248
Tabel 5. 71 Level 0 Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	248
Tabel 5. 72 Level 1 Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	249
Tabel 5. 73 Level 0 Managerial Dinas Lingkungan Hidup	261
Tabel 5. 74 Level 0 Utama Dinas Lingkungan Hidup.....	261
Tabel 5. 75 Level 1 Utama Dinas Lingkungan Hidup.....	262
Tabel 5. 76 Level 0 Managerial Dinas Pangan dan Perikanan.....	274
Tabel 5. 77 Level 1 Utama Dinas Pangan dan Perikanan	275
Tabel 5. 78 Level 1 Utama Dinas Pangan dan Perikanan	275
Tabel 5. 79 Level 0 Managerial Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	286
Tabel 5. 80 Level 0 Utama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	287

Tabel 5. 81 Level 1 Utama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	287
Tabel 5. 82 Level 0 Managerial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	303
Tabel 5. 83 Level 0 Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	303
Tabel 5. 84 Level 0 Managerial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	317
Tabel 5. 85 Level 0 Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	317
Tabel 5. 86 Level 1 Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	318
Tabel 5. 87 Level 0 Managerial Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.....	327
Tabel 5. 88 Level 0 Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.....	327
Tabel 5. 89 Level 1 Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.....	327
Tabel 5. 90 Level 0 Managerial Dinas Perpustakaan dan kearsipan	339
Tabel 5. 91 Level 0 Utama Dinas Perpustakaan dan kearsipan.....	339
Tabel 5. 92 Level 1 Utama Dinas Perpustakaan dan kearsipan.....	339
Tabel 5. 93 Level 0 Managerial Dinas Pertanian	346
Tabel 5. 94 Level 0 Managerial Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	366
Tabel 5. 95 Level 0 Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	366
Tabel 5. 96 Level 1 Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	367
Tabel 5. 97 Level 0 Managerial Dinas Sosial.....	378
Tabel 5. 98 Level 0 Utama Dinas Sosial	379
Tabel 5. 99 Level 1 Utama Dinas Sosial	379
Tabel 5. 100 Level 0 Managerial Dinas Tenaga Kerja.....	386
Tabel 5. 101 Level 0 Utama Dinas Tenaga Kerja	387
Tabel 5. 102 Level 1 Utama Dinas Tenaga Kerja	387
Tabel 5. 103 Level 0 Managerial Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	398
Tabel 5. 104 Level 0 Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan	398
Tabel 5. 105 Level 1 Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan	399
Tabel 5. 106 Level 0 Managerial INSPEKTORAT	410
Tabel 5. 107 Level 0 Utama INSPEKTORAT	410
Tabel 5. 108 Level 1 Utama INSPEKTORAT	411
Tabel 5. 109 Level 0 Managerial Satuan Polisi Pamong Praja	412
Tabel 5. 110 Level 0 Utama Satuan Polisi Pamong Praja	412
Tabel 5. 111 Level 1 Utama Satuan Polisi Pamong Praja	413
Tabel 5. 112 Level 0 Manajerial RSUD R.A Basoeni.....	420
Tabel 5. 113 Level 0 Utama RSUD R.A Basoeni	420
Tabel 5. 114 Level 1 Utama RSUD R.A Basoeni	420
Tabel 5. 115 Level 0 Manajerial Kecamatan.....	424
Tabel 5. 116 Level 0 Utama Kecamatan	424
Tabel 5. 117 Level 1 Utama Kecamatan	424
Tabel 5. 118 Level 0 Managerial Pengadaan Barang dan Jasa	428
Tabel 5. 119 Level 0 Utama Pengadaan Barang dan Jasa	429

Tabel 5. 120 Level 1 Utama Pengadaan Barang dan Jasa	429
Tabel 5. 121 Level 0 Managerial RSUD Prof. dr. Soekandar	433
Tabel 5. 122 Level 0 Utama RSUD Prof. dr. Soekandar.....	433
Tabel 5. 123 Level 1 Utama RSUD Prof. dr. Soekandar.....	433
Tabel 6. 1 Identifikasi Metadata Aplikasi	457
Tabel 6. 3 Aplikasi yang Masih Digunakan	459
Tabel 6. 5 Identifikasi Simbol Penggambaran Arsitektur Aplikasi	469
Tabel 7. 1 Identifikasi Metadata Perangkat Keras Server	496
Tabel 7. 2 Identifikasi Metadata Sistrm penghubung Layanan	497
Tabel 7. 3 Identifikasi Metadata Jaringan Intra Pemerintah.....	498
Tabel 7. 4 Identifikasi Metadata Perangkat Keras Jaringan	498
Tabel 7. 5 Usulan Jaringan Intra Pemerintah	505
Tabel 7. 6 Usulan Kebutuhan PC	513
Tabel 7. 7 Usulan Printer	516
Tabel 8. 1 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan	519
Tabel 8. 2 Atribut Metadata Manajemen Keamanan.....	520
Tabel 9. 1 Kesimpulan Tahapan Manajemen SPBE	578
Tabel 9. 2 Pemetaan SOTK Dinkominfo dan ITIL	583
Tabel 9. 3 Peran <i>Service Desk Tier 1</i> dan <i>Tier 2</i>	583
Tabel 9. 4 Penjelasan Tanggung Jawab untuk Setiap Peran	585
Tabel 9. 5 Pembagian Peran dalam Pengelolaan SI/TI Berdasarkan Jenis	585
Tabel 9. 6 Pengadaan SDM Kompetensi Pengelola TIK yang Terintegrasi,	590
Tabel 9. 7 Program peningkatan kompetensi perencanaan SPBE.....	597
Tabel 9. 8 Program peningkatan kompetensi rekayasa proses bisnis pemerintahan	598
Tabel 9. 9 Program peningkatan kompetensi pengelolaann TIK yang terintegrasi, aman, dan andal	599
Tabel 9. 10 Detail Program Yang Ada Untuk Kompetensi Manajemen Layanan Dan Fasilitas	601
Tabel 9. 11 Tugas dan fungsi yang direkomendasikan.....	602

(Halaman dikosongkan)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil Penilaian SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019.....	3
Gambar 3.1 Struktur Arsitektur Data dan Informasi SPBE.....	6
Gambar 5. 1 Struktur Arsitektur Proses Bisnis SPBE.....	80
Gambar 5. 2 Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan.....	87
Gambar 5. 3 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Sekretariat DPRD	92
Gambar 5. 4 Proses Bisnis Level 1 Utama Sekretariat DPRD	94
Gambar 5. 5 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Badan Pendapatan Daerah.....	98
Gambar 5. 6 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial, Level 0 Utama dan Level 1 Utama Badan Pendapatan Daerah	102
Gambar 5. 7 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	107
Gambar 5. 8 Proses Bisnis Level 1 Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	111
Gambar 5. 9 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	119
Gambar 5. 10 Proses Bisnis Level 1 Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	127
Gambar 5. 11 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.....	131
Gambar 5. 12 Proses Bisnis Level 1 Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	134
Gambar 5. 13 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	138
Gambar 5. 14 Proses Bisnis Level 1 Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	142
Gambar 5. 15 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah	145
Gambar 5. 16 Proses Bisnis Level 1 Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	148
Gambar 5. 17 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Bagian Pemerintahan	151
Gambar 5. 18 Proses Bisnis Level 1 Utama Bagian Pemerintahan.....	154
Gambar 5. 19 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Bagian Organisasi	157
Gambar 5. 20 Proses Bisnis Level 1 Utama Bagian Organisasi.....	159
Gambar 5. 21 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat.....	162
Gambar 5. 22 Proses Bisnis Level 1 Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat.....	164
Gambar 5. 23 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Bagian Hukum	166
Gambar 5. 24 Proses Bisnis Level 1 Utama Bagian Hukum.....	168
Gambar 5. 25 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.....	172
Gambar 5. 26 Proses Bisnis Level 1 Utama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	175
Gambar 5. 27 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Bagian Administrasi Pembangunan.....	177
Gambar 5. 28 Proses Bisnis Level 1 Utama Bagian Administrasi Pembangunan	179

Gambar 5. 29 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Bagian Umum .	181
Gambar 5. 30 Proses Bisnis Level 1 Utama Bagian Umum.....	182
Gambar 5. 31 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Bagian Perencanaan dan Keuangan	184
Gambar 5. 32 Proses Bisnis Level 1 Utama Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	185
Gambar 5. 33 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	187
Gambar 5. 34 Proses Bisnis Level 1 Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	188
Gambar 5. 35 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.....	193
Gambar 5. 36 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.....	199
Gambar 5. 37 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Pendidikan	204
Gambar 5. 38 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Pendidikan.....	212
Gambar 5. 39 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Kesehatan	219
Gambar 5. 40 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Kesehatan	226
Gambar 5. 41 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	231
Gambar 5. 42 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	236
Gambar 5. 43 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	242
Gambar 5. 44 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	247
Gambar 5. 45 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	254
Gambar 5. 46 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	260
Gambar 5. 47 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Lingkungan Hidup	267
Gambar 5. 48 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Lingkungan Hidup	274
Gambar 5. 49 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Pangan dan Perikanan	280
Gambar 5. 50 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Pangan dan Perikanan	286
Gambar 5. 51 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.....	294
Gambar 5. 52 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	302
Gambar 5. 53 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	309
Gambar 5. 54 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..	316
Gambar 5. 55 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	321
Gambar 5. 56 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	326
Gambar 5. 57 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	332
Gambar 5. 58 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.....	338

Gambar 5. 59 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	342
Gambar 5. 60 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	345
Gambar 5. 61 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Pertanian.....	355
Gambar 5. 62 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Pertanian.....	365
Gambar 5. 63 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan.....	372
Gambar 5. 64 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	378
Gambar 5. 65 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Sosial.....	382
Gambar 5. 66 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Sosial.....	386
Gambar 5. 67 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Tenaga Kerja	392
Gambar 5. 68 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Tenaga Kerja	397
Gambar 5. 69 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	404
Gambar 5. 70 Proses Bisnis Level 1 Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	410
Gambar 5. 71 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama INSPEKTORAT	411
Gambar 5. 72 Proses Bisnis Level 1 Utama INSPEKTORAT	412
Gambar 5. 73 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Satuan Polisi Pamong Praja.....	416
Gambar 5. 74 Proses Bisnis Level 1 Utama Satuan Polisi Pamong Praja.....	419
Gambar 5. 75 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama RSUD R.A Basoeni	422
Gambar 5. 76 Proses Bisnis Level 1 Utama RSUD R.A Basoeni	423
Gambar 5. 77 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Kecamatan.....	426
Gambar 5. 78 Proses Bisnis Level 1 Utama Kecamatan	428
Gambar 5. 79 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	430
Gambar 5. 80 Proses Bisnis Level 1 Utama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	432
Gambar 5. 81 Daftar Proses Bisnis Level 0 Manajerial dan Level 0 Utama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	436
Gambar 5. 82 Proses Bisnis Level 1 Utama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	439
Gambar 5. 83 Peta Relasi Kabupaten Mojokerto	441
Gambar 5. 84 Peta Lintas Fungsi Manajerial	443
Gambar 5. 85 Peta Lintas Fungsi Layanan Publik Kabupaten Mojokerto	444
Gambar 5. 86 Peta Lintas Fungsi Sektoral Bidang Kesehatan	445
Gambar 5. 87 Peta Lintas Fungsi Sektoral Perijinan.....	446
Gambar 5. 88 Peta Lintas Fungsi bidang Pengelolaan Barang Milik Negara.....	447
Gambar 5. 89 Peta Lintas Fungsi bidang Pengaduan Masyarakat	449
Gambar 5. 90 Peta Lintas Fungsi bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	450
Gambar 5. 91 Peta Lintas Fungsi bidang Pengawasan.....	451
Gambar 5. 92 Peta Lintas Fungsi bidang Kearsipan	451
Gambar 5. 93 Peta Lintas Fungsi bidang Akuntabilitas Kinerja	452

Gambar 6. 1 Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE.....	457
Gambar 6. 2 Presentasi Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE	458
Gambar 6. 3 Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Pembangunan.....	465
Gambar 6. 4 Jumlah Aplikasi Berdasarkan Fungsi Aplikasi	467
Gambar 6. 5 Komponen Usulan Aplikasi SPBE	468
Gambar 6. 6 Penjelasan Simbol Arsitektur Aplikasi.....	469
Gambar 7. 1 Struktur Arsitektur Infrastruktur SPBE	495
Gambar 7. 2 Topologi jaringan Kabupaten Mojokerto.....	500
Gambar 7. 3 Desain Usulan Sistem Infrastruktur dan Keamanan jaringan Diskominfo Kabupaten Mojokerto	503
Gambar 8. 1 Struktur Arsitektur Keamanan SPBE	518



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan, efisiensi dan efektifitas dalam pemberian layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik diperlukan Tata kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);

1 E 11 9

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/ M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

MSI

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna.
8. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
10. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

14/11/19

11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
12. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
13. Tim koordinasi SPBE pemerintah daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE.
14. *Government Chief Information Officer* Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disingkat GCIO adalah Kepala Dinas Kabupaten Mojokerto.
15. Basis Data (*Database*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
16. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
17. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
18. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
19. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
20. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
21. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
22. *Application Programming Interface* untuk selanjutnya disingkat API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
23. *Network Operation Center* untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
24. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.

MHJ

25. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
26. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat Internet.
27. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di *Data Center* yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastuktur.
28. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
29. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
30. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok
31. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
32. Infrastruktur TIK adalah infrastruktur mencakup perangkat keras pemrosesan informasi (*server, workstation, dan peripherals*, jaringan komunikasi dan *software* infrastruktur (sistem operasi, *tool system*).
33. *Government Service Bus* adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut GSB.
34. *User Interface* adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan penggunaanya untuk berinteraksi.
35. E-mail resmi adalah email yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu mail.mojokertokab.go.id.
36. *Source Code* yang selanjutnya disebut Kode Sumber/Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
37. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah internet dengan jangkauan mencakup wilayah lokal dengan menggunakan kabel UTP (*Unshielded Twisted-Pair*), *HUB, Router* dan sebagainya.
38. *Wide Area Network* yang selanjutnya disingkat WAN adalah internet dengan jangkauan luas dengan menggunakan jaringan *fiber optic* dari sirkuit telekomunikasi provider.
39. Repositori adalah struktur data yang menyimpan metadata untuk sekumpulan struktur bebas atau direktori.

1718

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah mewujudkan keterpaduan tata kelola SPBE yang terdiri dari :
 - a) perencanaan dan penganggaran SPBE;
 - b) pemetaan dan penetapan proses bisnis organisasi PD;
 - c) pengelolaan data dan Informasi;
 - d) pembangunan dan pengembangan Sistim informasi manajemen; dan
 - e) pemberian layanan kepada pengguna SPBE.

Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Efektivitas;
 - b. Keterpaduan;
 - c. Kestinambungan;
 - d. Efisiensi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Interoperabilitas; dan
 - g. Keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

15/10

- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB III

UNSUR SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Pelaksanaan SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Bupati melakukan reviu Arsitektur SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan :
 - a. perkembangan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur-unsur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 5

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (3) Bupati bersama Tim Koordinasi SPBE melakukan reviu Peta Rencana SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;

MTA

- c. perubahan Arsitektur SPBE;
- d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Rencana dan Anggaran Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 6

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran keuangan tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan berpedoman pada Arsitektur dan Peta rencana SPBE.
- (2) Untuk keterpaduan rencana SPBE, penyusunan rencana SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Untuk keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi pengelolaan keuangan.

Bagian Ketiga
Proses Bisnis
Pasal 8

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

MEPTD

Pasal 10

- (1) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Proses Bisnis dalam pelayanan SPBE wajib memiliki Standar layanan yang memberikan info kepada pengguna tata cara penggunaan layanan dan standar pelayanan.
- (3) Standar layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan jaminan kualitas pelayanan yang diharapkan serta prosedur pemberian layanan.

Bagian Keempat**Data dan Informasi****Pasal 11**

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan standar data dan metadata yang ditentukan ;
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya serta memperhatikan prinsip interoperabilitas.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi dalam pelaksanaan SPBE dengan mengacu pada Arsitektur SPBE;
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.

MSP + Q

- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
- a. Panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD);
 - c. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal PD tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar PD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

Pasal 14

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui :
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

1 E P 10

Pasal 15

- (1) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan aplikasi, dan/atau servernya di Pusat Data.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah harus terhubung dengan Pusat Data Nasional.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (4) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Colocation Server*, keamanan *server* dan *up-time server*.
- (5) PD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan *server*.
- (6) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan *server* sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 16

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 17

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan data.

Pasal 18

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

↳ EPI 2

Bagian Kelima
Infrastruktur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 19

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur meliputi :
 - a. Identifikasi dan pemilihan system,
 - b. Pembangunan system elektronik;
 - c. Pembangunan infrastruktur TIK;
 - d. Keamanan system TIK; dan
 - e. Perancangan data dan informasi.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router seluruh PD, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.

1 E P H Q

- b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur lingkup PD yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi PD setelah mendapatkan rekomendasi Dinas.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Pemerintah Daerah selain PD Mandiri TIK dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 21

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) digunakan oleh PD melalui aplikasi yang disediakan Pemerintah Pusat yang dikelola Dinas.

Bagian Keenam

Aplikasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kaidah *Software Development Life Cycle* dan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Berdasarkan tingkat skala penggunaan, aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD.
- (5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Dinas; dan

PLP HQ

- (6) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Dinas; dan
 - b. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus PD dapat dilakukan oleh PD setelah mendapat rekomendasi Dinas.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan oleh PD Pemilik Layanan.
- (8) Setiap PD dalam mengadakan, mengembangkan, dan mengelola aplikasi PD harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah www.mojokertokab.go.id.

Pasal 23

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :
 - a. dokumen *Software Development Life Cycle*;
 - b. dokumen manual penggunaan aplikasi;
 - c. *source code* dengan penjelasan fungsi masing – masing prosedur;
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di *Repository*.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya serta mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

M. F. H.

Bagian Ketujuh
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 24

- (1) Obyek keamanan SPBE mencakup keamanan sumber daya yang meliputi :
 - a. data dan informasi;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. aplikasi.
- (2) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 25

- (1) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, PD dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedelapan
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 26

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. Layanan publik berbasis elektronik.

MSR

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah yang meliputi layanan :
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah daerah.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Pasal 27

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PD yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ASPD

Pasal 28

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses yang menghubungkan dan menyatukan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah daerah .
- (3) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 29

- (1) PD yang menyelenggarakan layanan SPBE wajib membentuk meja layanan.
- (2) Meja layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. *single point of contact*;
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE.
- (4) Meja layanan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala PD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan dapat berkoordinasi dengan dinas.

PKPTD

BAB IV
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Manajemen SPBE meliputi :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 31

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen risiko SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MSI

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 32

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b bertujuan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah dalam keberlangsungan SPBE serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Ruang lingkup keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. Keamanan pada transaksi elektronik
- (4) Keamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk mengatur keamanan sumberdaya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (5) Keamanan pada sistem elektronik mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (6) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, PD wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas.
- (7) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mengatur keamanan pada setiap transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (8) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada PD wajib memiliki Sertifikat Elektronik.

Bagian Keempat
Manajemen Data
Pasal 33

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

/ K P T 2

- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Setiap PD wajib menjaga data update, akurasi, ketersediaan, akses serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.
- (4) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data dapat disimpan dalam Pusat Data yang dikelola Dinas.

Bagian Kelima

Manajemen Aset TIK

Pasal 34

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (4) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (5) Dinas melakukan pendataan dan melaporkan aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah kepada Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Daerah.
- (6) Penyediaan dan pengelolaan aset TIK yang dilaksanakan oleh Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 35

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

C S P H Q

- (3) Penyelenggara layanan SPBE harus memiliki sumber daya manusia sesuai dengan standard kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Sumber daya manusia penyelenggara SPBE dapat berasal dari ASN atau non ASN.
- (5) untuk mencukupi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (6) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
 - a. Menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. Bimbingan teknis; dan/atau
 - c. Pendidikan dan latihan teknis.
- (7) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di setiap penyelenggaraan layanan SPBE dilaksanakan oleh Dinas dan/atau lembaga pelaksana pendidikan dan latihan teknis.
- (8) Dinas harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai :
 - a. analis sistem;
 - b. pengelola jaringan;
 - c. pengelola layanan web;
 - d. pemrogram; dan
 - e. staf dukungan teknis.
- (9) Sumber daya manusia pada Dinas bertugas sebagai pelaksana tata kelola TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik di setiap penyelenggara layanan SPBE.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 36

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

MPTQ

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 37

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 38

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

MSPA

- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
AUDIT TIK
Pasal 39

- (1) Audit TIK terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.
- (5) Sebelum persiapan pelaksanaan audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB VI
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penyelenggara SPBE
Pasal 40

- (1) Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah adalah Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang terdiri atas :
 - a. Ketua; dan
 - b. Tim koordinasi;

Handwritten signature in blue ink.

- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Penyelenggara SPBE

Pasal 41

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a adalah Bupati.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua menyelenggarakan fungsi :
 - a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
 - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) Ketua dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat TIK untuk menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Pasal 42

Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;
- b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

Handwritten signature in blue ink.

- c. mengoordinasikan perencanaan SPBE di Pemerintahan Daerah;
- d. mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data;
- e. mengoordinasikan penganggaran SPBE di Pemerintahan Daerah;
- f. mengelola Arsitektur SPBE;
- g. mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi;
- h. mengoordinasikan penerapan keamanan SPBE;
- i. mengoordinasikan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah; dan
- j. mengoordinasikan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah;

BAB VII

PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan implementasi SPBE di Organisasi PD;
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peningkatan SDM dan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah guna peningkatan Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 44

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah.

15/10

- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Kearsipan

Pasal 45

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Organisasi PD di lingkup Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Organisasi PD dan/atau antar Organisasi PD di lingkup Pemerintah Daerah;

PSP 10

- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 46

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua PD.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai data kepegawaian di bidang manajemen kepegawaian dalam Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
 - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antar Perangkat Daerah di bidang manajemen kepegawaian;
- (5) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 47

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APD

- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik Organisasi PD dan/atau antar Organisasi PD di lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kelima

Pasal 48

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di lingkup Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 49

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE;
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE; dan
 - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

ASPA

KETENTUAN PERALIHAN**Pasal 50**

Aplikasi umum yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya aplikasi umum dari pemerintah.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 51**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

HIMAWAN ESTU BAGIJO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 244 /HK/416-012/2021
TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE terdiri dari:
a. Pembina SPBE;
b. Koordinator SPBE;
c. Wakil Koordinator SPBE;
d. Bidang Perencanaan SPBE;
e. Bidang Penganggaran SPBE;
f. Bidang Arsitektur SPBE;
g. Bidang Layanan Administrasi Pemerintahan;
h. Bidang Layanan Publik SPBE; dan
i. Sekretariat SPBE.
- KETIGA : Pembina SPBE sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf a bertugas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah;
- KEEMPAT : Koordinator dan Wakil Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b dan huruf c bertugas:
a. Mengkoordinasikan penerapan Kebijakan SPBE di Pemerintahan Daerah;
b. Mengkoordinasikan SPBE antar Perangkat Daerah, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain; dan
c. Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan antar Pemerintahan Daerah.
- KELIMA : Bidang Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf d bertugas:
a. Mengkoordinasikan perencanaan SPBE di Pemerintahan Daerah; dan
b. Mengkoordinasikan tata kelola data dan manajemen data.

- KEENAM : Bidang Penganggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf e bertugas mengkoordinasikan penganggaran SPBE di Pemerintahan Daerah.
- KETUJUH : Bidang Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf f bertugas:
- a. Mengelola Arsitektur SPBE;
 - b. Mengkoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan keamanan SPBE;
 - d. Melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan layanan wali data.;
 - e. Mengkoordinasikan Integrasi Proses Bisnis di Pemerintahan Daerah
- KEDELAPAN : Bidang Layanan Administrasi Pemerintahan SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf g bertugas mengkoordinasikan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah
- KESEMBILAN : Bidang Layanan Publik SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf h bertugas mengkoordinasikan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah;
- KESEPULUH : Sekretariat SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf i bertugas:
- a. Melaksanakan tugas-tugas administrasi Tim Koordinasi SPBE;
 - b. Mendokumentasikan penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
 - c. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi SPBE.
- KESEBELAS : Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b dapat membentuk Tim Evaluator Internal dalam rangka evaluasi mandiri SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 244 /HK/416-012/2021
TANGGAL 2 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Mojokerto
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
3.	Wakil Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
4.	Bidang Perencanaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mojokerto
5.	Bidang Penganggaran	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto
6.	Bidang Arsitektur SPBE	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
7.	Bidang Layanan Administrasi Pemerintahan	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto
8.	Bidang Layanan Publik	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
9.	Anggota	a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto; b. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto; c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto; d. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto; e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto; f. Inspektur Kabupaten Mojokerto; dan g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
10.	Sekretariat Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Sekretariat	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto a. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;

		<p>b. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;</p> <p>c. Kepala Bidang Pembinaan Aparatur Sipil Negara, Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto;</p> <p>d. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto; dan</p> <p>e. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.</p>
--	--	--

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telepon: (0321) 321950 Faks. (0321) 327373
Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

Mojokerto, 21 Juli 2021

Nomor : 188.45/749/416-012/2021

K e p a d a :
Yth. Ibu Bupati Mojokerto
di_
MOJOKERTO

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Permohonan Rancangan Keputusan Bupati Mojokerto
Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Catatan : Telah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah Pengusul dan dicermati oleh Bagian Hukum Setda. Kabupaten Mojokerto.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Untuk mohon tanda tangan : Ibu Bupati Mojokerto.
DISPOSISI PIMPINAN :

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,**


Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH., MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640319 198903 1 001



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan telah disusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2018 tentang Standar Aplikasi Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 98 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN MOJOKERTO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Peta Rencana (Roadmap) SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
8. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
9. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media elektronik.
11. Layanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sistem Informasi adalah sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional Perangkat Daerah, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi.
13. Infrastruktur Teknologi Informasi adalah sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform (tempat menjalankan perangkat lunak atau aplikasi) untuk aplikasi dan sistem informasi di Pemerintah Daerah.
14. Sumber Daya Manusia Bidang TIK adalah sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki keahlian dibidang TIK yang bekerja di Pemerintah Daerah.
15. Tata Kelola Teknologi Informasi adalah salah satu bagian dari tata kelola Pemerintah Daerah yang terfokus pada sistem teknologi informasi (TI) serta manajemen kinerja dan risikonya.

16. Anggaran bidang TIK adalah anggaran pembangunan di Perangkat Daerah yang terkait dengan bidang TIK.
17. Pengelolaan Permasalahan Bidang TIK adalah prosedur dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan di Perangkat Daerah yang terkait dengan TIK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Arsitektur SPBE ini meliputi, Perencanaan Layanan Publik, Perencanaan Sistem Informasi, Perencanaan Infrastruktur Teknologi Informasi, Perencanaan Sumber Daya Manusia bidang TIK, Perencanaan Tata Kelola Teknologi Informasi, Perencanaan Anggaran bidang TIK dan Perencanaan Pengelolaan Permasalahan Bidang TIK.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pembangunan dan pengembangan sistem TIK.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. membangun dan mengembangkan sistem layanan publik berbasis TIK;
 - b. membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi;
 - c. membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi;
 - d. merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dalam bidang TIK;
 - e. membangun dan mengembangkan tata kelola teknologi informasi; dan
 - f. mengelola permasalahan dalam bidang TIK.

BAB IV ARSITEKTUR SPBE

Pasal 4

- Arsitektur SPBE meliputi kegiatan yang mencakup :
- a. pembangunan dan pengembangan sistem layanan publik berbasis TIK;
 - b. pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi;

- c. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
- d. perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dalam bidang TIK;
- e. pembangunan dan pengembangan tata kelola teknologi informasi;
- f. penyusunan anggaran dalam bidang TIK; dan
- g. pengelolaan permasalahan dalam bidang TIK.

Pasal 5

Dokumen Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk buku sebanyak 3 (tiga) buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali berdasarkan:

- a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
- b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
- c. Perubahan pada unsur SPBE yang meliputi:
 - 1. Rencana dan anggaran SPBE;
 - 2. Proses bisnis SPBE;
 - 3. Data dan informasi;
 - 4. Infrastruktur SPBE;
 - 5. Aplikasi SPBE;
 - 6. Keamanan SPBE; dan
 - 7. Layanan SPBE.
- d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Arsitektur SPBE ini mulai dilaksanakan Tahun 2020-2023.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 6 Agustus 2020

BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 49



DATA PENDUKUNG KABUPATEN MOJOKERTO TERHADAP LPPD TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA KUNCI Urusan Persandian

1) **IKK Outcome** : Tingkat keamanan informasi pemerintah

Konsep/Definisi : Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota

IKK Output :

- 1) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan.
- 2) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.
- 3) Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah.
- 4) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan.

BAB XXV
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERSANDIAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota		
Rumus	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\% \cdot \frac{1}{5} \times 100\%$		20,00%
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI ▪ Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi ▪ Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata kelola keamanan informasi ▪ Pengelolaan resiko keamanan informasi ▪ Kerangka kerja keamanan informasi ▪ Pengelolaan aset informasi ▪ Teknologi dan keamanan informasi ▪ Indeks KAMI dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara selfassessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN ▪ Hasil verifikasi dapat berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun ▪ Daerah yang belum pernah melaksanakan/mengukur Indeks KAMI dapat membuat surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		
	Dokumen GAP Analisis ISO 27001		

- Penjelasan IKK Output


IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
Tingkat keamanan informasi pemerintah	1) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\% \cdot \frac{0}{1} \times 100\%$ <p>Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara</p> <p>Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis.</p>	0,00%	Pemda sudah memiliki perangkat tapi belum terimplementasikan

	<p>2) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.</p>	<p>Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian</p> $\frac{10}{244} \times 100\%$ <p>Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penvangkalan maupun gabungan dari layanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kehiikan kegiatan perencanaan tanggung iawah praktek Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai.</p>	<p>4,10%</p>	<p>siskeudes,antik,sikh,mojopahitshoppin gcenter,sanapati,klikmojo,e-monev,sso,e-mover,mojokertokab)</p>
	<p>3) Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</p>	<p>Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</p> $\frac{0}{0} \times 100\%$ <p>Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan</p>	<p>0,00%</p>	<p>sda.</p>

	4) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik diamankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100\% = \frac{15}{18} \times 100\%$ <p>Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengangkan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetankan dalam suatu keputusan Kepala PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan teraelar beberapa JKS. JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi</p>	83,33%	Data dukung terlampir
--	---	---	--------	-----------------------

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika




 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda/IVc



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

1) **IKK Outcome** : Tingkat keamanan informasi pemerintah

Penjelasan IKK Outcome :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto di tahun 2021 belum melaksanakan Pengukuran Indeks KAMI untuk tingkat keamanan informasi pemerintah. Hal ini dikarenakan anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan Indeks KAMI bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2021, sedangkan waktu penetapan APBD Perubahan mengalami kemunduran yaitu pada akhir oktober 2021 yang berakibat singkatnya/ tidak cukupnya waktu untuk pelaksanaan kegiatan sehingga pengukuran Indeks KAMI tidak jadi dilaksanakan.

Akan tetapi di tahun 2021 telah dilaksanakan GAP Analisis ISO : 27001 : 2013 pada ruang lingkup performa keamanan sistem informasi pada operasional layanan yang bisa mewakili 1 area dari 5 area penilaian pengamanan informasi yaitu pada area **teknologi dan keamanan informasi**.

Pengukuran Indeks KAMI akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan penganggaran pada APBD Tahun 2022. Berikut kami lampirkan DPA Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Tahun 2022.

Data Pendukung :

- DPA Tahun 2022 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (terlampir)
- Softcopy hasil pelaksanaan kegiatan GAP Analisis ISO : 27001 : 2013 (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 046/199/416-113/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto, dengan ini menerangkan bahwa :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto di tahun 2021 belum melaksanakan Pengukuran Indeks KAMI untuk tingkat keamanan informasi pemerintah. Pengukuran Indeks KAMI akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan penganggaran pada APBD Tahun 2022, sedangkan untuk Audit Sistem Elektronik/Asset Informasi direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan penganggaran pada APBD Perubahan Tahun 2022. Berikut kami lampirkan DPA Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Tahun 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Mojokerto, 7 Februari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

LAPORAN KEGIATAN



Kegiatan :

**Gap Analisis ISO 27001 dan
Training Awareness ISO 27001**

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1. LATAR BELAKANG	Error! Bookmark not defined.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	Error! Bookmark not defined.
1.3. RUANG LINGKUP	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
METODOLOGI	Error! Bookmark not defined.
2.1. Tentang ISO 27001	Error! Bookmark not defined.
2.2. Metodologi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Gap Analisis ISO 27001 dan Training Awareness ISO 27001 Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Perencanaan.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Pelaksanaan.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Pembuatan Laporan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
JADWAL KEGIATAN	Error! Bookmark not defined.
3.1. Jadwal Kegiatan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PELAKSANAAN PEKERJAAN	Error! Bookmark not defined.
4.1. Perencanaan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Penentuan Ruang Lingkup	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Penentuan Metode.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Pembuatan Jadwal.....	Error! Bookmark not defined.
4.2. Pelaksanaan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Interview	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Studi Dokumen.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.3 Studi Implementasi Dokumen & Observasi Lapangan.....	Error! Bookmark not defined.
defined.	
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
5.1. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Table 1 Jadwal Kegiatan	Error! Bookmark not defined.
Table 2 Hasil Gap Analisis Pasal ISO 27001:2013 ruang lingkup Operasional Aplikasi	5
Table 3 Hasil Gap Analisis Annex ISO 27001:2013 ruang lingkup Operasional Aplikasi	Error! Bookmark not defined.
Table 4 Hasil Gap Analisis Pasal ISO 27001:2013 ruang lingkup Operasional Sandi	Error! Bookmark not defined.
Table 5 Hasil Gap Analisis Annex ISO 27001:2013 ruang lingkup Operasional Sandi	Error! Bookmark not defined.
Table 6 Hasil Gap Analisis Pasal ISO 27001:2013 ruang lingkup Data Center	31
Table 7 Hasil Gap Analisis Annex ISO 27001:2013 ruang lingkup Data Center	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hubungan antar keluarga ISO 27001	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2 Proses Interview dengan personil terkait	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3 Seminar Gap Analisis dan Training Awareness ISO 27001:2013	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4 Daftar SOP yang dimiliki	Error! Bookmark not defined.

Table 1 Hasil Gap Analisis Pasal ISO 27001:2013 ruang lingkup Operasional Aplikasi

NO	PASAL	URAIAN	DOKUMEN				IMPLEMENTASI				HASIL ASSESSMENT	SARAN PERBAIKAN	
			TIDAK ADA	ADA, SEBAGIAN KECIL SESUAI	ADA, SEBAGIAN BESAR SESUAI	SESUAI	TIDAK IMPLEMENTASI	IMPLEMENTASI SEBAGIAN KECIL	IMPLEMENTASI SEBAGIAN BESAR	KONSISTEN IMPLEMENTASI			
1	PASAL 4 HAL-HAL TERKAIT ORGANISASI												
	4,1	Pemahaman terkait organisasi dan semua hal yang terkait konteks											
	a	Tentukan isu eksternal yang relevan dengan tujuannya dan yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen keamanan informasinya.		x				x				Organisasi Belum menentukan isu eksternal dan isu internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	1. Menentukan isu-isu internal & eksternal yang relevan dengan tujuannya dan yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen keamanan informasinya. 2. Membuat proses bisnis, terutama sesuai dengan ruang lingkup (misal : ruang lingkup ISO 27001:2013 tentang data center, maka didetailkan proses bisnis pada data center)
	b	Tentukan isu internal yang relevan dengan tujuannya dan yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen keamanan informasinya.		x				x					
	4,2	Pemahaman terkait harapan dan kebutuhan pihak terkait											

	a	Penentuan pihak terkait yang relevan terhadap sistem manajemen keamanan informasi	x				x				Belum menentukan pihak-pihak yang terkait dengan Sistem Keamanan Manajemen Informasi dan belum dilakukan identifikasi persyaratan terhadap pihak-pihak terkait	1. Penentuan pihak terkait yang relevan terhadap sistem manajemen keamanan informasi
	b	Identifikasi persyaratan pihak terkait (perijinan, peraturan, kontrak)	x				x				Belum teridentifikasi persyaratan pihak terkait (perijinan, peraturan, kontrak)	2. Identifikasi persyaratan pihak terkait (perijinan, peraturan, kontrak)
	4,3	Penentuan ruang lingkup penerapan SMKI									Belum ditentukan ruang lingkup Sistem Manajemen Kamanan Informasi	Menentukan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Dapat diperoleh dari Hasil Gap Analisa
		Saat menentukan ruang lingkup ini, organisasi harus mempertimbangkan:										===
	a	Isu eksternal dan internal	x					x			Belum nenentukan isu Internal dan Eksternal	Untuk ruang lingkup disarankan, apabila ingin melakukan implementasi hingga sertifikasi ISO 27001:2013 kurang dari 12 Bulan adalah "Supporting Data Center" atau "
	b	Peraturan terkait		x				x			Peraturan terkait ada namun belum terimplementasikan	
	c	Tampilan dan keterikatan antara aktifitas organisasi dengan organisasi lain		x				x			Koordinasi dengan organisasi lain ada namun prosedur tidak dijalankan.	
	4,4	Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus:										Membuat kebijakan tentang penetapan, penerapan

	a	Ditetapkan	x								Belum pernah menetapkan, menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Keamanan Informasi	dan pemeliharaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi serta dilakukan Pengesahan dan Mensosialisasikan Kebijakan tersebut
	b	Diterapkan	x								Belum pernah menetapkan, menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
	c	Dipelihara	x								Belum pernah menetapkan, menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
POINT			0	4	0	0	0	5	0	0		
			4			33%	5			42%		
2	PASAL 5 KEPEMIMPINAN											
	5,1	Top Manajemen harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan:									-	Top Manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi melalui melakukan meeting berkala, evaluasi berkala, tinjauan manajemen, dll, untuk :
	a	Memastikan kebijakan keamanan informasi dan tujuan keamanan informasi ditetapkan dan sesuai dengan arahan strategis organisasi;	x					x			Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Namun sudah ada rencana penerapan.	1. Memastikan kebijakan keamanan informasi dan tujuan keamanan informasi ditetapkan dan sesuai dengan arahan strategis organisasi;

	b	Memastikan integrasi persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ke dalam proses organisasi	x				x				Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	2. Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen keamanan informasi ke dalam proses organisasi
	c	Memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi tersedia		x				x			Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Sudah ada SDM yang Berkompetensi.	3. Mengkomunikasikan pentingnya manajemen keamanan informasi yang efektif dan sesuai dengan persyaratan sistem manajemen keamanan informasi
	d	Mengkomunikasikan pentingnya manajemen keamanan informasi yang efektif dan sesuai dengan persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	x				x				Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	4. Memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi mencapai hasil yang diinginkan;
	e	Memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi mencapai hasil yang diinginkan		x				x			Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	5. Mengarahkan dan mendukung tim SMKI untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen keamanan informasi;

	f	Mengarahkan dan mendukung orang untuk berkontribusi pada keefektifan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	x				x				Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	6. Mendukung peran manajemen lain yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinan mereka sesuai dengan bidang tanggung jawab mereka
	g	Membuat perencanaan perbaikan secara berkelanjutan		x				x			Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	7. Membuat perencanaan berkelanjutan
	h	Mendukung peran manajemen lain yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinan mereka sesuai dengan bidang tanggung jawab mereka	x				x				Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.	8. Mendukung peran manajemen lain yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinan mereka sesuai dengan bidang tanggung jawab mereka
	5,2	Top Manajemen harus menetapkan kebijakan keamanan informasi									Top Manajemen belum menetapkan kebijakan keamanan informasi serta belum melakukan dokumentasi kebijakan, mengkomunikasikan, menyediakan untuk pihak terkait dan melakukan kaji ulang.	Membuat Kebijakan Keamanan Informasi yang didalamnya : sesuai dengan tujuan organisasi, tujuan keamanan informasi, komitmen memenuhi persyaratan terkait keamanan informasi, komitmen meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi secara berkelanjutan.serta mendokumentasi kebijakan, mengkomunikasikan, menyediakan untuk pihak terkait dan melakukan kaji ulang.
	a	Sesuai dengan tujuan organisasi	x				x				Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	
	b	Menyediakan kerangka kerja untuk	x				x				Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	

		menetapkan tujuan keamanan informasi											
	c	Komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku terkait dengan keamanan informasi	x				x					Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	
	d	Komitmen untuk terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi	x				x					Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	
		Kebijakan keamanan informasi harus (didokumentasikan, dikomunikasikan, tersedia untuk pihak terkait dan dikaji ulang)	x				x					Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	
	e	Harus didokumentasikan	x				x					Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	
	f	Harus dikomunikasikan	x				x					Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	
	g	Harus tersedia untuk semua pihak terkait	x				x					Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	
	h	Harus dikaji ulang	x										
	5,3	Fungsi, wewenang dan tanggungjawab organisasi										Organisasi belum menentukan struktur organisasi, jobdesk dan wewenang terkait kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	1. Membuat struktur organisasi serta jobdesk terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi 2. Menunjuk penanggung jawab/koordinator keamanan informasi dan membuat Struktur Keamanan Informasi 3. Menunjuk penanggung jawab/koordinator dan Tim Audit Internal, 4. Membuat Penanggung jawab /koordinator Tim Business Continuity Manajemen dan Insiden Respon Plan
		Manajemen puncak harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk :											
	a	Memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan persyaratan standar ini	x				x						

	b	Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi kepada Top Manajemen	x				x					5. Semua tim diatas disahkan
POINT			0	3	0	0	0	4	0	0		
			3			33%	4			44%		
3	PASAL 6 PERENCANAAN											
	6,1	Tindakan terkait peluang dan resiko										
	6.1.1	Saat merencanakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, organisasi harus mempertimbangkan isu-isu yang disebutkan dalam 4.1 dan persyaratan yang disebutkan dalam 4.2 dan menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani:										
	a	Memastikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dapat mencapai hasil yang diharapkan	x				x				Belum pernah dilakukan identifikasi analisa resiko berdasarkan bagian/divisi pemilik resiko terkait Sistem Manajemen Keamanan linformasi	1. Menentukan identifikasi analisa resiko / Risk Assessment berdasarkan tiap pemilik resiko 2. Melakukan penanganan analisa resiko terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
	b	Mencegah, atau mengurangi, efek yang tidak diinginkan	x				x				Belum pernah dilakukan identifikasi analisa resiko berdasarkan bagian/divisi pemilik resiko terkait Sistem Manajemen Keamanan linformasi	
	c	Pencapaian perbaikan yang berkelanjutan	x				x				Belum pernah dilakukan identifikasi analisa resiko berdasarkan bagian/divisi pemilik resiko terkait Sistem Manajemen Keamanan linformasi	

		Organisasi harus merencanakan :										
	d	Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang	x				x					Belum pernah dilakukan identifikasi analisa risiko berdasarkan bagian/divisi pemilik risiko terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
	e	Bagaimana untuk :										
		1. Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam proses Sistem Manajemen Keamanan Informasi	x				x					
		2. Mengevaluasi keefektifan tindakan ini	x				x					
	6.1.2	Pengukuran risiko keamanan informasi										Belum menentukan pengukuran risiko berdasarkan pemilik risiko terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
		Organisasi harus menentukan dan menerapkan proses penilaian risiko keamanan informasi										
	a	Menetapkan dan memelihara kriteria risiko keamanan informasi yang mencakup										
		1. Kriteria penerimaan risiko	x				x					Tidak ada Kriteria penerimaan risiko
		2. Kriteria untuk melakukan penilaian risiko keamanan informasi	x				x					Tidak ada Kriteria untuk melakukan penilaian risiko keamanan informasi
												1. Organisasi harus menentukan pengukuran risiko berdasarkan pemilik risiko 2. Organisasi harus menentukan kebertrimaan risiko terkait SMKI 3. Menetapkan Sasaran dan Tujuan dari Hasil Analisa Risiko

	b	Memastikan bahwa penilaian risiko keamanan informasi yang berulang menghasilkan hasil yang konsisten, valid dan sebanding	x				x			Masih belum dapat Memastikan bahwa penilaian risiko keamanan informasi yang berulang menghasilkan hasil yang konsisten, valid dan sebanding
	c	Mengidentifikasi risiko keamanan informasi								
		1. Menerapkan proses penilaian risiko keamanan informasi untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan hilangnya kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi dalam ruang lingkup sistem manajemen keamanan informasi.	x				x			Belum ada proses penilaian risiko terhadap SMKI
		2. Identifikasi pemilik risiko	x				x			Belum ditetapkan pemilik risiko
	d	Menganalisis risiko keamanan informasi								
		1. Menilai konsekuensi potensial yang akan terjadi jika risiko yang diidentifikasi dalam 6.1.2 c) 1) terwujud	x				x			Belum ada analisa risiko keamanan informasi
		2. Menilai kemungkinan realistis terjadinya risiko yang diidentifikasi dalam 6.1.2 c) 1)	x				x			Belum ada analisa risiko keamanan informasi
		3. Menentukan level risiko	x				x			Belum ada analisa risiko keamanan informasi
	e	Mengevaluasi risiko keamanan informasi								
		1. Bandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang	x				x			Belum ada evaluasi risiko keamanan informasi

		ditetapkan dalam 6.1.2 a)										
		2. Memprioritaskan risiko yang dianalisis untuk penanganan risiko	x				x					Belum ada evaluasi risiko keamanan informasi
	6.1.3	Penanganan resiko Keamanan informasi										Organisasi belum mempunyai prosedur tentang penanganan resiko keamanan informasi
	a	Pilih opsi penanganan risiko keamanan informasi yang sesuai, dengan memperhitungkan hasil penilaian risiko	x				x					
	b	Tentukan semua kontrol yang diperlukan untuk menerapkan opsi penanganan risiko keamanan informasi yang dipilih	x				x					Organisasi belum mempunyai prosedur tentang penanganan resiko keamanan informasi
	c	Bandingkan kontrol yang ditentukan pada 6.1.3 b) di atas dengan yang ada di Annex A dan pastikan tidak ada kontrol yang diperlukan	x				x					Organisasi belum mempunyai prosedur tentang penanganan resiko keamanan informasi
	d	Menghasilkan pernyataan penerapan yang berisi kontrol yang diperlukan (lihat 6.1.3 b dan c) dan justifikasi untuk inklusi, apakah dilakukan atau tidak, dan justifikasi untuk pengecualian kontrol dari Annex A	x				x					Organisasi belum mempunyai prosedur tentang penanganan resiko keamanan informasi
												1. Menentukan analisa risiko sesuai dengan proses yang dijadikan ruang lingkup di Sistem Manajemen Keamanan Informasi. 2. Mengambil penanganan risiko pada kontrol yang ditentukan pada Standar ISO 27001:2013. 3. Membuat Pernyataan Pemberlakuan dari Kontrol yang ditetapkan oleh ISO 27001:2013. 4. Menetapkan pemilik risiko sampai ke personal.

	e	Merumuskan rencana penanganan risiko keamanan informasi	x				x				Organisasi belum mempunyai prosedur tentang penanganan risiko keamanan informasi	
	f	Memastikan pengesahan dari pemilik risiko (PIC) dan keterberterimaan dari risiko sisa	x				x				Organisasi belum mempunyai prosedur tentang penanganan risiko keamanan informasi	
	6,2	Tujuan keamanan informasi dan perencanaan pencapaiannya									Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	Membuat Dokumentasi Tujuan Keamanan Informasi, yang konsisten dengan kebijakan, terukur, terkait dengan risiko, mengkomunikasikan tujuan tersebut dan selalu diperbaharui secara berkala.
		Organisasi harus menetapkan tujuan keamanan informasi pada fungsi dan tingkat yang relevan. Tujuan keamanan informasi harus										
	a	Tujuan SMKI harus konsisten dengan kebijakan SMKI	x				x				Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	
	b	Tujuan SMKI harus terukur	x				x				Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	

c	Tujuan SMKI harus terkait dengan daftar resiko	x								Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi
d	Tujuan SMKI harus dikomunikasikan	x								Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi
e	Tujuan SMKI harus termuktakhir (update)	x								Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi
	Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi mengenai tujuan keamanan informasi Saat merencanakan bagaimana mencapai tujuan keamanan informasinya, organisasi harus menentukan									
f	Merencanakan apa yang akan dilakukan	x								Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi
g	Merencanakan sumberdaya yang dibutuhkan	x								Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi

	h	Merencanakan pihak yang bertanggungjawab	x					x				Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	
	i	Merencanakan target waktu penyelesaian	x					x				Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	
	j	Merencanakan bagaimana hasil dievaluasi	x					x				Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	
POINT			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0			0%	0			0%			
4	PASAL 7 PENDUKUNG												
	7,1	Sumber Daya											
		Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, implementasi, pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen keamanan informasi	x					x				Sumber Daya sudah di sediakan, namun belum ada ketentuan tertulis tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, implementasi, pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen keamanan informasi	Menyiapkan dan merinci sumber daya yang dibutuhkan (baik sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan ataupun sumber daya peralatan) (detail sumber daya dapat diperoleh dari analisa risiko dan rencana perbaikan) , menyediakan sumberdaya yang telah di identifikasi
	7,2	Kompetensi											

	a	Tentukan kompetensi yang diperlukan orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendalinya yang mempengaruhi kinerja keamanan informasinya (persyaratan jabatan)	x								Sudah ada sebagian kecil kompetensi yang diperlukan orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendalinya yang mempengaruhi kinerja keamanan informasinya (persyaratan jabatan)	Membuat Matrik kompetensi terutama tentang keamanan informasi, untuk menentukan kompetensi yang diperlukan, memastikan personil sudah kompeten, mengambil tindakan jika personil belum kompeten dan melakukan evaluasi personil
	b	Memastikan bahwa orang-orang ini kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai	x								Belum ada Pelatihan Terkait Keamanan Informasi	Melakukan Training terkait keamanan informasi (Awareness ISO 27001:2103, Audit Internal ISO 27001:2103, Sertifikasi teknis sesuai keahlian dll)
	c	Jika memungkinkan, mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi keefektifan tindakan yang dilakukan	x								Belum ada evaluasi kompetensi	
	d	Bukti dokumen pendukung kompetensi	x								Belum ada bukti pendukung Kompetensi	
	7,3	Kepedulian										
		Orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi harus sadar									Belum melakukan kesadaran tentang kebijakan keamanan informasi, kontribusi personil terhadap efektifitas keamanan informasi dan implikasinya. Belum melakukan kesadaran tentang keamanan informasi.	
	a	Kebijakan keamanan informasi	x				x				Kebijakan Belum ada	1. Melakukan sosialisasi kebijakan yang sudah

	b	Kontribusi mereka terhadap efektivitas sistem manajemen keamanan informasi, termasuk manfaat kinerja keamanan informasi yang lebih baik	x				x				Masih Belum ada kontribusi karena belum ada Kebijakan	dibuat, melakukan kesadaran peran dan dampak personil dalam penerapan SMKI melalui induksi berkala, planfet, berita dll)
	c	Implikasi tidak sesuai dengan persyaratan sistem manajemen keamanan informasi	x				x				Masih belum bisa diterapkan	
	7,4	Komunikasi										
		Organisasi harus menentukan kebutuhan akan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen keamanan informasi termasuk										
	a	Tentang apa yang harus dikomunikasikan	x				x				Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait Komunikasi	1. Membuat identifikasi (list) dan ketentuan tentang komunikasi, apa klasifikasi informasi yang akan dikomunikasikan, kapan waktunya berkomunikasi, dengan siapa berkomunikasi dan dimana komunikasi dilakukan. 2. Membuat list semua kontak internal 3. Membuat list semua kontak eksternal (vendor, Instansi Terkait dan pihak terkait lainnya)
	b	Kapan harus berkomunikasi	x				x				Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait Komunikasi	
	c	Dengan siapa berkomunikasi	x				x				Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait Komunikasi	
	d	Siapa yang harus berkomunikasi dan	x				x				Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait Komunikasi	
	e	Proses dimana komunikasi harus dilakukan	x				x				Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait Komunikasi	
	7,5	Informasi terdokumentasi										
	7.5.1	umum										
		Sistem manajemen keamanan informasi organisasi harus mencakup										

	a	Informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh Standar Internasional ini;	x				x				Belum ada informasi terdokumentasi terhadap SMKI	1. Membuat kebijakan tentang adanya informasi terdokumentasi yang terkait dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
	b	Informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh organisasi diperlukan untuk efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi	x				x				Belum ada informasi terdokumentasi terhadap SMKI	2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan informasi terdokumentasi yang berkaitan dengan tujuan organisasi yang relevan terhadap Sistem Manajemen Keamanan Informasi
	7.5.2	Membuat dan memperbarui										
		Saat membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, organisasi harus memastikan yang sesuai										
	a	Identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, pengarang, atau nomor referensi);					x				Belum ada ketentuan Dokumen informasi terdokumentasi yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	1. Membuat ketentuan tentang informasi terdokumentasi
	b	Format (misalnya bahasa, versi perangkat lunak, grafik) dan media (misalnya kertas, elektronik)					x				Belum ada ketentuan Dokumen informasi terdokumentasi yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	2. Menentukan Identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, pengarang, atau nomor referensi)
	7,5,3	Pengendalian informasi terdokumentasi										
		Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan oleh Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan dengan Standar Internasional ini harus										

		dikontrol untuk memastikan											
	a	Tersedia dan cocok untuk digunakan, dimana, dan kapan dibutuhkan	x				x					Belum ada pengendalian terhadap informasi terdokumentasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	1. Membuat prosedur tentang pengendalian terhadap informasi terdokumentasi 2. Membuat tingkat kerahasiaan terhadap informasi terdokumentasi 3. Menentukan lokasi dan tempat penyimpanan informasi terdokumentasi 4. Melakukan kontrol perubahan terhadap perubahan informasi terdokumentasi (versioning)
	b	Itu cukup dilindungi (misalnya dari hilangnya kerahasiaan, penggunaan yang tidak tepat, atau kehilangan integritas)	x				x					Belum ada pengendalian terhadap informasi terdokumentasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
		Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, organisasi harus menangani kegiatan berikut, sebagaimana berlaku											
	c	Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan	x				x					Belum ada pengendalian terhadap informasi terdokumentasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
	d	Penyimpanan dan pelestarian, termasuk pelestarian keterbacaan	x				x					Belum ada pengendalian terhadap informasi terdokumentasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
	e	Kontrol perubahan (misal: kontrol versi);	x				x					Belum ada pengendalian terhadap informasi terdokumentasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	

	f	Retensi dan disposisi	x				x				Belum ada pengendalian terhadap informasi terdokumentasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
POINT			0	2	0	0	0	5	0	0		
			2		10%		5			24%		
5	PASAL 8 Operasional											
	8,1	Perencanaan dan pengendalian operasional										
		Organisasi harus merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan keamanan informasi, dan untuk melaksanakan tindakan yang ditentukan dalam 6.1. Organisasi juga harus menerapkan rencana untuk mencapai tujuan keamanan informasi yang ditetapkan dalam 6.2		x			x				Organisasi belum merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. SOP yang ada Hak Akses Fisik dan Logic namun belum diimplementasikan	1. Membuat sasaran dan program keamanan informasi, untuk tindak lanjut dari tujuan keamanan informasi, dan melakukan update berkala pada sasaran dan program tersebut disertai dengan bukti pelaksanaan
		Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana		x			x				Masih Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait	2. Menyimpan seluruh bukti informasi terdokumentasi yang sudah ditentukan
		Organisasi harus mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau kembali konsekuensi perubahan yang tidak diinginkan, mengambil tindakan untuk mengurangi	x				x				Masih Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait	3. Melakukan revisi pada prosedur perubahan dan membuat ketentuan/klasifikasi level perubahan dan ketentuan persetujuan personil terkait. Mendokumentasikan semua perubahan pada sistem kritikal (terutama

		dampak buruk yang diperlukan.									yang ada pada data center)	
		Organisasi harus memastikan bahwa proses alih daya ditentukan dan dikendalikan	x				x				Masih Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait	
	8,2	Penilaian Resiko keamanan informasi										
		Organisasi harus melakukan penilaian risiko keamanan informasi pada interval yang direncanakan atau bila ada perubahan signifikan yang diajukan atau terjadi, dengan mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan dalam 6.1.2 a).	x				x				Belum pernah dilakukan penilaian resiko terkait keamanan informasi	1. Melakukan identifikasi resiko terhadap tiap divisi
		Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi tentang hasil penilaian risiko keamanan informasi	x				x				Masih Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait	2. Menentukan pemilik resiko yang terkait dan Menentukan Penilaian dan Kebertrimaan resiko
	8,3	Pengendalian Resiko keamanan informasi										
		Organisasi harus menerapkan rencana penanganan risiko keamanan informasi	x				x				Belum ada pengendalian terhadap resiko keamanan informasi	Membuat pengendalian terhadap semua resiko terkait SMKI
		Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi tentang hasil penanganan risiko keamanan informasi	x				x				Belum ada pengendalian terhadap resiko keamanan informasi	Membuat pengendalian terhadap semua resiko terkait SMKI
POINT			0	2	0	0	0	0	0	0		
			2		22%		0		0%			
PASAL 9 EVALUASI PEFORMA												

9,1	Monitoring, measurement, analysis and evaluation										
	Organisasi harus mengevaluasi kinerja keamanan informasi dan efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi										
	Organisasi harus menentukan:										
a.	Apa yang perlu dipantau dan diukur, termasuk proses dan kontrol keamanan informasi	x					x			Belum ada informasi terkait apa saja yang perlu dipantau, diukur, dianalisis, dan dievaluasi dari proses pengembangan dan pengelolaan aplikasi Belum ada monitoring berkala.	1. Membuat ketentuan parameter apa saja yang akan di monitoring, ukur, analisa dan evaluasi (log akses / perubahan aplikasi, bandwidth untuk performa, log server, dll) 2. Membuat ketentuan kapan akan di monitoring, ukur, analisa dan evaluasi
b.	Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, sebagaimana mestinya, untuk memastikan hasil yang valid	x					x			Belum ada SOP cara pemantauan, pengukuran, analisa, dan evaluasi. Masih dilakukan berdasarkan kompetensi personil.	2. Membuat SOP cara pemantauan, pengukuran, analisa, dan evaluasi atau membuat matriks kompetensi dari keahlian personil dengan item yang dipantau.
c.	Kapan monitoring dilakukan?	x				x				Masih belum ada ketentuan	Membuat ketentuan kapan akan di monitoring, ukur, analisa dan evaluasi.
d.	Siapa PIC monitoring	x					x			Masih belum ada ketentuan, ada sebagian implementasi	Menentukan siapa yang melakukan monitoring, pengukuran, analisa dan evaluasi
e.	Kapan hasil dari monitoring di analisa dan di evaluasi	x				x				Masih belum ada ketentuan	Membuat jadwal berkala Analisis Sesuai kebutuhan
f.	Siapa yang harus meng analisa dan evaluasi	x				x				Masih belum ada ketentuan	Menentukan siapa yang melakukan monitoring, pengukuran, analisa dan evaluasi
9,2	Internal Audit										

		Organisasi harus melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk memberikan informasi mengenai apakah Sistem Manajemen Keamanan Informasi :										
	a	1) Persyaratan organisasi untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan	x				x					Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
		2) Persyaratan Standar Internasional ini	x				x					Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
	b	Diimplementasikan dan dipelihara secara efektif	x				x					Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
		Organisasi harus :										
	c	Merencanakan, menetapkan, melaksanakan dan memelihara program audit, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan. Program audit harus mempertimbangkan pentingnya proses yang bersangkutan dan hasil audit sebelumnya	x				x					Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
	d	Tentukan kriteria dan cakupan audit untuk setiap audit	x				x					Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
												<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat prosedur audit internal ISO 27001:2013 2. Membentuk Tim Auditor 3. Membuat jadwal audit 4. Melakukan audit internal sesuai prosedur 5. Melaporkan hasil audit ke manajemen 6. Mendokumentasikan hasil audit internal

	e	Memilih auditor dan melakukan audit yang memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit	x				x				Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
	f	Memastikan bahwa hasil audit dilaporkan ke manajemen yang relevan	x				x				Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
	g	Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti program audit dan hasil audit	x				x				Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
9,3		Tinjauan manajemen										
		Peninjauan manajemen harus mencakup pertimbangan :										
	a	Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya	x				x				Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
	b	Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan manajemen keamanan informasi	x				x				Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	1. Membuat Prosedur/Ketentuan Tinjauan Manajemen Keamanan Informasi 2. Melakukan Tinjauan Manajemen 3. Melibatkan Top Manajemen 4. Mendokumentasikan hasil Tinjauan Manajemen
	c	Umpan balik mengenai kinerja keamanan informasi, termasuk tren dalam :										
		1) Ketidaksesuaian dan tindakan korektif;	x				x				Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	

		2) Hasil pemantauan dan pengukuran;	x				x				Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
		3) Hasil audit; dan	x				x				Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
		4) Pemenuhan tujuan keamanan informasi;	x				x				Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
	d	Umpan balik dari pihak yang berkepentingan;	x				x				Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
	e	Hasil penilaian risiko dan status rencana perawatan risiko; dan	x				x				Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
	f	Kesempatan untuk perbaikan terus-menerus.	x				x				Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
POINT			0	0	0	0	0	3	0	0	
			0			0%	3			33%	
PASAL 10 PENINGKATAN											

	10,1	Ketidak sesuaian dan tindakan perbaikan										
		Bila ketidaksesuaian terjadi, organisasi harus :										
	a	Bereaksi terhadap ketidaksesuaian, dan jika berlaku :										
		1) Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya; dan	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	1. Membuat ketentuan tentang tinjauan manajemen terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi 2. Melakukan review secara berkala terhadap sasaran Sistem Manajemen Keamanan Informasi 3. Menyerahkan review terhadap Top Manajemen
		2) Menangani konsekuensinya	x				x			Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi		
	b	Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar tidak kambuh kembali atau terjadi di tempat lain, dengan										
		1) Mengkaji ketidaksesuaian;	x				x			Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi		

		2) Menentukan penyebab ketidaksesuaian; dan	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi
		3) Menentukan apakah ketidaksesuaian serupa ada, atau berpotensi terjadi;	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi
	c	Melaksanakan tindakan yang dibutuhkan;	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi
	d	Meninjau keefektifan tindakan perbaikan yang dilakukan; dan	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi
	e	Membuat perubahan pada sistem manajemen keamanan informasi, jika perlu.	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi

		Tindakan korektif harus sesuai dengan efek ketidaksesuaian yang dihadapi.	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi
		Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti:	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi
	f	Sifat ketidaksesuaian dan tindakan selanjutnya yang diambil, dan	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi
	g	Hasil tindakan korektif.	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi
	10,2	Peningkatan berkesinambungan									Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi

	Organisasi harus terus memperbaiki kesesuaian, kecukupan dan keefektifan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidakaesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	
POINT		0	0	0	0	0	0	0	0	SANGAT RENDAH	
		0			0%	0			0%		
		14%			20%						
POINT TOTAL		17%									
11%											

Table 2 Hasil Gap Analisis Pasal ISO 27001:2013 ruang lingkup Data Center

NO	PASAL	URAIAN	DOKUMEN				IMPLEMENTASI				HASIL GAP ANALISA (GAP ANALYSIS)	SARAN PERBAIKAN	
			TIDAK ADA	ADA, SEBAGIAN KECIL SESUAI	ADA, SEBAGIAN BESAR SESUAI	SESUAI	TIDAK IMPLEMENTASI	IMPLEMENTASI SEBAGIAN KECIL	IMPLEMENTASI SEBAGIAN BESAR	KONSISTEN IMPLEMENTASI			
1	PASAL 4 HAL-HAL TERKAIT ORGANISASI												
	4,1	Pemahaman terkait organisasi dan semua hal yang terkait konteks											
	a	Tentukan isu eksternal yang relevan dengan tujuannya dan yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen keamanan informasinya.	x						x			Organisasi Belum menentukan isu eksternal dan isu internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	1. Menentukan isu-isu internal & eksternal yang relevan dengan tujuannya dan

	b	Tentukan isu internal yang relevan dengan tujuannya dan yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen keamanan informasinya.	x					x				yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen keamanan informasinya. 2. Membuat proses bisnis, terutama sesuai dengan ruang lingkup (misal : ruang lingkup ISO 27001:2013 tentang data center, maka didetailkan proses bisnis pada data center)
4,2		Pemahaman terkait harapan dan kebutuhan pihak terkait										
	a	Penentuan pihak terkait yang relevan terhadap sistem manajemen keamanan informasi	x					x			Belum menentukan pihak-pihak yang terkait dengan Sistem Keamanan Manajemen Informasi dan belum dilakukan identifikasi persyaratan terhadap pihak-pihak terkait	1. Penentuan pihak terkait yang relevan terhadap sistem manajemen keamanan informasi
	b	Identifikasi persyaratan pihak terkait (perijinan, peraturan, kontrak)	x					x			Belum teridentifikasi persyaratan pihak terkait (perijinan, peraturan, kontrak)	2. Identifikasi persyaratan pihak terkait (perijinan, peraturan, kontrak)
	4,3	Penentuan ruang lingkup penerapan SMKI									Belum ditentukan ruang lingkup Sistem Manajemen Kamanan Informasi	Menentukan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Dapat diperoleh dari Hasil Gap Analisa
		Saat menentukan ruang lingkup ini, organisasi harus mempertimbangkan:										===
	a	Isu eksternal dan internal	x					x			Belum nenentukan isu Internal dan Eksternal	Untuk ruang lingkup disarankan,
	b	Peraturan terkait	x					x			Peraturan terkait ada namun belum terimplementasikan	

	c	Tampilan dan keterikatan antara aktifitas organisasi dengan organisasi lain	x								Koordinasi dengan koordinasi lain ada namun prosedur tidak dijalankan. Tampilan dan keterikatan antara aktifitas organisasi dengan organisasi lain	apabila ingin melakukan implementasi hingga sertifikasi ISO 27001:2013 kurang dari 12 Bulan adalah "Supporting Data Center" atau "
	4,4	Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus:										Membuat kebijakan tentang penetapan, penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi serta dilakukan Pengesahan dan Mensosialisasikan Kebijakan tersebut
	a	Ditetapkan	x								Belum pernah menetapkan, menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
	b	Diterapkan	x						x		Belum pernah menetapkan, menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
	c	Dipelihara	x								Belum pernah menetapkan, menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
POINT			0	0	0	0	0	4	0	0		
			0			0%	4			33%		
2	PASAL 5 KEPEMIMPINAN											
	5,1	Top Manajemen harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan:										Top Manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi melalui melakukan meeting berkala, evaluasi berkala, tinjauan manajemen, dll, untuk :
	a	Memastikan kebijakan keamanan informasi dan tujuan keamanan informasi ditetapkan dan sesuai dengan arahan strategis organisasi;	x								x	Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Namun sudah ada rencana penerapan.

b	Memastikan integrasi persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ke dalam proses organisasi	x					x				Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	2. Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen keamanan informasi ke dalam proses organisasi
c	Memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi tersedia	x					x				Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Sudah ada SDM yang Berkompetensi.	3. Mengkomunikasikan pentingnya manajemen keamanan informasi yang efektif dan sesuai dengan persyaratan sistem manajemen keamanan informasi
d	Mengkomunikasikan pentingnya manajemen keamanan informasi yang efektif dan sesuai dengan persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	x					x				Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	4. Memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi mencapai hasil yang diinginkan;
e	Memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi mencapai hasil yang diinginkan	x					x				Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	5. Mengarahkan dan mendukung orang untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen keamanan informasi;
f	Mengarahkan dan mendukung orang untuk berkontribusi pada keefektifan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	x					x				Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	6. Mendukung peran manajemen lain yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinan mereka sesuai dengan bidang tanggung jawab mereka
g	Membuat perencanaan perbaikan secara berkelanjutan	x					x				Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	7. Membuat perencanaan berkelanjutan

	h	Mendukung peran manajemen lain yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinan mereka sesuai dengan bidang tanggung jawab mereka	x								Top Manajemen belum menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.	8. Mendukung peran manajemen lain yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinan mereka sesuai dengan bidang tanggung jawab mereka
	5,2	Top Manajemen harus menetapkan kebijakan keamanan informasi									Top Manajemen belum menetapkan kebijakan keamanan informasi serta belum melakukan dokumentasi kebijakan, mengkomunikasikan, menyediakan untuk pihak terkait dan melakukan kaji ulang.	Membuat Kebijakan Keamanan Informasi yang didalamnya : sesuai dengan tujuan organisasi, tujuan keamanan informasi, komitmen memenuhi persyaratan terkait keamanan informasi, komitmen meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi secara berkelanjutan serta mendokumentasi kebijakan, mengkomunikasikan, menyediakan untuk pihak terkait dan melakukan kaji ulang.
	a	Sesuai dengan tujuan organisasi	x								Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	
	b	Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan keamanan informasi	x								Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	
	c	Komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku terkait dengan keamanan informasi	x								Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	
	d	Komitmen untuk terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi	x								Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	
		Kebijakan keamanan informasi harus (didokumentasikan, dikomunikasikan, tersedia untuk pihak terkait dan dikaji ulang)	x								Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	
	e	Harus didokumentasikan	x								Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	
	f	Harus dikomunikasikan	x								Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	
	g	Harus tersedia untuk semua pihak terkait	x								Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI	
	h	Harus dikaji ulang	x									

	5,3	Fungsi, wewenang dan tanggungjawab organisasi									Organisasi belum menentukan struktur organisasi, jobdesk dan wewenang terkait kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	1. Membuat struktur organisasi serta jobdesk terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi 2. Menunjuk penanggung jawab/koordinat or keamanan informasi dan membuat Struktur Keamanan Informasi 3. Menunjuk penanggung jawab/koordinat or dan Tim Audit Internal, 4. Membuat Penanggung jawab /koordinator Tim Business Continuity Manajemen dan Insiden Respon Plan 5. Semua tim diatas disahkan	
		Manajemen puncak harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk :											
	a	Memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan persyaratan standar ini	x				x						
	b	Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi kepada Top Manajemen	x				x						
POINT			0	0	0	0	0	0	0	0			
			0			0%			0			0%	
3	PASAL 6 PERENCANAAN												
	6,1	Tindakan terkait peluang dan resiko											
	6.1.1	Saat merencanakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, organisasi harus mempertimbangkan isu-isu yang disebutkan dalam 4.1 dan persyaratan yang disebutkan dalam 4.2 dan menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani:											
	a	Memastikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dapat mencapai hasil yang diharapkan	x				x				Belum pernah dilakukan identifikasi analisa resiko berdasarkan bagian/divisi pemilik resiko terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	1. Menentukan identifikasi analisa resiko / Risk Assessment berdasarkan tiap pemilik resiko 2. Melakukan penanganan analisa resiko terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
	b	Mencegah, atau mengurangi, efek yang tidak diinginkan	x				x				Belum pernah dilakukan identifikasi analisa resiko berdasarkan bagian/divisi pemilik resiko terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi		

	c	Pencapaian perbaikan yang berkelanjutan	x								Belum pernah dilakukan identifikasi analisa resiko berdasarkan bagian/divisi pemilik resiko terkait Sistem Manajemen Keamanan linformasi	
		Organisasi harus merencanakan :										
	d	Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang	x								Belum pernah dilakukan identifikasi analisa resiko berdasarkan bagian/divisi pemilik resiko terkait Sistem Manajemen Keamanan linformasi	
	e	Bagaimana untuk :										
		1. Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam proses Sistem Manajemen Keamanan Informasi	x									
		2. Mengevaluasi keefektifan tindakan ini	x									
6.1.2		Pengukuran resiko keamanan informasi									Belum menentukan pengukuran resiko berdasarkan pemilik resiko terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
		Organisasi harus menentukan dan menerapkan proses penilaian risiko keamanan informasi										
	a	Menetapkan dan memelihara kriteria risiko keamanan informasi yang mencakup										
		1. Kriteria penerimaan risiko	x								Tidak ada Kriteria penerimaan risiko	
		2. Kriteria untuk melakukan penilaian risiko keamanan informasi	x								Tidak ada Kriteria untuk melakukan penilaian risiko keamanan informasi	
	b	Memastikan bahwa penilaian risiko keamanan informasi yang berulang menghasilkan hasil yang konsisten, valid dan sebanding	x								Masih belum dapat Memastikan bahwa penilaian risiko keamanan informasi yang berulang menghasilkan hasil yang konsisten, valid dan sebanding	
	c	Mengidentifikasi risiko keamanan informasi										
		1. Menerapkan proses penilaian risiko keamanan informasi untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan hilangnya kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi dalam ruang lingkup sistem manajemen keamanan informasi.	x								Belum ada proses penilaian risiko terhadap SMKI	
		2. Identifikasi pemilik resiko	x								Belum ditetapkan pemilik resiko	
	d	Menganalisis risiko keamanan informasi										
		1. Menilai konsekuensi potensial yang akan terjadi jika risiko yang diidentifikasi dalam 6.1.2 c) 1) terwujud	x								Belum ada analisa risiko keamanan informasi	
		2. Menilai kemungkinan realistis terjadinya risiko yang diidentifikasi dalam 6.1.2 c) 1)	x								Belum ada analisa risiko keamanan informasi	

1. Organisasi harus menentukan pengukuran resiko berdasarkan pemilik resiko
2. Organisasi harus menentukan kebertrimaan resiko terkait SMKI
3. Menetapkan Sasaran dan Tujuan dari Hasil Analisa Resiko

		3. Menentukan level resiko	x				x				Belum ada analisa resiko keamanan informasi	
e		Mengevaluasi resiko keamanan informasi										
		1. Bandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang ditetapkan dalam 6.1.2 a)	x				x				Belum ada evaluasi resiko keamanan informasi	
		2. Memprioritaskan risiko yang dianalisis untuk penanganan risiko	x				x				Belum ada evaluasi resiko keamanan informasi	
6.1.3		Penanganan resiko Keamanan informasi									Organisasi belum mempunyai prosedur tentang penanganan resiko keamanan informasi	
a		Pilih opsi penanganan risiko keamanan informasi yang sesuai, dengan memperhitungkan hasil penilaian risiko	x				x					1. Menentukan analisa risiko sesuai dengan proses yang dijadikan ruang lingkup di Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
b		Tentukan semua kontrol yang diperlukan untuk menerapkan opsi penanganan risiko keamanan informasi yang dipilih	x				x				Organisasi belum mempunyai prosedur tentang penanganan resiko keamanan informasi	2. Mengambil penanganan risiko pada kontrol yang ditentukan pada Standar ISO 27001:2013.
c		Bandingkan kontrol yang ditentukan pada 6.1.3 b) di atas dengan yang ada di Annex A dan pastikan tidak ada kontrol yang diperlukan	x				x				Organisasi belum mempunyai prosedur tentang penanganan resiko keamanan informasi	3. Membuat Pernyataan Pemberlakuan dari Kontrol yang ditetapkan oleh ISO 27001:2013.
d		Menghasilkan pernyataan penerapan yang berisi kontrol yang diperlukan (lihat 6.1.3 b dan c) dan justifikasi untuk inklusi, apakah dilakukan atau tidak, dan justifikasi untuk pengecualian kontrol dari Annex A	x				x				Organisasi belum mempunyai prosedur tentang penanganan resiko keamanan informasi	4. Menetapkan pemilik risiko sampai ke personal.
e		Merumuskan rencana penanganan risiko keamanan informasi	x				x				Organisasi belum mempunyai prosedur tentang penanganan resiko keamanan informasi	
f		Memastikan pengesahan dari pemilik risiko (PIC) dan keterberterimaan dari risiko sisa	x				x				Organisasi belum mempunyai prosedur tentang penanganan resiko keamanan informasi	
6,2		Tujuan keamanan informasi dan perencanaan pencapaiannya									Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	Membuat Dokumentasi Tujuan Keamanan Informasi, yang konsisten dengan kebijakan, terukur, terkait dengan risiko, mengkomunikas
		Organisasi harus menetapkan tujuan keamanan informasi pada fungsi dan tingkat yang relevan. Tujuan keamanan informasi harus										
a		Tujuan SMKI harus konsisten dengan kebijakan SMKI	x				x				Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	

	b	Tujuan SMKI harus terukur	x								Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	ikan tujuan tersebut dan selalu di perbaharui secara berkala.
	c	Tujuan SMKI harus terkait dengan daftar resiko	x								Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	
	d	Tujuan SMKI harus dikomunikasikan	x								Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	
	e	Tujuan SMKI harus termuktakhir (update)	x								Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	
		Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi mengenai tujuan keamanan informasi Saat merencanakan bagaimana mencapai tujuan keamanan informasinya, organisasi harus menentukan										
	f	Merencanakan apa yang akan dilakukan	x								Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	
	g	Merencanakan sumberdaya yang dibutuhkan	x								Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	
	h	Merencanakan pihak yang bertanggungjawab	x								Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	
	i	Merencanakan target waktu penyelesaian	x								Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	
	j	Merencanakan bagaimana hasil dievaluasi	x								Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, diukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan informasi	
POINT			0	0	0	0	0	0	0	0		
			0		0%	0		0%				
4	PASAL 7 PENDUKUNG											
	7,1	Sumber Daya										

		Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, implementasi, pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen keamanan informasi	x							Sumber Daya sudah di sediakan, namun belum ada ketentuan tertulis tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, implementasi, pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen keamanan informasi	Menyiapkan dan merinci sumber daya yang dibutuhkan (baik sumber daya manusia, keuangan ataupun sumber daya peralatan) (detail sumber daya dapat diperoleh dari analisa risiko dan rencana perbaikan)
7,2	Kompetensi										
a	Tentukan kompetensi yang diperlukan orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendalinya yang mempengaruhi kinerja keamanan informasinya (persyaratan jabatan)	x								Sudah ada sebagian kecil kompetensi yang diperlukan orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendalinya yang mempengaruhi kinerja keamanan informasinya (persyaratan jabatan)	Membuat Matrik kompetensi terutama tentang keamanan informasi, untuk menentukan kompetensi yang diperlukan, memastikan personil sudah kompeten, mengambil tindakan jika personil belum kompeten dan melakukan evaluasi personil
b	Memastikan bahwa orang-orang ini kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai		x							Belum ada Pelatihan Terkait Keamanan Informasi	Melakukan Training terkait keamanan informasi (Awareness ISO 27001:2103, Audit Internal ISO 27001:2103, Sertifikasi teknis sesuai keahlian dll)
c	Jika memungkinkan, mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi keefektifan tindakan yang dilakukan		x							Belum ada evaluasi kompetensi	
d	Bukti dokumen pendukung kompetensi		x							Belum ada bukti pendukung Kompetensi	
7,3	Kepedulian										
		Orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi harus sadar								Belum melakukan kesadaran tentang kebijakan keamanan informasi, kontribusi personil terhadap efektifitas keamanan informasi dan implikasinya. Belum melakukan kesadaran tentang keamanan informasi.	

	a	Kebijakan keamanan informasi	x					x				Kebijakan Belum ada	1. Melakukan sosialisasi kebijakan yang sudah dibuat, melakukan kesadaran peran dan dampak personil dalam penerapan SMKI melalui induksi berkala, planfet, berita dll)
	b	Kontribusi mereka terhadap efektivitas sistem manajemen keamanan informasi, termasuk manfaat kinerja keamanan informasi yang lebih baik	x					x				Masih Belum ada kontribusi karena belum ada Kebijakan	
	c	Implikasi tidak sesuai dengan persyaratan sistem manajemen keamanan informasi	x					x				Masih belum bisa diterapkan	
	7,4	Komunikasi											
		Organisasi harus menentukan kebutuhan akan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen keamanan informasi termasuk											
	a	Tentang apa yang harus dikomunikasikan	x					x				Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait Komunikasi	1. Membuat identifikasi (list) dan ketentuan tentang komunikasi, apa klasifikasi informasi yang akan dikomunikasikan, kapan waktunya berkomunikasi, dengan siapa berkomunikasi dan dimana komunikasi dilakukan. 2. Membuat list semua kontak internal 3. Membuat list semua kontak eksternal (vendor, Instansi Terkait dan pihak terkait lainnya)
	b	Kapan harus berkomunikasi	x					x				Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait Komunikasi	
	c	Dengan siapa berkomunikasi	x					x				Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait Komunikasi	
	d	Siapa yang harus berkomunikasi dan	x					x				Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait Komunikasi	
	e	Proses dimana komunikasi harus dilakukan	x					x				Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait Komunikasi	
	7,5	Informasi terdokumentasi											

7.5.1	umum											
	Sistem manajemen keamanan informasi organisasi harus mencakup											
a	Informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh Standar Internasional ini;	x				x					Belum ada informasi terdokumentasi terhadap SMKI	1. Membuat kebijakan tentang adanya informasi terdokumentasi yang terkait dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
b	Informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh organisasi diperlukan untuk efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi	x				x					Belum ada informasi terdokumentasi terhadap SMKI	2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan informasi terdokumentasi yang berkaitan dengan tujuan organisasi yang relevan terhadap Sistem Manajemen Keamanan Informasi
7.5.2	Membuat dan memperbarui											
	Saat membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, organisasi harus memastikan yang sesuai											
a	Identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, pengarang, atau nomor referensi);	x					x				Belum ada ketentuan Dokumen informasi terdokumentasi yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	1. Membuat ketentuan tentang informasi terdokumentasi
b	Format (misalnya bahasa, versi perangkat lunak, grafik) dan media (misalnya kertas, elektronik)	x					x				Belum ada ketentuan Dokumen informasi terdokumentasi yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	2. Menentukan Identifikasi dan deskripsi (misalnya judul,

												tanggal, pengarang, atau nomor referensi)
	7,5, 3	Pengendalian informasi terdokumentasi										
		Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan oleh Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan dengan Standar Internasional ini harus dikontrol untuk memastikan										
	a	Tersedia dan cocok untuk digunakan, dimana, dan kapan dibutuhkan	x					x			Belum ada pengendalian terhadap informasi terdokumentasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	1. Membuat prosedur tentang pengendalian terhadap informasi terdokumentasi 2. Membuat tingkat kerahasiaan terhadap informasi terdokumentasi 3. Menentukan lokasi dan tempat penyimpanan informasi terdokumentasi 4. Melakukan kontrol perubahan terhadap informasi terdokumentasi (versioning)
	b	Itu cukup dilindungi (misalnya dari hilangnya kerahasiaan, penggunaan yang tidak tepat, atau kehilangan integritas)	x					x		Belum ada pengendalian terhadap informasi terdokumentasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi		
		Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, organisasi harus menangani kegiatan berikut, sebagaimana berlaku										
	c	Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan	x					x		Belum ada pengendalian terhadap informasi terdokumentasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi		
	d	Penyimpanan dan pelestarian, termasuk pelestarian keterbacaan	x					x		Belum ada pengendalian terhadap informasi terdokumentasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi		
	e	Kontrol perubahan (misal: kontrol versi);	x					x		Belum ada pengendalian terhadap informasi terdokumentasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi		
	f	Retensi dan disposisi	x					x		Belum ada pengendalian terhadap informasi terdokumentasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi		
POINT			0	3	0	0	0	16	0	0		
			3		14%		16		76%			
5	PASAL 8 Operasional											
	8,1	Perencanaan dan pengendalian operasional										

		Organisasi harus merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan keamanan informasi, dan untuk melaksanakan tindakan yang ditentukan dalam 6.1. Organisasi juga harus menerapkan rencana untuk mencapai tujuan keamanan informasi yang ditetapkan dalam 6.2	x							Organisasi sudah memiliki beberapa SOP terkait operasional layanan terkait data center. Akan tetapi SOP yang dimiliki saat ini belum meng-cover seluruh persyaratan ISO 27001:2013	1. Membuat sasaran dan program keamanan informasi, untuk tindak lanjut dari tujuan keamanan informasi, dan melakukan update berkala pada sasaran dan program tersebut disertai dengan bukti pelaksanaan
		Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana	x							dokumen SOP disimpan dilokasi yang telah ditentukan akan tetapi organisasi masih belum memiliki Kebijakan dan Ketentuan terkait penyimpanan informasi terdokumentasi.	2. Menyimpan seluruh bukti informasi terdokumentasi yang sudah ditentukan
		Organisasi harus mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau kembali konsekuensi perubahan yang tidak diinginkan, mengambil tindakan untuk mengurangi dampak buruk yang diperlukan.	x							Setiap perubahan SOP, pasti diketahui oleh atasan terkait akan tetapi organisasi belum memiliki Prosedur dan kebijakan terkait perubahan dokumen	3. Melakukan revisi pada prosedur perubahan dan membuat ketentuan/klasifikasi level perubahan dan ketentuan persetujuan personel terkait. Mendokumentasikan semua perubahan pada sistem kritikal (terutama yang ada pada data center)
		Organisasi harus memastikan bahwa proses alih daya ditentukan dan dikendalikan	x				x			Masih Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait	
8,2		Penilaian Resiko keamanan informasi									

		Organisasi harus melakukan penilaian risiko keamanan informasi pada interval yang direncanakan atau bila ada perubahan signifikan yang diajukan atau terjadi, dengan mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan dalam 6.1.2 a).	x								Belum pernah dilakukan penilaian risiko terkait keamanan informasi	1. Melakukan identifikasi risiko terhadap tiap divisi
		Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi tentang hasil penilaian risiko keamanan informasi	x								Masih Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait	2. Menentukan pemilik risiko yang terkait dan Menentukan Penilaian dan Kebertrimaan risiko
8,3		Pengendalian Resiko keamanan informasi										
		Organisasi harus menerapkan rencana penanganan risiko keamanan informasi	x								Belum ada pengendalian terhadap risiko keamanan informasi	Membuat pengendalian terhadap semua risiko terkait SMKI
		Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi tentang hasil penanganan risiko keamanan informasi	x								Belum ada pengendalian terhadap risiko keamanan informasi	Membuat pengendalian terhadap semua risiko terkait SMKI
POINT			0	0	0	0	0	3	0	0		
			0		0%		3		33%			
PASAL 9 EVALUASI PEFORMA												
9,1		Monitoring, measurement, analysis and evaluation										
		Organisasi harus mengevaluasi kinerja keamanan informasi dan efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi										
		Organisasi harus menentukan:										

	a.	Apa yang perlu dipantau dan diukur, termasuk proses dan kontrol keamanan informasi	x							Sudah Ada Fasilitas Pendukung Data Center berupa CCTV, Door akses, AC , Sensor suhu, Kelembapan, Genset namun belum termonitor berkala dan belum ada analisa	1. Membuat ketentuan parameter apa saja yang akan di monitoring, ukur, analisa dan evaluasi (suhu, kelembaban, arus listrik, daya listrik, log akses, bandwidth, log salah satu server, Pemadam, CCTV, dll) 2. Membuat ketentuan kapan akan di monitoring, ukur, analisa dan evasluas
	b.	Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, sebagaimana mestinya, untuk memastikan hasil yang valid	x							Ruang server juga belum tertutup / kamufase terhadap pengunjung / orang dari luar	Di tutup dengan partisi agar tidak terlihat
	c.	Kapan monitoring dilakukan?	x							Masih belum ada ketentuan	Membuat ketentuan kapan akan di monitoring, ukur, analisa dan evasluas
	d.	Siapa PIC monitoring	x							Masih belum ada ketentuan, ada sebagian implementasi	Menentukan siapa yang melakukan monitoring, pengukuran, analisa dan evaluasi
	e.	Kapan hasil dari monitoring di analisa dan di evaluasi	x							Masih belum ada ketentuan	Mwnwntukan jadwal berkala Analisis Sesuai kebutuhan
	f.	Siapa yang harus meng analisa dan evaluasi	x							Masih belum ada ketentuan	Menentukan siapa yang melakukan monitoring, pengukuran, analisa dan evaluasi
9,2		Internal Audit									

	Organisasi harus melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk memberikan informasi mengenai apakah Sistem Manajemen Keamanan Informasi :										
a	1) Persyaratan organisasi untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan	x				x					Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
	2) Persyaratan Standar Internasional ini	x				x					Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
b	Diimplementasikan dan dipelihara secara efektif	x				x					Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
	Organisasi harus :										
c	Merencanakan, menetapkan, melaksanakan dan memelihara program audit, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan. Program audit harus mempertimbangkan pentingnya proses yang bersangkutan dan hasil audit sebelumnya	x				x					Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
d	Tentukan kriteria dan cakupan audit untuk setiap audit	x				x					Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
e	Memilih auditor dan melakukan audit yang memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit	x				x					Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
f	Memastikan bahwa hasil audit dilaporkan ke manajemen yang relevan	x				x					Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
g	Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti program audit dan hasil audit	x				x					Belum pernah ada audit internal terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
9,3	Tinjauan manajemen										
	Peninjauan manajemen harus mencakup pertimbangan :										
a	Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya	x				x					Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
b	Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan manajemen keamanan informasi	x				x					Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi
c	Umpan balik mengenai kinerja keamanan informasi, termasuk tren dalam :										
	1) Ketidaksesuaian dan tindakan korektif;	x				x					Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi

1. Membuat prosedur audit internal ISO 27001:2013
2. Membentuk Tim Auditor
3. Membuat jadwal audit
4. Melakukan audit internal sesuai prosedur
5. Melaporkan hasil audit ke manajemen
6. Mendokumentasikan hasil audit internal

1. Membuat Prosedur/Ketentuan Tinjauan Manajemen Keamanan Informasi
2. Melakukan Tinjauan Manajemen

		2) Hasil pemantauan dan pengukuran;	x				x				Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	3. Melibatkan Top Manajemen 4. Mendokumentasikan hasil Tinjauan Manajemen
		3) Hasil audit; dan	x				x				Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
		4) Pemenuhan tujuan keamanan informasi;	x				x				Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
	d	Umpan balik dari pihak yang berkepentingan;	x				x				Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
	e	Hasil penilaian risiko dan status rencana perawatan risiko; dan	x				x				Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
	f	Kesempatan untuk perbaikan terus-menerus.	x				x				Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
POINT			0	0	0	0	0	6	0	0		
			0		0%		6		67%			
PASAL 10 PENINGKATAN												
	10,1	Ketidak sesuaian dan tindakan perbaikan										
		Bila ketidaksesuaian terjadi, organisasi harus :										
	a	Bereaksi terhadap ketidaksesuaian, dan jika berlaku :										
		1) Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya; dan		x				x			Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	1. Membuat ketentuan tentang tinjauan manajemen terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi 2. Melakukan review secara berkala
		2) Menangani konsekuensinya	x					x			Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	
	b	Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar tidak kambuh kembali atau terjadi di tempat lain, dengan										
		1) Mengkaji ketidaksesuaian;	x					x			Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	

	2) Menentukan penyebab ketidaksesuaian; dan	x					x			Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	terhadap sasaran Sistem Manajemen Keamanan Informasi 3. Menyerahkan review terhadap Top Manajemen
	3) Menentukan apakah ketidaksesuaian serupa ada, atau berpotensi terjadi;	x					x			Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	
c	Melaksanakan tindakan yang dibutuhkan;	x					x			Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	
d	Meninjau keefektifan tindakan perbaikan yang dilakukan; dan	x					x			Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	
e	Membuat perubahan pada sistem manajemen keamanan informasi, jika perlu.	x					x			Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	
	Tindakan korektif harus sesuai dengan efek ketidaksesuaian yang dihadapi.	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	
	Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti:	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	
f	Sifat ketidaksesuaian dan tindakan selanjutnya yang diambil, dan	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	
g	Hasil tindakan korektif.	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	
10,2	Peningkatan berkesinambungan									Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	
	Organisasi harus terus memperbaiki kesesuaian, kecukupan dan keefektifan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	x				x				Belum ada ketentuan terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait keamanan informasi	
POINT		0	1	0	0	0	8	0	0	RENDAH	
		1			17%	8			133%		
		4%			49%						
POINT TOTAL		27%									

Table 3 Hasil Gap Analisis Annex ISO 27001:2013 ruang lingkup Data Center

	TOPIK	ISI	DOKUMEN	IMPLEMENTASI	SARAN PERBAIKAN
--	-------	-----	---------	--------------	-----------------

N O	KLAUSUL ANNEX			TIDAK ADA	ADA, SEBAGIAN KECIL SESUAI	ADA, SEBAGIAN BESAR SESUAI	SESUAI	TIDAK IMPLEMENTASI	IMPLEMENTASI SEBAGIAN KECIL	IMPLEMENTASI SEBAGIAN BESAR	KONSISTEN IMPLEMENTASI	HASIL GAP ANALISA (GAP ANALYSIS)	
	A.5	Kebijakan Keamanan Informasi											
	A.5.1.	Arah manajemen keamanan informasi											
1	A.5.1.1	Kebijakan Keamanan Informasi	Satu set kebijakan keamanan informasi harus didefinisikan, disetujui oleh manajemen, diterbitkan dan dikomunikasikan kepada karyawan dan pihak eksternal yang relevan.	x				x				organisasi saat ini belum memiliki kebijakan keamanan informasi dan tidak mengimplementasikan kebijakan keamanan informasi	Membuat kebijakan yang relevan terhadap SMKI, yaitu yang meliputi CIA, Kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan Ketersediaan (availability) disahkan dan dikomunikasikan
2	A.5.1.2	Review Dari Kebijakan Keamanan Informasi	Kebijakan untuk keamanan informasi harus ditinjau pada interval yang direncanakan atau jika terjadi perubahan yang signifikan untuk memastikan kesinambungan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas.	x				x				organisasi saat ini belum pernah melakukan review dari kebijakan keamanan informasi	Setelah melakukan penyusunan kebijakan keamanan informasi, organisasi diharuskan melakukan review terhadap kebijakan keamanan secara berkala
POINT				0	0	0	0	0	0	0	0		
				0			0%	0			0%		
	A.6	Organisasi Keamanan Informasi											
	A.6.1	Organisasi Internal											
3	A.6.1.1.	Peran dan Tanggung Jawab	Semua tanggung jawab keamanan informasi harus ditetapkan dan dialokasikan.	x					x			organisasi belum memiliki struktur organisasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Membentuk Struktur Organisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi

4	A.6.1.2.	Pemisahan Tugas	Tugas yang saling bertentangan dan area tanggung jawab harus dipisahkan untuk mengurangi peluang untuk modifikasi yang tidak sah atau tidak disengaja atau penyalahgunaan aset organisasi		x						Personil Organisasi telah memiliki jobdesk masing - masing akan tetapi belum memiliki jobdesk tiap personil yang terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Menentukan matriks jobdesk berdasarkan struktur organisasi yang relevan terkait SMKl, Tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan kritikal, dipisahkan untuk mengurangi risiko adanya perubahan tanpa ijin atau tidak disengaja dan penyalahgunaan aset tanpa otorisasi. Misal : disahkan pemisahan tugas antara operator dengan admin (operator cctv dengan admin log cctv)
5	A.6.1.3.	Kontak dengan pihak berwenang	Kesesuaian kontak dengan pihak berwenang harus dipelihara		x						organisasi Belum memiliki kontak pihak yang berwenang, dan belum terdokumentasi dengan baik dan tidak secara berkala melakukan kontak dengan pihak yang berwenang untuk membahas isu-isu eksternal yang terjadi	Membuat list kontak pihak-pihak berwenang dan membuat jadwal untuk komunikasi dengan pihak yang berwenang, guna mendapatkan informasi mengenai isu-isu eksternal yang dapat mempengaruhi SMKl
6	A.6.1.4.	Kontak dengan pihak terkait	Kesesuaian kontak dengan pihak terkait atau forum sepsialis keamanan dan asosiasi profesional harus dipelihara		x						Organisasi belum melakukan komunikasi terhadap pihak terkait (Belum mengikuti forum)	Mengikuti forum IT dan keamanan informasi terkait keamanan informasi di Perusahaan. (Misal : Mengikuti forum salah satu hardware yang dimiliki)
7	A.6.1.5.	Keamanan Informasi pada manajemen proyek	Keamanan informasi harus dibahas dalam manajemen proyek, terlepas dari jenis proyek.		x						Organisasi Belum melakukan manajemen proyek, dan belum memasukkan unsur keamanan informasi pada manajemen. (Terdokumentasi dan lisan). Kontrak untuk manajemen project masih terlalu umum	Memastikan keamanan informasi untuk manajemen proyek yang mempengaruhi layanan dalam pengolahan informasi, metode manajemen proyek harus menetapkan <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran keamanan informasi dalam proyek • Penilaian resiko dilakukan sebelum proyek dilakukan • dll

	A.6.2.	Perangkat Mobile dan teleworking											
8	A.6.2.1.	kebijakan perangkat mobile	Kebijakan dan pendukung pengukuran keamanan harus diadopsi untuk mengendalikan resiko yang dihasilkan dari penggunaan perangkat mobile	x					x			Organisasi belum menentukan kebijakan terkait penggunaan perangkat mobile dalam lingkup kemanan informasi secara terdokumentasi	Menentukan kebijakan penggunaan perangkat mobile yang terkait SMKI, Pengguna fasilitas Mobile menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa Informasi yang terkandung di dalamnya tidak bocor dan menjaga penggunaannya di lingkungan publik, misalnya: fasilitas Mobile tercuri atau hilang.
9	A.6.2.2.	Teleworking	Kebijakan dan pendukung pengukuran keamanan harus diimplementasikan untuk melindungi informasi yang diakses diproses, atau disimpan pada situs teleworking	x					x			Organisasi belum memiliki kebijakan terdokumentasi tentang teleworking, namun belum dilakukan beberapa cara teleworking yang aman	Dalam pelaksanaan teleworking perlu dipertimbangkan. Misal : Tidak dilakukan di tempat umum (café, warnet, dll) dan diusahakan menggunakan line khusus atau fixed line yang aman.
POINT				0	1	0	0	0	7	0	0		
				1			5%	7			33%		
	A.7	Keamanan Sumber daya Manusia											
	A.7.1.	Sebelum bekerja											
10	A.7.1.1.	Penyaringan	Pemeriksaan verifikasi latar belakang pada semua calon tenaga kerja harus dilakukan sesuai dengan hukum, peraturan dan etika dan harus sebanding dengan kebutuhan bisnis, klasifikasi informasi yang dapat diakses dan risiko yang dirasakan.	x					x			Organisasi Belum melakukan Background Check terkait calon tenaga kerja untuk keamanan informasi, Seleksi dilakukan oleh BKD	Penyaringan latar belakang (screening) harus dilakukan untuk setiap calon personil dan pihak ketiga dengan melakukan verifikasi terhadap informasi pribadi antara lain mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Referensi mengenai pengalaman, baik pribadi maupun profesional. • Verifikasi kelengkapan dan kebenaran CV pribadi. • Konfirmasi kebenaran kualifikasi akademik dan profesional. • Pemeriksaan catatan

			fungsi pekerjaan mereka.										
A.7.2.3.	Proses Pendisiplinan	Harus ada proses pendisiplinan formal dan dikomunikasikan di tempat untuk mengambil tindakan terhadap karyawan yang telah melakukan suatu pelanggaran keamanan informasi.	x						x			Organisasi belum memiliki kebijakan/prosedur terdokumentasi tentang proses pendisiplinan karyawan yang melanggar keamanan informasi.	Membuat prosedur pendisiplinan, jika karyawan melakukan pelanggaran keamanan informasi, ketentuan pencabutan hak akses, dan beberapa ketentuan mengenai proses pendisiplinan
A.7.3.	Pemutusan Pekerjaan												
A.7.3.1	Pemutusan dan Perubahan Tanggung Jawab Kerja	Tanggung jawab keamanan informasi dan tugas yang tetap berlaku setelah pemutusan atau perubahan pekerjaan harus ditetapkan, dikomunikasikan kepada karyawan atau kontraktor dan ditegaskan.	x						x			Organisasi belum memiliki prosedur kepegawaian untuk pemutusan dan perubahan tanggung jawab secara umum di Perusahaan, namun belum ada ketentuan detail untuk penghapusan hak akses khusus keamanan informasi	Menambahkan prosedur kepegawaian, mulai dari pemberhentian / pemindahan bagian pegawai, Personalia dan security officer memastikan tidak ada keamanan informasi yang terganggu ketika personil bersangkutan keluar atau pindah. Tanggung jawab untuk melakukan proses pemberhentian atau pergantian status kepegawaian.
POINT			0	0	0	0	0	0	6	0	0		
			0			0%	6			33%			
A.8	Aset manajemen												
A.8.1	Tanggung jawab Terhadap Aset												
A.8.1.1.	Inventarisasi Aset	Aset yang terkait dengan informasi dan fasilitas pengolahan informasi harus diidentifikasi dan inventarisasi dari aset-aset ini harus disusun dan dipelihara.		x					x			Organisasi telah memiliki daftar inventaris aset, tetapi daftar aset belum di upgrade lebih spesifik setiap rak dan spesifikasi, termasuk power consume	Daftar inventaris Aset TI sedapat mungkin memuat Informasi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Identitas perangkat (aset), misalnya: nomor ID, nama perangkat, alamat jaringan (static IP address), pemilik. • lokasi perangkat (aset), misalnya: ruang data center, rak A.

													* Semua server dan perangkat di Data Center harus ter-update pada daftar inventory (bukan hanya perangkat yang bernilai mahal)	
A.8.1.2.	Kepemilikan aset	Aset yang berada dalam daftar aset harus memiliki pemilik		x					x				Organisasi belum memiliki informasi terdokumentasi mengenai pemilik aset	Setiap aset yang terdaftar di list dokumen identifikasi aset, wajib disertakan PIC (penanggung jawab) dari masing-masing aset dan harus terdokumentasi
A.8.1.3.	Aset yang dapat diterima	Aturan untuk penggunaan yang dapat diterima dari suatu informasi dan aset yang terkait dengan informasi dan fasilitas pengolahan informasi harus diidentifikasi, didokumentasikan dan diterapkan.							x				Belum ada ketentuan penggunaan aset yang critical dan non critical	Membuat ketentuan penggunaan aset yang dapat diterima dan Information security officer harus memonitor peraturan mengenai penggunaan aset yang dapat diterima pada fasilitas pemrosesan informasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan layanan jaringan, email dan penggunaan internet • Penggunaan perangkat TI
A.8.1.4.	Pengembalian Aset	Semua karyawan dan pengguna pihak eksternal harus mengembalikan semua aset organisasi yang mereka miliki pada saat pemutusan hubungan kerja mereka, kontrak atau perjanjian.							x				Organisasi Belum menetapkan kebijakan tentang pengembalian aset karyawan yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan	Untuk kebijakan Penetapan pengembalian aset harus disertai dengan berita acara dan pemusnahan hak akses ke aset tersebut
A.8.2.	Klasifikasi Informasi													
A.8.2.1.	Klasifikasi Informasi	Informasi harus diklasifikasikan dalam hal persyaratan hukum, nilai, kekritisitas dan kepekaan terhadap pengungkapan yang tidak sah atau modifikasi.		x					x				Organisasi memiliki kebijakan/ketentuan klasifikasi informasi akan tetapi belum sesuai standar keamanan informasi	Membuat kebijakan/ketentuan terhadap semua informasi yang ada

	A.8.2.2.	Pelabelan Informasi	Prosedur pelabelan informasi harus dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan skema klasifikasi informasi yang diadopsi oleh organisasi.	x								Organisasi belum memiliki kebijakan/ketentuan pelabelan dokumen	Membuat kebijakan/ketentuan pelabelan terhadap semua informasi yang ada
	A.8.2.3.	Penanganan Aset	Prosedur untuk menangani aset harus dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan skema klasifikasi informasi yang diadopsi oleh organisasi.	x								Organisasi belum memiliki kebijakan/ketentuan penanganan aset yang ada, namun belum sampai untuk aset hardcopy dan detail penanganannya	Melakukan review dan merevisi terhadap kebijakan/ketentuan penanganan aset secara lebih detail, terutama aset hardcopy. Penanganan aset informasi khususnya yang bersifat rahasia mencakup pada aspek pemrosesan, penyimpanan, distribusi, dan pemusnahan informasi harus diterapkan secara aman.
	A.8.3.	Penanganan Media											
	A.8.3.1.	Manajemen Removable Media	Prosedur harus diterapkan untuk pengelolaan removable media sesuai dengan skema klasifikasi yang diadopsi oleh organisasi.	x					x			Organisasi belum memiliki kebijakan/ketentuan tentang pengelolaan removable media	Membuat kebijakan/ketentuan aturan dalam menangani removable media, misalkan : <ul style="list-style-type: none"> • Removable media yang digunakan dalam proses perlu dipastikan bahwa data organisasi yang bersifat rahasia di dalam media tersebut telah dienkrip atau menggunakan password diinventarisasikan terhadap personil yang terotorisasi untuk menggunakan aset tersebut. Mekanisme otorisasi penggunaan removable media harus didokumentasikan dengan jelas. • Data yang terkandung dalam removable media yang tidak akan digunakan kembali harus dihapus secara permanen

													dan dipastikan tidak dapat di-recover.
A.8.3.2.	Pemusnahan Media	Media harus dibuang dengan aman bila tidak diperlukan lagi, dengan menggunakan prosedur formal.	x					x				Organisasi belum memiliki prosedur tentang pemusnahan media yang menyimpan data	Membuat prosedur tentang pemusnahan aset baik berupa data atau alat, dan disertai dengan berita acara penghapusan/pemusnahan
A.8.3.3.	Transfer Media Fisik	Media yang berisi informasi harus dilindungi terhadap akses yang tidak sah, penyalahgunaan atau korupsi selama transportasi.	x					x				Organisasi belum memiliki prosedur tersebut	Membuat kebijakan/ketetnuan/prosedur pengamanan saat transfer media fisik dari media tersebut dengan mempertimbangkan, salah satunya Pengemasan media harus dipastikan telah dilakukan dengan baik dan disesuaikan dengan jenis dan kondisi media untuk menghindari kerusakan fisik.
POINT			0	2	0	0	0	8	0	0			
			2			7%		8			27%		
A.9	Kontrol Akses												
A.9.1.	Persyaratan Bisnis untuk Kontrol Akses												
A.9.1.1.	Kebijakan Kontrol Akses	Kebijakan kontrol akses harus ditetapkan, didokumentasikan dan ditinjau berdasarkan persyaratan	x					x				Belum ada kebijakan tentang kontrol akses, namun sudah dilakukan meski masih belum sesuai	Membuat kebijakan kontrol akses baik berupa fisik maupun logic di lingkungan perusahaan yang terkait dengan SMKI

			keamanan bisnis dan informasi.										
												Belum ada kebijakan/ketentuan tentang kontrol akses (hak akses).	Membuat kebijakan/ketentuan kontrol akses baik berupa fisik maupun logic di lingkungan perusahaan yang terkait dengan SMKI
													Misal : Kebijakan setiap informasi harus diakses memakai user dan password, hak akses untuk user dan admin apa saja, siapa saja yang mendapatkan hak akses admin.
A.9.1.2.	Akses terhadap Jaringan dan Layanan Jaringan	Pengguna hanya diberikan akses ke jaringan dan layanan jaringan yang telah ditentukan secara spesifik.		x							x	Pembagian akses terhadap jaringan dan layanan jaringan belum dilakukan	Membuat pembagian akses jaringan dan layanan jaringan sesuai dengan tingkat kerahasiannya
A.9.2.	Manajemen Akses Pengguna												
A.9.2.1.	Pendaftaran Pengguna dan Pencabutan Registrasi	Proses pendaftaran dan pencabutan pengguna harus dilaksanakan sebagai syarat untuk mendapatkan hak akses		x							x	Belum dibuat Prosedur pendaftaran hak akses	Membuat prosedur hak akses yang relevan terhadap SMKI termasuk hak akses secara fisik dan logic
												Belum didapatkan prosedur/pendaftaran pengguna untuk pencabutan hak akses ketika sudah tidak memiliki wewenang	Membuat prosedur atau ketentuan pendaftaran pengguna untuk mencabut hak akses
A.9.2.2.	Penyediaan Akses User	Proses formal penyediaan akses pengguna harus diimplementasikan untuk memperoleh atau mencabut hak		x							x	Belum dibuat Prosedur penyediaan hak akses	Membuat prosedur hak akses user

			akses untuk semua jenis pengguna pada semua sistem dan layanan.										
												Tidak dapat ditunjukkan dokumentasi persetujuan dan verifikasi formal dari personil berwenang untuk pemberian hak akses	Mendokumentasikan persetujuan dan verifikasi formal dari personil berwenang untuk pemberian hak akses
A.9.2.3.	Manajemen Hak Akses Istimewa		Alokasi dan penggunaan hak akses istimewa harus dibatasi dan dikendalikan		x							Belum dibatasi Penggunaan hak akses istimewa secara prosedural	Membuat kebijakan hak akses istimewa yang relevan terhadap SMKI, meliputi : Akses Fisik, Akses non fisik dan Password Super
												Belum didokumentasikan kebijakan/ketentuan hak akses istimewa	Membuat kebijakan/ketentuan hak akses istimewa (hak akses selain user pengguna biasa), cara mendapatkan, monitoring, dan review.
A.9.2.4.	Manajemen informasi otentikasi rahasia pengguna		Alokasi informasi otentikasi rahasia harus dikendalikan melalui proses manajemen formal.		x							Belum menggunakan otentikasi rahasia dan melakukan manajemen otentikasi namun belum ada ketentuan terdokumentasi manajemen otentikasi rahasia	Membuat ketentuan terdokumentasi otentikasi rahasia
A.9.2.5.	Review Hak Akses User		Pemilik aset harus meninjau hak akses pengguna secara berkala.		x							Belum dilakukan review hak akses, namun belum dideokumentasikan dan blm ada jadwal berkala review hak akses.	Membuat ketentuan review hak akses. Review hak akses sebaiknya dilakukan secara berkala, atau setiap ada penambahan atau pengurangan karyawan
A.9.2.6.	Penghapusan dan Penyesuaian Hak Akses		Hak akses dari seluruh karyawan dan pengguna pihak eksternal untuk informasi dan fasilitas pengolahan informasi harus dihilangkan pada									Belum ada ketentuan terdokumentasi tentang penghapusan dan penyesuaian hak akses	Membuat ketentuan/prosedur penghapusan hak akses kepada karyawan yang sudah tidak bekerja / pindah bagian, penghapusan baik secara data fisik dan logic

			saat pemutusan hubungan kerja mereka, kontrak atau perjanjian, atau disesuaikan pada perubahan.									
A.9.3.	Tanggung Jawab User											
A.9.3.1.	Penggunaan Otentikasi Informasi Rahasia	Pengguna wajib mengikuti praktek-praktek organisasi dalam penggunaan otentikasi informasi rahasia.	x					x			Penggunaan otentikasi informasi rahasia Tidak digunakan dan belum ada ketentuan terdokumentasi untuk penggunaan otentikasi informasi rahasia	Membuat ketentuan terdokumentasi untuk penggunaan otentikasi informasi rahasia.
A.9.4.	Sistem Kontrol dan Akses Aplikasi											
A.9.4.1.	Pembatasan Akses Informasi	Akses terhadap informasi dan sistem fungsi aplikasi harus dibatasi sesuai dengan kebijakan kontrol akses.			x				x		Sudah dilakukan pembatasan akses informasi, namun masih tahap minimal (misal : akses ke data center sudah dibatasi, perangkat security akses belum maksimal), belum ada ketentuan terdokumentasi.	* Membuat ketentuan pembatasan akses informasi yang terdokumentasi. * Semua personil harus menggunakan user yang berbeda untuk login ke server dan perangkat network.
A.9.4.2.	Prosedur log-on yang aman	Dimana diperlukan oleh kebijakan kontrol akses, akses ke sistem dan aplikasi harus dikendalikan dengan prosedur log-on aman.			x				x		Belum ada nya ketentuan terdokumentasi, log on yang aman	Membuat prosedur log on yang aman secara terdokumentasi
A.9.4.3.	Sistem Manajemen Password	Sistem manajemen password harus interaktif dan harus memastikan password yang berkualitas.	x					x			Belum diimplementasikan pergantian password secara berkala, password panjang, terenkripsi, namun belum ditentukan secara tertulis	Membuat kebijakan/ketentuan manajemen password

												kapas password wajib diganti, berapa panjang password, dll. (Manajemen Password)	
A.9.4.4.	Penggunaan Program Utilitas Istimewa	Penggunaan program utilitas yang mungkin mampu mempengaruhi sistem dan aplikasi kontrol utama harus dibatasi dan dikontrol ketat.	x					x				Belum pernah dilakukan kontrol terhadap utilitas	Penggunaan kontrol utilitas dilakukan secara berkala, agar dapat di pantau apabila mempengaruhi sistem
A.9.4.5.	Mengontrol Akses Terhadap Source Code Program	Akses terhadap source code program harus dibatasi			x					x		Belum dilakukan pembatasan akses pada source code (masih sangat minimal implementasinya) dan belum ada ketentuan terdokumentasi	Membuat ketentuan terdokumentasi mengenai Source code harus dibatasi dalam penggunaan maupun editing
POINT			0	8	0	0	0	10	2	0			
POINT			8			19%	12			29%			
A.10	Kriptografi												
A.10.1	Kriptografi kontrol												
A.10.1.1.	Kebijakan Penggunaan Kontrol Kriptografi	Kebijakan tentang penggunaan kontrol kriptografi untuk perlindungan informasi harus dikembangkan dan diimplementasikan.	x							x		Belum ada kebijakan tentang penggunaan kontrol kriptografi	Membuat kebijakan tentang penggunaan kontrol kriptografi
A.10.1.2.	Manajemen Kunci	Kebijakan tentang penggunaan, perlindungan dan masa aktif kunci kriptografi harus dikembangkan dan dilaksanakan sepanjang penggunaan kunci kriptografi.	x							x		Belum ada manajemen kunci kriptografi	Membuat ketentuan manajemen kunci kriptografi
POINT			0	0	0	0	0	2	0	0			
POINT			0			0%	2			33%			

	A.11	Keamanan Fisik dan Lingkungan											
	A.11.1	Area Aman											
	A.11.1.1.	Perimeter Keamanan Fisik	Perimeter keamanan harus didefinisikan dan digunakan untuk melindungi daerah-daerah yang berisi informasi sensitif dan kritis dan fasilitas pengolahan informasi.	x						x		Ruang server belum memenuhi standar, pintu akses masuk ruang server masih menggunakan pintu kaca, tidak ada raised floor, terdapat berbagai peralatan yang tidak seharusnya terletak di dalam ruang server, dan masuk kategori ilegal aset, Akses masuk ruang data center masih sebatas menggunakan kunci biasa, ruang pendukung harus memiliki : ruang listrik, ruang jaringan, ruang dropzone, ruang perakitan/staging area/test room, penyimpanan gudang dan ruang monitoring	* Menentukan/mendefinisikan parameter pembagian setiap ruangan sesuai dengan persyaratan SMKI
												Akses fisik hanya sebatas melalui kunci pintu biasa.	* Sebaiknya mengganti ruang kaca di data center dengan tembok ataupun pintu baja yang sulit untuk ditembus (mengingat besarnya data center dan banyaknya informasi yang diolah), mencegah adanya potensi penyusupan orang ke area yang menyimpan dan memproses informasi (information processing) terutama yang bersifat sangat rahasia dan rahasia.
												Belum ada ketentuan tertulis bagaimana prosedur masuk	* Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang spesifikasi perimeter keamanan fisik

												ruang paling sensitif (ruang aman).	lebih jelasnya dapat dilakukan Analisa Risiko terlebih dahulu.
												Belum ada daftar penerimaan tamu (log book)	* Menentukan parameter/ prosedur untuk memasuki ruang aman, yaitu dapat dengan mengisi log book, memakai tanda name tag visitor, menitipkan semua alat telekomunikasi sebelum masuk data center.
A.11.1.2.	Kontrol Masuk Fisik	Daerah aman harus dilindungi oleh kontrol entri yang sesuai untuk memastikan bahwa hanya karyawan resmi yang diperbolehkan akses.			x							Acess door dan lock access door belum diupgrade, masih menggunakan kunci pintu biasa.	Acess door dan lock access door perlu diupgrade menggunakan finger print yang terkoneksi dengan server, menentukan adanya personil yang memiliki akses masuk data center dan yang tidak memiliki akses. Membuat SK untuk personil yang memiliki akses masuk Data Center.
												Belum ada ketentuan tertulis siapa saja yang boleh masuk ke ruang paling sensitif.	Untuk personil yang memiliki hak akses dan yang tidak memiliki hak akses harus dibedakan dalam kontrol masuk ruang server, untuk personil yang tidak mempunyai hak akses, ditemani personil yang memiliki hak akses
												Belum ada pencatatan tanggal dan waktu keluar masuk personil.	Melakukan pencatatan waktu keluar masuk personil
A.11.1.3.	Mengamankan Kantor, Ruangan, dan Fasilitas	Keamanan fisik untuk kantor, ruangan dan fasilitas harus dirancang dan diterapkan.			x							Belum ada pengamanan kantor, mulai dari akses masuk gedung.	* Sebaiknya mengganti pintu kaca di data center dan pintu kaca pada ruang panel dengan tembok ataupun pintu baja yang sulit untuk ditembus (mengingat besarnya data center dan banyaknya informasi yang diolah), mencegah adanya potensi penyusupan orang ke area yang menyimpan dan memproses informasi (information processing) terutama yang bersifat

	A.11.1.6.	Area Pengiriman dan Pemuatan	Jalur akses seperti area pengiriman dan bongkar poin lain di mana orang yang tidak berwenang bisa masuk tempat harus dikendalikan dan, jika mungkin, terisolasi dari fasilitas pengolahan informasi untuk menghindari akses yang tidak sah.		x							Belum ada prosedur untuk menentukan jalur akses publik dan bongkar muat.	Membuat prosedur area bongkar muat barang yang tidak terhubung langsung dengan ruang aman. Untuk lebih baik ruang bongkar muat terpisah dengan ruang masuk utama data center.
	A.11.2	Peralatan											
	A.11.2.1.	Penempatan peralatan dan perlindungan	Peralatan harus diletakkan dan dilindungi untuk mengurangi risiko dari ancaman lingkungan dan bahaya, dan kesempatan untuk akses yang tidak sah.		x							Perangkat yang kritikal dan sensitif, sudah dilindungi secara langsung, namun masih terlihat dari luar.	Mengganti kaca pada ruang data center (baik jendela dan pintunya)
												Sudah tidak ada aktifitas makan minum di area data center ataupun di ruang kerja.	
												Masih adanya potensi debu masuk, hewan pengerat masuk.	Menutup lubang pada jendela, sekat pintu kaca, lubang splinkler pemaam kebakaran.
												Panel Listrik sudah dikunci.	Sebaiknya semua dikunci agar tidak kemasukan binatang atau membahayakan orang lain
													Sebaiknya semua dikunci agar tidak kemasukan binatang atau tidak ada yang mensabotase rack server
													Untuk Rak Jaringan, sebaiknya ditutup dan terkunci atau boleh tidak terkunci, selama dipastikan prosedurnya hanya orang tertentu yang bisa masuk, dan ketika orang lain yang

													masuk, dilakukan pendampingan	
A.11.2.2.	Utilitas Pendukung	Peralatan harus dilindungi dari gangguan listrik dan gangguan lain yang disebabkan oleh kegagalan dalam utilitas pendukung.		x									Sudah ada grounding, namun tidak dapat ditunjukkan letaknya dan bukti pemeliharaan.	Segera melakukan pengecekan berkala (pemeliharaan) penangkal petir dan grounding bangunan
													Ada penangkal petir, namun tidak dapat ditunjukkan bukti pemeliharaan.	
													Sudah ada UPS, Sudah ada Genset meskipun masih jadi satu dengan gedung.	Membuat peta power (daya) untuk ruang data center
													Untuk UPS belum dihitung berdasarkan dari jumlah maksimal power setiap peralatan.	Menghitung jumlah daya maksimal pada power setiap peralatan, untuk dipastikan UPS dan Genset memenuhi batas aman.
A.11.2.3.	Keamanan Pengkabelan	Listrik dan kabel komunikasi yang membawa data atau mendukung layanan informasi harus dilindungi dari intersepsi, gangguan atau kerusakan.		x									Belum dilakukan perlindungan kabel data dan kabel power.	Sebaiknya membuatkan tray pemisah antara kabel power dan kabel jaringan agar tidak terjadi induksi listrik
													Belum dilakukan penandaan kabel.	Memberi penanda kabel end to end, untuk memudahkan analisa kerusakan jalur koneksi
													Belum didapatkan peta kabel power (peta daya) dan peta kabel jaringan.	Membuat peta power (daya) dan peta kabel jaringan untuk ruang data center
													Belum ada prosedur jika terjadi keadaan darurat apabila ada kabel yang rusak.	Membuat prosedur jika salah satu jalur kabel mengalami kerusakan

A.11.2.4.	Pemeliharaan Peralatan	Peralatan harus dipelihara dengan benar untuk memastikan ketersediaan dan integritas yang terus menerus.		x							Pemeliharaan terhadap AC, APAR dan Genset belum maksimal.	Membuat jadwal perencanaan perawatan berkala
											Prosedur pemeliharaan belum di lakukan update (d disesuaikan dengan kondisi saat ini)	Melakukan update prosedur pemeliharaan (d disesuaikan dengan kondisi saat ini)
A.11.2.5.	Pemindahan Aset	Peralatan ,informasi atau software tidak boleh diletakkan diluar kantor tanpa ijin dari pihak yang berwenang		x							Belum adanya ketentuan keluar masuk peralatan penting secara tertulis.	Membuat kebijakan/ketentuan keluar masuk peralatan secara tertulis
											Belum ada pencatatan atau dokumentasi keluar masuk peralatan kritikal.	Melakukan pencatatan keluar masuk peralatan secara tertulis
A.11.2.6.	Keamanan peralatan dan aset off lokal	Keamanan harus diterapkan pada aset off-site dengan mempertimbangkan risiko yang berbeda dari bekerja di luar tempat organisasi.		x							Belum ada kebijakan penggunaan peralatan diluar kantor	Membuat kebijakan/ketentuan penggunaan peralatan diluar kantor
A.11.2.7.	Pembuangan yang aman atau penggunaan kembali peralatan	Semua item peralatan yang mengandung media penyimpanan harus diverifikasi untuk memastikan bahwa setiap data sensitif dan perangkat lunak berlisensi telah dihapus atau ditimpa aman sebelum dibuang atau digunakan kembali.		x							Belum ada prosedur terkait penghapusan yang aman	Membuat prosedur pemusnahan aset apabila tidak digunakan kembali, contoh: memusnahkan harddisk yang telah rusak dengan cara dihancurkan berkeping keping

	A.11.2.8.	Pengguna peralatan tanpa pengawasan	Pengguna harus memastikan bahwa peralatan tanpa pengawasan memiliki perlindungan yang tepat.	x					x			Belum ada kebijakan penggunaan peralatan tanpa pengawasan	Membuat kebijakan/ketentuan penggunaan peralatan tanpa pengawasan
	A.11.2.9.	Kebijakan clean desk dan clean screen	Kebijakan clean desk untuk dokumen hardcopy dan perangkat/media penyimpanan dan kebijakan clean screen untuk fasilitas pengolahan informasi harus diadopsi	x				x				Belum pernah ada kebijakan clean desk dan clean screen	Membuat kebijakan clean desk dan clear screen sehingga informasi yang terdapat pada PC atau laptop serta dokumen yang terdapat di meja tidak dapat di akses orang lain
	POINT			0	9	0	0	0	12	4	0		
				9		20%		16		36%			
	A.12	keamanan operasi											
	A.12.1	Prosedur dan Tanggung Jawab Personil											
	A.12.1.1.	Prosedur Operasi Terdokumentasi	Prosedur operasional harus terdokumentasi dan selalu tersedia bagi semua personil organisasi yang membutuhkan.		x				x			Belum memiliki prosedur operasional yang menyangkut operasional data center	Membuat prosedur terdokumentasi, Setiap aplikasi yang dioperasikan di khususnya Core aplikasi beserta operasional Data Center harus dilengkapi dengan prosedur dan petunjuk pengoperasian (misalnya Run Book dan petunjuk teknis) dan dipelihara untuk menjaga ketersediaan bagi seluruh pengguna sistem informasi yang membutuhkannya. Misal : prosedur keluar masuk data center, prosedur mengeluarkan barang yang ada pada data center, dll

	A.12.1.2.	Manajemen perubahan	Perubahan terhadap organisasi, proses bisnis, fasilitas pengolahan informasi dan sistem yang mempengaruhi keamanan informasi harus dikendalikan	x								Belum memiliki prosedur manajemen perubahan	Membuat prosedur manajemen perubahan, yang terkait pada data center (misal : power, bandwidth dll). Melakukan klasifikasi / level perubahan (akan terkait dengan persetujuan). Pengendalian perubahan diterapkan pada infrastruktur dan Sistem Aplikasi harus mengacu pada prosedur manajemen perubahan yang mempertimbangkan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Aspek risiko yang muncul terhadap kebutuhan bisnis. • Dokumentasi atas log perubahan sesuai urutan waktu perubahan. • Perencanaan dan pengujian perubahan. (User Acceptable Test) • Tersedianya persetujuan formal untuk usulan perubahan. • Dll
	A.12.1.3.	Manajemen kapasitas	Penggunaan sumber daya harus dimonitor, disesuaikan dan diproyeksikan pada kebutuhan kapasitas di masa mendatang untuk memastikan kebutuhan performa sistem		x							Belum memiliki prosedur manajemen kapasitas	Pengelola Kapasitas harus membuat prosedur manajemen kapasitas dan melakukan manajemen kapasitas (misal : power, bandwidth dll) untuk setiap pengembangan infrastruktur dan sistem aplikasi baru maupun yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan proyeksi terhadap kebutuhan operasional, infrastruktur, sistem aplikasi berdasarkan kebutuhan bisnis yang akan datang. Pengukuran kapasitas terhadap aplikasi dan infrastruktur dilakukan secara periodik

	A.12.1.4.	Pemisahan area pengembangan, uji coba, dan operasional	Pengembangan, pengujian, dan area operasional harus dipisah untuk mengurangi resiko adanya akses tanpa ijin atau perubahan terhadap area operasional		x						Belum ada pemisahan, area operasional data center, AC, ruang bongkar muat, ruang uji coba, ruang gudang dan ruang antara (untuk pintu masuk)	Pemisahan antara fasilitas pengembangan dan pengujian dari fasilitas operasional baik secara fisik maupun logikal didasarkan pada kritikalitas sistem aplikasi dan dengan mengimplementasikan pengendalian yang sesuai. Pemisahan ini juga digunakan untuk mengurangi resiko akses dan perubahan yang tidak terotorisasi atas sistem. Saran pemisahan ruang : * Ruang Operasioal data Center (Ruang Aman) * Ruang uji (test, UAT) terpisah dengan ruang antara, untuk masuk data center) * Ruang Gudang dipisah dari ruang pengujian
	A.12.2.	perlindungan terhadap malware										
	A.12.2.1.	Pengendalian terhadap malware	Kontrol deteksi, pencegahan, dan pemulihan untuk perlindungan terhadap malware harus diimplementasikan, dikombinasikan dengan pemahaman pengguna yang sesuai		x						Belum dilakukan scanning antivirus secara berkala dan otomatis	Melakukan scanning antivirus dan update secara berkala
	A.12.3.	Backup										
	A.12.3.1.	Backup informasi	Backup salinan informasi, software dan system image harus dilakukan dan diuji secara berkala sesuai dengan kebijakan backup yang disepakati		x						Belum dilakukan back up dan restore secara berkala	Melakukan Backup dan restore secara berkala, membuat dokumentasi penjadwalan, masa retensi backup yang disetujui oleh atasan atau personil terkait
	A.12.4.	Logging dan monitoring										

	A.12.4.1.	Event logging	Even log merekam aktivitas user, pengecualian, kesalahandan peristiwa yang berkaitan dengan keamanan informasi harus ada, dijaga, dan direview secara berkala		x							Belum pernah dilakukan monitoring dan penyimpanan log, belum dilakukan review log, belum ada ketentuan/prosedur manajemen log	Membuat ketentuan/prosedur Log. Pada prosedur tersebut yang perlu disimpan mencakup pada aspek berikut : <ul style="list-style-type: none"> • User id • Tanggal dan waktu serta detail dari kejadian penting (key events) dalam sistem seperti logon dan logoff. • Identitas terminal atau komputer dan lokasi bila memungkinkan. • Dll * Melakukan review log
	A.12.4.2.	Perlindungan terhadap informasi log	Fasilitas log dan informasi log harus dilindungi terhadap gangguan dan akses yang tidak sah		x							Belum ada perlindungan pada informasi log, belum ada prosedur untuk melindungi log yang ada.	Membuat prosedur manajemen log, meletakkan apada komputer khusus dan diberi identitas. Fasilitas atau sistem untuk melakukan logging dan informasi log harus dilindungi dari modifikasi dan akses tanpa ijin yaitu pembatasan terhadap perubahan atau penghapusan terhadap log files
	A.12.4.3.	Administrastor dan operator log	Aktivitas sistem administrator dan sistem operator harus terekam dan lognya terlindungi serta di-review secara berkala	x					x			Belum dilakukan secara sah administator dan operator log, super admin belum dual custody	* Membuat surat penunjukkan administrator dan penunjukan log. * Seluruh aktivitas administrator dan operator sistem informasi harus direkam dalam log dan ditinjau secara berkala yang mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Waktu dari kejadian (event) balk yang sukses maupun gagal. • Hak akses dan identitas dari administrator atau operator.

	A.12.4.4.	Sinkronisasi waktu	Waktu pada seluruh perangkat pengolah informasi didalam organisasi atau di dalam domain security harus disinkronisasi dengan acuan satu sumber referensi waktu		x							<p>Semua device belum dilakukan sinkronisasi waktu. Misal : server, ac, cctv. Belum ada ketentuan sinkronisasi waktu</p>	<p>* Membuat ketentuan peralatan apa saja yang harus sinkron untuk waktunya. * Melakukan sinkronisasi waktu untuk seluruh perangkat yang berkaitan dengan SMKI di data center harus terintegrasi menjadi satu dalam hal waktu, ini dapat memberi manfaat ketika ada IT forensik ketika ada insiden</p>
	A.12.5.	Pengendalian terhadap operasional software											
	A.12.5.1.	Pemasangan software pada sistem operasional	Prosedur yang berkaitan harus diimplementasikan untuk mengendalikan pemasangan software pada sistem operasi	x				x				<p>Belum ada ketentuan terdokumentasi tentang software apa saja yang diperbolehkan dan prosedur pemasangannya (otorisasi dll)</p>	<p>Membuat ketentuan terdokumentasi tentang software apa saja yang diperbolehkan dan prosedur pemasangannya (otorisasi dll)</p>
	A.12.6.	Manajemen kerentanan teknis											
	A.12.6.1	Manajemen kerentanan teknis	Informasi mengenai kerentanan teknis dari sistem informasi yang digunakan harus diperoleh secara berkala, paparan organisasi mengenai kerentana tersebut harus dievaluasi dan tindakan yang sesuai harus diambil untuk mengatasi resiko terkait.	x				x				<p>Belum pernah melakukan uji test pada jaringan, ketika melakukan perubahan sebelum di masukkan kedalam operasional data center (sistem kritikal).</p>	<p>Melakukan uji test secara berkala. Membuat ketentuan uji coba teknis sebelum melakukan perubahan pada sistem kritikal.</p>
	A.12.6.2.	Pembatasan pada pemasangan software	Aturan yang mengatur pemasangan software oleh user harus dibuat dan dilaksanakan	x				x	x			<p>Belum ada kebijakan/ketentuan terdokumentasi tentang pembatasan pemasangan software terkait SMKI</p>	<p>Membuat kebijakan pemasangan software asli, pembatasan pemasangan software, pemasangan yang dilakukan hanya oleh satu admin super, sehingga tidak ada user lain yang</p>

													dapat memasang software bajakan/software berbahaya
A.12.7	Pertimbangan audit sistem informasi												
A.12.7.1.	Kontrol Audit Sistem Informasi	Persyaratan audit dan kegiatan yang melibatkan verifikasi sistem operasional harus direncanakan dengan hati-hati dan disetujui untuk meminimalkan gangguan terhadap proses bisnis.	x			x	x					Belum ada prosedur terdokumentasi mengenai kegiatan ketika melakukan audit/verifikasi sistem operasional yang sedang berjalan.	Membuat prosedur terdokumentasi mengenai kegiatan ketika melakukan audit/verifikasi sistem operasional yang sedang berjalan. Mulai menentukan ruang lingkup, memonitoring sistem yang diaudit dan persetujuan personil terkait.
POINT			0	8	0	9	0	10	0	0			
			17			28%	10			17%			
A.13	Keamanan komunikasi												
A.13.1.	Manajemen keamanan jaringan												
A.13.1.1.	Pengendalian jaringan	Jaringan harus dikelola dan dikendalikan untuk melindungi informasi dalam sistem dan aplikasi.		x						x		Belum dilakukan pembatasan, monitoring dan review terhadap jaringan tetapi ada beberapa pengendalian yang belum dilakukan	Bagian Network support / Technical harus membatasi kontrol terhadap penggunaan jaringan. Pengendalian terhadap jaringan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Semua perangkat jaringan hanya dapat diakses oleh personil penanggung jawab jaringan yang telah mendapatkan otorisasi dari bagian System Administrator. • Akses jaringan melalui remote harus mendapatkan persetujuan dari bagian network support dan didokumentasikan • Penggunaan jaringan harus direview berkala

	A.13.1.2.	Keamanan layanan jaringan	Mekanisme keamanan, tingkat layanan dan persyaratan manajemen dari semua layanan jaringan harus diidentifikasi dan dimasukkan dalam perjanjian layanan jaringan, apakah layanan ini disediakan secara in-house atau outsourcing.		x							Belum ada Service Level Agreements (SLA) dari pihak penyedia jaringan.	Meminta SLA dari pihak penyedia jaringan, membuat ketentuan jadwal review dan Melakukan review terhadap keamanan jaringan (SLA untuk ISP) dilakukan secara berkala dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti ISP, Colocation data center,dll
	A.13.1.3.	Pemisahan jaringan	Grup dari layanan informasi, pengguna dan sistem informasi harus dipisahkan pada jaringan		x							Sudah dilakukan pemisahan jaringan. Belum dapat ditunjukkan topologi jaringan data center.	Jika belum ada topologi jaringan, dibuat topologi jaringan dan segmentasi jaringannya
	A.13.2	transfer informasi											
	A.13.2.1.	Kebijakan dan prosedur transfer informasi	Kebijakan transfer secara formal, prosedur dan kontrol harus ada untuk melindungi transfer informasi melalui semua tipe fasilitas komunikasi	x								Belum ada kebijakan terhadap transfer informasi	<p>Segera membuat kebijakan tersebut yang relevan dengan SMKI, dan menambahkan beberapa poin pertimbangan dalam pertukaran informasi melalui media elektronik yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendeteksian terhadap virus melalui scan antivirus terhadap data yang ditransmisikan. • Perlindungan data rahasia yang dipertukarkan melalui attachment email dengan menggunakan password. • Melarang automatic email forwarding dari email XXX ke email pribadi.

	A.13.2.2.	Perjanjian pada transfer informasi	Perjanjian harus membahas transfer secara aman dari informasi bisnis antara organisasi dan pihak eksternal	x				x			Belum ada NDA tentang trnsfer informasi secara aman.	Membuat NDA dan mereview ketentuan serta memastikan semua pihak yang terlibat melakukan pengamanan informasi dengan memuat hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan dalam kesepakatan yang sama terkait keamanan informasi sehingga informasi dapat dilindungi secara memadai • Penyimpanan Informasi secara aman dan memadai. • Standar identifikasi kurir yang melakukan proses pertukaran informasi. • Penggunaan sistem pelabelan yang telah disepakati untuk informasi yang kritikal dan sensitif serta memastikan bahwa sistem tersebut dapat dengan mudah dimengerti. • Penggunaan teknologi password yang diperlukan.
	A.13.2.3.	Pesan elektronik	Informasi yang terlibat dalam pesan elektronik harus dilindungi dengan tepat.		x			x			Belum menggunakan proteksi SSL	Menambah Firewall untuk melindungi data secara elektronik
	A.13.2.4.	Perjanjian rahasia atau NDA	Persyaratan untuk perjanjian rahasia atau NDA yang menunjukkan kebutuhan organisasi terhadap perlindungan terhadap informasi harus diidentifikasi, dan direview secara berkala dan didokumentasi	x				x			Belum pernah dilakukan pemberlakuan terkait NDA pada pihak ketiga dan para karyawan belum dapat ditunjukkan NDA terkait keamanan informasi.	Setiap pegawai maupun pihak ketiga yang bekerja di organisasi harus menyetujui dan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan informasi (NDA) yang dituangkan dalam dokumen pernyataan kerahasiaan informasi atau kontrak kerja dan berlaku selama personil aktif.
	POINT			0	4	0	0	0	3	4	0	
				4			17%	7			29%	

	A.14	Sistem akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan										
	A.14.1.	Persyaratan Keamanan Informasi										
	A.14.1.1	Analisis persyaratan keamanan informasi dan spesifikasi	Persyaratan keamanan informasi terkait harus dimasukkan dalam persyaratan untuk sistem informasi baru atau perangkat tambahan untuk sistem informasi yang ada.	x					x		Belum ada analisa untuk persyaratan dan spesifikasi sistem baru yang akan dimasukkan ke dalam data center, serta belum menyesuaikan dengan standar keamanan informasi yang ada.	Membuat analisa untuk persyaratan keamanan informasi dan spesifikasi sistem baru yang akan dimasukkan ke dalam data center. Misal persyaratan password harus sesuai dengan peraturan sandi, daya perangkat harus 220 Volt, dll)
	A.14.1.2	Mengamankan layanan aplikasi pada jaringan publik	Informasi yang terlibat dalam layanan aplikasi yang melewati jaringan publik harus dilindungi dari aktivitas penipuan, perselisihan kontrak dan pengungkapan yang tidak sah dan modifikasi.		x				x		Belum ada perlindungan terhadap layanan jaringan publik dari penipuan, perselisihan kontrak, dll	Melakukan perlindungan menggunakan SSL pada website
	A.14.1.3	Melindungi transaksi layanan aplikasi	Informasi yang terlibat dalam aplikasi layanan transaksi harus dilindungi untuk mencegah transmisi yang tidak lengkap, mis-routing, perubahan pesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, duplikasi dan pengulangan pesan yang tidak sah.	x					x		Belum ada perlindungan terhadap Informasi yang terlibat dalam aplikasi layanan transaksi untuk mencegah transmisi yang tidak lengkap, mis-routing, perubahan pesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, duplikasi dan pengulangan pesan yang tidak sah.	Membuat proteksi terhadap software layanan transaksi untuk mencegah transaksi yang tidak lengkap
	A.14.2.	Keamanan pada proses pengembangan dan pendukung										

	A.14.2.1	Kebijakan pengembangan aman	Aturan untuk pengembangan perangkat lunak dan sistem harus ditetapkan dan diterapkan pada pengembangan dalam organisasi.		x							Belum memiliki kebijakan untuk pengembangan aplikasi tetapi belum relevan terhadap kebijakan SMKI	Aspek-aspek berikut harus dimasukkan dalam pertimbangan kebijakan pengembangan aplikasi: • Lingkungan pengembangan yang aman • Dokumentasi bertahap pengembangan sistem
	A.14.2.2.	Prosedur pengendalian perubahan sistem	Perubahan sistem dalam siklus pengembangan harus dikendalikan dengan menggunakan prosedur pengendalian perubahan formal.		x							Belum ada prosedur pengendalian perubahan pada beberapa perubahan IT yang ada.	Membuat prosedur pengendalian perubahan terhadap infrastruktur mencakup: • Persetujuan formal harus didapat sebelum dilakukan perubahan. • Update terhadap dokumentasi sistem mengikuti perubahan yang dilakukan. • Menjaga kendali untuk versi dari perubahan pada sistem informasi. • Memelihara audit trail dalam proses perubahan sistem
	A.14.2.3.	Kajian teknis aplikasi setelah operasi perubahan Platform	Ketika platform operasi yang berubah, aplikasi bisnis penting harus ditinjau dan diuji untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap operasi atau keamanan organisasi.		x							Belum pernah melakukan kajian teknis aplikasi, dan tidak ada dokumentasi tentang hal tersebut.	Bagian Security Coordinator dan tim pengembangan aplikasi harus meninjau dan menguji kembali apabila terdapat perubahan sistem operasi untuk memastikan tidak ada dampak yang dapat menghambat operasional bisnis maupun keamanan informasinya dan didokumentasikan
	A.14.2.4.	Pembatasan pada perubahan paket perangkat lunak	Modifikasi untuk paket perangkat lunak harus dikurangi, terbatas pada perubahan yang diperlukan dan semua perubahan harus dikendalikan secara ketat.		x							Tidak dilakukan pembatasan perubahan paket perangkat lunak, yang diperlukan penyesuaian dengan keamanan informasi	Bagian Aplikasi / Application Development harus mengendalikan perubahan atau modifikasi perangkat lunak yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dan bila memungkinkan, minta perubahan yang diinginkan supaya dikembangkan menjadi update standard oleh pihak vendor aplikasi

	A.14.2.5.	Prinsip rekayasa sistem yang aman	Prinsip untuk sistem aman rekayasa harus ditetapkan, didokumentasikan, dipelihara dan diterapkan pada setiap upaya implementasi sistem informasi.	x								Belum dilakukan prinsip rekayasa sistem yang aman	* Prosedur rekayasa sistem informasi yang aman harus berdasarkan pada prinsip teknik keamanan dan keamanan harus dirancang ke dalam semua lapisan arsitektur (bisnis, data, aplikasi dan teknologi) untuk menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan informasi dengan kebutuhan aksesibilitas * Teknologi baru harus dianalisis untuk risiko keamanan dan desain harus ditinjau terhadap pola serangan yang diketahui.
	A.14.2.6.	Lingkungan Pengembangan yang Aman	Organisasi harus menetapkan dan secara tepat melindungi lingkungan pengembangan yang aman untuk pengembangan sistem dan integrasi upaya yang mengcover seluruh siklus hidup pengembangan sistem.		x							Belum ada tempat pengembangan yang memadai secara keamanan informasi (ruang UAT masih jadi satu dengan akses masuk data center)	Organisasi harus menilai risiko yang terkait dengan upaya pengembangan sistem individual dan membangun lingkungan pengembangan yang aman untuk upaya pengembangan sistem tertentu * Menyekat ruang UAT agar tidak terganggu oleh keluar masuk personil data center.
	A.14.2.7.	Pengembangan outsourcing	Organisasi harus mengawasi dan memantau kegiatan pengembangan sistem outsourcing.		x							Belum dilakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan outsourcing.	Mengumpulkan bukti monitoring pengembangan software yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan mempertimbangkan: • Kesepakatan mengenai lisensi, kepemilikan source code serta hak atas kekayaan intelektual. • Adanya jaminan kualitas, akurasi dan pengendalian pengamanan. • Kesepakatan mengenai escrow apabila terjadi kesalahan atau kegagalan pada pekerjaan pengembangan oleh pihak ketiga.

													• Serangkaian pengujian sebelum instalasi dilakukan untuk mendeteksi malware
A.14.2.8.	Pengujian Sistem Keamanan	Pengujian fungsi keamanan harus dilakukan selama pengembangan.	x					x				Tidak dilakukan pengujian keamanan yang relevan terhadap SMKI	Sebuah sistem baru atau diperbarui memerlukan pengujian menyeluruh dan verifikasi selama proses pengembangan, termasuk penyusunan jadwal rinci kegiatan dan masukan uji dan output yang diharapkan di bawah berbagai kondisi
A.14.2.9.	Pengujian Sistem Penerimaan	Program pengujian penerimaan dan kriteria terkait harus ditetapkan untuk sistem informasi baru, upgrade dan versi baru.	x					x				Organisasi belum melakukan User Acceptable Test (UAT) sebelum memasukkan ke data center. Belum didapatkan dokumentasi pengujian UAT, dan belum ada ketentuan terdokumentasi untuk melakukan UAT	Membuat ketentuan / prosedur UAT dengan Kriteria penerimaan atau syarat lulus pengujian sistem harus mengacu kepada kesesuaian dengan user requirement dan kinerja sistem yang dibutuhkan
A.14.3.	test data												
A.14.3.1.	Perlindungan Terhadap Test Data	Data uji harus dipilih dengan hati-hati, dilindungi dan dikendalikan.	x					x					
POINT			0	5	0	0	0	5	0	0			
			5			28%	5			28%			
A.15	Hubungan dengan supplier												

A.15.1	Keamanan informasi dalam hubungan pemasok												
A.15.1.1.	Kebijakan keamanan informasi untuk hubungan pemasok	Persyaratan keamanan informasi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan akses pemasok untuk aset organisasi harus disepakati dengan pemasok dan didokumentasikan .	x					x				Belum ada kebijakan untuk pemasok, terhadap unsur keamanan informasi secara memadai.	Membuat kebijakan untuk pemasok, dengan memasukkan unsur keamanan informasi secara memadai, agar pemasok juga ikut menjaga kerahasiaan informasi
A.15.1.2	Menggaris bawahi keamanan dalam perjanjian pemasok	Semua persyaratan keamanan informasi yang relevan harus ditetapkan dan disetujui oleh setiap pemasok yang dapat mengakses, memproses, menyimpan, berkomunikasi, atau menyediakan komponen infrastruktur, informasi organisasi TI.	x					x				Belum memiliki persyaratan yang berhubungan dengan perjanjian pemasok	Mendokumentasikan dan menetapkan perjanjian pemasok (misal SLA, NDA) untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman antara organisasi dan pemasok mengenai kewajiban kedua belah pihak untuk memenuhi persyaratan keamanan informasi yang relevan
A.15.1.3.	Teknologi informasi dan komunikasi rantai pasokan	Perjanjian dengan pemasok harus mencakup persyaratan untuk mengatasi risiko keamanan informasi yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi layanan dan rantai pasokan produk.	x					x				Ketentuan pada organisasi belum ada persyaratan perjanjian antara pemasok dengan rantai pasokan produk (apabila pemasok melakukan subkon ke pihak lain) dan belum terkait keamanan informasi.	Meminta perjanjian keamanan informasi antara pemasok dengan rantai pasokan produk (apabila pemasok melakukan subkon ke pihak lain)
A.15.2.	Manajemen Pelayanan Pemasok												

	A.15.2.1.	Pemantauan dan Peninjauan layanan pemasok	Organisasi harus secara teratur memonitor, review dan audit terhadap layanan pengiriman supplier.	x								Belum dilakukan pemantauan terhadap layanan pemasok, belum monitoring, belum review dan belum dilakukan audit pada pemasok yang kritikal terhadap keamanan informasi	* Dilakukan Pemantauan dan Kajian (review) terhadap layanan yang disediakan oleh Pemasok meliputi antara lain: • Memantau tingkat layanan yang diberikan sesuai dengan perjanjian kerja. • Mengkaji laporan yang disampaikan oleh Pihak Ketiga dengan melakukan pertemuan berkala yang dituangkan dalam risalah rapat atau laporan progress pelaksanaan pekerjaan pemasok * Melakukan audit pada pemasok yang kritikal keamanan informasi
	A.15.2.2.	mengelola perubahan terhadap layanan supplier	Perubahan pada penyediaan jasa oleh pemasok, termasuk mempertahankan dan meningkatkan yang sudah ada kebijakan keamanan informasi, prosedur dan pengendalian, harus dikelola, mempertimbangkan kekritisan informasi bisnis, sistem dan proses yang terlibat dan penilaian risiko.	x								belum dilakukan pengelolaan perubahan terhadap layanan supplier dan belum terkait keamanan informasi	Melakukan review terhadap ketentuan pengelolaan perubahan terhadap layanan, untuk memasukkan unsur keamanan informasi dan menyatakan bahwa Seluruh perubahan terhadap layanan yang diberikan oleh pihak pemasok, termasuk operasional dan pemeliharaan harus dikelola dengan mempertimbangkan sistem yang dijalankan oleh organisasi
	POINT			0	0	0	0	0	0	0	0		
				0			0%	0			0%		
	A.16	Manajemen insiden keamanan informasi		x									
	A.16.1.	Pengelolaan insiden keamanan informasi dan perbaikan		x									
	A.16.1.1.	Tanggung jawab dan prosedur	Tanggung jawab dan prosedur manajemen harus ditetapkan untuk memastikan	x								Belum ada prosedur penanganan insiden dan belum ada tim yang	* Membuat struktur tim insiden respon, untuk mempercepat penanganan insiden sesuai dengan prosedur.

			respon yang cepat, efektif dan teratur terhadap insiden keamanan informasi.								menangani insiden, belum ada struktur dan disahkan dan belum ada prosedur terdokumentasi untuk penanganan insiden.	* Membuat prosedur manajemen insiden untuk lingkup SMKI
A.16.1.2.	Pelaporan kejadian keamanan informasi	Kejadian keamanan informasi harus dilaporkan melalui saluran manajemen yang tepat secepat mungkin.	x					x			Belum ada alur pelaporan kejadian keamanan informasi.	Membuat skema alur pelaporan detail apabila terjadi insiden terkait keamanan informasi
A.16.1.3.	Pelaporan kelemahan keamanan informasi	Karyawan dan kontraktor menggunakan sistem dan layanan informasi organisasi wajib mencatat dan melaporkan setiap kelemahan keamanan informasi diamati atau dicurigai dalam sistem atau jasa.	x					x			Belum ada alur pelaporan kelemahan keamanan informasi, secara terdokumentasi	Membuat skema alur pelaporan apabila terjadi kelemahan terkait keamanan informasi
A.16.1.4.	Penilaian dan keputusan tentang kejadian keamanan informasi	Kejadian keamanan informasi harus dinilai dan diputuskan jika mereka harus diklasifikasikan sebagai insiden keamanan informasi.	x					x			Belum ada penilaian setiap kejadian insiden keamanan informasi, Belum ada ketentuan skala klasifikasi, kriteria insiden keamanan informasi dan tindak lanjut insiden keamanan informasi	* Membuat penilaian insiden keamanan informasi. * Membuat ketentuan dan kriteria insiden keamanan informasi * Membuat tindak lanjut terhadap insiden keamanan informasi
A.16.1.5.	Respon untuk Insiden Keamanan Informasi	Insiden keamanan informasi harus direspon sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi.	x					x			Respon untuk insiden belum dilakukan, namun karena belum ada prosedur baku yang detail (prosedur yang ada masih terlalu umum).	Membuat skema alur pelaporan apabila terjadi insiden dan kelemahan tterkait keamanan informasi, beserta responnya

	A.16.1.6.	Belajar dari Keamanan Informasi	Pengetahuan yang diperoleh dari menganalisis dan menyelesaikan insiden keamanan informasi harus digunakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak dari kejadian di masa depan.	x								Belum pernah dilakukan evaluasi insiden dan belum dapat menunjukkan bukti terdokumentasi,	Melakukan evaluasi terdokumentasi insiden keamanan informasi yang terjadi terkait dampak dan biaya dari insiden keamanan informasi dan digunakan sebagai bahan masukan untuk proses peninjauan (review) dari kebijakan keamanan informasi
	A.16.1.7.	Pengumpulan Bukti	Organisasi harus menetapkan dan menerapkan prosedur untuk identifikasi, pengumpulan, akuisisi dan pelestarian informasi, yang dapat berfungsi sebagai bukti.	x								Belum ditetapkan dan diterapkan prosedur untuk identifikasi, pengumpulan, akuisisi dan pelestarian informasi, yang dapat berfungsi sebagai bukti.	Menetapkan dan menerapkan prosedur untuk identifikasi, pengumpulan, akuisisi dan pelestarian informasi, yang dapat berfungsi sebagai bukti.
POINT				0	0	0	0	0	0	0	0		
				0			0%	0			0%		
	A.17	Aspek keamanan informasi manajemen kelangsungan bisnis											
	A.17.1.	Kontinuitas Keamanan Informasi											
	A.17.1.1.	Perencanaan kelangsungan keamanan informasi	Organisasi harus menetapkan persyaratan untuk keamanan informasi dan kelangsungan manajemen keamanan informasi dalam situasi yang merugikan, misalnya selama krisis atau bencana.	x								Belum ada strategi/prosedur keberlangsungan keamanan informasi, dengan beberapa kasus (misal : listrik padam, jaringan down, kebakaran dll)	* Membuat prosedur keberlangsungan keamanan informasi, dengan beberapa kasus (misal : listrik padam, jaringan down, kebakaran dll) * Untuk keberlangsungan pasokan listrik, dipastikan ada prosedur untuk pemanggilan vendor atau pihak ketiga ketika genset tidak dapat dioperasikan * Keberlangsungan bisnis mempertimbangkan: • Pemahaman terhadap berbagai risiko yang dihadapi terhadap insiden pada operasional atau keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana alam yang mencakup

													<p>prioritisasi dari proses bisnis kritis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dari seluruh aset yang digunakan oleh proses bisnis kritis.
A.17.1.2.	Menerapkan Kontinuitas Keamanan Informasi	Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara proses, prosedur dan kontrol untuk memastikan tingkat kontinuitas yang diperlukan untuk keamanan informasi selama situasi yang merugikan.	x					x				<p>Belum ada tim terkait Keberlangsungan keamanan informasi (BCP), belum dilakukan training terkait keberlangsungan keamanan informasi, prosedur penanganan dan pemulihan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen harus menetapkan tim penanggulangan dan pemulihan bencana yang diwakili oleh masing-masing unit pemilik dari bisnis kritis. Proses koordinasi pemulihan BCP dilakukan oleh tim BCP sebagai penanggung jawab pemulihan yang didokumentasikan dalam kerangka kerja business continuity plan. • Rencana pelatihan untuk personel yang terlibat dalam proses-proses dalam business continuity plan (BCP) • Melengkapi prosedur operasional bisnis pada proses recovery dan restoration.
A.17.1.3.	Verifikasi, meninjau dan mengevaluasi kelangsungan keamanan informasi	Organisasi harus memverifikasi kontrol kontinuitas keamanan informasi yang ditetapkan dan dilaksanakan secara berkala dalam rangka	x					x				<p>Belum dilakukan verifikasi, meninjau dan mengevaluasi kelangsungan keamanan informasi</p>	<p>Melakukan verifikasi, meninjau dan mengevaluasi kelangsungan keamanan informasi</p>

			untuk memastikan bahwa kontrol kontinuitas yang digunakan adalah valid dan efektif dalam situasi yang merugikan.										
A.17.2.	Redundansi												
A.17.2.1.	Ketersediaan fasilitas pengolahan informasi	Fasilitas pengolahan informasi harus dilakukan dengan redundansi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan.		x					x			Tidak ada redundansi untuk jaringan (3 ISP), power (Dua Power UPS), AC, belum ada untuk colocation.	* Melakukan kerjasama atau membuat colocation, minimal untuk sistem/ data kritikal * Melakukan drill atau simulasi, untuk memastikan sistem redundansi berjalan
POINT				0	1	0	0	0	2	0	0		
				1		7%	2		13%				
A.18	Pemenuhan												
A.18.1.	Kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan kontrak												
A.18.1.1.	Identifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan kontrak	Semua legislatif hukum, peraturan, persyaratan kontrak yang relevan dan pendekatan organisasi untuk memenuhi persyaratan ini harus secara eksplisit diidentifikasi, didokumentasikan dan terus up to date untuk setiap sistem informasi dan organisasi.		x					x			Belum ada identifikasi dan review terkait pemenuhan per-undang2an yang berlaku	* Membuat Prosedur Pemenuhan Peraturan * Melakukan identifikasi dan review terkait pemenuhan per-undang2an yang berlaku

A.18.1.2.	Hak Kekayaan Intelektual	Prosedur yang tepat harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan dengan persyaratan legislatif, peraturan dan kontrak yang terkait dengan hak kekayaan intelektual dan penggunaan produk perangkat lunak proprietary.		x							Belum didapatkan prosedur yang terkait dengan kepatuhan hak kekayaan intelektual	* Membuat Kebijakan/Ketentuan terkait kepatuhan hak kekayaan intelektual. * Bagian pengembangan / aplikasi dan operasional (Network / Technical) memastikan penggunaan aset TI yang memiliki HAKI dan produk software berlisensi telah memenuhi kepatuhan terhadap peraturan, dan kebutuhan kontrak
A.18.1.3.	Perlindungan Terhadap Rekaman	Rekaman harus dilindungi dari kehilangan, kerusakan, pemalsuan, akses tidak sah dan rilis tidak sah, sesuai dengan legislative, peraturan, kontrak dan kebutuhan bisnis.		x							Belum memiliki prosedur pengendalian rekaman, namun harus disesuaikan dengan sistem manajemen keamanan informasi	Record perlu dikategorikan sesuai dengan tipenya seperti record akuntansi, record database, log dari transaksi atau hasil audit yang perlu dilengkapi dengan keterangan mengenai masa simpan dan masa retensi.
A.18.1.4.	Privasi dan perlindungan data pribadi	Privasi dan perlindungan informasi pribadi harus dipastikan sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku.	x						x		Organisasi belum melakukan kontrol melalui prosedur perlindungan informasi serta belum dilakukan review apakah sudah sesuai peraturan yang berlaku di Indoensia	* Melakukan review prosedur dengan peraturan yang berlaku di Indoensia * Information security officer bekerjasama dengan Internal Audit perlu memastikan penggunaan fasilitas informasi terkait kemungkinan penyalahgunaan fasilitas pengolahan informasi ini secara berkala melalui pelaksanaan audit.
A.18.1.5.	Peraturan kontrol kriptografi	Kontrol kriptografi harus digunakan sesuai dengan semua perjanjian yang relevan, undang-undang dan peraturan.	x						x		Belum dilakukan kontrol kriptografi dalam organisasi yang sesuai dengan undang-undang terkait	Pengendalian dalam penggunaan kriptografi harus diterapkan sesuai dengan ketentuan kebijakan keamanan informasi dan persetujuan dari komite keamanan
A.18.2.	Review keamanan informasi											

	A.18.2.1.	Review Independen Keamanan Informasi	Pendekatan organisasi untuk mengelola keamanan informasi dan implementasinya (objektif kontrol, kontrol, kebijakan, proses dan prosedur untuk keamanan informasi) harus ditinjau secara independen pada selang waktu terencana atau ketika terjadi perubahan yang signifikan.	x								Organisasi belum melakukan review independen keamanan informasi	Manajemen perlu untuk mengkoordinasi tinjauan terhadap proses keamanan informasi oleh pihak independen secara berkala untuk menjamin kesesuaian, kecukupan dan efektivitas dari sistem
	A.18.2.2.	Kepatuhan terhadap kebijakan dan standar keamanan	Manajer harus secara teratur meninjau kepatuhan pengolahan informasi dan prosedur dalam area tanggung jawab mereka dengan kebijakan yang tepat keamanan, standar dan persyaratan keamanan lainnya.	x								Belum ada review kepatuhan terhadap kebijakan	Review kepatuhan kebijakan harus dilakukan dalam rapat tinjauan manajemen minimal setahun sekali
	A.18.2.3.	Tinjauan kepatuhan teknis	Sistem informasi harus direview secara berkala untuk kepatuhan terhadap kebijakan dan standar keamanan informasi organisasi.	x								Sudah dilakukan pentest namun tidak secara berkala, baik internal ataupun eksternal	Melakukan pentest baik internal maupun eksternal, sehingga ada benchmark antara keduanya
POINT				0	3	0	0	0	3	0	0	SANGAT RENDAH	
				3			11%	3			11%		
POINT TOTAL				10%				21%					
				15%									

4.1.1. Maturity Performa Keamanan Informasi

Dari ketiga ruang lingkup yang dilakukan Gap Analisis yaitu, Aplikasi, Operasional Sandi, dan Data Center, yang memiliki rating maturity lebih baik adalah Data Center. Hal ini terlihat dari hasil penilaian gap analisis Pasal ISO 27001:2013 yang menunjukkan rating lebih baik daripada Aplikasi, dan Operasional Sandi yaitu sebesar 27%. Serta, hasil gap analisis Annex ISO 27001:2013 yang juga menunjukkan rating lebih baik daripada Aplikasi, dan Operasional Sandi yaitu sebesar 15%.

4.1.2. Saran Peluang dan Saran Performa Keamanan Informasi

Saran Peluang : Apabila Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sukses menerapkan saran perbaikan yang diberikan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto akan memiliki tingkat keamanan informasi yang lebih baik lagi, dari segi organisasi, prosedural, maupun teknis.

Saran Performa Keamanan Informasi : Peningkatan Performa Keamanan Informasi khususnya dalam layanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sangatlah penting untuk diupayakan agar sasaran performa dapat terpenuhi dan memenuhi harapan-harapan dari pihak terkait.

4.1.3. Rekomendasi Peluang Perbaikan

Adapun rekomendasi terhadap Peluang Perbaikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan identifikasi terhadap resiko Keamanan Informasi pada layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.
- Pembuatan informasi terdokumentasi / dokumen / SOP terkait layanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
- Sosialisasi dan implementasi informasi terdokumentasi / dokumen / SOP yang telah disusun

4.1.4. Rekomendasi Cara Perbaikan

- Pembuatan informasi terdokumentasi / dokumen / SOP terkait layanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto berdasarkan standar keamanan informasi, seperti : ISO 27001.
- Sosialisasi dan implementasi informasi terdokumentasi / dokumen / SOP yang telah disusun. Untuk sosialisasi bisa melalui team briefing, notice board (papan pengumuman), atau email

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.05.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			76,00 %	
Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.05.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Unit : 2.16.2.20.2.21.05.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				76,00 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp150.000.000	
Keluaran	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				76 %	
Hasil	Indeks Kami Bernilai Tinggi				17 nilai	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto						
Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Mojokerto						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan			2 Kebijakan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.240.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.240.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp20.100
	[#] Pembuatan SOP Kemanan Informasi					Rp20.100
	[-]					
	Karbon Spesifikasi : pembulatan	20100 Rupiah	lembar	1	0	Rp20.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp313.500
	[#] Pembuatan SOP Kemanan Informasi					Rp313.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Cetak Buku Spesifikasi : Kertas HVS, 80 Gsm, isi 25-50 lembar dan Cover	5 Buku	Buku	57.000	28.500	Rp313.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp906.400
	[#] Pembuatan SOP Kemanan Informasi					Rp906.400
	[-]					
	Air Mineral Spesifikasi : Kemasan Botol 330 MI	4 Dos	Dos	38.500	15.400	Rp169.400
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Biasa	10 Kotak	Orang / Kali	23.000	23.000	Rp253.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Biasa	10 Kotak	Orang / Kali	44.000	44.000	Rp484.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.760.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.760.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp23.760.000
	[#] Pembuatan SOP Kemanan Informasi					Rp23.760.000
	[-]					
	Upah / Gaji Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-1) Ahli Muda Spesifikasi : Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	OB	8.800.000	1.760.000	Rp19.360.000
	Upah Tenaga Surveyor / Drafter / Administrasi /Studi (SMA/SMK - D3) Spesifikasi : Pengalaman 1 thn sd 4 thn	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	OB	2.000.000	400.000	Rp4.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000

Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Mojokerto

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase Sistem Elektronik/Aset Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah	10 Sistem Elektronik

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.280.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.280.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp29.500
	[#]					
	[-]					
	Karbon Spesifikasi : pembulatan	29500 Rupiah	lembar	1	0	Rp29.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.798.500
	[#] Indeks KAMI					Rp599.500
	[-]					
	Cetak Buku Spesifikasi : Kertas HVS, 80 Gsm, isi 51-100 lembar dan Cover	5 Buku	Buku	109.000	54.500	Rp599.500
	[#] Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi					Rp1.199.000
	[-]					
	Cetak Buku Spesifikasi : Kertas HVS, 80 Gsm, isi 51-100 lembar dan Cover	10 Buku	Buku	109.000	109.000	Rp1.199.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.452.000
	[#] Indeks KAMI					Rp484.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Biasa	10 Kotak	Orang / Kali	44.000	44.000	Rp484.000
	[#] Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi					Rp968.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Biasa	20 Kotak	Orang / Kali	44.000	88.000	Rp968.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp71.720.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp71.720.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp71.720.000
	[#] Indeks KAMI					Rp16.280.000
	[-]					
	Upah / Gaji Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-1) Ahli Muda Spesifikasi : Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn	1 Orang / Bulan x 1 Bulan	OB	8.800.000	880.000	Rp9.680.000
	Upah Tenaga Surveyor / Drafter / Administrasi /Studi (SMA/SMK - D3) Spesifikasi : Pengalaman 1 thn sd 4 thn	3 Orang / Bulan x 1 Bulan	OB	2.000.000	600.000	Rp6.600.000
	[#] Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi					Rp55.440.000
	[-]					
	Upah / Gaji Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-1) Ahli Muda Spesifikasi : Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	OB	8.800.000	2.640.000	Rp29.040.000
	Upah Tenaga Surveyor / Drafter / Administrasi /Studi (SMA/SMK - D3) Spesifikasi : Pengalaman 1 thn sd 4 thn	4 Orang / Bulan x 3 Bulan	OB	2.000.000	2.400.000	Rp26.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp75.000.000	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Mojokerto					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik				3 Sistem Elektronik	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.080.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.640.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.640.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp140.000
	[#]					
	[-]					
	Karbon Spesifikasi : pembulatan	140000 Rupiah	lembar	1	0	Rp140.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.500.000
	[#] Belanja Jasa Peningkatan Keamanan Informasi					Rp7.500.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi (Prasmanan) Spesifikasi : Biasa	100 Orang	Per Orang	75.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.440.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp11.440.000
	[#] Belanja Jasa Peningkatan Keamanan Informasi					Rp11.440.000
	[-]					
	Upah / Gaji Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-2 - S-3) Ahli Muda Spesifikasi : Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn	1 Orang / Bulan	OB	10.400.000	1.040.000	Rp11.440.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.000.000
	[#] Belanja Jasa Peningkatan Keamanan Informasi					Rp9.000.000
	[-]					
	Biaya Tiket Kereta Api Spesifikasi : Mojokerto - Jakarta	5 Orang / Kali	Orang/Kali	540.000	0	Rp2.700.000
	Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp3.650.000
	Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp2.650.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp21.920.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp21.920.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp21.920.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp21.920.000
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise					Rp21.920.000
	[#] Belanja Jasa Peningkatan Keamanan Informasi					Rp21.920.000
	[-]					
	Lisensi Ssl Wild Card Spesifikasi : Geotrust Ssl /Tahun	5 Tahun	Tahun	4.384.000	0	Rp21.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp150.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0	<p>Mojosari, tanggal 03 Januari 2022</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p><u>Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si</u> NIP: 197009271991011002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Ir. MIEKE JULI ASTUTI, M.Si</u> NIP: 196407311990032005</p>				
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp37.669.900					
Mei	Rp1.250.000					
Juni	Rp1.250.000					
Juli	Rp85.220.500					
Agustus	Rp1.250.000					
September	Rp23.170.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp189.600					
Jumlah	Rp150.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				



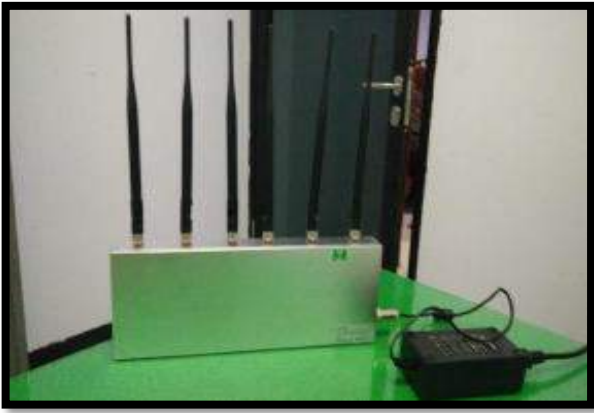
- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah

IKK Output :

- 1) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan. Kegiatan-kegiatan strategis yang terselenggara di tahun 2021, masih belum menerapkan sistem pengamanan sinyal, dikarenakan masih dalam tahapan pemahaman lebih lanjut terkait operasionalisasi peralatan pengacak sinyal/*jammer signal*. Kegiatan pengamanan sinyal pada kegiatan-kegiatan strategis direncanakan akan mulai diterapkan di tahun 2022.

Data pendukung : Dokumentasi Alat *Jammer Signal*

No	Sarana Pendukung Persandian	Kondisi
1.	Alat Pengacak Sinyal/ <i>jammer signal</i> 	Baik

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



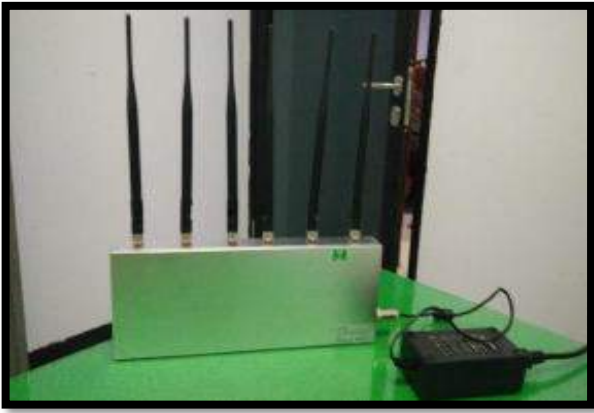
- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah

IKK Output :

- 1) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan. Kegiatan-kegiatan strategis yang terselenggara di tahun 2021, masih belum menerapkan sistem pengamanan sinyal, dikarenakan masih dalam tahapan pemahaman lebih lanjut terkait operasionalisasi peralatan pengacak sinyal/*jammer signal*. Kegiatan pengamanan sinyal pada kegiatan-kegiatan strategis direncanakan akan mulai diterapkan di tahun 2022.

Data pendukung : Dokumentasi Alat *Jammer Signal*

No	Sarana Pendukung Persandian	Kondisi
1.	Alat Pengacak Sinyal/ <i>jammer signal</i> 	Baik

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

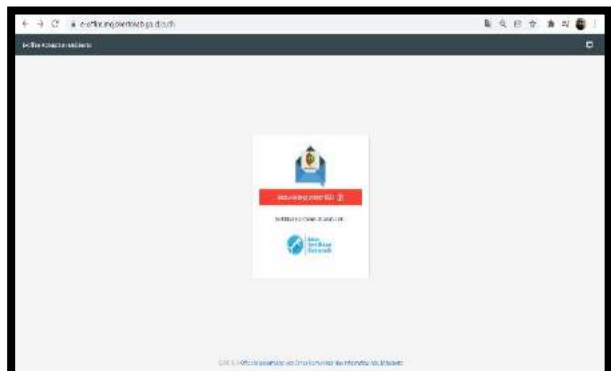
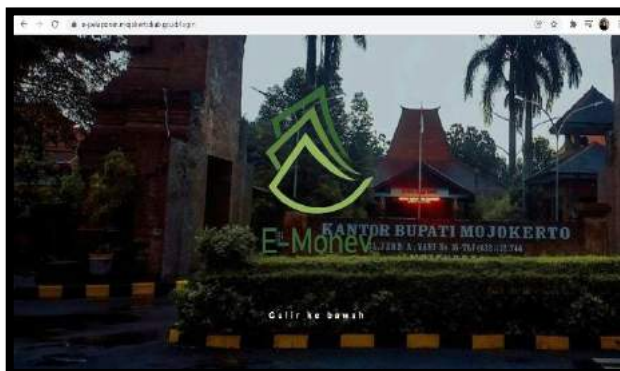
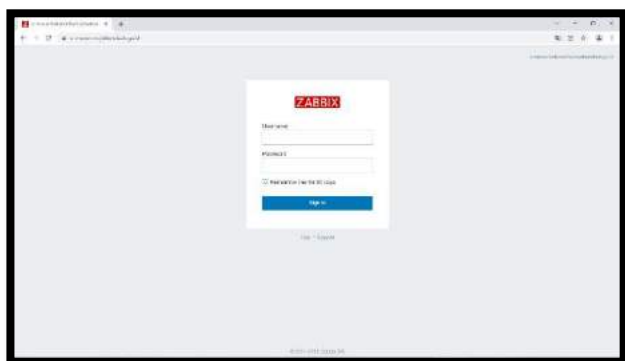
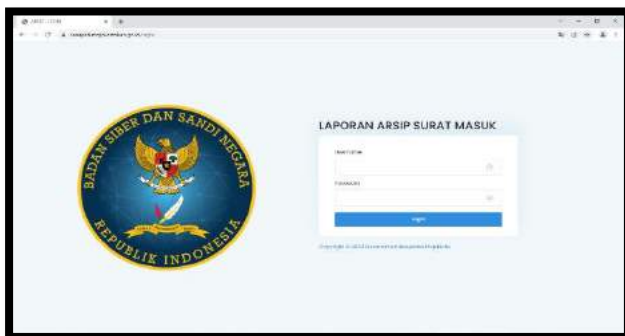
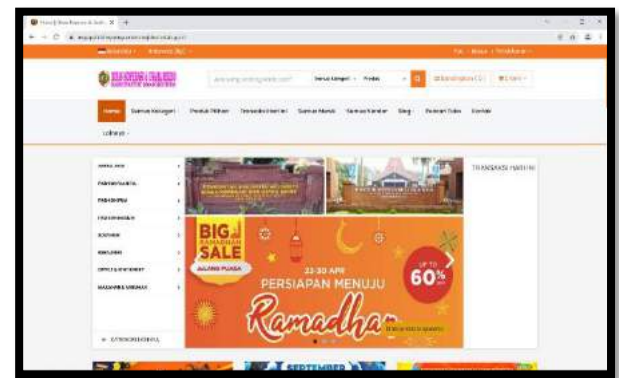
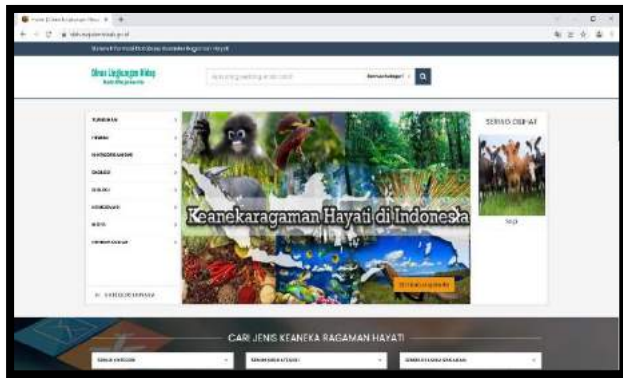
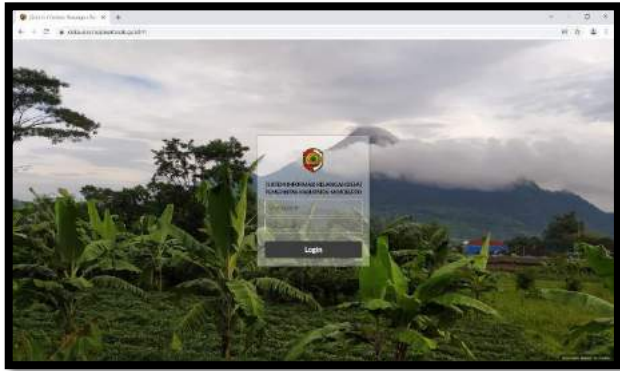
Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Lampiran Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Screenshot aplikasi siskeudes, antik, sikh, mojopahitshoppingcenter, klikmojo, e-pelaporan, e-office, e-mover, mojokertokab





- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah

IKK Output :

- 2) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.

Berdasarkan Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 terkait jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu sejumlah 244 dan yang telah terpasangkan Secure Socket Layer (SSL) yaitu sebanyak 10 aplikasi meliputi : siskeudes, antik, sikh, mojopahitshoppingcenter, sanapati, klikmojo, e-monev, sso, e-mover, mojokertokab) sedangkan khusus aplikasi persandian *mail-server* sanapati telah secara langsung diamankan oleh Lembaga Sandi Negara/BSSN.

Data Pendukung :

- Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP Analysis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021 hal. 41-42 & hal 172-179 (terlampir)
- Screenshot aplikasi siskeudes, antik, sikh, mojopahitshoppingcenter, klikmojo, e-monev, sso, e-mover, mojokertokab
- *Screenshoot mail-server* sanapati (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah

IKK Output :

- 3) Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah.

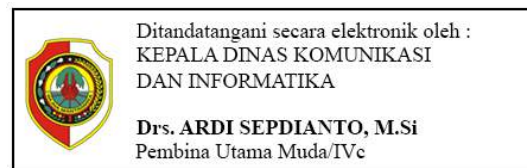
Untuk audit atas sistem elektronik/asset informasi rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan akan dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2022.

Data Pendukung :

- Surat Keterangan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (terlampir)
- DPA Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Tahun 2022 (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.05.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			76,00 %	
Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.05.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Unit : 2.16.2.20.2.21.05.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				76,00 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp150.000.000	
Keluaran	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				76 %	
Hasil	Indeks Kami Bernilai Tinggi				17 nilai	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto						
Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Mojokerto						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan			2 Kebijakan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.240.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.240.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp20.100
	[#] Pembuatan SOP Kemanan Informasi					Rp20.100
	[-]					
	Karbon Spesifikasi : pembulatan	20100 Rupiah	lembar	1	0	Rp20.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp313.500
	[#] Pembuatan SOP Kemanan Informasi					Rp313.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Cetak Buku Spesifikasi : Kertas HVS, 80 Gsm, isi 25-50 lembar dan Cover	5 Buku	Buku	57.000	28.500	Rp313.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp906.400
	[#] Pembuatan SOP Kemanan Informasi					Rp906.400
	[-]					
	Air Mineral Spesifikasi : Kemasan Botol 330 MI	4 Dos	Dos	38.500	15.400	Rp169.400
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Biasa	10 Kotak	Orang / Kali	23.000	23.000	Rp253.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Biasa	10 Kotak	Orang / Kali	44.000	44.000	Rp484.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.760.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.760.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp23.760.000
	[#] Pembuatan SOP Kemanan Informasi					Rp23.760.000
	[-]					
	Upah / Gaji Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-1) Ahli Muda Spesifikasi : Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	OB	8.800.000	1.760.000	Rp19.360.000
	Upah Tenaga Surveyor / Drafter / Administrasi /Studi (SMA/SMK - D3) Spesifikasi : Pengalaman 1 thn sd 4 thn	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	OB	2.000.000	400.000	Rp4.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000

Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Mojokerto

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase Sistem Elektronik/Aset Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah	10 Sistem Elektronik

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.280.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.280.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp29.500
	[#]					
	[-]					
	Karbon Spesifikasi : pembulatan	29500 Rupiah	lembar	1	0	Rp29.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.798.500
	[#] Indeks KAMI					Rp599.500
	[-]					
	Cetak Buku Spesifikasi : Kertas HVS, 80 Gsm, isi 51-100 lembar dan Cover	5 Buku	Buku	109.000	54.500	Rp599.500
	[#] Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi					Rp1.199.000
	[-]					
	Cetak Buku Spesifikasi : Kertas HVS, 80 Gsm, isi 51-100 lembar dan Cover	10 Buku	Buku	109.000	109.000	Rp1.199.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.452.000
	[#] Indeks KAMI					Rp484.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Biasa	10 Kotak	Orang / Kali	44.000	44.000	Rp484.000
	[#] Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi					Rp968.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Biasa	20 Kotak	Orang / Kali	44.000	88.000	Rp968.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp71.720.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp71.720.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp71.720.000
	[#] Indeks KAMI					Rp16.280.000
	[-]					
	Upah / Gaji Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-1) Ahli Muda Spesifikasi : Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn	1 Orang / Bulan x 1 Bulan	OB	8.800.000	880.000	Rp9.680.000
	Upah Tenaga Surveyor / Drafter / Administrasi /Studi (SMA/SMK - D3) Spesifikasi : Pengalaman 1 thn sd 4 thn	3 Orang / Bulan x 1 Bulan	OB	2.000.000	600.000	Rp6.600.000
	[#] Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi					Rp55.440.000
	[-]					
	Upah / Gaji Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-1) Ahli Muda Spesifikasi : Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	OB	8.800.000	2.640.000	Rp29.040.000
	Upah Tenaga Surveyor / Drafter / Administrasi /Studi (SMA/SMK - D3) Spesifikasi : Pengalaman 1 thn sd 4 thn	4 Orang / Bulan x 3 Bulan	OB	2.000.000	2.400.000	Rp26.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.000.000
Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Mojokerto						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik				3 Sistem Elektronik
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.080.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.640.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.640.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp140.000
	[#]					
	[-]					
	Karbon Spesifikasi : pembulatan	140000 Rupiah	lembar	1	0	Rp140.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.500.000
	[#] Belanja Jasa Peningkatan Keamanan Informasi					Rp7.500.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi (Prasmanan) Spesifikasi : Biasa	100 Orang	Per Orang	75.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.440.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp11.440.000
	[#] Belanja Jasa Peningkatan Keamanan Informasi					Rp11.440.000
	[-]					
	Upah / Gaji Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-2 - S-3) Ahli Muda Spesifikasi : Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn	1 Orang / Bulan	OB	10.400.000	1.040.000	Rp11.440.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.000.000
	[#] Belanja Jasa Peningkatan Keamanan Informasi					Rp9.000.000
	[-]					
	Biaya Tiket Kereta Api Spesifikasi : Mojokerto - Jakarta	5 Orang / Kali	Orang/Kali	540.000	0	Rp2.700.000
	Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp3.650.000
	Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp2.650.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp21.920.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp21.920.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp21.920.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp21.920.000
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise					Rp21.920.000
	[#] Belanja Jasa Peningkatan Keamanan Informasi					Rp21.920.000
	[-]					
	Lisensi Ssl Wild Card Spesifikasi : Geotrust Ssl /Tahun	5 Tahun	Tahun	4.384.000	0	Rp21.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp150.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0	<p>Mojosari, tanggal 03 Januari 2022</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p><u>Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si</u> NIP: 197009271991011002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Ir. MIEKE JULI ASTUTI, M.Si</u> NIP: 196407311990032005</p>				
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp37.669.900					
Mei	Rp1.250.000					
Juni	Rp1.250.000					
Juli	Rp85.220.500					
Agustus	Rp1.250.000					
September	Rp23.170.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp189.600					
Jumlah	Rp150.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				



DATA OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021

No	Titik pada PHKS	Kondisi Ratelda	Status
1	Kecamatan Sooko	Baik	Aktif
2	Kecamatan Puri	Baik	Aktif
3	Kecamatan Trowulan	Baik	Aktif
4	Kecamatan Dlanggu	Baik	Aktif
5	Kecamatan Jatrejo	Baik	Aktif
6	Kecamatan Gondang	Baik	Aktif
7	Kecamatan Mojoanyar	Baik	Aktif
8	Kecamatan Pacet	Baik	Aktif
9	Kecamatan Jetis	Baik	Aktif
10	Kecamatan Kemlagi	Baik	Aktif
11	Kecamatan Gedeg	Baik	Aktif
12	Kecamatan Kutorejo	Baik	Aktif
13	Kecamatan Bangsal	Baik	Aktif
14	Kecamatan Trawas	Baik	Aktif
15	Kecamatan Dawar Blandong	Baik	Aktif
16	Kecamatan Mojosari	Tidak Berfungsi	Tidak Aktif
17	Kecamatan Pungging	Tidak Berfungsi	Tidak Aktif
18	Kecamatan Ngoro	Tidak Berfungsi	Tidak Aktif

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Dokumentasi kegiatan monitoring pemeliharaan peralatan ORARI/Ratelda



Dokumentasi kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi





Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah

IKK Output :

- 4) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan.

Untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan jaringan hubungan persandian pada tahun 2021, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi telah melaksanakan kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi dengan realisasi kinerja yaitu 15 jaring komunikasi sandi karena anggaran yang mengalami *refocusing* sehingga tidak bisa mencapai 18 jaring komunikasi sandi yang termasuk didalamnya kegiatan pemeliharaan peralatan radio telekomunikasi daerah/ratelda. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaring komunikasi sandi terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya beberapa pesawat radio telekomunikasi daerah/ratelda yang terdapat di kecamatan tidak berfungsi diantaranya yaitu kecamatan ngoro, mojosari dan punggging sehingga jika ada berita dari Garuda Induk (Dinas Komunikasi dan Informatika) berita tersebut tidak tersampaikan.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tahun 2021, maka akan dilaksanakan kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi yang telah dianggarkan pada APBD Tahun 2022. Sedangkan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi/PHKS yang memuat titik/Jaring Komunikasi Sandi/JKS yang digelar dalam lingkup Pemda Kab Mojokerto di tahun 2021 dan 2022 masih ditargetkan sejumlah 18 JKS yang meliputi 18 kecamatan di lingkup Kabupaten Mojokerto, akan tetapi peralatan yang mendukung JKS yaitu radio telekomunikasi daerah yang berfungsi dengan baik di tahun 2021 sejumlah 15 di tiap kecamatan, dan 1 untuk Garuda Induk pada Dinas Komunikasi dan Informatika sedangkan 3 ratelda pada kecamatan ngoro, mojosari dan punggging tidak berfungsi dan memerlukan perbaikan.

Data Pendukung :

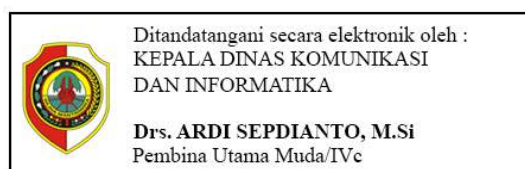
- Dokumentasi kegiatan monitoring pemeliharaan peralatan ORARI di kecamatan (terlampir)
- Dokumentasi kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi (terlampir)
- DPA Tahun 2022 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB XXIV
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN STATISTIK

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi :	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
Rumus :	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{50}{57} \times 100\%$	87,72%	Berdasarkan Buku Desk Data Tahun 2021 terdapat 50 OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Keterangan :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara ▪ Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral ▪ Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 			

- Penjelasan IKK Output

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1) Tersedianya buku profil daerah	Ada/Tidak	Ada	Pada tahun 2021 Diskominfo telah membuat Video Infografis Profil Kabupaten Mojokerto
	2) Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	25	Pada tahun 2021 telah dilaksanakan survey statistik sektoral sebanyak 25 kegiatan. Rincian sebagaimana terlampir
	3) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	12	Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kompilasi statistik sektoral sebanyak 12 kegiatan. Rincian sebagaimana terlampir
	4) Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	16	Pada tahun 2021 survey statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS sebanyak 16 kegiatan. Rincian sebagaimana terlampir

	5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	8	Pada tahun 2021 kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS sebanyak 8 kegiatan. Rincian sebagaimana terlampir
	6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik}} \times 100\% = \frac{37}{37} \times 100\% = 100\%$	100%	Daftar rincian metadata kegiatan statistik sektoral sebagaimana terlampir
	7)	Persentase kelengkapan metadata indikator statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\% = \frac{33}{41} \times 100\% = 80,49\%$	80,49%	Daftar rincian metadata indikator statistik sektoral sebagaimana terlampir

2) IKK Outcome : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			
Rumus	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\% = \frac{50}{57} \times 100\% = 87,72\%$			Berdasarkan Buku Desk Data Tahun 2021 terdapat 50 OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait. 			

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BUKTI PENDUKUNG JUMLAH SURVEY STATISTIK SEKTORAL YANG MENDAPAT REKOMENDASI DARI BPS

romantikbps.go.id/rekomendasi/rekomendasisaya/

Rekomendasi Rekomendasi Saya

Daftar Rekomendasi Yang Saya Ajukan

Menampilkan 1-17 dari 17 Rekomendasi

No	Judul	Waktu Pengajuan	Status Rekomendasi	Nomor Rekomendasi	Surat Rekomendasi	Surat Ketidaksiyakan	Waktu Divalidasi	File pendukung	Aksi
1	Survei Kepuasan Masyarakat	10 Februari 2021 Pukul 14:16	LAYAK	V-21.3516.003	Download	--	23 Februari 2021 Pukul 14:12		
2	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto	09 Februari 2021 Pukul 10:06	LAYAK	V-21.3516.007	Download	--	01 Maret 2021 Pukul 13:10		
3	Penutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	17 Februari 2021 Pukul 21:08	LAYAK	V-21.3516.005	Download	--	26 Februari 2021 Pukul 14:10		
4	Data BUMDesa Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur	17 Februari 2021 Pukul 21:00	DIBATALKAN	--	--	--	22 Februari 2021 Pukul 13:57		
5	Indeks Persepsi Korupsi	10 Februari 2021 Pukul 14:26	LAYAK	V-21.3516.002	Download	--	23 Februari 2021 Pukul 14:11		
6	Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata	10 Februari 2021 Pukul 14:00	LAYAK	V-21.3516.001	Download	--	26 Februari 2021 Pukul 14:06		
7	Updating Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur	17 Februari 2021 Pukul 21:16	LAYAK	V-21.3516.004	Download	--	26 Februari 2021 Pukul 14:11		
8	Penyusunan Profil Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	01 April 2021 Pukul 09:30	LAYAK	V-21.3516.009	Download	--	05 April 2021 Pukul 09:22		
9	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei / Pemetaan	30 Maret 2021 Pukul 11:37	LAYAK	V-21.3516.008	Download	--	31 Maret 2021 Pukul 09:10		
10	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	09 Februari 2021 Pukul 09:41	LAYAK	V-21.3516.006	Download	--	01 Maret 2021 Pukul 15:24		
11	Analisis Indeks Ketrukunan Umat Beragama	13 April 2021 Pukul 16:38	LAYAK	V-21.3516.011	Download	--	10 April 2021 Pukul 09:34		
12	Penghitungan Angka Inflasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	13 April 2021 Pukul 14:22	LAYAK	V-21.3516.012	Download	--	15 April 2021 Pukul 09:36		
13	Analisis Indeks Kesehatan Sosial	13 April 2021 Pukul 16:50	LAYAK	V-21.3516.010	Download	--	15 April 2021 Pukul 09:34		
14	Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto	01 November 2021 Pukul 10:56	LAYAK	V-21.3516.015	Download	--	02 November 2021 Pukul 13:23		
15	Indeks Partisipasi Masyarakat	24 Agustus 2021 Pukul 11:36	LAYAK	V-21.3516.013	Download	--	03 September 2021 Pukul 10:16		
16	PENYUSUNAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021	26 September 2021 Pukul 08:29	LAYAK	V-21.3516.014	Download	--	01 Oktober 2021 Pukul 13:47		
17	Survei Telekomunikasi	29 Oktober 2021 Pukul 14:09	LAYAK	V-21.3516.016	Download	--	02 November 2021 Pukul 13:22		

BUKTI PENDUKUNG JUMLAH KOMPILASI STATISTIK SEKTORAL YANG MENDAPAT REKOMENDASI DARI BPS

romantik.bps.go.id/rekomendaskompromin/rekomendasiasaya/

Rekomendasi Kompromin Rekomendasi Saya

Daftar Rekomendasi Yang Saya Ajukan

Menampilkan 1-10 dari 12 Rekomendasi

No	Judul	Waktu Pengajuan	Status Rekomendasi	Nomor Rekomendasi	Surat Rekomendasi	Surat Ketidaksiyakan	Waktu Divalidasi	File pendukung	Aksi
1	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021	13 April 2021 Pukul 13:54	LAYAK	K-21.3516.007	Download	—	16 April 2021 Pukul 10:32		
2	Indeks Partisipasi Masyarakat	24 Agustus 2021 Pukul 14:02	DIBATALKAN	—	—	—	15 September 2021 Pukul 09:02		
3	Penyusunan Desk Elemen Data Kabupaten Mojokerto	14 Desember 2020 Pukul 14:49	LAYAK	K-20.3516.001	Download	—	05 Januari 2021 Pukul 11:57		
4	Database Potensi Pariwisata	10 Februari 2021 Pukul 11:08	LAYAK	K-21.3516.001	Download	—	26 Februari 2021 Pukul 14:14		
5	Kompilasi Produk Administrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	09 Februari 2021 Pukul 09:18	DIBATALKAN	—	—	—	01 Maret 2021 Pukul 13:45		
6	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	17 Februari 2021 Pukul 20:29	DIBATALKAN	—	—	—	22 Februari 2021 Pukul 14:05		
7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	17 Februari 2021 Pukul 20:46	DIBATALKAN	—	—	—	22 Februari 2021 Pukul 14:03		
8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	17 Februari 2021 Pukul 11:18	LAYAK	K-21.3516.002	Download	—	01 Maret 2021 Pukul 13:11		
9	Profil Gender dan Anak Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	10 Februari 2021 Pukul 09:25	LAYAK	K-21.3516.003	Download	—	26 Februari 2021 Pukul 14:13		
10	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	10 Februari 2021 Pukul 10:45	LAYAK	K-21.3516.004	Download	—	26 Februari 2021 Pukul 14:14		

Hubungi Kami

Gedung 2 Lantai 1,
Pelayanan Statistik Terpadu, Badan Pusat Statistik,
Jl. Dr. Sutomo 6-8, Jakarta 10710 Indonesia

psl@bps.go.id
Telp (62-21) 3907057 (direct)
Telp (62-21) 3941195, 3942506, 3910291 ext. 3244
Faks (62-21) 3857046
NRMP+KAW (+6.1663197.106.8362427)

MSA

Unduh
Standar Pelayanan
Maklumat Pelayanan
Pelayanan Statistik Terpadu
Pengajuan

romantik.bps.go.id/rekomendaskompromin/rekomendasiasaya/

Rekomendasi Kompromin Rekomendasi Saya

Daftar Rekomendasi Yang Saya Ajukan

Menampilkan 11-12 dari 12 Rekomendasi

No	Judul	Waktu Pengajuan	Status Rekomendasi	Nomor Rekomendasi	Surat Rekomendasi	Surat Ketidaksiyakan	Waktu Divalidasi	File pendukung	Aksi
11	Buku Profil ASN / Buletin Kepegawaian Kabupaten Mojokerto Semester II Tahun 2020	01 April 2021 Pukul 15:18	LAYAK	K-21.3516.006	Download	—	15 April 2021 Pukul 09:37		
12	Data Statistik Poternakan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	24 Maret 2021 Pukul 10:01	LAYAK	K-21.3516.005	Download	—	31 Maret 2021 Pukul 09:12		



**Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto**

- 1) **IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.**

2. IKK Output

Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan.

Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan pada tahun 2021 sebanyak 25 kegiatan. Rincian kegiatan survey statistik sektoral sebagaimana terlampir.


Data Pendukung :

Data Kegiatan Survey Statistik Sektoral yang Diajukan kepada BPS Kabupaten Mojokerto (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BUKTI PENDUKUNG JUMLAH KOMPILASI STATISTIK SEKTORAL YANG MENDAPAT REKOMENDASI DARI BPS

romantik.bps.go.id/rekomendaskompromin/rekomendasiasaya/

Rekomendasi Kompromin Rekomendasi Saya

Daftar Rekomendasi Yang Saya Ajukan

Menampilkan 1-10 dari 12 Rekomendasi

No	Judul	Waktu Pengajuan	Status Rekomendasi	Nomor Rekomendasi	Surat Rekomendasi	Surat Ketidaksiyakan	Waktu Divalidasi	File pendukung	Aksi
1	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021	13 April 2021 Pukul 13:54	LAYAK	K-21.3516.007	Download	—	16 April 2021 Pukul 10:32		
2	Indeks Partisipasi Masyarakat	24 Agustus 2021 Pukul 14:02	DIBATALKAN	—	—	—	15 September 2021 Pukul 09:02		
3	Penyusunan Desk Elemen Data Kabupaten Mojokerto	14 Desember 2020 Pukul 14:49	LAYAK	K-20.3516.001	Download	—	05 Januari 2021 Pukul 11:57		
4	Database Potensi Pariwisata	10 Februari 2021 Pukul 11:08	LAYAK	K-21.3516.001	Download	—	26 Februari 2021 Pukul 14:14		
5	Kompilasi Produk Administrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	09 Februari 2021 Pukul 09:18	DIBATALKAN	—	—	—	01 Maret 2021 Pukul 13:45		
6	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	17 Februari 2021 Pukul 20:29	DIBATALKAN	—	—	—	22 Februari 2021 Pukul 14:05		
7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	17 Februari 2021 Pukul 20:46	DIBATALKAN	—	—	—	22 Februari 2021 Pukul 14:03		
8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	17 Februari 2021 Pukul 11:18	LAYAK	K-21.3516.002	Download	—	01 Maret 2021 Pukul 13:11		
9	Profil Gender dan Anak Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	10 Februari 2021 Pukul 09:25	LAYAK	K-21.3516.003	Download	—	26 Februari 2021 Pukul 14:13		
10	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	10 Februari 2021 Pukul 10:45	LAYAK	K-21.3516.004	Download	—	26 Februari 2021 Pukul 14:14		

Hubungi Kami

Gedung 2 Lantai 1,
Pelayanan Statistik Terpadu, Badan Pusat Statistik
Jl. Dr. Sutomo 6-8, Jakarta 10710 Indonesia

✉ psl@bps.go.id
☎ Telp (62-21) 3907057 (direct)
Telp (62-21) 3941195, 3942506, 3910291 ext. 3244
Faks (62-21) 3857046
📍 RRMP+JW (-6.1663197,106.8362427)



Unduh

Standar Pelayanan
Maklumat Pelayanan
Pelayanan Statistik Terpadu
Pengajuan

romantik.bps.go.id/rekomendaskompromin/rekomendasiasaya/

Rekomendasi Kompromin Rekomendasi Saya

Daftar Rekomendasi Yang Saya Ajukan

Menampilkan 11-12 dari 12 Rekomendasi

No	Judul	Waktu Pengajuan	Status Rekomendasi	Nomor Rekomendasi	Surat Rekomendasi	Surat Ketidaksiyakan	Waktu Divalidasi	File pendukung	Aksi
11	Buku Profil ASN / Buletin Kepegawaian Kabupaten Mojokerto Semester II Tahun 2020	01 April 2021 Pukul 15:18	LAYAK	K-21.3516.006	Download	—	15 April 2021 Pukul 09:37		
12	Data Statistik Poternakan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	24 Maret 2021 Pukul 10:01	LAYAK	K-21.3516.005	Download	—	31 Maret 2021 Pukul 09:12		



Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

- 1) **IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.**

3. IKK Output

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan.

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan pada tahun 2021 sebanyak 12 kegiatan. Rincian kegiatan kompilasi statistik sektoral sebagaimana terlampir.

Data Pendukung :

Data Kegiatan Kompilasi Statistik Sektoral yang Diajukan kepada BPS Kabupaten Mojokerto (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BUKTI PENDUKUNG JUMLAH SURVEY STATISTIK SEKTORAL YANG MENDAPAT REKOMENDASI DARI BPS

romantikbps.go.id/rekomendasi/rekomendasisaya/

Rekomendasi Rekomendasi Saya

Daftar Rekomendasi Yang Saya Ajukan

Menampilkan 1-17 dari 17 Rekomendasi

No	Judul	Waktu Pengajuan	Status Rekomendasi	Nomor Rekomendasi	Surat Rekomendasi	Surat Ketidaksiyakan	Waktu Divalidasi	File pendukung	Aksi
1	Survei Kepuasan Masyarakat	10 Februari 2021 Pukul 14:16	LAYAK	V-21.3516.003	Download	--	23 Februari 2021 Pukul 14:12		
2	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto	09 Februari 2021 Pukul 10:06	LAYAK	V-21.3516.007	Download	--	01 Maret 2021 Pukul 13:10		
3	Penutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	17 Februari 2021 Pukul 21:08	LAYAK	V-21.3516.005	Download	--	26 Februari 2021 Pukul 14:10		
4	Data BUMDesa Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur	17 Februari 2021 Pukul 21:00	DIBATALKAN	--	--	--	22 Februari 2021 Pukul 13:57		
5	Indeks Persepsi Korupsi	10 Februari 2021 Pukul 14:26	LAYAK	V-21.3516.002	Download	--	23 Februari 2021 Pukul 14:11		
6	Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata	10 Februari 2021 Pukul 14:00	LAYAK	V-21.3516.001	Download	--	26 Februari 2021 Pukul 14:06		
7	Updating Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur	17 Februari 2021 Pukul 21:16	LAYAK	V-21.3516.004	Download	--	26 Februari 2021 Pukul 14:11		
8	Penyusunan Profil Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	01 April 2021 Pukul 09:30	LAYAK	V-21.3516.009	Download	--	05 April 2021 Pukul 09:22		
9	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei / Pemetaan	30 Maret 2021 Pukul 11:37	LAYAK	V-21.3516.008	Download	--	31 Maret 2021 Pukul 09:10		
10	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	09 Februari 2021 Pukul 09:41	LAYAK	V-21.3516.006	Download	--	01 Maret 2021 Pukul 15:24		
11	Analisis Indeks Ketrukunan Umat Beragama	13 April 2021 Pukul 16:38	LAYAK	V-21.3516.011	Download	--	10 April 2021 Pukul 09:34		
12	Penghitungan Angka Inflasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	13 April 2021 Pukul 14:22	LAYAK	V-21.3516.012	Download	--	15 April 2021 Pukul 09:36		
13	Analisis Indeks Kesehatan Sosial	13 April 2021 Pukul 16:50	LAYAK	V-21.3516.010	Download	--	15 April 2021 Pukul 09:34		
14	Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto	01 November 2021 Pukul 10:56	LAYAK	V-21.3516.015	Download	--	02 November 2021 Pukul 13:23		
15	Indeks Partisipasi Masyarakat	24 Agustus 2021 Pukul 11:36	LAYAK	V-21.3516.013	Download	--	03 September 2021 Pukul 10:16		
16	PENYUSUNAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021	26 September 2021 Pukul 08:29	LAYAK	V-21.3516.014	Download	--	01 Oktober 2021 Pukul 13:47		
17	Survei Telekomunikasi	29 Oktober 2021 Pukul 14:09	LAYAK	V-21.3516.016	Download	--	02 November 2021 Pukul 13:22		



Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

- 1) **IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.**

4. IKK Output

Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS.

Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS pada tahun 2021 sebanyak 16 kegiatan. Rincian kegiatan survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS sebagaimana terlampir.

Data Pendukung :

Data Kegiatan Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi BPS melalui aplikasi ROMANTIK (*romantik.bps.go.id*) (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Dr. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BUKTI PENDUKUNG JUMLAH KOMPILASI STATISTIK SEKTORAL YANG MENDAPAT REKOMENDASI DARI BPS

romantik.bps.go.id/rekomendaskompromin/rekomendasiasaya/

Rekomendasi Kompromin Rekomendasi Saya

Daftar Rekomendasi Yang Saya Ajukan

Menampilkan 1-10 dari 12 Rekomendasi

No	Judul	Waktu Pengajuan	Status Rekomendasi	Nomor Rekomendasi	Surat Rekomendasi	Surat Ketidaksiyakan	Waktu Divalidasi	File pendukung	Aksi
1	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021	13 April 2021 Pukul 13:54	LAYAK	K-21.3516.007	Download	—	16 April 2021 Pukul 10:32		
2	Indeks Partisipasi Masyarakat	24 Agustus 2021 Pukul 14:02	DIBATALKAN	—	—	—	15 September 2021 Pukul 09:02		
3	Penyusunan Desk Elemen Data Kabupaten Mojokerto	14 Desember 2020 Pukul 14:49	LAYAK	K-20.3516.001	Download	—	05 Januari 2021 Pukul 11:57		
4	Database Potensi Pariwisata	10 Februari 2021 Pukul 11:08	LAYAK	K-21.3516.001	Download	—	26 Februari 2021 Pukul 14:14		
5	Kompilasi Produk Administrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	09 Februari 2021 Pukul 09:18	DIBATALKAN	—	—	—	01 Maret 2021 Pukul 13:45		
6	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	17 Februari 2021 Pukul 20:29	DIBATALKAN	—	—	—	22 Februari 2021 Pukul 14:05		
7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	17 Februari 2021 Pukul 20:46	DIBATALKAN	—	—	—	22 Februari 2021 Pukul 14:03		
8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	17 Februari 2021 Pukul 11:18	LAYAK	K-21.3516.002	Download	—	01 Maret 2021 Pukul 13:11		
9	Profil Gender dan Anak Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	10 Februari 2021 Pukul 09:25	LAYAK	K-21.3516.003	Download	—	26 Februari 2021 Pukul 14:13		
10	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	10 Februari 2021 Pukul 10:45	LAYAK	K-21.3516.004	Download	—	26 Februari 2021 Pukul 14:14		

Hubungi Kami

Gedung 2 Lantai 1,
Pelayanan Statistik Terpadu, Badan Pusat Statistik
Jl. Dr. Sutomo 6-8, Jakarta 10710 Indonesia

✉ psl@bps.go.id
☎ Telp (62-21) 3907057 (direct)
Telp (62-21) 3841195, 3942506, 3810291 ext. 3244
Faks (62-21) 3857046
📍 RRMP+JAW (-6.1663197,106.8362427)



Unduh

- Standar Pelayanan
- Maklumat Pelayanan
- Pelayanan Statistik Terpadu
- Pengajuan

romantik.bps.go.id/rekomendaskompromin/rekomendasiasaya/

Rekomendasi Kompromin Rekomendasi Saya

Daftar Rekomendasi Yang Saya Ajukan

Menampilkan 11-12 dari 12 Rekomendasi

No	Judul	Waktu Pengajuan	Status Rekomendasi	Nomor Rekomendasi	Surat Rekomendasi	Surat Ketidaksiyakan	Waktu Divalidasi	File pendukung	Aksi
11	Buku Profil ASN / Buletin Kepegawaian Kabupaten Mojokerto Semester II Tahun 2020	01 April 2021 Pukul 15:18	LAYAK	K-21.3516.006	Download	—	15 April 2021 Pukul 09:37		
12	Data Statistik Poternakan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	24 Maret 2021 Pukul 10:01	LAYAK	K-21.3516.005	Download	—	31 Maret 2021 Pukul 09:12		



- 1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

5. IKK Output

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS.

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS pada Tahun 2021 sebanyak 8 kegiatan. Rincian kegiatan kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS sebagaimana terlampir.

Data Pendukung :

- Data Kegiatan Kompilasi Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi BPS melalui aplikasi ROMANTIK (*romantik.bps.go.id*) (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc




METADATA KEGIATAN DAN METADATA INDIKATOR

No	OPD/Instansi	Judul	Metadata Indikator	JENIS
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto	Buku Profil ASN / Buletin Kepegawaian Kabupaten Mojokerto Semester II Tahun 2020	-	KPA
2	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	Kompilasi Penyusunan Target PAD	Capaian Realisasi PAD	KPA
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	-	KPA
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Indeks Partisipasi Masyarakat	Indeks Partisipasi Masyarakat	FS3
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Analisis Variabel Determinan yang Mempengaruhi Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2020	Indeks Pembangunan Manusia	KPA
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Penghitungan Angka Inflasi Kabupaten Mojokerto	Inflasi	FS3
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mojokerto	Indeks Kerukunan Umat Beragama	FS3
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Analisis Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Mojokerto	-	FS3
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Analisis Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	KPA
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto	Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
13	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto	Survei Telekomunikasi Kabupaten Mojokerto	Media Informasi	FS3
14	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto	Penyusunan Desk Elemen Data Kabupaten Mojokerto	-	KPA
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Penyusunan Profil Usaha Mikro Kab. Mojokerto	Usaha Mikro	FS3
16	Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto	Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan di Kabupaten Mojokerto	Skor Pola Pangan Harapan	FS3
			Neraca bahan makanan	
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto	Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata	Pengeluaran Wisatawan	FS3
18	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto	Database Potensi Pariwisata	potensi wisata	KPA
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto	Pengumpulan Data Curah Hujan Kabupaten Mojokerto	-	KPA
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto	Updating Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur	Tingkat Perkembangan Desa	FS3
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto	Data Bumdesa Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur	-	KPA
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Mojokerto	Indeks Desa Membangun	FS3
			Indeks Ketahanan Lingkungan	
			Indeks Ketahanan Ekonomi	
			Indeks Ketahanan Sosial	
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto	Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Profil Gender dan Anak Kabupaten Mojokerto	-	KPA

25	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-	KPA
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto	Pendataan Industri Kecil Kabupaten Mojokerto	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
27	Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto	Data Statistik Peternakan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	Potensi Peternakan	KPA
28	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto	Survei Kepuasan Pelayanan Ketenagakerjaan	Kepuasan masyarakat	FS3
29	Kantor Kecamatan Gedeg	Survei Kepuasan Masyarakat Kantor Kecamatan Gedeg	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
30	Kantor Kecamatan Puri	Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Puri	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
31	KB Samsat Mojokerto	Survei Kepuasan Masyarakat KB Samsat Mojokerto	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
32	Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IB	Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IB	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
33	Pengadilan Negeri Mojokerto	Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Mojokerto	Kepuasan masyarakat	FS3
34	Pengadilan Negeri Mojokerto	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Mojokerto	Indeks Anti Korupsi	FS3
35	Polres Mojokerto	Survei Kepuasan Masyarakat Polres Mojokerto	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
36	UPT Puskesmas Bangsal	Survei Kepuasan Masyarakat UPT Puskesmas Bangsal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
37	UPT Puskesmas Jatirejo	Survei Kepuasan Masyarakat UPT Puskesmas Jatirejo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3

**Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto**



	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si Pembina Utama Muda/IVc</p>
--	---



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

- 1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

6. IKK Output

Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral.

Pada tahun 2021, jumlah metadata kegiatan statistik sektoral sebanyak 37 kegiatan dan jumlah kegiatan statistik sektoral sebanyak 37 kegiatan. Adapun daftar metadata kegiatan sebagaimana terlampir.

Data Pendukung :

- Daftar metadata kegiatan dan metadata indikator tahun 2021 (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".


METADATA KEGIATAN DAN METADATA INDIKATOR

No	OPD/Instansi	Judul	Metadata Indikator	JENIS
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto	Buku Profil ASN / Buletin Kepegawaian Kabupaten Mojokerto Semester II Tahun 2020	-	KPA
2	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	Kompilasi Penyusunan Target PAD	Capaian Realisasi PAD	KPA
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	-	KPA
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Indeks Partisipasi Masyarakat	Indeks Partisipasi Masyarakat	FS3
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Analisis Variabel Determinan yang Mempengaruhi Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2020	Indeks Pembangunan Manusia	KPA
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Penghitungan Angka Inflasi Kabupaten Mojokerto	Inflasi	FS3
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mojokerto	Indeks Kerukunan Umat Beragama	FS3
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Analisis Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Mojokerto	-	FS3
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Analisis Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	KPA
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto	Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
13	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto	Survei Telekomunikasi Kabupaten Mojokerto	Media Informasi	FS3
14	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto	Penyusunan Desk Elemen Data Kabupaten Mojokerto	-	KPA
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Penyusunan Profil Usaha Mikro Kab. Mojokerto	Usaha Mikro	FS3
16	Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto	Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan di Kabupaten Mojokerto	Skor Pola Pangan Harapan	FS3
			Neraca bahan makanan	
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto	Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata	Pengeluaran Wisatawan	FS3
18	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto	Database Potensi Pariwisata	potensi wisata	KPA
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto	Pengumpulan Data Curah Hujan Kabupaten Mojokerto	-	KPA
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto	Updating Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur	Tingkat Perkembangan Desa	FS3
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto	Data Bumdesa Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur	-	KPA
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Mojokerto	Indeks Desa Membangun	FS3
			Indeks Ketahanan Lingkungan	
			Indeks Ketahanan Ekonomi	
			Indeks Ketahanan Sosial	
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto	Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Profil Gender dan Anak Kabupaten Mojokerto	-	KPA

25	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-	KPA
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto	Pendataan Industri Kecil Kabupaten Mojokerto	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
27	Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto	Data Statistik Peternakan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	Potensi Peternakan	KPA
28	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto	Survei Kepuasan Pelayanan Ketenagakerjaan	Kepuasan masyarakat	FS3
29	Kantor Kecamatan Gedeg	Survei Kepuasan Masyarakat Kantor Kecamatan Gedeg	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
30	Kantor Kecamatan Puri	Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Puri	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
31	KB Samsat Mojokerto	Survei Kepuasan Masyarakat KB Samsat Mojokerto	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
32	Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IB	Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IB	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
33	Pengadilan Negeri Mojokerto	Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Mojokerto	Kepuasan masyarakat	FS3
34	Pengadilan Negeri Mojokerto	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Mojokerto	Indeks Anti Korupsi	FS3
35	Polres Mojokerto	Survei Kepuasan Masyarakat Polres Mojokerto	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
36	UPT Puskesmas Bangsal	Survei Kepuasan Masyarakat UPT Puskesmas Bangsal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3
37	UPT Puskesmas Jatirejo	Survei Kepuasan Masyarakat UPT Puskesmas Jatirejo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	FS3

**Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto**



	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si Pembina Utama Muda/IVc</p>
--	---



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



- 1) **IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.**

7. IKK Output

Persentase kelengkapan metadata indikator statistik sektoral.

Pada tahun 2021, jumlah indikator statistik sektoral sebanyak 41 indikator sedangkan jumlah metadata indikator statistik sektoral sebanyak 33 kegiatan. Daftar rincian metadata indikator statistik sektoral sebagaimana terlampir

Data Pendukung :

- Daftar metadata indikator tahun 2021 (terlampir)

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc





BAB IV HASIL

DESK DATA

Berdasarkan hasil desk yang dilakukan dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lainnya di Kabupaten Mojokerto sejumlah 50 perangkat daerah/instansi dengan elemen sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, SIPD, RPJMD, KLHS, Mojokerto Dalam Angka, LKPJ, dan lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Hasil Desk Data Kabupaten Mojokerto

No.	Organisasi Perangkat Daerah/Instansi	Jumlah Indikator	
		Sebelum Desk	Setelah Desk
1	Bagian Administrasi Perekonomian	1	1
2	Bagian Organisasi	3	3
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3	2
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	13
5	Badan Pendapatan Daerah	18	11
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51	41
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	31	19
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	27
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41	39
10	Dinas Kesehatan	133	116
11	Dinas Pendidikan	31	36
12	Dinas Pertanian	37	27
13	Dinas Sosial	37	19
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	30	19
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	37	28
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	64	58
17	Dinas Pangan dan Perikanan	44	36
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata	54	38
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	12
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	42	37
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27	25
22	Dinas Lingkungan Hidup	59	44
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	64	52



No.	Organisasi Perangkat Daerah/Instansi	Jumlah Indikator	
		Sebelum Desk	Setelah Desk
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	49	39
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41	28
26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	65	45
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96	70
28	Inspektorat	10	10
29	Kecamatan	6	7
30	RSUD Basoeni	5	5
31	RSUD Soekandar	5	5
32	SATPOL PP	30	16
33	Sekretariat DPRD	16	15

Berdasarkan tabel diatas berikut adalah penjelasan terkait elemen data dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Instansi di Kabupaten Mojokerto.

1. Bagian Administrasi Perekonomian

Elemen data dari Bagian Administrasi Perekonomian sebelum dilakukan desk sejumlah 1 indikator. Setelah dilakukan desk, disepakati elemen data tersebut tidak berubah sehingga elemen data tetap sejumlah 1 indikator.

2. Bagian Organisasi

Elemen data dari Bagian Organisasi sebelum dilakukan desk sejumlah 3 indikator. Setelah dilakukan desk, disepakati elemen data tersebut tidak berubah sehingga elemen data tetap sejumlah 3 indikator.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Elemen data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebelum dilakukan desk sejumlah 3 indikator. Setelah dilakukan desk, ada 1



indikator yang tidak digunakan, sehingga disepakati terdapat 3 indikator dalam elemen data Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Elemen data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebelum dilakukan desk sejumlah 18 indikator. Setelah dilakukan desk, ada 18 indikator yang tidak dapat dipenuhi, sehingga disepakati terdapat 13 indikator dalam elemen data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

5. Badan Pendapatan Daerah

Elemen data dari Badan Pendapatan Daerah sebelum dilakukan desk sejumlah 18 indikator. Setelah dilakukan desk, ada 7 indikator yang tidak digunakan, sehingga disepakati terdapat 11 indikator dalam elemen data Badan Pendapatan Daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Elemen data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebelum dilakukan desk sejumlah 51 indikator. Setelah dilakukan desk, ada 10 indikator yang tidak digunakan, sehingga disepakati terdapat 41 indikator dalam elemen data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Elemen data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebelum dilakukan desk sejumlah 31 indikator. Setelah dilakukan desk, ada 12 indikator yang tidak digunakan, sehingga disepakati terdapat 19 indikator dalam elemen data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.



8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Elemen data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebelum dilakukan desk sejumlah 30 indikator. Setelah dilakukan desk, ada 3 indikator yang bukan tupoksi maka tidak digunakan, sehingga disepakati terdapat 27 indikator dalam elemen data Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Elemen data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebelum dilakukan desk sejumlah 41 indikator. Setelah dilakukan desk, ada 2 indikator yang tidak digunakan, sehingga disepakati terdapat 39 indikator dalam elemen data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

10. Dinas Kesehatan

Elemen data dari Dinas Kesehatan sebelum dilakukan desk adalah sebanyak 133 indikator. Kemudian dilakukan desk, terdapat 17 indikator yang direduksi dan tidak dapat dipenuhi, sehingga disepakati elemen data dari Dinas Kesehatan sebanyak 116 indikator.

11. Dinas Pendidikan

Elemen data dari Dinas Pendidikan sebelum dilakukan desk adalah sebanyak 31 indikator. Setelah dilakukan desk dengan dinas terkait, terdapat beberapa penambahan indikator sebanyak 5 indikator, sehingga disepakati elemen dari Dinas Pendidikan sebanyak 36 indikator.



12. Dinas Pertanian

Elemen data dari Dinas Pertanian sebelum dilakukan desk adalah sebanyak 37 indikator. Setelah dilakukan desk terdapat indikator yang direduksi dan tidak dapat dipenuhi, sehingga disepakati elemen yang digunakan Dinas Pertanian ada sebanyak 27 indikator.

13. Dinas Sosial

Elemen data dari Dinas Sosial sebelum dilakukan desk adalah sebanyak 37 indikator. Kemudian dilakukan desk, terdapat indikator yang direduksi dan tidak dapat dipenuhi, sehingga disepakati elemen data dari Dinas Sosial sebanyak 19 indikator.

14. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Elemen data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebelum dilakukan desk ada sebanyak 30 indikator. Setelah dilakukan desk dengan dinas terkait terdapat 12 indikator yang tidak digunakan dan 1 indikator tambahan, sehingga disepakati terdapat 19 indikator dari elemen data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

15. Dinas Komunikasi dan Informatika

Elemen data dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebelum dilakukan desk terdapat 37 indikator. Setelah dilakukan desk terdapat indikator yang tidak digunakan sebanyak 9 indikator, sehingga disepakati terdapat 28 indikator dari elemen data Dinas Komunikasi dan Informatika.



16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Elemen data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelum dilakukan desk elemen terdapat 64 indikator. Setelah dilakukan desk terdapat beberapa indikator yang tidak digunakan karena kurang sesuai. Sehingga disepakati terdapat 58 indikator pada elemen data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

17. Dinas Pangan dan Perikanan

Elemen data dari Dinas Pangan dan Perikanan sebelum dilakukan desk berjumlah 44 indikator. Setelah dilakukan desk elemen data, terdapat 8 indikator yang tidak digunakan, sehingga disepakati terdapat 36 indikator pada elemen data Dinas Pangan dan Perikanan

18. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Elemen data dari Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata sebelum dilakukan desk elemen berjumlah 54 indikator. Setelah dilakukan desk elemen, disepakati terdapat 38 indikator pada elemen data Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Elemen data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum dilakukan desk data terdapat 17 indikator. Setelah dilakukan desk elemen terdapat 5 indikator yang direduksi, sehingga disepakati terdapat 12 indikator pada elemen data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Elemen data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebelum dilakukan desk data elemen berjumlah 42 indikator. Setelah dilakukan desk elemen data terdapat 5 indikator yang tidak digunakan, sehingga terdapat 37 indikator pada elemen Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Elemen data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebelum dilakukan desk berjumlah 27 indikator. Setelah dilakukan desk data, terdapat 2 indikator yang tidak digunakan, sehingga disepakati sebanyak 25 indikator yang digunakan pada elemen data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

22. Dinas Lingkungan Hidup

Elemen data dari Dinas Lingkungan Hidup sebelum dilakukan desk berjumlah 59 indikator. Setelah dilakukan desk elemen data, disepakati elemen data dari Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 44 indikator.

23. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembardayaan Perempuan

Elemen data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembardayaan Perempuan sebelum dilakukan desk elemen data berjumlah 64 indikator. Kemudian setelah dilakukan desk elemen data, terdapat indikator yang tidak digunakan, sehingga elemen data



pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan sebanyak 52 indikator.

24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Elemen data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum dilakukan desk berjumlah 49 indikator. Setelah dilakukan desk data, terdapat beberapa indikator yang tidak sesuai, sehingga disepakati elemen data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 39 indikator.

25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Elemen data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum dilakukan desk data berjumlah 41 indikator. Setelah dilakukan desk elemen data, disepakati terdapat 28 indikator pada elemen data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

26. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Elemen data dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebelum dilakukan desk elemen data berjumlah 65 indikator. Setelah dilakukan desk elemen data terdapat data-data yang tidak digunakan karena tidak sesuai dengan tupoksi dinas, sehingga disepakati elemen dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdapat 45 indikator.



27. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Elemen data dari Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebelum dilakukan desk sebanyak 96 indikator. Setelah dilakukan desk elemen data, disepakati bahwa elemen data dari Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdapat sebanyak 70 indikator.

28. Inspektorat

Elemen data dari Inspektorat sebelum dilakukan desk elemen data berjumlah 10 indikator. Setelah dilakukan desk elemen, tidak terdapat perubahan elemen dan disepakati terdapat 10 indikator.

29. Kecamatan

Elemen data dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto sebelum dilakukan desk elemen terdapat sebanyak 6 indikator. Setelah dilakukan desk data, terdapat penambahan indikator dan indikator dimikrokan, sehingga disepakati terdapat 7 indikator pada elemen data kecamatan.

30. RSUD RA Basoeni

Elemen data dari RSUD RA Basoeni sebelum dilakukan desk elemen data terdapat 5 indikator. Setelah dilakukan desk elemen data disepakati elemen tidak ada perubahan.

31. RSUD Soekandar

Elemen data dari RSUD Soekandar sebelum dilakukan desk elemen data terdapat 5 indikator. Setelah dilakukan desk elemen data disepakati elemen tidak ada perubahan.



32. Satuan Polisi Pamong Praja

Elemen data dari Satuan Polisi Pamong Praja sebelum dilakukan desk elemen data sebanyak 30 indikator. Setelah dilakukan desk elemen, disepakati sebanyak 16 indikator yang masuk pada elemen data dari Satuan Polisi Pamong Praja.

33. Sekretariat DPRD

Elemen data dari Sekretariat DPRD sebelum dilakukan desk data terdapat sebanyak 16 indikator. Setelah dilakukan desk elemen data, terdapat 1 indikator yang tidak digunakan, sehingga terdapat 15 indikator pada elemen data Sekretariat DPRD.



Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

2) **IKK Outcome** : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Penjelasan IKK Outcome :

Konsep/definisi : Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

Di tahun 2021 jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah sebanyak 50 OPD dari total 57 OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Data Pendukung :

- Berdasarkan Buku Desk Data Tahun 2021 terdapat 50 OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (terlampir).

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

**DATA OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	Organisasi Perangkat Daerah/Instansi	Jumlah Indikator	
		Sebelum Desk	Setelah Desk
1	Bagian Administrasi Perekonomian	1	1
2	Bagian Organisasi	3	3
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3	2
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	13
5	Badan Pendapatan Daerah	18	11
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51	41
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	31	19
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	27
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41	39
10	Dinas Kesehatan	133	116
11	Dinas Pendidikan	31	36
12	Dinas Pertanian	37	27
13	Dinas Sosial	37	19
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	30	19
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	37	28
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	64	58
17	Dinas Pangan dan Perikanan	44	36
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata	54	38
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	12
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	42	37
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27	25
22	Dinas Lingkungan Hidup	59	44
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	64	52
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	49	39
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41	28
26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	65	45
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96	70
28	Inspektorat	10	10
29	Kecamatan Bangsal	6	7
30	Kecamatan Dawarblandong		
31	Kecamatan Dlanggu		
32	Kecamatan Gedeg		
33	Kecamatan Gondang		
34	Kecamatan Jatilejo		
35	Kecamatan Jetis		
36	Kecamatan Kemlagi		
37	Kecamatan Kutorejo		
38	Kecamatan Mojoanyar		
39	Kecamatan Mojosari		
40	Kecamatan Ngoro		
41	Kecamatan Pacet		



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

42	Kecamatan Pungging		
43	Kecamatan Puri		
44	Kecamatan Sooko		
45	Kecamatan Trawas		
46	Kecamatan Trowulan		
47	RSUD Basoeni	5	5
48	RSUD Soekandar	5	5
49	SATPOL PP	30	16
50	Sekretariat DPRD	16	15

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

**DATA OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MELAKUKAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	Organisasi Perangkat Daerah/Instansi	Jumlah Indikator	
		Sebelum Desk	Setelah Desk
1	Bagian Administrasi Perekonomian	1	1
2	Bagian Organisasi	3	3
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3	2
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	13
5	Badan Pendapatan Daerah	18	11
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51	41
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	31	19
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	27
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41	39
10	Dinas Kesehatan	133	116
11	Dinas Pendidikan	31	36
12	Dinas Pertanian	37	27
13	Dinas Sosial	37	19
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	30	19
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	37	28
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	64	58
17	Dinas Pangan dan Perikanan	44	36
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata	54	38
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	12
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	42	37
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27	25
22	Dinas Lingkungan Hidup	59	44
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	64	52
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	49	39
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41	28
26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	65	45
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96	70
28	Inspektorat	10	10
29	Kecamatan Bangsal	6	7
30	Kecamatan Dawarblandong		
31	Kecamatan Dlanggu		
32	Kecamatan Gedeg		
33	Kecamatan Gondang		
34	Kecamatan Jatilejo		
35	Kecamatan Jetis		
36	Kecamatan Kemlagi		
37	Kecamatan Kutorejo		
38	Kecamatan Mojoanyar		
39	Kecamatan Mojosari		
40	Kecamatan Ngoro		
41	Kecamatan Pacet		



Lampiran Data Pendukung
Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

42	Kecamatan Pungging		
43	Kecamatan Puri		
44	Kecamatan Sooko		
45	Kecamatan Trawas		
46	Kecamatan Trowulan		
47	RSUD Basoeni	5	5
48	RSUD Soekandar	5	5
49	SATPOL PP	30	16
50	Sekretariat DPRD	16	15

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto